



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
2021**



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana program jangka menengah provinsi,

perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

- c. berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD SB adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati terpilih.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD SB memuat dan menjabarkan :
 - a. Visi;
 - b. Misi; dan
 - c. program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.
- (3) Materi muatan RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD setiap tahun;
 - b. Renstra PD;
 - c. Renja PD; dan
 - d. rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD SB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

┐

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11 TAHUN 2021
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI:(11,38/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan, oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Pebruari 2021 mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJMD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, gender, ekonomi, politik, hukum dan IPTEK. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I-24
1.4.1 Maksud.....	I-24
1.4.2 Tujuan	I-25
1.5 Sistematika Penulisan	I-26
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-2
2.1.1.2 Topografi dan Geologi	II-3
2.1.1.3 Hidrologi	II-4
2.1.1.4 Iklim dan Suhu	II-6
2.1.2 Kerangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032	II-6
2.1.2.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032	II-6
2.1.2.2 Rencana Pola Ruang.....	II-7
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.2 Aspek Demografi	II-9
2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-10
2.2.2 Jumlah Angkatan Kerja	II-12
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-13
2.3.1.2 Inflasi	II-18
2.3.1.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Tabanan	II-19
2.3.1.4 Distribusi Pendapatan	II-20
2.3.1.5 Persentase Kemiskinan	II-21
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-22
2.3.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)	II-23
2.3.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah	II-24

2.3.2.4	Angka Usia Harapan Hidup	II-24
2.3.2.5	Pengeluaran Perkapita	II-25
2.3.2.6	Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	II-26
2.3.2.7	Prevelensi Stunting	II-27
2.3.2.8	Pertanahan	II-27
2.3.2.9	Ketenagakerjaan	II-28
2.3.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-29
2.3.4	Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-36
2.3.4.1	Bidang Pendidikan	II-36
2.3.4.2	Bidang Kesehatan	II-37
2.3.4.3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-39
2.3.4.4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-40
2.3.4.5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-41
2.3.4.6	Bidang Sosial	II-42
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-44
2.4.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-44
2.4.1.1	Pendidikan	II-44
2.4.1.2	Kesehatan	II-51
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-56
2.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-59
2.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-61
2.4.1.6	Sosial	II-62
2.4.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-63
2.4.2.1	Tenaga Kerja	II-63
2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-65
2.4.2.3	Pangan	II-66
2.4.2.4	Pertanahan	II-68
2.4.2.5	Lingkungan Hidup	II-68
2.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-70
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-71
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-72
2.4.2.9	Perhubungan	II-74

2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-75
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-78
2.4.2.12	Penanaman Modal	II-80
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-81
2.4.2.14	Statistik	II-82
2.4.2.15	Persandian	II-84
2.4.2.16	Kebudayaan	II-86
2.4.2.17	Perpustakaan	II-87
2.4.2.18	Kearsipan	II-88
2.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-89
2.4.3.1	Kelautan dan Perikanan	II-89
2.4.3.2	Pariwisata	II-91
2.4.3.3	Pertanian	II-93
2.4.3.4	Perdagangan	II-94
2.4.3.5	Perindustrian	II-96
2.4.3.6	Transmigrasi	II-97
2.4.4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang	II-98
2.4.4.1	Perencanaan	II-98
2.4.4.2	Keuangan	II-99
2.4.4.3	Kepegawaian	II-101
2.4.4.4	Pendidikan dan Pelatihan	II-103
2.4.4.5	Penelitian dan Pengembangan	II-105
2.4.4.6	Pengawasan	II-106
2.4.4.7	Kecamatan	II-107
2.4.4.8	Kesatuan Bangsa dan Politik	II-109
2.4.4.9	Sekretariat Daerah	II-110
2.4.4.10	Sekretariat DPRD	II-111
2.5	Aspek Daya Saing	II-112
2.5.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-112
2.5.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-112
2.5.1.2	Nilai Tukar Petani	II-113
2.5.1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Perkapita	II-113
2.5.1.4	Rasio Net Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II-114
2.5.1.5	Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-115
2.5.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-115
2.5.2.1	Infrastruktur Jalan	II-115
2.5.2.2	Irigasi	II-116
2.5.2.3	Air Bersih	II-117
2.6	Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Tabanan	II-118
2.7	Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian	

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-126
---	--------

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2020	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-7
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015-2020	III-13
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-15
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-16
3.2.2.1 Defisit Rill Anggaran	III-16
3.2.2.2 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III-17
3.3 Kerangka Pendanaan	III-18
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-18
3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-20
3.3.2.1 Pendapatan Daerah	III-20
3.3.2.2 Belanja Daerah	III-23
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-26

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Geografi.....	IV-2
4.1.2 Demografi.....	IV-3
4.1.3 Kesejahteraan Masyarakat	IV-5
4.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IV-5
4.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	IV-7
4.1.3.3 PDRB Per Kapita	IV-11
4.1.3.4 Tingkat Kemiskinan.....	IV-13
4.1.3.5 Pendapatan Penduduk	IV-14
4.1.3.6 Tingkat Pengangguran	IV-15
4.1.3.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	IV-17
4.1.3.8 Derajat Kesehatan Masyarakat	IV-20
4.1.4 Pelayanan Umum.....	IV-22
4.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-22
4.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-31
4.1.4.3 Urusan Pilihan	IV-45
4.1.4.4 Fungsi Penunjang	IV-50
4.1.5 Daya Saing Daerah	IV-56
4.1.5.1 Perbaikan iklim investasi.....	IV-56

4.1.5.2	Ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja	IV-57
4.1.5.3	Inovasi dan kreativitas daerah	IV-58
4.2	Isu Strategis	IV-58
4.2.1	Tinjauan Dokumen Perencanaan Terkait	IV-59
4.2.1.1	Tinjauan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.....	IV-59
4.2.1.2	Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	IV-63
4.2.1.3	Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025	IV-67
4.2.1.4	Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029	IV-71
4.2.1.5	Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2009-2019	IV-77
4.2.2	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabanan	IV-88
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi.....	V-2
5.2	Misi	V-6
5.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	V-8
5.4	Asta Program.....	V-15
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Langkah Strategis Tahunan	VI-8

6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-18
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1
9.2 Pedoman Transisi.....	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan 2016-2020	II-10
Tabel 2.2	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan kerja Tahun 2017-2019	II-12
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)	II-14
Tabel 2.4	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabanan 2016 – 2020	II-16
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)	II-17
Tabel 2.6	Jumlah Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Tabanan	II-27
Tabel 2.7	Bidang dan Luasnya Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.8	Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-30
Tabel 2.9	Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-31
Tabel 2.10	Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-34
Tabel 2.11	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.12	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.13	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.14	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.15	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.16	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-42

Tabel 2.17	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 dan 2020	II-46
Tabel 2.20	Ketersediaan Guru pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-47
Tabel 2.21	Kondisi Ruang Kelas SD di sepuluh Kecamatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-48
Tabel 2.22	Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-48
Tabel 2.23	Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020	II-50
Tabel 2.24	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dan 2020	II-52
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.26	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.27	Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.28	Kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2020	II-60
Tabel 2.29	Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.30	Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020	II-63
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2020	II-64
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.34	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020	II-70
Tabel 2.35	Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-71

Tabel 2.36	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.38	Jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020	II-74
Tabel 2.39	Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang terangkut Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel 2.40	Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan	II-77
Tabel 2.41	Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan ..	II-78
Tabel 2.42	Perkembangan Lembaga Usaha Koperasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.43	Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA-PMDN) di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020..	II-81
Tabel 2.44	Ranking dan Perolehan Medali Kabupaten Tabanan dalam PORPROV Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.45	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.46	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.47	Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2020.....	II-89
Tabel 2.48	Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.49	Jumlah Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020	II-92
Tabel 2.50	Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020.....	II-92
Tabel 2.51	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-93
Tabel 2.52	Perkembangan Industri Kecil (IKM) di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.53	Jumlah transmigran dan Lokasi Transmigrasi di Tabanan Tahun 2016 – 2020.....	II-98
Tabel 2.54	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.55	Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-101
Tabel 2.56	Persentase Pejabat yang Telah Melaksanakan Diklatpim Eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.57	Wajib Lapor LHKPN, LHKASN dan SP4N-LAPOR di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-107

Tabel 2.58	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-107
Tabel 2.59	Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.60	Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.61	Jumlah Parpol, LSM, Hasil Pengawasan Orang Asing dan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.62	Jumlah Perda Yang Berhasil Disahkan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.63	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020.....	II-113
Tabel 2.64	Persentase Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Komoditas, Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020.....	II-114
Tabel 2.65	Rasio Net Ekspor Impor Barang Jasa terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (Milyar Rupiah)	II-114
Tabel 2.66	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana di Kabupaten Tabanan, 2016-2020	II-115
Tabel 2.67	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2020	II-116
Tabel 2.68	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Tabanan	III-8
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan kabupaten Tabanan Tahun 2019-2020.....	III-11
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020.....	III-15
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabanan 2017-2020	III-15
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020.....	III-16
Tabel 3.7	Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020	III-17

Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020	III-18
Tabel 3.9	Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020	III-19
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026	III-22
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-24
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-27
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026	III-28
Tabel 4.1	Penduduk Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Tabanan, 2019	IV-8
Tabel 4.2	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Tabanan tahun 2019 dan 2020	IV-17
Tabel 4.3	Rasio Guru Terhadap Murid	IV-19
Tabel 4.4	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2017 – 2019	IV-25
Tabel 4.5	Daya Dukung Air Berdasarkan Fungsi Jasa Ekosistem per tahun	IV-36
Tabel 4.6	Daya Dukung Air Berdasarkan Potensi dan Kapasitas Produksi SPAB	IV-36
Tabel 4.7	Daya Dukung Lahan untuk Pemenuhan Pangan ...	IV-37
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tabanan	V-9
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-2
Tabel 6.2	Langkah Strategis Tahunan	VI-8
Tabel 6.3	<i>Milestone</i> Strategi dan Arah Kebijakan	VI-9
Tabel 6.4	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-19
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah	VI-25
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-2
Tabel 7.2	Program Perangkat Daerah	VII-5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKK)	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I-12
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali	I-15
Gambar 1.3	Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	I-21
Gambar 1.4	Hubungan antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-23
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tabanan	II-2
Gambar 2.2.	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan	II-7
Gambar 2.3	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan	II-8
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan	II-9
Gambar 2.5	Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2020.....	II-11
Gambar 2.6	Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	II-15
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.8	Inflasi Kabupaten Tabanan dan Nasional Tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.9	PDRB Perkapita Kab. Tabanan (Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020	II-19
Gambar 2.10	Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Tabanan dan Provinsi bali Tahun 2016-2018.....	II-20
Gambar 2.11	Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali.....	II-21
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan, provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020	II-23
Gambar 2.13	Angka Melek Huruf Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	II-23
Gambar 2.14	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	II-24
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	II-25
Gambar 2.16	Pengeluran Perkapita Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2016-2020.....	II-26
Gambar 2.17	Persentase Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2016-2020	II-26
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2016-2020	II-28

Gambar 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020	II-29
Gambar 2.20	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek.....	II-76
Gambar 2.21	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020	II-103
Gambar 2.22	Perbandingan pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	II-105
Gambar 2.23	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Per Bulan Di Kabupaten Tabanan 2015–2020	II-112
Gambar 2.24	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020.....	II-116
Gambar 2.25	Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2020	II-118
Gambar 3.1	Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah	III-6
Gambar 3.2	Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020	III-14
Gambar 4.1	IPM Tabanan 2013–2019	IV-6
Gambar 4.2	Pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2013-2019 (Kiri) dan pertumbuhan (%) PDRB menurut lapangan usaha triwulan III 2020 (kanan).....	IV-8
Gambar 4.3	PDRB per-kapita Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional tahun 2013-2019	IV-12
Gambar 4.4	Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali tahun 2013 – 2019	IV-13
Gambar 4.5	Perkembangan Gini Ratio Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan.....	IV-14
Gambar 4.6	Stunting di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	IV-20
Gambar 4.7	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2019 .	IV-21
Gambar 4.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabanan 2019.....	IV-23



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026, disusun selaras dengan RPJM Nasional 2020-2024, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 dan mengacu pada RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2005-2025, serta RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023. Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin



keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

RPJMD merupakan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah yang kemudian digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati dan I Made Edi Wirawan sebagai Wakil Bupati untuk memimpin Tabanan dalam tiga tahun ke depan, periode 2021-2024. Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)

3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan *Sad Kerthi* sebagai pondasi pembangunannya.

Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan, maka secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak *conservationism* dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi



masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor



13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

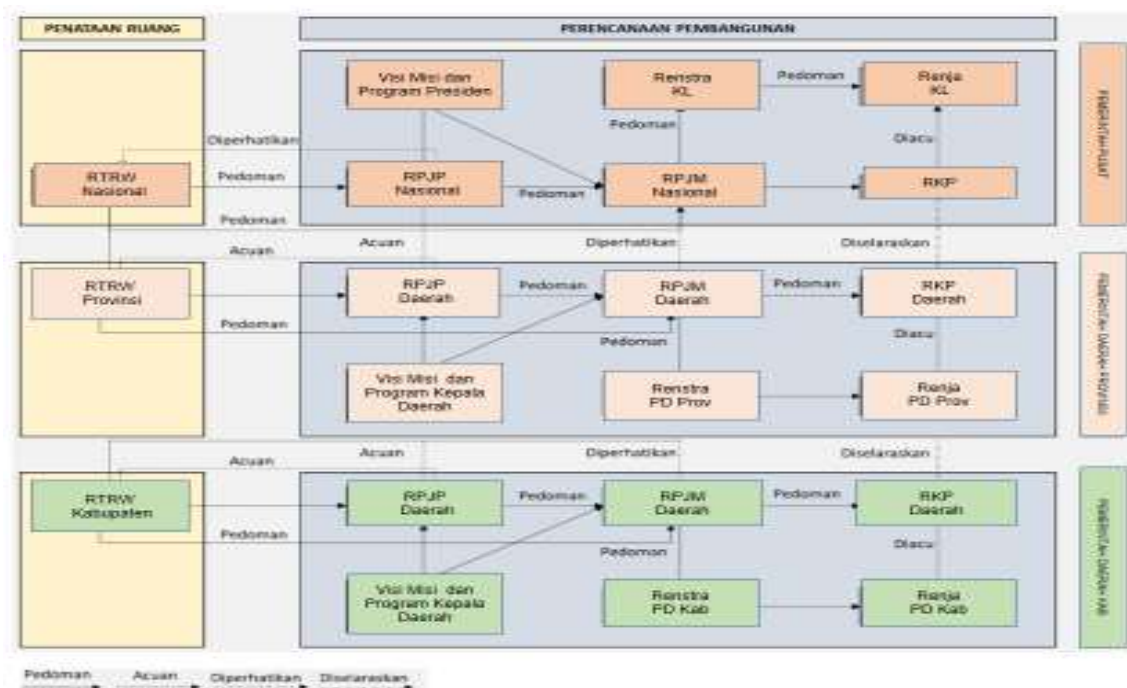
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi yang bertujuan untuk mendukung koordinasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan serta memastikan adanya sinkronisasi sasaran dan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. RPJMD harus sinkron pula dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2021-2026 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dan RTRW Kabupaten Tabanan dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Bali dan RTRW Provinsi Bali serta Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 juga mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya, memperhatikan pula RPJMD

Provinsi Bali, serta berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024. Selanjutnya, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

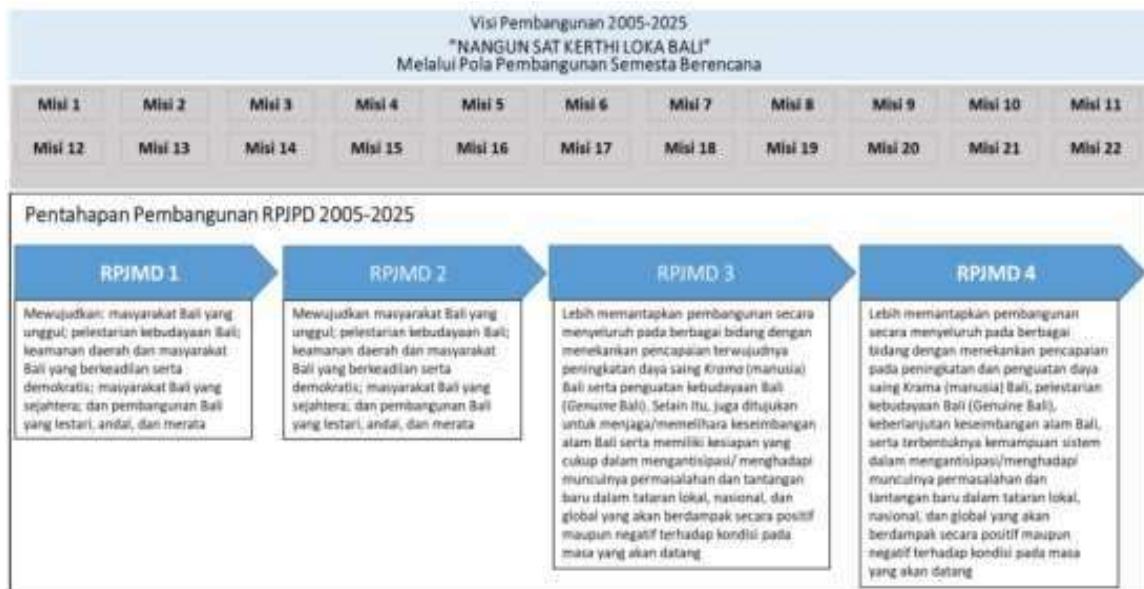


1. Hubungan RPJPD Provinsi Bali dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan

Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sekalaniskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Agar RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPJMD Provinsi Bali akan memasuki periode ke tiga.

Secara ringkas, hubungan antara RPJMD Semesta Berencana dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber : RPJPD SB Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali

2. Hubungan RPJM Nasional dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan RPJM Nasional saat ini memasuki tahap dua, dengan menekankan pada peningkatan industri, pariwisata dan investasi diberbagai wilayah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJM Nasional mempunyai sasaran peningkatan daya saing SDM, perekonomian dan pemajuan kebudayaan.

RPJM Nasional dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, kurun waktu lima tahun ke depan menjadi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

3. Hubungan RPJPD Kabupaten Tabanan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tabanan periode 2021-2024, juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.



Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM III, RPJM IV ditujukan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan tingkat pertumbuhan yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dengan tetap terjaganya daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.
2. Kesejahteraan masyarakat Tabanan yang terus meningkat juga ditandai oleh makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh-kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya kesetaraan gender.
3. Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah kabupaten Tabanan.
4. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.
5. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara



lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.

6. Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan sebagai menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
7. Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.
8. Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun ke depan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Tabanan dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra

Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

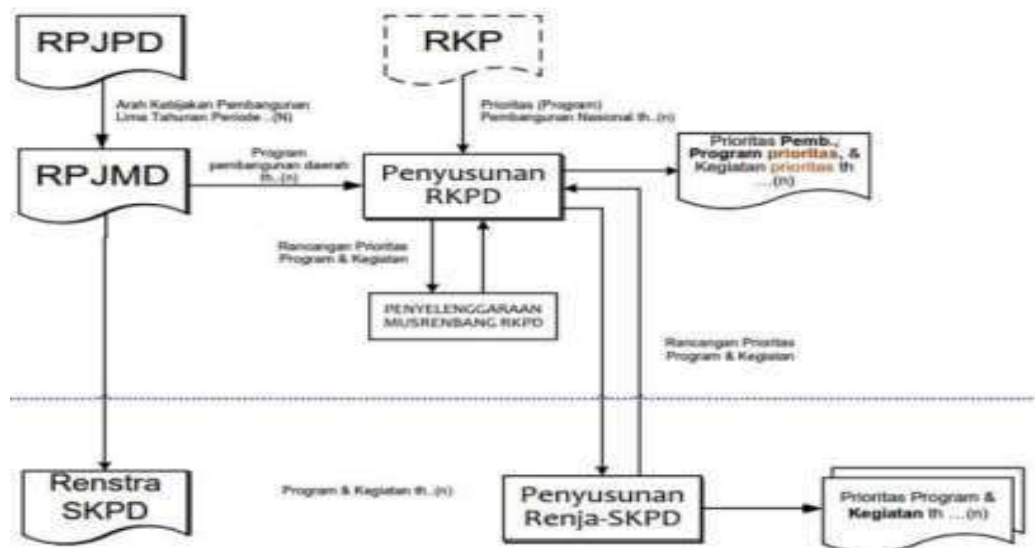
5. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, RPJMD Provinsi Bali, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas dan target-target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5

(lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.3

Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan
Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

6. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Pembangunan haruslah sesuai dengan pola pengembangan sesuai arahan rencana tata ruang agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

7. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

KLHS merupakan pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia yaitu : (a) Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Pelaksanaan KLHS RPJMD meliputi pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen perencanaan, termasuk RPJMD guna meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan.

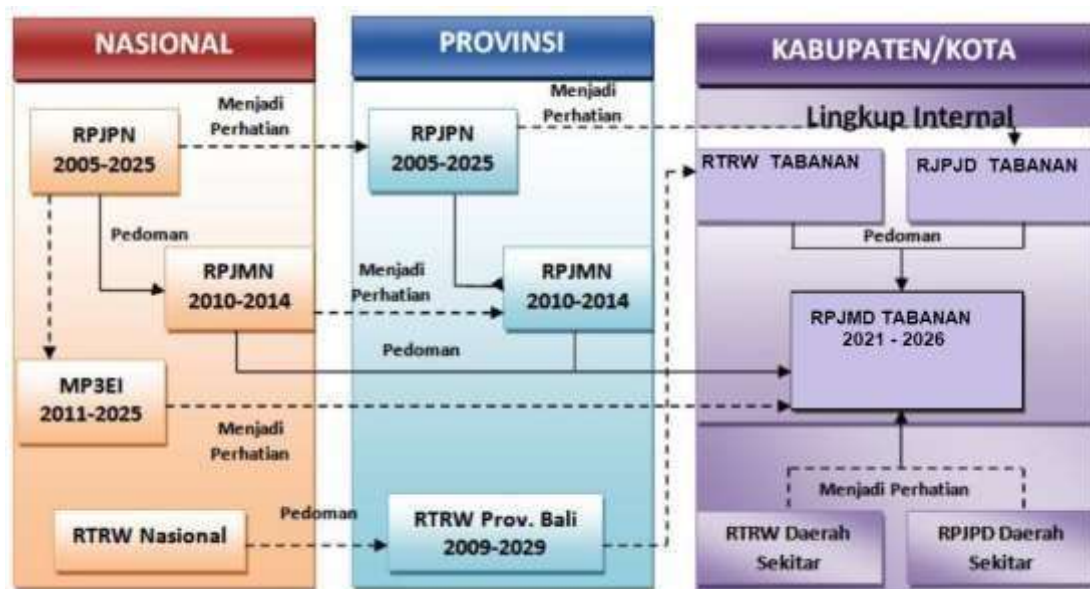
8. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Bali, Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Tabanan, yaitu:

- Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan;
- Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Tabanan, seperti: Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng
- Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 1.4

Hubungan antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RTRW Kabupaten Tabanan yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan



Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang,
- b) Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif,
- c) Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat,
- d) Untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, dan
- e) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sekaligus merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

1.4.2 Tujuan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan disusun dengan tujuan:

- a) Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra PD);



- b) Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah (PD);
- c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi;
- d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan terkait dengan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah ini akan menguraikan terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek



kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan terkait dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang diprediksikan akan berkembang selama lima tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini akan memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan



menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi umum daerah Kabupaten Tabanan digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek-aspek ini memberikan gambaran secara umum tentang kondisi daerah, sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis yang ada di Kabupaten Tabanan.

Dalam pembahasan gambaran umum kondisi daerah ini, basis data dalam tabel yang disajikan bersumber dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan dan juga dari Instansi Teknis terkait, dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, namun ada data dari beberapa aspek sudah sampai dengan Tahun 2020.

2.1. Aspek Geografi

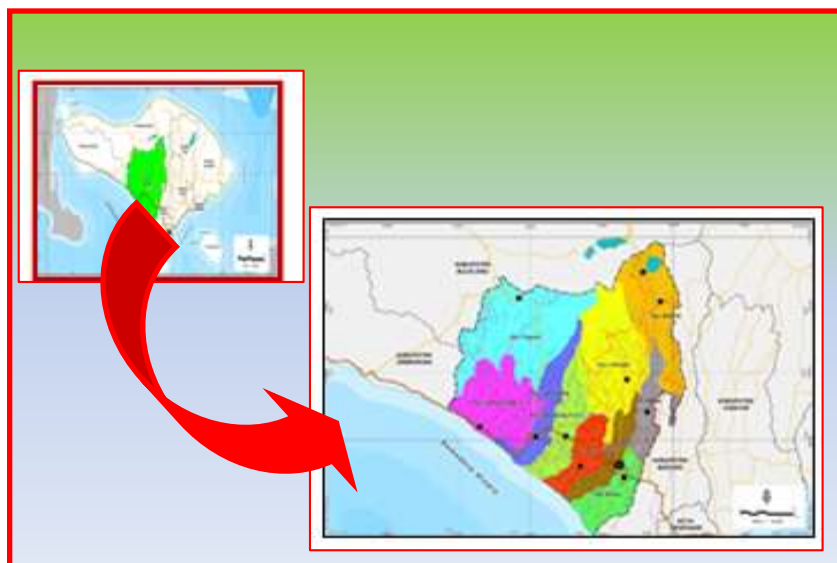
Karakteristik lokasi wilayah di Kabupaten Tabanan digambarkan melalui aspek geografi, potensi sumber daya, wilayah rawan bencana.

2.1.1. Geografi

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi Kabupaten Tabanan terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan wilayah rawan bencana. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tabanan tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tabanan.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah sebesar 839.33 km² atau 14,90 persen luas Provinsi Bali, dengan panjang garis pantai $\pm$ 30.177 km. Secara administratif, Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 133 desa dinas, 349 desa adat, dan 817 banjar dinas. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tabanan

Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Propinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 km dengan waktu tempuh $\pm$ 45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar provinsi. Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 8°14' 30" - 8° 30' 07" Lintang Selatan, 114° 54' 52" - 115° 12' 57" Bujur Timur.

2.1.1.2 Topografi dan Geologi

Topografi Kabupaten Tabanan bervariasi berada pada ketinggian 0,000 - 2.276 meter di atas permukaan laut (dpl), di mana wilayah tertinggi di puncak Gunung Batukaru. Karakteristik wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatif datar, di bagian tengah bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan di mana terdapat beberapa gunung yaitu Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sangiyang (2.097 m), Gunung Pohen (2.055 m) dan Gunung Adeng (1.811 m).

Wilayah permukaan Kabupaten Tabanan tersusun oleh formasi geologi yang beragam. Batuan tua yang ditemukan adalah batuan hasil muntahan Gunung Api Membrana seperti Gunung Klatakan, Gunung Merbuk dan Gunung Patas yang terdiri dari lava, breksi dan tufa. Batuan ini menyelimuti daerah sekitar Kaliukir, Munduk Tiinggading hingga Suraberata. Juga ditemui di dekat Desa Kerambitan. Batuan ini terbentuk pada era kuartir bawah sekitar 6 juta tahun lalu. Batuan yang lebih muda adalah tufa dan endapan lahar Buyan-Bratan dan Batur yang terbentuk pada era kuartir. Batuan ini menutupi sekitar setengah Kabupaten Tabanan, terutama daerah bagian selatan. Sementara pada daerah pegunungan terdapat dua formasi batuan yaitu batuan hasil ekstrusi Gunung Batukaru dan batuan gunung api dari kerucut-kerucut sebesren Gunung Pohen, Gunung Sangiyang dan Gunung Lesong. Jenis-jenis batuan menurut luasnya di wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Batuan Gunung Berapi Batukaru, luasnya 120,79 km²/(14,39%).
- b. Tufa endapan lahar Buyan, Beratan dan Batur, luasnya 453,57 km²/ (54,04%).

- c. Batuan Gunung Pohen dan Gunung Sangiyang, luasnya 136,50 km²/ (16,26%).
- d. Batuan Gunung Api Jembrana, Breksi, Tufa dari Gunung Klatakan dan Batuan tergabung, luasnya 118,42 km²/(14,11%).
- e. Endapan Alluvial pada Danau Beratan, luasnya 0,38 km²/(0,05%).
- f. Formasi Palasari, luasnya 9,67 km²/(1,15%).

Jenis tanah secara umum yang terdapat di Kabupaten Tabanan berdasarkan Uraian Tanah Tinjau (Bappeda Provinsi Bali, 2007) terdiri dari tanah alluvial, regosol, andosol dan latosol. Tanah alluvial berasal dari bahan induk endapan laut dan endapan sungai dengan fisiografi daratan pantai dan bentuk wilayah datar terdapat di daerah pantai Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg. Tanah jenis regosol berasal dari bahan induk abu vulkan dengan fisiografi vulkan, lembah dan kerucut vulkan dan bentuk wilayah melandai sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, Penebel dan Baturiti. Tanah jenis andosol berasal dari bahan induk abu dan tufa vulkan dengan fisiografi lungur vulkan kerucut dan lungur dan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Pupuan, Penebel dan Baturiti. Sedangkan jenis tanah latosol yang merupakan sebagian besar dari jenis tanah di Kabupaten Tabanan tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.1.3 Hidrologi

Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sungai, danau, mata air dan air tanah. Terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai



tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), antara lain Tukad Yeh Empas luasnya 100,82 km². Daerah aliran sungai ini sepenuhnya berada di Kabupaten Tabanan dan bermuara di perbatasan Desa Sudimara dan Pangkung Tibah, Tukad Yeh Ho luasnya 135,76 km². Semua daerah aliran sungai ini terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di perbatasan Kecamatan Selemadeg Timur dan Kerambitan dan Tukad Balian luasnya 152,9 km². Semua daerah aliran sungai terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat. Sungai-sungai besar lainnya yang bermuara di wilayah Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungi (panjang 40,5 km) bermuara di Desa Beraban (Kecamatan Kediri), Tukad Yeh Abe (panjang 9,3 km) bermuara di perbatasan Kecamatan Tabanan dan Kerambitan. Tukad Yeh Matan (panjang 13,5 km) bermuara di perbatasan Desa Berembeng dan Tegalmengkeb, dan Tukad Yeh Otan (panjang 24,0 km) bermuara di Desa Antap.

Selain Daerah Aliran Sungai, Kabupaten Tabanan memiliki sebuah danau dari empat buah danau yang ada di Provinsi Bali, yaitu Danau Beratan. Danau Beratan terletak di kawasan Bedugul pada ketinggian sekitar 1.200 meter dpl, memiliki luas permukaan air 3,85 km² dan luas daerah tangkapan air 13,4 km². Danau ini memiliki kedalaman rata-rata 12,8 meter dan kedalaman maksimum 20 meter, dengan volume airnya 49,22 juta m³. Untuk kebutuhan air Kabupaten Tabanan memiliki sebuah waduk yang baru saja dibangun pada tahun 2008 yaitu Waduk Telaga Tunjung. Waduk Telaga Tunjung terletak di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dengan luas daerah tangkapan waduk 81,50 km², volume tampungan efektif 1.159.640 m³, dan luas genangan waduk 16,50 km². Waduk ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Kerambitan dan sekitarnya serta sebagai sumber air bersih.

2.1.1.4. Iklim dan Suhu

Tipe iklim Kabupaten Tabanan secara umum termasuk tipe AW, yang merupakan iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai Mei), dan adanya musim kemarau pada bulan April sampai September. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74 – 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 – 3.292 mm. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidh dan Fergusson, Kabupaten Tabanan secara dominan termasuk ke dalam tipe iklim C dan D, hanya sebagian kecil daerahnya termasuk ke dalam tipe iklim A, yaitu wilayah pegunungan Batukaru dan kawasan Bedugul.

2.1.2. Kerangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032

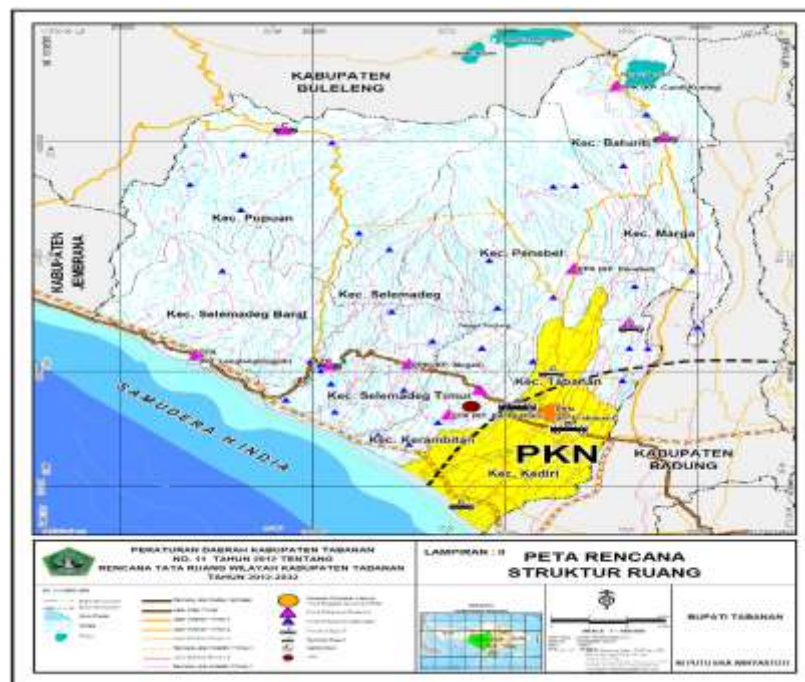
Kerangka pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 meliputi Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.

2.1.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan meliputi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat pelayanan secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu Sistem Perkotaan dan Sistem Perdesaan. Sistem Perkotaan meliputi 2 pusat pelayanan, yaitu bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Kawasan Perkotaan Tabanan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai kawasan strategis nasional.

Sistem Perdesaan mencakup pengembangan 2 pusat pelayanan, yaitu Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman perdesaan dan kegiatan sosial-ekonomi yang melayani skala antar desa; dan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang berperan mendorong tumbuhnya kota pertanian dan berkembangnya usaha agribisnis. Hubungan fungsional antar pusat-pusat permukiman/pelayanan tersebut di atas tergambar dalam Peta Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan seperti disajikan pada Gambar 2.2.



*Sumber : Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan*

Gambar 2.2.

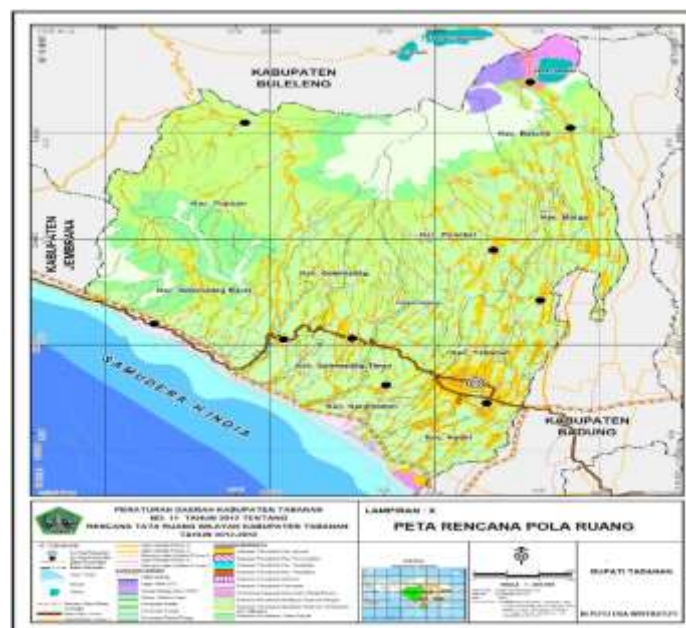
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Tabanan

2.1.2.2 Rencana Pola Ruang

Pola ruang merupakan salah satu unsur penting dalam rencana tata ruang yang menjelaskan mengenai pembagian wilayah

berdasarkan fungsinya. Secara umum, pola ruang dibagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan budidaya. Pola ruang menggambarkan fungsi dan peruntukkan dalam suatu ruang.

Pola ruang yang ada di Kabupaten Tabanan dibagi menjadi dua kawasan yaitu lindung dan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan negara. Berikut Peta Rencana Pola Ruang sebagai acuan umum pengembangan wilayah di Kabupaten Tabanan.



Sumber : Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan

Gambar 2.3.

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebesar 159,82 artinya wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi bencana sangat tinggi atau zona merah. Sumber potensi bencana alam yang perlu diwaspadai adalah bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, puting beliung. Berikut peta wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Tabanan.



Sumber: BPBD Kabupaten Tabanan

Gambar 2.4

Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan

2.2. Aspek Demografi

Aspek demografi memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan struktur umur penduduk dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tabanan.

2.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sebanyak 461.630 jiwa yang terdiri dari 231.448 jiwa (50,14%) penduduk laki-laki dan sebanyak 230.182 jiwa (49,86%) penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2020 melambat sebesar 0,90 persen. Berikut komposisi perkembangan penduduk Kabupaten Tabanan per Kecamatan Tahun 2020.

Tabel 2.1.

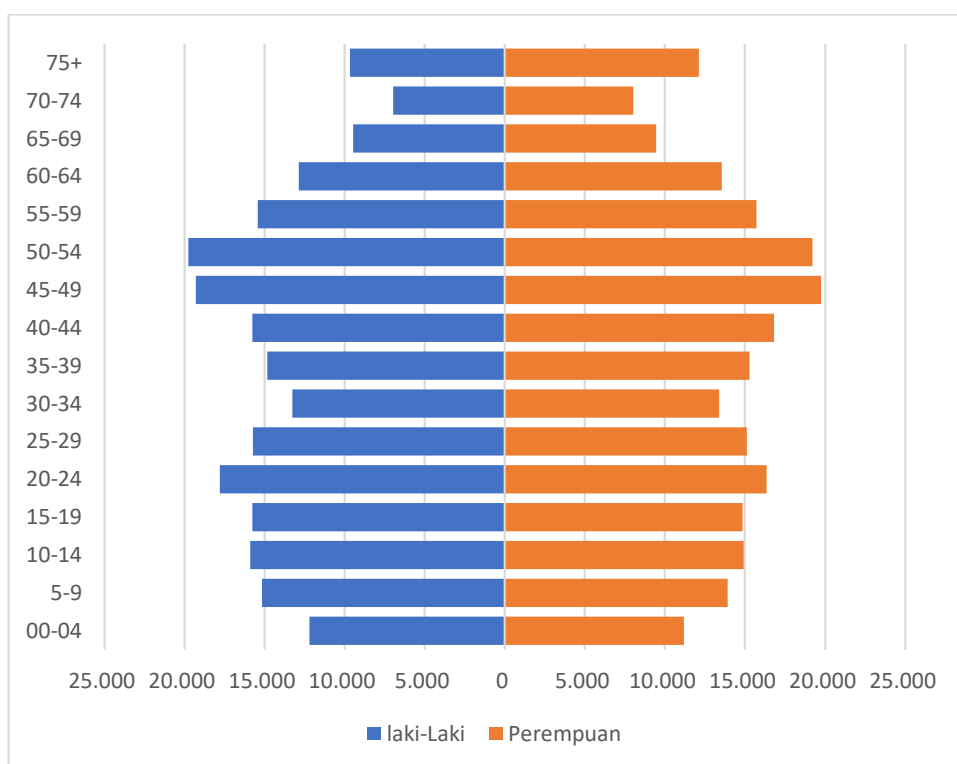
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	LPP Per Tahun 2010-2020
1	Selemadeg	21,87	1,24
2	Selemadeg Timur	23,83	1,16
3	Selemadeg Barat	21,08	1,11
4	Kerambitan	41,77	1,00
5	Tabanan	76,24	0,76
6	Kediri	90,49	0,70
7	Marga	42,90	0,59
8	Baturiti	51,38	0,99
9	Penebel	49,64	1,15
10	Pupuan	42,44	0,98
	Kab Tabanan	461,63	0,90

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh di atas rata-rata, diantaranya Kecamatan Kediri (1.688 jiwa per km²), Tabanan (1.483 jiwa per km²), Marga (957 jiwa per km²), dan Kerambitan (985 jiwa per km²), sedangkan tingkat kepadatan penduduk lainnya 600 jiwa per km² ke bawah.

Sementara komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Tabanan sebesar 47,37 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk non produktif yakni usia (0-14 tahun dan 65 Tahun ke atas), berikut Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2020.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tabanan, Tahun 2020

Gambar 2.5.

Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Piramida penduduk Kabupaten Tabanan menunjukkan struktur penduduk diusia produktif tertinggi pada usia 45-54 tahun kemudian maka dalam 10 tahun kedepan terjadi ledakan kelompok lansia yang akan menjadi beban kelompok usia produktif, sementara kelompok usia 20-24 tahun cukup tinggi sehingga perlu disiapkan lapangan pekerjaan dan mendorong munculnya kewirausahaan baru melalui pelatihan kewirausahaan. Sedangkan pada kelompok umur 0-

4 tahun terletak pada dasar piramida mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun, walaupun dari jumlah absolut tidak kecil, demikian juga jumlah penduduk berumur 5-9 tahun masih terlihat lebar atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 0-4 tahun. Hal ini berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok umur ini.

2.2.2. Jumlah Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2017 di Tabanan adalah 309.620 jumlah ini terus bertambah sampai tahun 2019 menjadi 317.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja pada tahun 2017-2019 adalah 2,59 persen.

Tabel 2.2.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan kerja Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun			Laju Pertumbuhan
	2017	2018	2019	
Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	309.620	316.295	317.625	2,59
Angkatan kerja (Jiwa)	251.253	275.772	268.094	6,70

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Penduduk angkatan kerja di Kabupaten Tabanan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2017 di Tabanan adalah 251.253 jiwa meningkat pada tahun 2019 menjadi 268.094 jiwa dengan Laju pertumbuhan Angkatan kerja tahun 2017-2019 adalah 6,70 persen.

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan merupakan tujuan dari pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat dianalisis terhadap beberapa fokus bidang kegiatan yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga serta Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus bidang kegiatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditinjau dari aspek pertumbuhan PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Distribusi Pendapatan dan Persentase Kemiskinan. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini sejalan dengan indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, *Real Estate* & Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa).

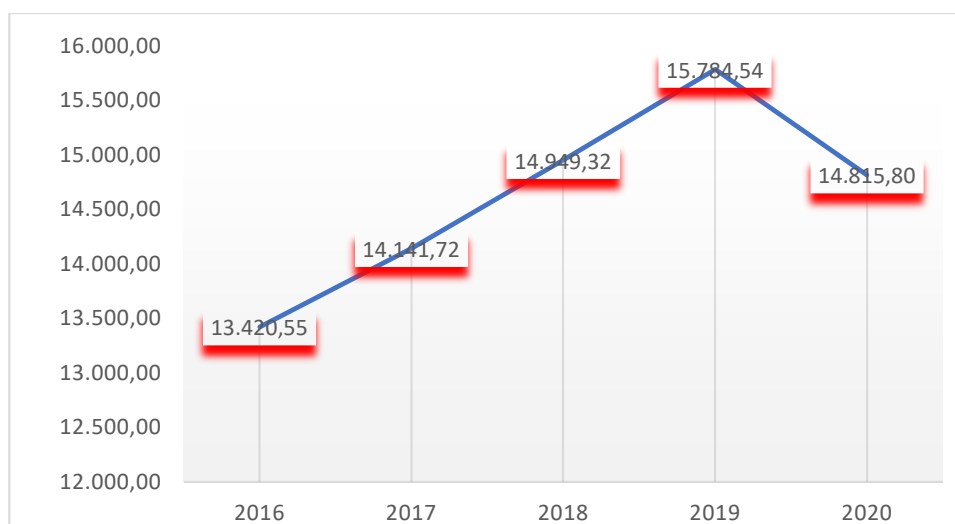


Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.869,27	2.986,52	3.150,21	3.284,63	3.245,09
Pertambangan dan Penggalian	161,64	166,99	168,57	172,12	163,42
Industri Pengolahan	807,58	823,59	858,54	906,94	862,81
Pengadaan Listrik dan Gas	13,97	14,60	14,91	15,56	14,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	24,75	25,23	26,56	28,21	28,50
Konstruksi	1.348,61	1.453,36	1.519,63	1.616,89	1.588,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.175,92	1.259,43	1.344,11	1.426,38	1.334,54
Transportasi dan Pergudangan	236,06	251,53	267,59	280,70	247,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.461,32	2.659,84	2.841,11	2.976,07	2.236,74
Informasi dan Komunikasi	943,40	1.005,84	1.069,32	1.118,65	1.187,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	491,61	498,44	508,50	556,51	534,12
Real Estate	771,36	800,04	846,51	888,70	891,76
Jasa Perusahaan	134,46	145,76	154,19	164,50	157,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.148,05	1.139,27	1.200,13	1.302,59	1.292,97
Jasa Pendidikan	255,74	275,50	292,55	306,82	305,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324,49	355,75	381,05	407,32	415,87
Jasa Lainnya	252,34	280,04	305,84	331,96	309,83
PDRB	13.420,55	14.141,72	14.949,32	15.784,54	14.815,80

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tabanan atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana nilai PDRB Tabanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2016-2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid 19. PDRB Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 mencapai sebesar 14.815,80 Milyar Rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar 15.784,54 Milyar rupiah.



Sumber : BPS Kab. Tabanan 2021

Gambar 2.6

Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 PDRB Kabupaten Tabanan didominasi oleh sektor akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,96% di Tahun 2019 melampaui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun karena adanya pandemi *Covid 19* di Tahun 2020 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kembali mendominasi sebesar 23,03%.

Berikut perkembangan kontribusi sektor terhadap PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.56	22.03	21.90	21,63	23,03
Pertambangan dan Penggalan	1.20	1.17	1.16	1,11	2,14
Industri Pengolahan	5.96	5.76	5.66	5,63	5,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.12	0.12	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.16	0.16	0.15	0,15	0,17
Konstruksi	9.89	9.95	10	10,01	10,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.43	8.58	8.63	8,65	8,75
Transportasi dan Pergudangan	1.62	1.62	1.62	1,61	1,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.61	22,05	22.08	21,96	17,16
Informasi dan Komunikasi	5.56	5.56	5.55	5,48	6,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.79	3.66	3.53	3,67	3,74
Real Estate	5.07	4.92	4.86	4,81	5,22
Jasa Perusahaan	0.99	1.02	1.01	1,01	1,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.07	7.22	7.38	7,57	8,25
Jasa Pendidikan	1.82	1.85	1.87	1,89	2,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.28	2.35	2.41	2,43	2,74
Jasa Lainnya	1.88	1.98	2,04	2,11	2,14
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Meskipun terjadi pergeseran struktur ekonomi Tabanan, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam menopang sektor lainnya. Laju pertumbuhan PDRB masih menunjukkan tren positif, namun beberapa sektor basis menunjukkan tren penurunan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan dari 5,5% tahun 2018 menjadi 4,26% tahun 2019, transportasi dan pergudangan dari 6,43% tahun 2018 menjadi 4,90% tahun 2019, penyediaan akomodasi dan makan minum dari 6,84% menjadi 4,75% dan beberapa sektor lainnya seperti pada tabel 2.5 berikut:

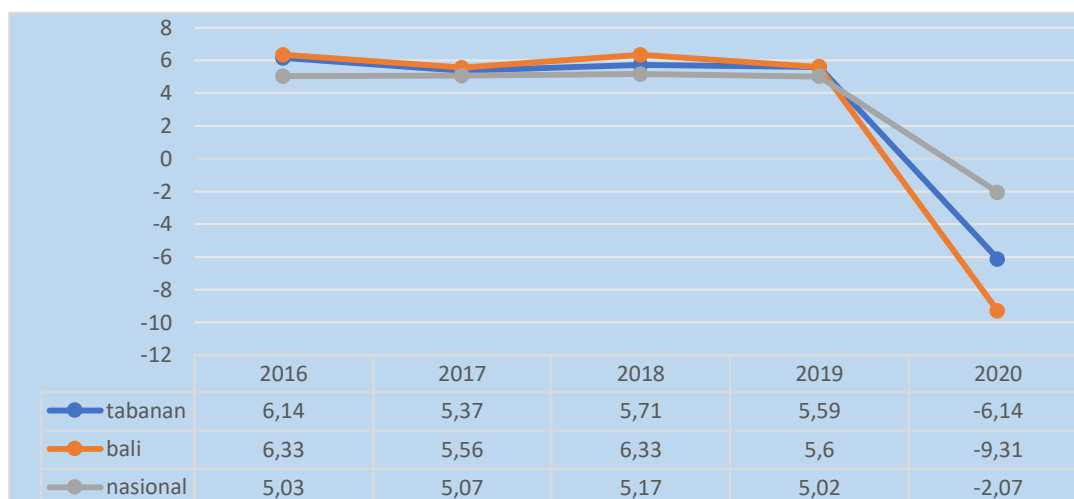
Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,23	4,09	5,48	4,27	-1,20
Pertambangan dan Penggalian	3,39	3,31	0,95	2,11	-5,06
Industri Pengolahan	4,79	1,98	4,24	5,64	-4,87
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	4,56	2,08	4,35	-7,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,97	1,94	5,30	6,19	1,06
Konstruksi	7,61	7,77	4,56	6,40	-1,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	7,10	6,72	6,12	-6,44
Transportasi dan Pergudangan	7,49	6,55	6,39	4,90	-11,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,08	8,07	6,82	4,75	-24,84
Informasi dan Komunikasi	9,98	6,62	6,31	4,61	6,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	1,39	2,02	9,44	-4,02
Real Estate	2,81	3,72	5,81	4,98	0,34
Jasa Perusahaan	6,15	8,40	5,78	6,69	-4,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	-0,76	5,34	8,54	-0,81
Jasa Pendidikan	8,21	7,73	6,19	4,88	-0,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	9,63	7,11	6,89	2,10
Jasa Lainnya	7,54	10,98	9,21	8,54	-6,67
PDRB	6,14	5,37	5,71	5,59	-6,14

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Sementara apabila dibandingkan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan kurun waktu 2016-2019 masih di bawah capaian pertumbuhan Provinsi Bali, dan di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan mengalami penurunan sampai di angka minus, itu disebabkan karena adanya pandemi *Covid 19*.

Berikut Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tabanan, Bali dan Nasional.



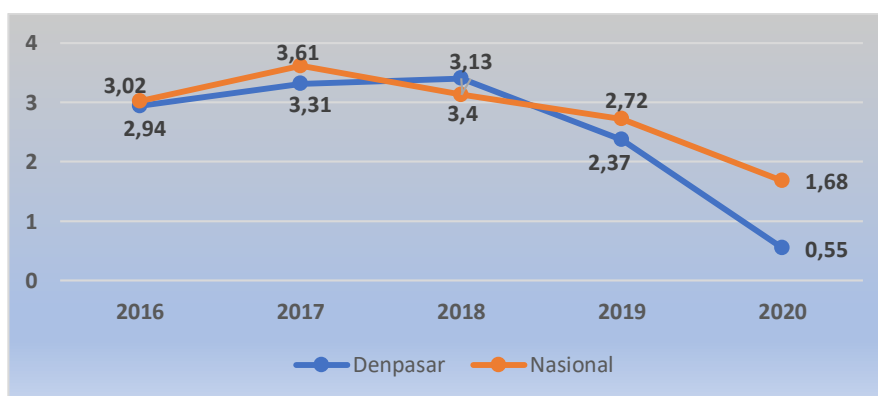
Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021

Gambar 2.7.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020

2.3.1.2 Inflasi

Inflasi Kabupaten Tabanan mengacu pada angka inflasi Kota Denpasar. Secara umum inflasi fluktuatif pada kisaran 0,5 persen hingga 3,1 persen.



Sumber : BPS Prov. Bali, Tahun 2021

Gambar 2.8.

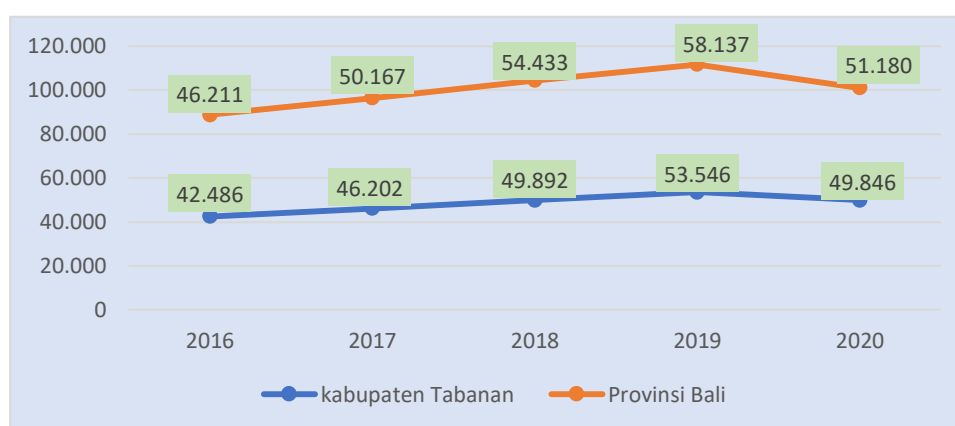
Inflasi Kabupaten Tabanan dan Nasional Tahun 2016-2020

Laju inflasi di Kabupaten Tabanan yang mengacu pada Kota Denpasar dimana terjadi penurunan yang cukup drastis dari tahun 2019

sebesar 2,37% ke tahun 2020 di angka 0,55% yang merupakan inflasi terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan penurunan permintaan dan daya beli sejak dan selama pandemi Covid 19 melanda. Berkurangnya mobilitas masyarakat mempengaruhi pergerakan ekonomi dan permintaan akan barang dan jasa yang menurun drastis. Kondisi pandemi yang belum sepenuhnya membaik menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat sehingga percepatan pemulihan kondisi akibat pandemi perlu segera dilakukan guna memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dan menekan laju inflasi secara keseluruhan.

2.3.1.3 PDRB per Kapita Kabupaten Tabanan

PDRB per Kapita Kabupaten Tabanan masih di bawah rata-rata Provinsi Bali, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Bali, PDRB Kabupaten Tabanan masih di bawah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 2.9

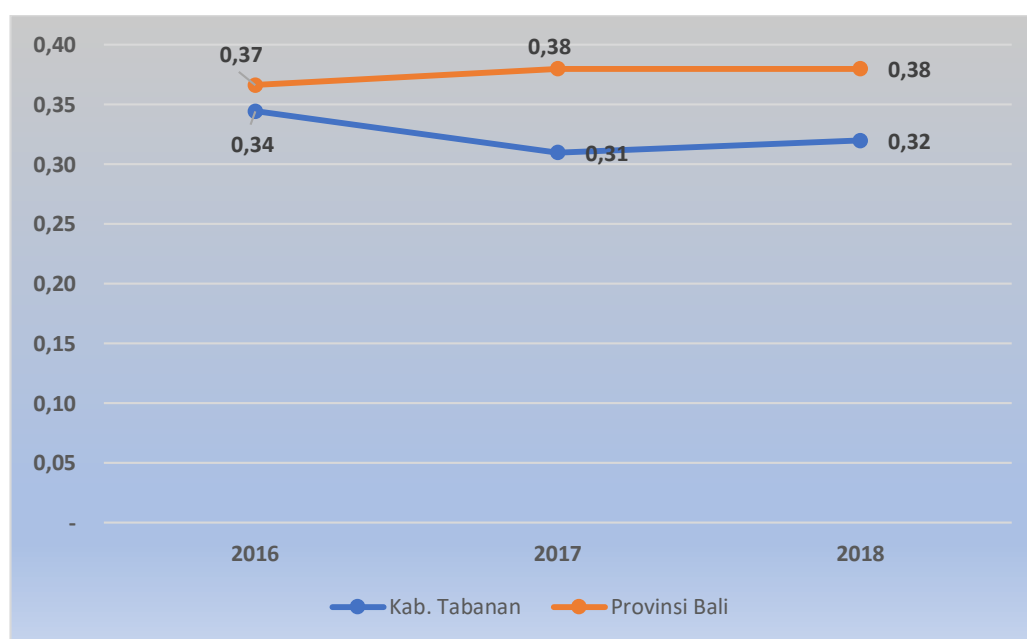
PDRB per Kapita Kab. Tabanan (Ribuan Rupiah) Tahun 2016-2020

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Tabanan menunjukkan

angka Rp 49.846.000,- yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp 53.546.000,-. Penurunan PDRB per kapita di tahun 2020 yang bahkan lebih rendah dari tahun 2018 menunjukkan penurunan pendapatan penduduk yang salah satu terjadi akibat adanya pandemi Covid 19 sejak bulan Maret Tahun 2020.

2.3.1.4 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan Kabupaten Tabanan yang ditunjukkan dari *Gini Ratio* meski masih dibawah rata-rata Bali namun masuk katagori rendah dan melebar pada tahun 2018 (gambar 2.10).



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 2.10

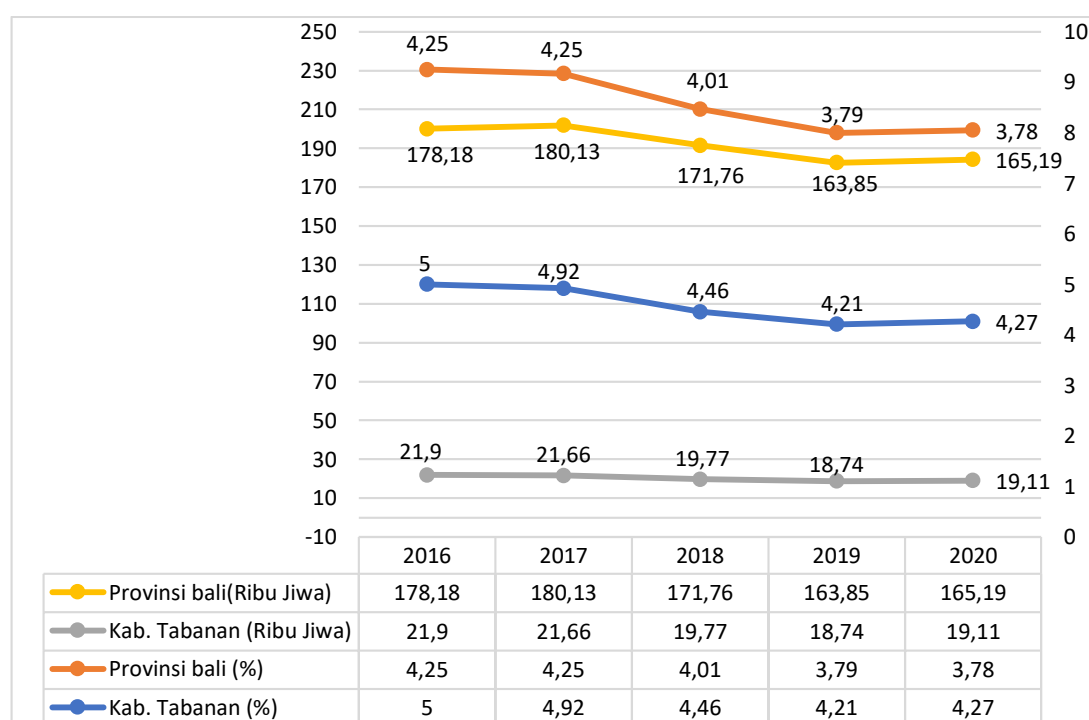
Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali Tahun 2016-2018

Distribusi pendapatan yang dilihat dari *Gini Ratio* menunjukkan pemerataan distribusi atas pendapatan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin kecil nilainya menunjukkan semakin kecil ketimpangan distribusi pada satu wilayah atau dapat dikatakan tingkat ketimpangan yang rendah.

Sampai dengan tahun 2018 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Tabanan mencapai 0,32 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup rendah.

2.3.1.5 Persentase Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 berada pada angka tertinggi kelima setelah dibandingkan dengan sembilan Kabupaten/Kota se-Bali yakni Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung dan Jemberana dan masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Bali. Berikut Perkembangan angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 2.11.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali

Angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, angka kemiskinan kembali

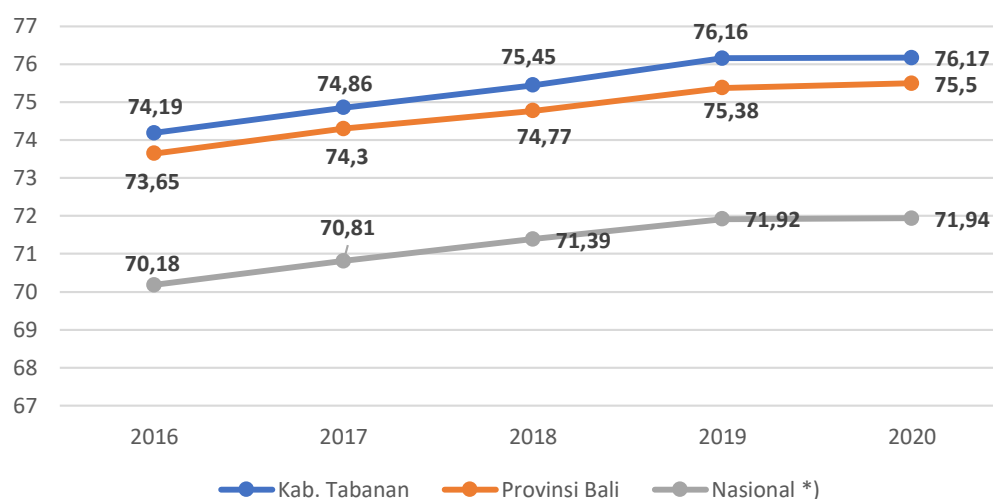
meningkat di tahun 2020 yang mencapai angka 19.110 jiwa. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 semenjak bulan Maret Tahun 2020 dimana menyebabkan banyak kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan seperti biasa bahkan terhenti sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Adanya program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi cukup membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu memperlambat laju peningkatan angka kemiskinan, namun tentunya hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lama karena akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah dan juga pemerintah daerah. Diperlukan terobosan-terobosan lainnya selain program jaminan sosial yang telah dilaksanakan, guna membantu masyarakat terdampak untuk kurun waktu yang panjang.

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan masyarakat dikaji dari beberapa aspek yaitu pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan. Aspek-aspek ini merupakan indikator dalam melakukan program-program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan dapat ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan di atas IPM Bali dan Nasional. Namun capaian ini masih lebih rendah dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.



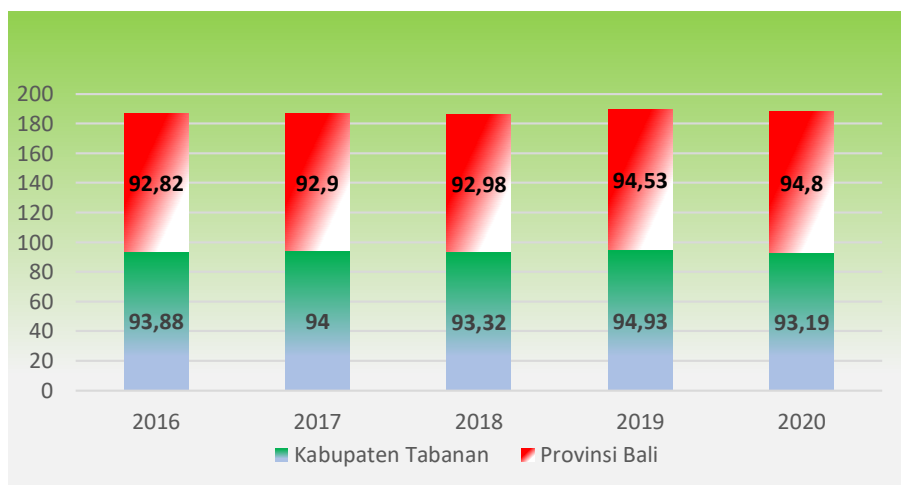
Sumber : BPS Prov. Bali, Tahun 2021

Gambar 2.12.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan,
provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020

2.3.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) di kabupaten Tabanan Tahun 2020 mengalami tren penurunan dan masih di bawah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.



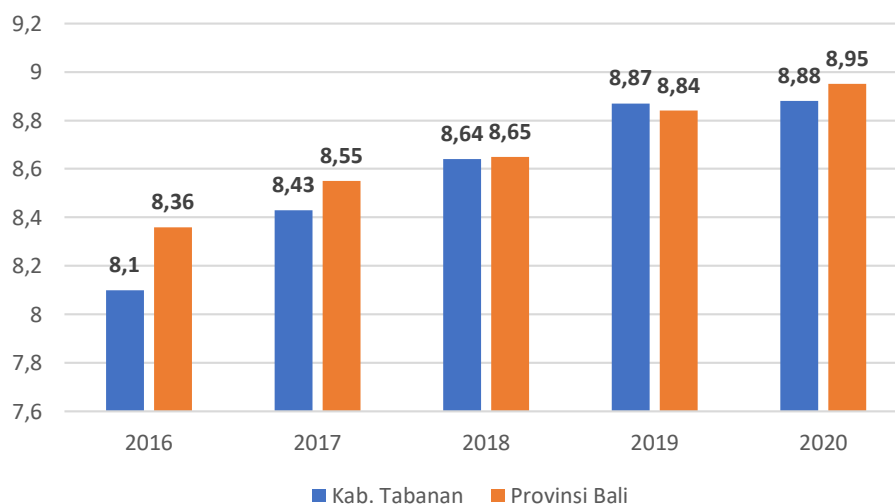
Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 2.13.

Angka Melek Huruf Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali Tahun 2016-2020

2.3.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 sebesar 8,88 Tahun masih dibawah rata-rata Provinsi Bali 8,95 Tahun. Artinya wajib belajar 9 Tahun belum tercapai. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.



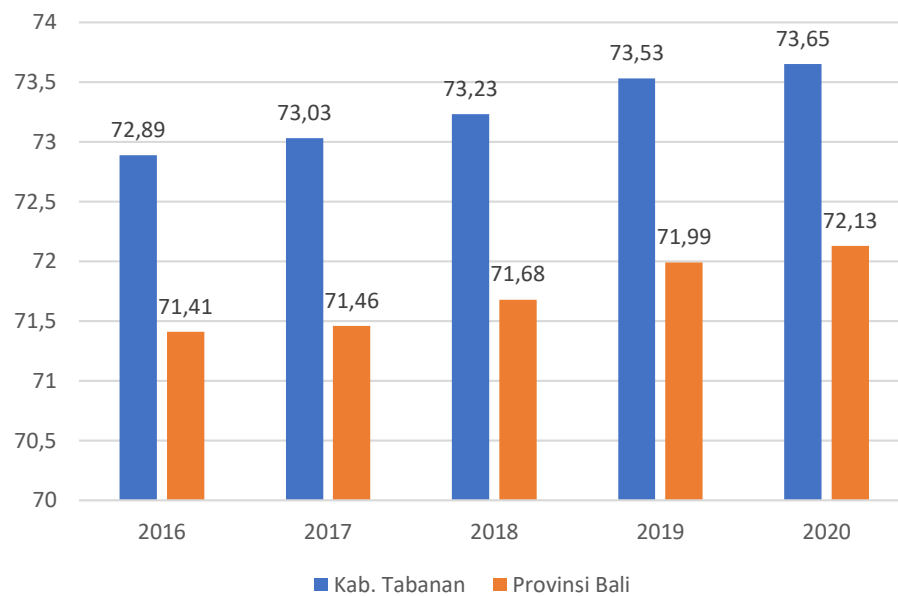
Sumber : BPS Kab. Tabanan, 2021; BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 2.14

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

2.3.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan di atas rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Bali. Angka Harapan Hidup Masyarakat Tabanan Tahun 2020 adalah 73,65 Tahun masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Badung (75,10 Tahun), Kota Denpasar (74,82 Tahun) dan Kabupaten Gianyar (73,68 Tahun)



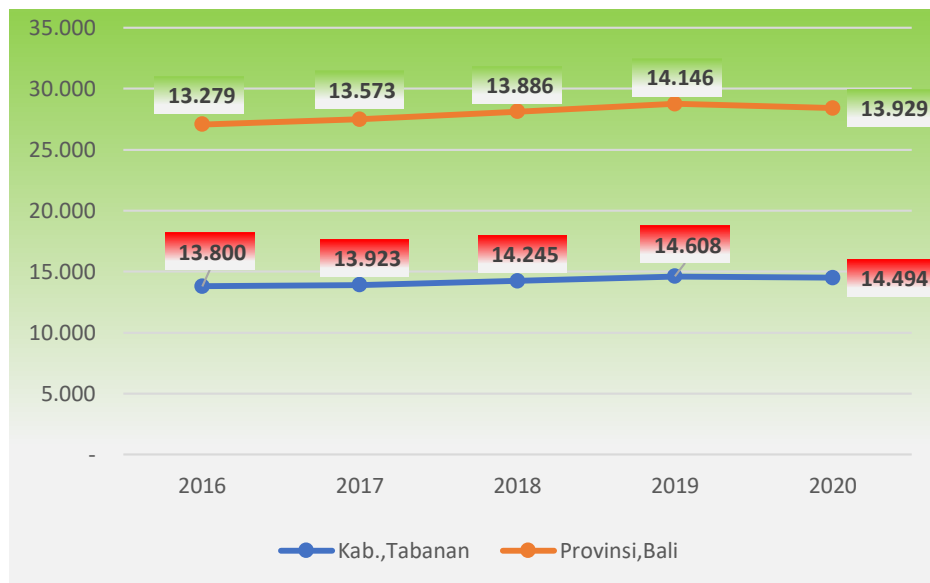
Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Gambar 2.15

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali Tahun 2016-2020

2.3.2.5 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) di Kabupaten Tabanan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2016-2019 dari Rp. 13.800 ribu menjadi Rp.14.608 ribu pada tahun 2019. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Tabanan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup di Tabanan. Terjadi penurunan tahun 2020 sebesar 0,78% karena dipengaruhi pandemi *Covid-19*. Berikut perkembangan daya beli masyarakat tahun 2016-2020



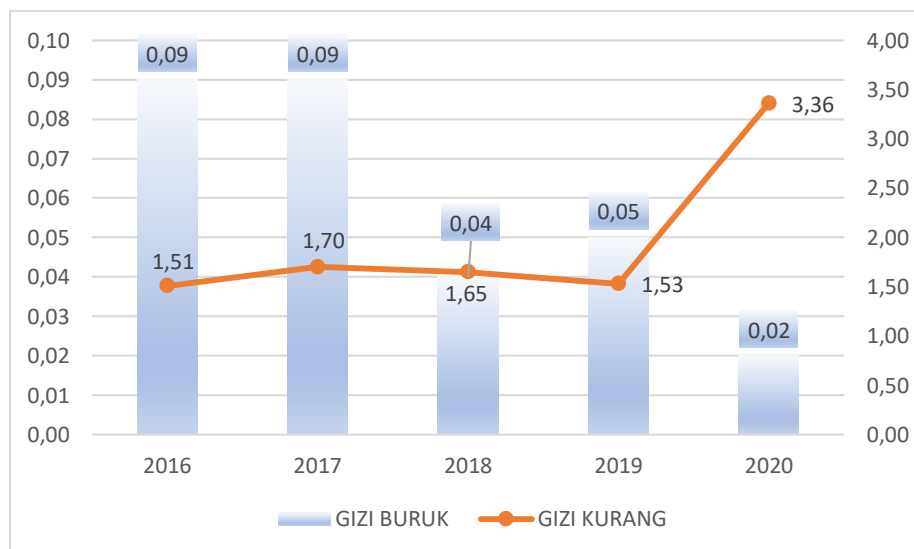
Sumber : BPS Kab. Tabanan, 2021; BPS Prov. Bali, Tahun 2021

Gambar 2.16

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali 2016-2020

2.3.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Persentase gizi buruk rata dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 0,06% sementara persentase Gizi Kurang sebesar 1,95%



Sumber Dinas Kesehatan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Gambar 2.17

Persentase Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali 2016-2020

2.3.2.7 Prevelensi Stunting

Jumlah *stunting* di Kabupaten Tabanan tahun 2020 sebanyak 1.219 jiwa dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Marga sebanyak 321 jiwa kemudian di Kecamatan Pupuan sebanyak 188 jiwa, berikut sebaran kasus *stunting* berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.6
Jumlah *Stunting* Per Kecamatan di Kabupaten Tabanan

No.	Kecamatan	<i>Stunting</i> (Jiwa)
1	Selemadeg	27
2	Selemadeg Timur	40
3	Selemadeg Barat	134
4	Kerambitan	136
5	Tabanan	170
6	Kediri	139
7	Marga	321
8	Baturiti	11
9	Penebel	53
10	Pupuan	188
Total		1219

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

2.3.2.8 Pertanahan

Di bidang pertanahan, aset tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang telah bersertifikat sebanyak 1.639 bidang atau 89,07%. Namun dari sisi luasan baru sebesar 25,76% atau seluas 1.539.578 m². Berikut jumlah bidang dan luasannya tanah Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.

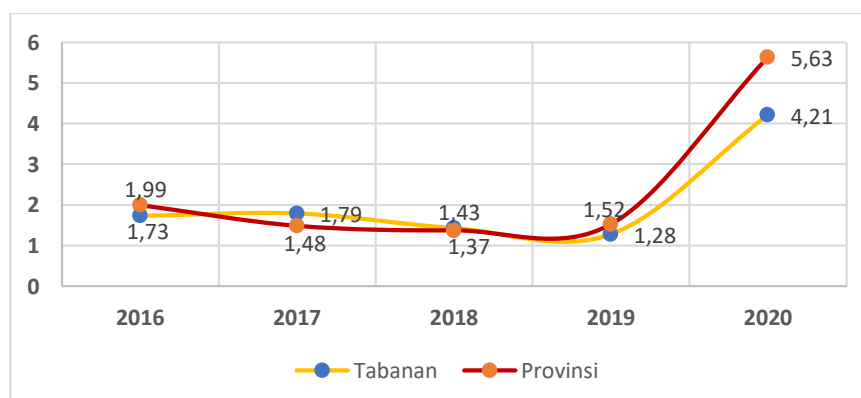
Tabel 2.7
Bidang dan Luasnya Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Tanah Terdaftar/Sertifikat		Tanah Tidak Terdaftar/Belum Sertifikat		Ket
		Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	
1	2016	706	12.645	376	6.088.512	
2	2017	708	1.900	374	6.086.612	
3	2018	713	81.360	369	6.010.782	
4	2019	729	34.760	353	5.976.022	
5	2020	1.639	1.539.578	201	4.436.444	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.3.2.9 Ketenagakerjaan

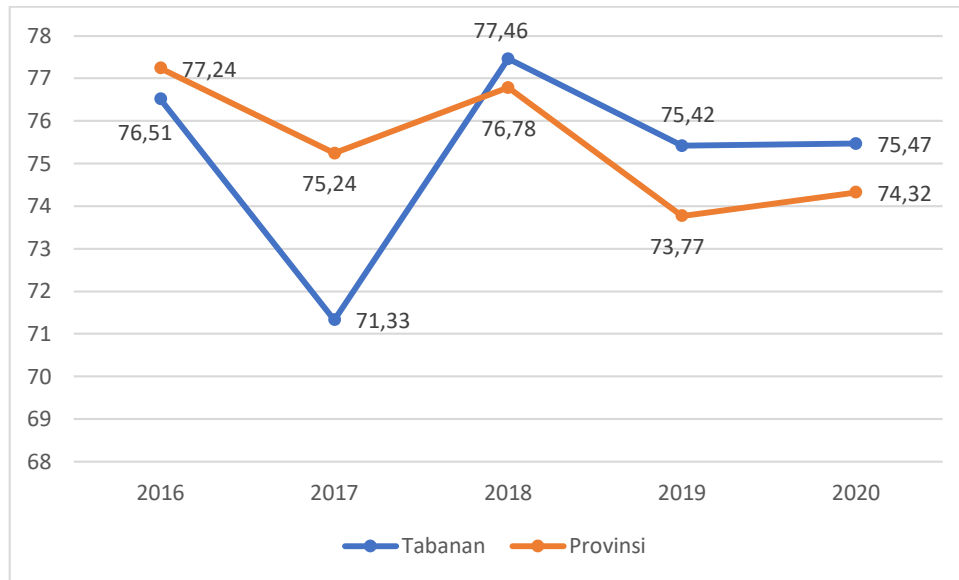
Kondisi pandemi yang terjadi berimbas pada seluruh sektor terutama pada sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dan sektor jasa. Selama ini struktur tenaga kerja di Kabupaten Tabanan bertumpu pada sektor pariwisata dimana sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja pada kelompok umur 20 tahun hingga 45 tahun. Dengan pandemi ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,93% dari 1,28% menjadi 4,21%. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2021

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan
dan Provinsi Bali 2016-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Tabanan tahun 2020 mencapai 75,47%. Terjadi penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan berada diatas TPAK Provinsi Bali. Berikut perkembangan TPAK Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2021

Gambar 2.19

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Artinya masih banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum bekerja.

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bali mewarisi tradisi, seni, dan budaya yang sangat kaya, beragam, dan unik yang tiada duanya di dunia. Warisan-warisan tersebut tidak hanya berwujud benda fisik, namun juga berwujud karya-karya sastra yang tersurat dalam lontar yang tak terhitung jumlah dan jenisnya. Pewarisan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat sampai saat ini, nampak dari karya, buah tangan, dan kebiasaan hidup orang Bali yang sangat menyatu dengan unsur-unsur seni dan estetika. Sangat mungkin, sentuhan-sentuhan seni dan budaya inilah menjadikan Bali memiliki daya tarik bagi orang luar



untuk berkunjung atau belajar memperdalam seni dan budaya Bali. Berikut beberapa Karya Warisan Budaya yang terdapat di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.8
Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	Nama Karya Budaya	Domain	Ket.
1	Kerambitan	Kerambitan	Tektekan	Seni Pertunjukan	sebagai WBTB Indonesia
2	Tabanan	Bongan	Mesyuryak	Budaya, perayaan	
3	Tabanan	Tunjuk	Tari Leko	Seni Pertunjukan	sebagai WBTB Indonesia
4	Tabanan	Tabanan	Seni Bela Diri Tengklung	Seni Pertunjukan	
5	Tabanan	Tabanan	Lumbung Glebeg	Kemahiran	
6	Tabanan	Tabanan	Tradisi Keberan	Adat Istiadat	
7	Tabanan	Tabanan	Samuan Barong	Adat Istiadat	
8	Tabanan	Tabanan	Tari Andir	Seni Pertunjukan	
9	Tabanan	Tunjuk	Gending Gender Wayang	Seni Pertunjukan	
10	Tabanan	Tabanan	Jukut Gonda	Kuliner	
11	Tabanan	Tabanan	Tradisi Nyalcal	Ritus	
12	Tabanan	Tabanan	Ritual Nerang	Ritus	
13	Tabanan	Tabanan	Payas Madya Tabanan	Ketrampilan	
14	Tabanan	Tabanan	Payas Agung Khas Tabanan	Ketrampilan	
15	Kediri	Kediri	Ngerebeg Keris Ki Baru Gajah	Adat Istiadat	sebagai WBTB Indonesia
16	Kediri	Pejaten	Keramik Pejaten	Kemahiran	
17	Kediri	Kediri	Okokan	Seni Pertunjukan	
18	Kediri	Abiantuwung	Topeng Sidakarya	Seni Wali	Pengakuan Unesco
19	Marga	Ole	Megandu	Tradisi	
20	Penebel	Mangesta	The Beras Merah	Kemahiran	
21	Penebel	Buruan	Joged Nini	Ritus	
22	Penebel	Puluk-Puluk	Baris Memedi	Ritus	
23	Penebel	Jatiluwhi	Sistim subak	WBD	Pengakuan Unesco
24	Pupuan	Pujungan	Mandolin	Seni Pertunjukan	
25	Pupuan	Pupuan	Rejang Ayunan	Seni Pertunjukan	
26	Pupuan	Pupuan	Baris Ketekok Jago	Seni Pertunjukan	
27	Pupuan	Pupuan	Rejang Pulu	Seni Pertunjukan	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Untuk mempertahankan budaya warisan leluhur dibutuhkan upaya untuk melestarikannya salah satunya melalui pemberdayaan dan pembinaan berbagai sanggar seni meliputi seni tari, tabuh, suara dan bentuk seni lainnya. Jumlah sanggar seni di Tabanan tahun 2020 sebanyak 73 sanggar yang telah terdaftar, sebagai berikut.

Tabel 2.9

Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No.	Sanggar Seni	Desa	Kecamatan
1	Sanggar Seni Bumi Sari Nadi	Desa Angseri	Baturiti
2	Sanggar Tari Wratnala	Desa Abian Tuwung	Kediri
3	Sanggar Sakuntala	Br. Anyar	Kediri
4	Sanggar Tari Satya Hredaya	Desa Pejaten	Kediri
5	Kursus Tari Bali Budi Manik Mas	Perumnas Sanggulan	Kediri
6	Sanggar Tari Satria Panca Merta	Br. Jadi	Kediri
7	Sanggar Karawitan Cepaka Kuning	Br.Cepaka,Desa Cepaka	Kediri
8	Sanggar Seni Bina Suara Art	Br Lalangpasek,Desa Cepaka	Kediri
9	Sanggar Gong Semar Pegulingan	Br, Puseh,Kediri	Kediri
10	Sanggar Okokan Brahma Diva Kencana	Br,Delod Puri,Kediri	Kediri
11	Sanggar Tabuh Sari Winangun	Br.Bengkel Gede,Bengkel	Kediri
12	Sanggar Tari Sekar Ayu	Br. Laing, Pandak Bandung	Kediri
13	Sanggar Tari Wagi Swari	Br.Kelakahan Gede,Buwit	Kediri
14	Sanggar Sekaa Batel Deloduma	Br.Deloduma,Buwit	Kediri
15	Sanggar Seni Murdha Manik	Banjar Adat Pilisan, Desa Kaba-Kaba	Kediri
16	Sanggar Seni Bandrang Mas	Banjar Adat Tanah Bang, Desa Banjar Anyar	Kediri
17	Sanggar Dharma Widya Santana	Banjar Suralaga, Desa Abiantuwung	Kediri
18	Sanggar Seni Dedari Dalem, (Seni Pertunjukan/Seni Tari)	Banjarabiantuwung Kelod, Desa Abian Tuwung	Kediri
19	Sanggar Dwiyani	Br.Kukuh Kerambitan	Kerambitan



No.	Sanggar Seni	Desa	Kecamatan
20	Sanggar Kumara Patria	Br.Tengah Kerambitan	Kerambitan
21	Sanggar Tari Duta Nirmala	Ds. Timpag	Kerambitan
22	Luntang Lantung	Br.Batan Nyuh Marga	Marga
23	Sanggar Tari Ratna Mekar Sari	Br. Lod Dalang, Ds. Kukuh	Marga
24	Sanggar Tari Bali Meirah	Br. Cau Ds. Tua	Marga
25	Sanggar Tari Mas Putra Baru	Br. Baru, Ds. Tua	Marga
26	Sanggar Tari Putra Ayu	Br. Lod Dalang, Ds. Kukuh	Marga
27	Sanggar Seni Dot Bagus Dot Jegeg	Desa Petiga	Marga
28	Sanggar Takir Wangsuh	Banjar Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga	Marga
29	Sanggar Batel	Desa Kuwum	Marga
30	Komunitas Timpal Tatkala Tabanan (Seni Sastra Dan Teater)	Banjar Cau, Desa Tua	Marga
31	Bali Asri	Br. Penatahan	Penebel
32	Sanggar Tari Biang Lala	Br. Jatiluwih, Jatiluwih	Penebel
33	Legong Berry	Br. Rejasa, Rejasa	Penebel
34	Sanggar Batukaru	Br. Wangaya	Penebel
35	Sanggar Seni Calonarang Tri Ananta Buana	Banjar Sangketan	Pupuan
36	Sanggar Aji Swaram	Banjar Cepag, Jegu	Pupuan
37	Sanggar Warok	Desa Jegu	Pupuan
38	Sanggar Tari Bali Kumara	Br. Kubu	Pupuan
39	Sanggar Jangkrik Binal	Desa Pupuan	Pupuan
40	Sanggar Semara Ratih	Desa Pupuan	Pupuan
41	Sanggar Genitri	Desa Pupuan	Pupuan
42	Sanggar Bungsil Gading	Desa Pupuan	Pupuan
43	Mara Bangun	Desa Sai	Pupuan
44	Sanggar Tari Sri Kandi	Desa Pajahan	Selemadeg Timur
45	Tunas Ayu	Br. Baletimbang, Kebon Padangan	Selemadeg Timur
46	Sanggar Tari Jegeg Bagus	Desa Padangan	Selemadeg Timur
47	Sanggar Padi	Banjar Swastika Carik Kangin, Desa Gadungan	Selemadeg Timur
48	Sanggar Tabuh Gading Mas	Banjar Mekarsari Carik Kauh, Desa Gadungan	Selemadeg Timur



No.	Sanggar Seni	Desa	Kecamatan
49	Sanggar Tari Kresna Loka	Banjar Pondok Kaja, Desa Gadungan	Selemadeg Timur
50	Sanggar Seni Jegeg Bagus	Banjar Mambang Gede, Desa Mambang	Selemadeg Timur
51	Yayasan Seni Kerta Rupaka	Banjar Mambang Gede, Desa Mambang	Selemadeg Timur
52	Sanggar Kelentang Mas	Banjar Tangguntiti, Desa Tangguntiti	Selemadeg Barat
53	Sanggar Tabuh Windu Giri Suara	Banjar Gempini Kauh, Desa Dalang	Selemadeg Barat
54	Sanggar Tari	Banjar Megati Kaja, Desa Megati	Selemadeg Barat
55	Sanggar Alit	Banjar Kutuh, Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat
56	Sanggar Seni Kantil Mas	Desa Selabih	Selemadeg Barat
57	Sanggar Seni Wisma Gayatri	Banjar Gulingan, Desa Antosari	Selemadeg Barat
58	Sanggar Tari Ayu	Br.Pande Tabanan, Desa Dajan Peken	Tabanan
59	Sanggar Tari Tri Bhuana Sari	Br.Buahan Utara, Desa Denbantas	Tabanan
60	Sanggar Tari Ssi	Br.Tegal Belodan, Desa Dauh Peken	Tabanan
61	Sanggar Sekar Rare	Br.Pande Tabanan, Desa Dajan Peken	Tabanan
62	Sanggar Tari Priambada Cita	Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken	Tabanan
63	Sanggar Tari Idea	Banjar Gubug Baleran	Tabanan
64	Sanggar Seni Duta Kumara Jaya	Banjar Tanah Pegat	Tabanan
65	Sanggar Karsa Tengah	Banjar Curah	Tabanan
66	Sanggar Adunk	Banjar Adat Bongan Gede	Tabanan
67	Sanggar Seni Kembang Bali	Banjar Tunjuk Kelod, Desa Tunjuk	Tabanan
68	Komunitas Seni Padma Buddharam	Desa Tunjuk	Tabanan
69	Sanggar Bianglala	Br. Pasekan	Tabanan
70	Sanggar Tari Sri Melati	Br. Tuakilang Belodan	Tabanan
71	Sanggar Yogi Iswara	Br. Kamasan	Tabanan
72	Sanggar Leklok	Tabanan	Tabanan
73	Hari Dwipa Gamelan Group	Jalan Kenanga No. 7 Tabanan	Tabanan

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Pembinaan sanggar seni secara berkala sangatlah penting, selain itu ruang untuk mengepresikan karya seni perlu diberikan seluasnya-luasnya sehingga masyarakat Tabanan dapat mencintai budayanya sendiri. Saat ini beberapa *event* yang telah dilaksanakan seperti Pesta Kesenian Bali mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, Festival Bedugul, Festival Tanah Lot, Festival Kerambitan, Festival Jatiluwih dan beberapa *event* yang berkaitan dengan kegiatan adat seperti budaya *ngerebeg* pada saat piodalan di Pura Kahyangan Alas Kedaton.

Sementara untuk situs cagar budaya di Tabanan cukup banyak yang tersebar di beberapa kecamatan. Keberadaan situs cagar budaya perlu dikelola dan dijaga dengan baik. Keberadaan situs cagar budaya menjadi potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan. Beberapa situs cagar budaya di Tabanan sebagai berikut:

Tabel 2.10

Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No.	Cagar Budaya	Desa	Kecamatan	Keterangan
				Terdaftar/tidak
1	Pura Luhur Batukaru	Desa Wongaya Gede	Penebel	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
2	Pura Luhur Muncak Sari	Desa Adat Sangketan	Penebel	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
3	Pura Luhur Tambawaras	Desa Adat Sangketan	Penebel	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
4	Pura Luhur Besi Kalung	Desa Babahan	Penebel	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
5	Pura Luhur PucakPetali	Desa Jatiluwih	Penebel	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
6	Pura Luhur Sekartaji	Desa Sesandan	Tabanan	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
7	Pura Luhur Yeh Gangga	Desa Perean	Baturiti	sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Nasional



No.	Cagar Budaya	Desa	Kecamatan	Keterangan
				Terdaftar/tidak
8	Cagar Budaya yang sudah di Registrasi Nasional sejumlah 368	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan		Yang sudah diregistrasi ini akan dilakukan proses Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten melalui pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Sama hal dengan seni budaya, olahraga juga sebagai media untuk memperkuat jati diri, membentuk karakter, dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan pembinaan kepada atlet muda sehingga mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun di kancah internasional. Selain pembinaan, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga terus didorong sehingga Tabanan memiliki sarana olah raga yang representatif. Dilihat dari perkembangan olahraga di Tabanan, masih terdapat capaian yang membutuhkan pembenahan seperti cakupan pembinaan atlet muda baru mencapai 58% dan pelatih yang bersertifikat sebanyak 51%. Berikut capaian bidang olahraga Kabupaten Tabanan sebagaimana pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan Pembinaan Olah Raga (%)	Cakupan Pelatih yang bersertifikat (%)	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	Jumlah prestasi Olahraga (%)	Jumlah Gedung Olahraga Per. 10.000 Penduduk
2016	100	48	45	51 Medali	1
2017	100	44	64	41 Medali	1
2018	100	46	67	111 Medali	1
2019	100	47	50	179 Medali	2
2020	100	51	58		2

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2020

2.3.4 Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, selanjutnya untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar diikat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) bidang pelayanan dasar tersebut.

2.3.4.1 Bidang Pendidikan

Di Kabupaten Tabanan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan meliputi 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Lebih lanjut terkait dengan bidang urusan pendidikan ini sampai dengan tahun 2020, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan; dan
- c. Pendidikan anak usia dini.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah, hasil/output pencapaian SPM oleh Daerah khususnya pada bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, rinciannya sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	SPM	Tahun				
		2016	2017	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pendidikan Dasar "(Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs))"	n a	n a	n a	90,25	91,00
2	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	n a	n a	n a	n a	0,16%
3	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	n a	n a	n a	55,33	65,79

*Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2016-2020,
Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan*

2.3.4.2 Bidang Kesehatan

Bidang urusan Kesehatan terdapat 12 (dua belas) Jenis pelayanan dasar. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Tabanan, maka ditetapkan Perangkat Daerah pengampu SPM-nya, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Di bawah ini, dijelaskan informasi tentang bidang urusan kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah dan hasil/output pencapaian SPM khususnya pada bidang urusan Kesehatan di Kabupaten Tabanan, sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	SPM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	n a	n a	91,80	93	92,90
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	n a	n a	100	95,40	95,70
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	n a	n a	99,40	100%	98,90
4	Pelayanan kesehatan balita	n a	n a	100	99,11	71,50
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	n a	n a	92,43	95,40	53,90
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	n a	n a	100	112,24	65,10
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	n a	n a	54	50,59	34,58
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	n a	n a	100	100	113,20
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	n a	n a	100%	100%	115,20%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	n a	n a	100%	100%	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	n a	n a	100%	100%	100,00%

NO	SPM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	n a	n a	100%	100%	100,00%

*Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2016-2020,
Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan*

2.3.4.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang urusan Pekerjaan Umum terdapat 2 (dua) Jenis pelayanan dasar. Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar bidang urusan Pekerjaan Umum sampai dengan Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah, dan hasil/output pencapaian SPM khususnya pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tabanan, secara terperinci sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.14

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Layanan	2016	2017	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	71,00	78,14	78,66	83,53	83,54
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	71,58	82,75	82,61	83,16	83,16

Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2016-2020,
Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan

2.3.4.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang urusan Perumahan Rakyat terdapat 5 (lima) Jenis pelayanan dasar. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM bidang urusan ini dilaksanakan oleh SKPD pengampu, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh;
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah, dan hasil/output pencapaian SPM khususnya pada bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabanan, sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.15

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Layanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten			0,00	100	0,00
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten			0,00	99,11	0,00
3	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya			0,00	0,00	50,3
4	Pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh			0,00	0,00	104,9
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman			0,00	0,00	58,7

Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2016-2020, Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan

2.3.4.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM bidang urusan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kondisi Pelayanan Dasar bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah, dan hasil/output pencapaian SPM khususnya pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tabanan, sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.16

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	SPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	36 org	36 org	40 org	40 org	134 org
2	Pelayanan informasi rawan bencana	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 org	104 org	60 org	300 org	293 org
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	42 titik	102 titik	685 titik	185 titik	569 titik
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	35	35	35	35	63

Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2016-2020, Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan

2.3.4.6 Bidang Sosial

Bidang urusan Sosial memiliki 5 (lima) jenis pelayanan dasar. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tabanan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar bidang urusan Sosial sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar dalam bidang urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

2. Indikator, Kebijakan Daerah dan Hasil/Output Pencapaian SPM

Terkait dengan indikator, kebijakan daerah, dan hasil/output khususnya pada bidang urusan Sosial di Kabupaten Tabanan, sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2016	2017	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	n a	n a	100	100	16,02
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	n a	n a	100	100	70,92
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	n a	n a	100	100	21,69
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	n a	n a	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2016	2017	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	n a	n a	100	100	100

*Sumber : Laporan Penerapan dan Capaian SPM Tahun 2018-2020,
Bagian Tapem Setda Kabupaten Tabanan*

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum memberikan gambaran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tabanan selama ini telah melaksanakan seluruh urusan wajib dan beberapa urusan pilihan yang sesuai dengan potensi daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.4.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar mencakup 6 (enam) urusan, yaitu: urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Setiap warga negara berhak memperoleh layanan minimal terhadap keenam urusan tersebut sesuai kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2.4.1.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Sesuai kewenangan yang diamanatkan, capaian kinerja yang mampu diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan seluruh warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 77,26%, hingga tahun 2020 meningkat menjadi 78,56%, Tahun 2016 jumlah lembaga PAUD yang ada sebanyak 431 satuan pendidikan dan terus mengalami penurunan, sampai tahun 2020 jumlah lembaga PAUD yang masih ada sebanyak 342 satuan pendidikan yang tersebar di sepuluh kecamatan. Pada tahun 2019 lembaga yang sudah terakreditasi sebanyak 67 satuan pendidikan (16 persen), sedangkan yang belum terakreditasi sebanyak 353 satuan pendidikan (84 persen). Dari lembaga yang sudah terakreditasi, sebagian besar masih dalam katagori B dan C. Hal ini menunjukkan keberadaan lembaga PAUD masih membutuhkan penanganan yang lebih intensif, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	77,26	77,31	77,34	77,50	78,56
2.	Persentase Lembaga PAUD yang teakreditasi	%	3	6	9	16	Akreditasi tidak dilaksanakan
3.	Jumlah Lembaga PAUD	Bh	431	431	416	420	342

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, Tahun 2020

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan, yaitu SD sederajat dan SMP sederajat. Untuk mengukur kinerja pendidikan, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. APS di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 dan 2020 pada

jenjang pendidikan SD dan SMP telah mendekati 100 persen, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
	2019	2020
SD/MI	99,22	99,19
SMP/MTs	99,19	98,65
SMA/SNK/MA	85,69	87,49

Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

Akses pendidikan di Kabupaten Tabanan sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan sudah cukup baik, namun hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah ketersediaan tenaga pendidik. Kabupaten Tabanan masih menghadapi kondisi yang cukup serius dengan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan SD, semestinya tersedia 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, dan 1 guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes). Dari 303 jumlah SD dan 1.863 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 2.478 guru. Namun, saat ini ketersediaan guru SD hanya sebanyak 1.935 guru (minus 543 orang). Dari jumlah guru yang ada ini pun sebanyak 494 orang (25,53 persen) berstatus sebagai guru kontrak (non PNS) (Tabel 2.20). Kondisi ini baru ditinjau dari sisi kuantitas, belum menyangkut ketersediaan guru mata pelajaran wajib (guru Agama dan Penjaskes). Apabila permasalahan guru ini tidak ditangani secara serius, mustahil dapat terwujud peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan SD.

Tabel 2.20
Ketersediaan Guru pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di
Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombongan Belajar	Guru Berstatus		Jumlah Guru	Kebutuhan
				PNS	Kontrak		
1	Baturiti	35	215	127	35	162	287
2	Kerambitan	28	168	149	48	197	224
3	Kediri	43	280	178	53	231	372
4	Marga	33	199	171	41	212	265
5	Penebel	42	245	192	64	256	329
6	Pupuan	29	175	143	44	187	233
7	Selemadeg Barat	20	117	99	26	125	157
8	Selemadeg	17	102	74	39	113	136
9	Selemadeg Timur	20	119	118	38	156	159
10	Tabanan	36	243	190	106	296	325
Jumlah		303	1.863	1.441	494	1.935	2.478

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, 2020

Dari tabel di atas dapat disimak, bahwa sebaran guru antar kecamatan juga mengalami ketimpangan. Kecamatan yang paling besar kekurangan guru secara berturut-turut adalah Kecamatan Baturiti, Kediri, dan Pupuan. Jadi, kekurangan guru SD tidak hanya terjadi di sekolah yang jauh dari kota namun juga terjadi di perkotaan (Kecamatan Kediri).

Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SD yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Kondisi Ruang Kelas SD di sepuluh Kecamatan
Di Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas			Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Baturiti	35	207	51	143	13	6,28
2	Kerambitan	28	179	59	114	6	3,35
3	Kediri	43	275	99	176	-	-
4	Marga	33	206	64	136	6	2,91
5	Penebel	42	272	94	167	11	4,04
6	Pupuan	29	183	41	130	12	6,55
7	Selemadeg Barat	20	129	41	77	11	8,52
8	Selemadeg	17	104	13	79	12	11,53
9	Selemadeg Timur	20	118	62	47	9	7,62
10	Tabanan	36	347	115	226	6	1,72
	Jumlah	303	2.020	639	1.295	86	4,25

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 86 unit atau 4,25 persen kondisi ruang belajar SD yang ada masih dalam kondisi rusak berat. Ruang belajar SD di Kecamatan Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, dan Selemadeg wajib mendapat penanganan lebih prioritas dibandingkan dengan SD di kecamatan lainnya.

Tabel 2.22
Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan
Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas			Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Baturiti	5	66	35	31	-	0,00
2	Kerambitan	2	46	21	25	-	0,00
3	Kediri	5	81	35	45	1	1,23
4	Marga	4	69	19	50	-	0,00
5	Penebel	3	54	25	26	3	5,55
6	Pupuan	6	70	26	39	5	7,14
7	Selemadeg Barat	2	20	10	7	3	15,00

No	Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas			Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
8	Selemadeg	2	32	4	23	5	15,62
9	Selemadeg Timur	3	48	36	12	-	0,00
10	Tabanan	8	140	65	75	-	0,00
Jumlah		40	617	250	308	17	2,75

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2020

Kondisi ruang belajar pada jenjang pendidikan SMP kondisinya lebih baik dibandingkan dengan jenjang SD. Ruang belajar yang rusak berat masih ada sebanyak 17 unit atau 2,75 persen dari ruang yang ada (Tabel 2.22). Ruang belajar SMP di Kecamatan Selemadeg Barat, Pupuan, dan Penebel butuh penanganan segera agar pemerataan kondisi prasarana pendidikan antar kecamatan lebih optimal.

3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga (usia 15-44 tahun) yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah dengan alasan putus sekolah, kendala biaya, sudah bekerja, dan alasan lainnya. Proses pembelajaran ini biasa dikenal dengan nama Kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA). Pelaksanaan pembelajaran untuk Pendidikan Kesetaraan tersentral dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF SKB Tabanan) yang ada di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tabanan, terdapat 10 lembaga PKBM dan 1 lembaga SPNF yang tersebar di seluruh kecamatan. Lembaga yang sudah terakreditasi dapat melaksanakan ujian nasional di lembaganya sendiri. Lembaga yang sudah terakreditasi yaitu:

1. SPNF SKB Tabanan (Kecamatan Kediri)
2. PKBM Sari Mekar (Kecamatan Kediri)
3. PKBM Windu Segara (Kecamatan Tabanan)

4. PKBM Eka Cita (Kecamatan Kerambitan)
5. PKBM Mandiri (Kecamatan Pupuan)
6. PKBM Dharma Santhi (Kecamatan Penebel)
7. PKBM Darma Wangsa (Kecamatan Baturiti)

Perkembangan jumlah siswa yang dididik pada lembaga pendidikan kesetaraan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.23

Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
1	SKB Tabanan	Kediri	-	25	80	5	54	139	5	54	148
2	PKBM Windhu Segara	Tabanan	-	-	-	9	-	25	10	-	30
3	PKBM Sari Mekar	Kediri	-	25	163	-	28	91	-	27	140
4	PKBM Eka Cita	Kerambitan	-	15	65	21	23	73	-	25	74
5	PKBM Mandiri	Pupuan	-	38	96	-	24	74	-	24	94
6	PKBM Dharma Santhi	Penebel	-	25	49	-	18	35	-	8	75
7	PKBM Darma Wangsa	Baturiti	-	15	56	-	15	96	-	15	33
8	PKBM Widya Sastra	Selemadeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PKBM Widya Santika	Selemadeg Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PKBM Melati	Marga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PKBM Tatwa Asi	Selemadeg Timur	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			0	156	529	5	54	139	15	153	594

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Tabanan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta Program Paket A dan B cenderung sedikit, sedangkan peserta didik pada Program Paket C relatif lebih banyak. Hal ini dapat dikaitkan dengan rendahnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Angka putus sekolah di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar 0,03 persen untuk jenjang pendidikan SD dan 0,28 persen untuk jenjang pendidikan SMP.

2.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan sangat strategis dalam upaya membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Kinerja daerah dalam urusan kesehatan secara umum dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. SPM bidang kesehatan mensyaratkan bahwa seluruh warga negara mulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia wajib mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar. Terdapat 12 SPM bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten antara lain: 1). pelayanan kesehatan ibu hamil, 2). pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3). pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4). pelayanan kesehatan balita, 5). pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6). pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7). pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8). pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9). pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, 10). pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11). pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi, dan 12). pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Target SPM bidang kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan 100%. Jika dilihat capaiannya tahun 2019 maka dari dua belas SPM bidang kesehatan di atas, lima capaiannya sudah sangat baik bahkan dua sudah mampu melebihi target sasaran yang ditetapkan yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari sasaran 5.191 bayi yang dilayani mencapai 5.213 bayi (100,42%) dan pelayanan kesehatan pada usia produktif dari sasaran 295.609 orang terealisasi 331.805 orang (112,24%). Tiga SPM capaiannya sudah sesuai target yaitu pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (100%), pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (100%), dan pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi (100%). Sedangkan empat SPM walaupun capaiannya

sudah cukup bagus akan tetapi masih di bawah target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil (93,01%), pelayanan kesehatan ibu bersalin (95,40%), pelayanan kesehatan balita (95,41%), dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (99,11%). Tiga SPM yang capaiannya terendah wajib menjadi perhatian serius oleh daerah yaitu pelayanan kesehatan penderita hipertensi dari 149.666 sasaran hanya terealisasi 11.302 orang (7,55%), pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan sasaran 71.954 orang terealisasi 36.398 orang (50,59%), dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV target 7.979 realisasi hanya 5.711 orang (71,58%). Secara keseluruhan rata-rata capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tabanan tahun 2019 baru mencapai 85,44%. Data capaian SPM Bidang kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan
Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Layanan Dasar	Target Sasaran 2019		Realisasi 2019		Target Sasaran 2020		Realisasi 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.710	100	5.311	93,01	5.290	100	4.914	92.90
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.451	100	5.200	95,40	5.395	100	5.164	95.72
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.191	100	5.213	100,42	5.138	100	5.120	99.65
4	Pelayanan kesehatan balita	26.441	100	25.227	95,41	25.643	100	18.347	71.55
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	50.484	100	50.033	99,11	52.917	100	28.499	53.86
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	295.609	100	331.805	112,24	283.479	100	206.996	73.02
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	71.954	100	36.398	50,59	283.479	100	206.996	73.02
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	149.666	100	11.302	7,55	101.984	100	10.817	10.61



No	Jenis Layanan Dasar	Target Sasaran 2019		Realisasi 2019		Target Sasaran 2020		Realisasi 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	5.740	100	5.740	100,00	5.577	100	5.577	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	735	100	735	100,00	1.330	100	797	59.92
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	358	100	358	100,00	399	100	184	46.10
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.979	100	5.711	71,58	13.300	100	6.926	52.08

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi capaian SPM bidang kesehatan adalah sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan telah tersedia cukup banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan kecamatan, bahkan jika digabungkan dengan jaringan pelayanan di bawahnya, seperti: Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh desa dan banjar.

Tahun 2020 tersedia 20 unit Puskesmas dengan rincian: Puskesmas Perawatan (Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan *obstetri neonatal emergency* dasar) sebanyak 5 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 15 unit. Lima Puskesmas Perawatan dimaksud adalah: Puskesmas Pupuan I, Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Tabanan III, Puskesmas Baturiti I dan Puskesmas Penebel I. Keterjangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tabanan telah mencapai 1,38 per 30.000 penduduk. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan

kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling). Jumlah Pustu pada tahun 2020 adalah sebanyak 76 unit, dan jumlah Pusling sebanyak 20 unit ditambah dengan 2 unit Mobil Sehat untuk memberikan pelayanan sampai pada tingkat banjar khususnya pelayanan kesehatan kesehatan kanker servik (IVA).

Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dilakukan oleh Rumah Sakit. Di Kabupaten Tabanan sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) rumah sakit, dua diantaranya merupakan rumah sakit pemerintah, yaitu Badan Rumah Sakit Umum (BRSU) Tabanan merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B dan UPTD Rumah Sakit Nyitdah merupakan rumah sakit tipe C.

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang lebih menekankan pada usaha kesehatan yang bersifat promotif dan preventif setidaknya perlu didukung oleh beberapa jenis tenaga kesehatan, yaitu: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tahun 2020 terdapat 652 tenaga kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 652 tenaga kesehatan yang ada, jumlah dokter umum sebanyak 67 orang, dokter gigi sebanyak 41 orang, tenaga perawat sebanyak 168 orang, tenaga perawat gigi sebanyak 54 orang, bidan sebanyak 211 orang, tenaga farmasi sebanyak 2 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 26 orang, tenaga sanitarian sebanyak 48 orang, tenaga gizi sebanyak 20 orang, dan tenaga keteknisan medis sebanyak 15 orang.

Ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 1.094 orang. Dari 1.094 tenaga tersebut terdiri dari 101 orang dokter spesialis, 59 orang dokter umum, 15 orang dokter gigi, 562 orang tenaga perawat, 13

orang perawat gigi, 117 orang bidan, 81 orang tenaga farmasi, 12 orang tenaga kesehatan masyarakat, 13 orang tenaga sanitarian, 31 orang tenaga gizi, 79 orang tenaga keteknisan medis, dan 11 orang tenaga fisioterapis. Jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar adalah dokter umum, bidan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, tenaga gizi, dan keterampilan fisik.

Selain capaian 12 indikator SPM, kinerja urusan kesehatan juga ditunjukkan dari capaian indikator RPJMD 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun
2016-2020

No	Indikator RPJMD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Utilisasi Pelayanan Kesehatan	%	n/a	n/a	101,49	112,7	87,99
2.	Angka Morbiditas	%	n/a	n/a	32,70	43,7	11,21
3.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	%	n/a	n/a	100	100	100
4.	Tingkat Akreditasi RSD	predikat	n/a	n/a	Paripurna	Paripurna	Paripurna
5.	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	n/a	n/a	87,97	85,44	61,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2020

Utilitas pelayanan kesehatan mencerminkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah kunjungan di faskes dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. Dengan angka 112,7% pada tahun 2019 berarti jumlah kunjungan di faskes sudah melebihi jumlah penduduk, hal ini bisa terjadi karena pengunjung yang sama dimungkinkan tercatat lebih dari satu kali, namun menurun di tahun 2020 menjadi 87,99%. Angka morbiditas sebesar 11,21% turun dari tahun sebelumnya (43,7%) menunjukkan bahwa masyarakat Tabanan semakin berkurang mengalami keluhan kesehatan, di sisi lain dapat

juga diartikan bahwa kesadaran masyarakat dalam masalah kesehatan cenderung semakin baik seiring target penerapan UHC (*universal health coverage*) dengan dukungan daerah mengalokasikan anggaran PBI daerah yang cukup besar untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan pembiayaan PBI Pusat. Sedangkan FKTP terakreditasi 100% sudah tercapai karena 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Tabanan seluruhnya sudah terakreditasi. Tingkat akreditasi RS target paripurna juga tercapai seiring BRSUD Tabanan yang tetap mampu mempertahankan tingkat paripurna dari tahun ke tahun, sedangkan untuk RS Nyitdah sudah terakreditasi tingkat dasar. Capaian indikator SPM bidang kesehatan tahun 2020 tercapai 61,29% turun dari tahun sebelumnya 85,44%. Turunnya capaian SPM bidang kesehatan dikarenakan rendahnya capaian beberapa SPM dari 12 SPM yang ada di bidang kesehatan. Beberapa SPM yang capaiannya rendah antara lain pelayanan kesehatan penderita hipertensi (10,61%) dari target 101.984 sasaran penderita hipertensi terealisasi 10.817, dan pada Pelayanan kesehatan orang dengan TB (46,10%) dari target 399 sasaran terealisasi 184.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terbagi atas 10 sub urusan meliputi sumberdaya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berikut sub urusan yang menjadi prioritas penanganan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

1. Air Minum

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2020 cakupan layanan air bersih Kabupaten Tabanan telah mencapai 83,54%, meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 83,53%.

Layanan penyediaan air bersih ini didukung oleh penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan layanan pedesaan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan yang dikelola sendiri masyarakat. Dalam enam tahun terakhir penyediaan air minum pedesaan banyak didukung oleh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang menjangkau desa yang tidak mendapatkan pelayanan sepenuhnya oleh PDAM. Dari capaian tahun 2020 tersebut, masih dibutuhkan peningkatan cakupan layanan sejumlah 16,47% untuk mencapai layanan sampai dengan 100% yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.

2. Air Limbah

Penyelenggaraan layanan air limbah khususnya akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga dan IPAL Komunal bagi wilayah dengan penduduk padat dan kumuh. Akses terhadap fasilitas sanitasi layak (Jamban Sehat) menurut kecamatan dan Puskesmas, tahun 2020 sudah mencapai 97,5 %. Namun demikian, masih terdapat $\pm$ 3.320 KK yang belum memiliki akses jamban sehat atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif baik upaya edukasi masyarakat maupun bentuk-bentuk intervensi lainnya.

Selain pembangunan jamban sehat untuk rumah tangga, pemenuhan akses sanitasi dilakukan juga melalui pembangunan IPAL komunal. Pembangunan IPAL komunal di Kabupaten Tabanan telah dimulai sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun 64 (enam puluh empat) unit IPAL Komunal, tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Di samping pembangunan IPAL Komunal dan pembangunan jamban sehat, sudah terbangun 1 (satu) unit IPAL Kawasan di tahun 2017, berlokasi Desa Dauh Pala untuk

pelayanan di wilayah perkotaan Tabanan yang meliputi 5 (lima) banjar di 2 (dua) desa.

Dari pelayanan sektor air limbah ini, beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria *ODF* (*Open Defecation Free*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Sampai tahun 2020, terdapat 28 desa berstatus *ODF* (*Open Defecation Free*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dengan rincian: 16 *ODF* Deklarasi, 7 *ODF Claim*, 5 *ODF Baseline*. Jadi, dari 133 desa baru 21,05% yang menyandang status *ODF*. Capaian ini tentu masih jauh dari harapan apalagi Tabanan sangat bersemangat mengembangkan Desa Wisata.

Kedua sub urusan air minum dan air limbah merupakan indikator dari SPM urusan pekerjaan umum. Capaian dari indikator tersebut adalah seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan
tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	71,00	78,14	78,66	83,53	83,54
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	71.58	82.75	82.61	83.16	83,16

Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, Tahun 2020

3. Drainase

Sistem drainase merupakan suatu sistem infrastruktur yang cukup kompleks karena terkait dengan status jalan dimana drainase tersebut berada. Di sisi lain, drainase merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, baik drainase primer, sekunder, maupun tersier. Sistem drainase di Kabupaten Tabanan pada umumnya masih memanfaatkan sungai dan saluran pengairan, bahkan sungai dan saluran pengairan saat ini berkembang menjadi saluran drainase Kota Tabanan. Drainase yang ada saat ini sepanjang 2.344 km yang sebagian besar masih dalam

Kota dan Ibu Kota Kecamatan dengan kondisi yang kurang memadai. Penanganan drainase perkotaan selama ini dihubungkan dengan saluran drainase utama yang telah ada. Pada titik-titik lokasi tertentu, kawasan perkotaan masih ada genangan akibat luapan/limpasan karena dimensi saluran drainase perkotaan yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemanfaatan lahan perkotaan.

Tabel 2.27
Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

N O	KONDISI	Persentase (%)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	BAIK	26.939	30,58	5.831	6,62	47.801	54,27	42.797	48,59	42.956	48,77
2	SEDANG	58.796	66,75	77.441	87,92	32.888	37,34	23.742	26,95	23.741	26,95
3	RUSAK	2.346	2,66	4.810	5,46	7.393	8,39	14.178	16,10	14.177	16,10
4	TANAH	-	-	-	-	-	-	7.365	8,36	7.205,	8,18
TOTAL		88.082	100,00	88.082	100,00	88.082	100,00	88.082	100,00	88.082	100,00

Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, Tahun 2020

4. Bangunan Gedung

Bangunan gedung dalam bentuk prasarana aparatur dan prasarana publik di Kabupaten Tabanan meliputi: gedung pendidikan, gedung kantor, gedung kesehatan, gedung olah raga, rumah dinas dan bangunan lainnya. Adapun jumlah prasarana aparatur dan prasarana publik di Kabupaten Tabanan mencapai 2.864 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi prasarana aparatur dan prasarana publik tersebut, 1.146 unit (40 %) masih dalam kondisi baik, 1.145 unit (40 %) dalam kondisi rusak sedang, dan 573 unit (20%) dalam kondisi rusak berat.

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan, meliputi: perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan

permukiman. Berikut kondisi sub urusan yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Tabanan.

Pembangunan bidang Perumahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hunian layak huni bagi masyarakat. Penanganan bidang perumahan di Kabupaten Tabanan banyak ditangani melalui program pusat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sasaran dari program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah, pembangunan rumah baru dan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dalam periode tahun 2016 – 2020, pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Tabanan sedikitnya sebanyak 1.207 unit rumah tidak layak huni sudah dapat dituntaskan di tiga kecamatan, di tujuh belas desa. Untuk kebutuhan penuntasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2020 masih terdapat $\pm$ 4.250 unit rumah yang layak ditangani yang tersebar di sepuluh kecamatan. Penanganan rumah tidak layak huni dapat berupa peningkatan kualitas/rehabilitasi rumah, pembangunan baru, atau bedah rumah yang bentuk dan ukuran rumah mengikuti standar pemberi bantuan (pemerintah). Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni bersifat dinamis sehingga dilakukan pemutakhiran data secara reguler.

Tabel 2.28

Kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2020

No	Kecamatan	Peningkatan Kualitas (unit)	Pembangunan Baru (unit)	Bedah Rumah (unit)	TOTAL
1	Tabanan	428	4	-	432
2	Penebel	258	28	16	302
3	Baturiti	239	85	-	324
4	Marga	119	30	4	153
5	Kediri	296	20	40	356
6	Selemadeg	401	19	4	424

No	Kecamatan	Peningkatan Kualitas (unit)	Pembangunan Baru (unit)	Bedah Rumah (unit)	TOTAL
7	Selemadeg Timur	286	43	3	332
8	Selemadeg Barat	240	38	16	294
9	Kerambitan	237	45	5	287
10	Pupuan	1.093	195	58	1.346
JUMLAH		3.597	507	146	4.250

Sumber: DPUPRKP Kab. Tabanan, Tahun 2020

Dalam kaitannya dengan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat yang ditujukan pada warga korban bencana dan warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah, sampai saat ini belum ada hunian warga yang tinggal di Kabupaten Tabanan terdampak oleh bencana dan program pemerintah. Dengan demikian, pencapaian indikator SPM tersebut belum diperlukan.

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota, meliputi: sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Capaian ketiga sub urusan tersebut dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.29

Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian (Tahun)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	36 orang	36 orang	40 orang	40 orang	134 orang
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian (Tahun)				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 orang relawan	0	60 orang relawan	300 orang masyarakat	104.293 orang masyarakat
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	102 titik	102 titik	685 titik	185 titik	569 titik
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	35	35	35	35	63

Sumber: Satpol PP Kab. Tabanan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketiga sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran belum dapat dinyatakan berhasil mencapai target pelayanan terhadap warga yang berhak mendapat pelayanan. Ke depan dibutuhkan pemetaan terhadap warga yang benar-benar berhak mendapat pelayanan sebelum program/kegiatan dieksekusi.

2.4.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan, dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tabel 2.30

Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	28	16	28	28	0
2.	Anak Terlantar	Orang	567	519	567	516	22.378
3.	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	Orang	340	295	340	339	235
4.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	891	962	891	963	26.778
5.	Penyandang Disabilitas	Orang	2.656	2.736	2.625	2.625	2.809
6.	Pemulung	Orang	200	17	200	21	0
7.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	299	335	299	349	25
8.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	10	12	10	11	11
9.	Korban Bencana Alam	Orang	16	14	16	12	11
10.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang	972	1.088	972	950	143
11.	Fakir Miskin	KK	15.651	18.781	17.839	44.677	40.373
12.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	28	35	28	40	0

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja, dan

kemampuan manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan siap diterima di pasar kerja atau bekerja sebagai wirausaha.

Dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tabanan, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Memberikan berbagai pelatihan kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat
- Memberikan pembinaan dan pengawasan yang intensif kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta
- Meningkatkan hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja

Berikut perkembangan kinerja urusan ketenagakerjaan dengan beberapa indikator yang telah disepakati.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peminat pelatihan terhadap kuota pelatihan yang tersedia (pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi)	% (orang)	116,66 350	99,33 302	108,53 414	204,52 814	37,21 160
2	Persentase tenaga kerja yang diserap lapangan kerja	%	56,62	68,11	60,74	55,42	69,88
3	Persentase pengusaha memberi perlindungan kepada pekerja	%	80	80	80	80	80

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabanan, Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampun memenuhi pelayanan yang maksimal bagi pencari kerja dan tenaga kerja masih kurang. Peminat pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi

cukup banyak sedangkan kemampuan melatih mereka masih kurang. Begitu pula, sebagian besar pelatihan-pelatihan tersebut berasal dari sumber dana APBN. Berkenaan dengan daya serap lapangan pekerjaan, sampai saat ini masih sangat jarang pemohon kartu kuning (pencari kerja) yang melapor setelah mereka berhasil diterima bekerja di suatu institusi/lembaga usaha. Dalam kaitan dengan kewajiban pemberi kerja terhadap perlindungan bagi tenaga kerjanya antara lain menyangkut upah sesuai ketentuan, kewajiban mengikutkan karyawannya dalam program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja masih stagnan pada capaian 80 persen.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini dibuktikan dengan ditetapkannya Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya. Selain itu Bupati Tabanan juga meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada Tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi dalam pemberdayaan perempuan. Keberhasilan ini antara lain terindikasi dari rendahnya kasus-kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tabanan. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan yang tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kondisinya semakin meningkat. IDG Kabupaten Tabanan mencapai 77,95 dari skala 0 – 100 tahun 2020.

Tabel 2.32

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	%	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03
2	Indek Perberdayaan Gender (IDG)	%	59,56	61,06	61,62	78,14	77,95

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.3. Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Tabanan sampai saat ini telah dapat dikatakan cukup berhasil yang terindikasi dari tidak adanya daerah rawan pangan. Sebagai daerah agraris, Tabanan masih merupakan sentra produksi padi, palawija, ternak, dan ikan. Dihitung dari jumlah produksi beras dan konsumsi seluruh penduduk Tabanan, produksi beras di Kabupaten Tabanan masih surplus, rata-rata 57.000 ton per tahun. Upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terus digalakkan untuk mendukung ketersediaan jenis pangan lainnya, seperti: tomat, cabe, dan sayur mayur lainnya. Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/hari	n/a	4.120	4.128	4.178	4.288
2	Ketercukupan protein	gram/kapita /hari	n/a	111,59	137,41	95,20	84,41
3	Cadangan pangan	ton	n/a	0,942	5,753	10,904	25,927
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	n/a	n/a	90,8	91,5	92,2
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	pasar	n/a	10	10	10	10
7	Ketersediaan informasi pasokan, harga,	data	n/a	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	dan akses pangan Penduduk rawan pangan	%	n/a	7	10	10	10
9	Komoditas pokok yang tidak melampaui standar koefisien harga	jenis	n/a	3	3	4	5
10	Cakupan Rumah tangga binaan dalam rangka memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	n/a	39,17	39,28	42,11	46,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan, 2020

Dari Tabel 2.33 di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan telah mencapai kondisi yang cukup baik, baik dilihat dari sisi ketersediaan maupun konsumsi. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Tabanan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sudah baik (92,2) pada tahun 2020 hampir mencapai kondisi ideal. Konsumsi protein penduduk Kabupaten Tabanan juga telah mencapai standar ideal walaupun terjadi kecenderungan penurunan dalam periode 2018-2020. Angka Kecukupan Pangan (AKP) yang direkomendasikan ± 60 gram/kapita/hari. Demikian pula dengan konsumsi energi yang telah mencapai angka di atas 4.000 kkal/perkapita/hari, melebihi standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/perkapita/hari. Walaupun dari sisi kuantitas konsumsi masyarakat telah memadai, namun perhatian yang sungguh-sungguh pada sumber gizi berimbang tetap diperlukan. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sumber karbohidrat, seperti beras secara berangsur-angsur harus dikurangi agar kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan bisa terwujud secara optimal.

2.4.2.4. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a) penyelesaian sengketa tanah garapan b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, c) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e) penerbitan izin membuka tanah, dan f) perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya berada dalam wilayah daerah.

Melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, program sertifikasi tanah atau program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan secara sungguh-sungguh di Kabupaten Tabanan. Sampai tahun 2020, telah berhasil disertifikatkan 32.000 bidang tanah dari target 67.000 bidang tanah. baik milik perorangan maupun milik desa adat. Program ini bertujuan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Pendaftaran tanah dilakukan secara serentak serta meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam satu wilayah (desa/kelurahan).

Manajemen aset, khususnya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan nampaknya membutuhkan penanganan yang lebih profesional. Masih lemahnya penanganan aset terlihat dari masih lemahnya sistem pencatatan serta tidak adanya rencana pemanfaatan aset.

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup terbagi atas 6 sub urusan, meliputi: perencanaan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tabanan tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan indeks kualitas air. Tahun 2020 IKLH dan indeks kualitas air Tabanan masing-masing sebesar 54,90 dan 14,29.

Fokus lain yang menjadi prioritas dalam penanganan isu lingkungan di Kabupaten Tabanan adalah menyangkut pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terpola, membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, serta komitmen berkelanjutan. Penanganan sampah sampai saat ini masih dominan pada pola: kumpul, angkut, dan buang. Pola ini akan menimbulkan permasalahan yang semakin membesar sejalan dengan perjalanan waktu (bom waktu). Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu melayani 8 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri). Dari cakupan pelayanan di wilayah tersebut, tahun 2020 penanganan sampah hanya mencapai 44,92 persen. Secara bertahap pola kumpul-angkut-buang, akan diganti dengan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan. Setiap desa diharapkan memiliki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sampah residu yang tidak dapat ditangani di tingkat desa.

Tabel 2.34
Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Scor	-	-	-	55,58	54,9
2	Indeks kualitas air	Scor	-	-	-	48,67	14,29
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	0,056	0,056	0,056	0,056	0.056
4.	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase sampah yang tertangani	%	17,00	18,61	46,54	59,98	44,92
6	jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA	Desa	8	8	8	7	7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencakup beberapa sub urusan, yaitu: sub urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan. Capaian kinerja berkenaan dengan kepemilikan dokumen kependudukan telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kepemilikan kartu keluarga dan e-KTP telah mencapai angka di atas 90 persen, sedangkan kepemilikan akte perkawinan dan akte kelahiran dapat dikatakan masih rendah. Demikian juga dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih relatif rendah. Rendahnya kepemilikan akte perkawinan dan akte kelahiran terjadi karena Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) baru dimulai tahun 2012. Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP sebelum SIK diterapkan tidak mensyaratkan Akte Perkawinan. Di samping itu, pasangan yang perkawinannya dicatatkan melalui Pengadilan Agama sebagian besar tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kepemilikan KIA yang rendah

sebagian besar terjadi karena kesadaran masyarakat masih rendah. Belum ada faktor penarik dan pendorong bagi masyarakat untuk mengurus KIA.

Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, ke depan dibutuhkan upaya-upaya yang lebih inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, edukasi kepada masyarakat dan kerjasama lintas sektor. Hal lain yang perlu dibenahi dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sistem informasi kependudukan yang belum mampu menyediakan data kependudukan yang memadai untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Tabel 2.35

Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	-	80.96	91.44	92.97	94.31
2	Kepemilikan e-KTP	%	-	95.31	97.28	97.80	98.77
3	Kepemilikan Akte Kelahiran	%	-	26.94	29.87	31.47	33.50
4.	Kepemilikan Akte Perkawinan	%	-	14.40	18.23	24.51	28.48
5	Ketersediaan Sistem Informasi Kependudukan yang ter-update	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6	Kepemilikan KIA	%	-	-	-	36.68	38.21

Sumber: Disdukcapil Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengoptimalkan Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa maka langkah-langkah yang telah dilakukan adalah mendorong jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes, mendorong desa untuk berprestasi dan mendorong desa untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Kabupaten Tabanan terdiri dari 133 desa, dalam

pengembangan upaya kemandirian ekonomi, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pemanfaatan potensi desa sebagai *core business*. BUMDes telah dibantu pemerintah Kabupaten Tabanan melalui penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sejumlah 50 BUMDes di 10 kecamatan dengan *core business* pengolahan.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang memiliki BUMDes	Desa	69	86	93	108	120
2	Persentase BUMDes Aktif	%	84%	86%	93%	85%	75%
3	Jumlah desa yang menyandang predikat ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan	Desa	na	na	na	25	28
4.	Indeks Desa Membangun	Scor	na	19.641	na	102.177	102
	Kategori:	Jumlah					
	1. Mandiri	desa	133	133	133	133	54
	2. Maju	Desa					68
	3. Berkembang	Desa					11
	4. Tertinggal	Desa					-
	5. Sangat Tertinggal	Desa					-
5	Jumlah desa yang mendapatkan penyertaan modal melalui BKK	Desa	45	50	50	58	64

Sumber: DPMD Kabupaten Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara penduduk yang meninggal, lahir, masuk dan penduduk yang keluar di suatu wilayah. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berfokus pada pengendalian angka kelahiran dan meningkatkan kualitas keluarga. Tingkat keberhasilan pengendalian penduduk umumnya dinilai dari angka *Total Fertility Rate*

(TFR). TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada usia subur (15-49 tahun). TFR Kabupaten Tabanan telah menunjukkan angka yang ideal, berkisar pada angka 2,0 artinya rata-rata perempuan hamil sebanyak dua kali. Keberhasilan menekan angka kelahiran ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat, tidak adanya benturan dengan nilai-nilai adat dan agama dan mudahnya akses pelayanan keluarga berencana. Di samping mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, urusan ini juga mengemban misi meningkatkan kualitas keluarga yang tercakup ke dalam 8 fungsi keluarga. Berikut beberapa capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	Skor	n/a	n/a	n/a	2,0	2,0
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	pasang	80.463	80.463	80.947	80.859	81.311
3	Jumlah Peserta KB Aktif	pasang	56.364	58.174	58.686	59.027	67.311
4	Cakupan Peserta KB Aktif	%	72,30	72,50	73,00	81,90	82,57
5	Persentase keluarga yang telah menjalankan fungsi reproduksi, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari total jumlah keluarga yang dibina	%	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
6	Jumlah keluarga binaan	KK	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680

Sumber: Dispenduk KB Kab. Tabanan, Tahun 2020

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.37 di atas, pengendalian kelahiran dapat dikatakan sudah cukup berhasil, namun upaya-upaya untuk menguatkan peran dan kualitas keluarga masih belum dilakukan secara maksimal. Sejalan dengan perkembangan zaman, peran keluarga dalam melahirkan generasi yang sehat, berkepribadian dan berdaya saing menghadapi tantangan yang semakin berat. Oleh

karenanya, semangat mengembalikan dan memperkuat fungsi keluarga perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

2.4.2.9. Perhubungan

Urusan perhubungan yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai kondisi daerah adalah berkenaan dengan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa, angkutan penumpang serta meningkatkan interaksi antar wilayah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Tabanan secara umum terdiri dari prasarana transportasi darat. Keberadaan prasarana transportasi tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.38

Jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Angkutan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang					
	Sedan	170	155	2.718	2737	2756
	Suburban	0	0	0	4	3
	Microlet	123	114	0	113	50
	Latihan mengemudi	2	2	0	-	-
	Angkutan pariwisata	488	290	0	225	72
	Jumlah	783	561	2.718	3079	2881
2	Mobil Bus					
	Micro Bis Umum	95	117	423	380	385
	Micro Bis tidak Umum	5	17	146	188	196
	Bis Umum	141	108	226	239	233
	Bis Tidak Umum	5	5	11	218	18
	Jumlah	246	247	806	1025	832
	Total angkutan umum penumpang	1.029	808	32.845	1,044	1,029
3	Mobil Barang					
	Pick-up umum		0	2	-	2
	Pick-up tidak umum	6.956	6.602	12.435	6516	5167
	Truk ringan umum	304	275	3.365	162	67
	Truk sedang umum	583	549		837	377
	Truk berat umum	1.464	1.409		161	81
	Tangki umum	288	307		18	12
	Truk ringan tidak umum	315	282	2.479	619	561
	Truk sedang tidak umum	10	11		771	848
	Truk berat tidak umum	21	25		95	112
	Tangki tidak umum	2	2		9	11



No.	Jenis Angkutan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kereta tempelan	1	1	-	1	2
	Total angkutan barang	9.944	9.463	18.281	9192	7243

Sumber : Tabanan Dalam Angka Tahun, 2020

Dari Tabel 2.38 di atas terlihat bahwa keberadaan angkutan penumpang dengan memanfaatkan angkutan umum cenderung menurun. Minat masyarakat memanfaatkan angkutan umum untuk bepergian semakin hilang tergantikan oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi. Mulai tahun 2019, angkutan penumpang dan barang konvensional secara perlahan mulai digantikan oleh angkutan berbasis aplikasi seperti *Go-jek*, *Grab* dan sejenisnya, khususnya di lingkungan perkotaan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pemanfaatan sepeda motor oleh siswa SMP, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengembangkan angkutan siswa Trans SERASI. Program Trans SERASI mulai dioperasikan pada tahun 2014. Sampai tahun 2020 cakupan layanan Trans SERASI sudah menjangkau seluruh kecamatan dengan jumlah armada: 100 kendaraan kecil (MPU), 155 Bus Kecil dan 3 Bus Sedang. Adapun armada yang telah dioperasikan tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Armada Trans SERASI dan Siswa yang terangkut
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kecamatan yang dilayani	Jumlah Armada	Siswa yang terangkut per hari
2016	4	80 armada angkutan kota, 3 bus sedang, 4 bus kecil;	3.939
2017	7	80 armada angkutan kota, 60 bus kecil, 3 bus sedang;	10.696
2018	7	80 armada angkutan kota (MPU), 63 bus kecil dan 3 bus sedang.	12.133
2019	9	100 armada angkutan kota (MPU), 155 bus kecil dan 3 bus sedang.	15.115
2020	10	100 armada angkutan kota (MPU), 155 bus kecil dan 3 bus sedang.	15.620

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, tetapi juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wadah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi SPBE di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 sebesar 1,23 dengan predikat kurang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,82 dengan predikat baik.



Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, Tahun 2020

Gambar 2.20

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Untuk pencapaian hasil evaluasi SPBE dan mewujudkan Tabanan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun pusat pelayanan pemerintah secara virtual yaitu Tabanan *Command Center* (TCC). TCC saat ini telah mengelola 49 *website*, mengelola 23 server, 25 perangkat aktif, 12,6 Km FO mandiri, 2 wifi corner, dan 43 aplikasi seperti *smart-goverment*, *e-planning*, *e-budgeting*, LPSE, SIMDA, SIM BPHTB, SIMPEG Kepegawaian, Bank Data, Sistem Pendataan Perusahaan, Sirep, e-Sakip, e-SPTPD, Sistem Uji Kir, Sistem Informasi Investasi, e-JDIH, Info Harga Pasar, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula aplikasi pelayanan seperti pelayanan Kependudukan dan catatan Sipil “De PAON”. Adapun pendukung dari TCC berupa infrastruktur seperti tabel berikut:

Tabel 2.40

Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan

No	Capaian	Jumlah	Satuan
1	Pembangunan jaringan FO (Fiber Optik) secara mandiri	12.680	meter
2	CCTV pada area public	20	buah
3	Perangkat aktif	25	unit

4	Akses poin	91	buah
5	Bandwith	1.100	Mbps
6	Free wifi corner	2	unit
7	Free wifi BKK provinsi bali (desa adat & tempat wisata & pura)	393	titik
8	Server jaringan	22	unit
9	PD terintegrasi	25	PD

Sumber : Diskominfo Kab. Tabanan, Tahun 2020

Sejak tahun 2018 dan dilanjutkan tahun 2019, telah dibangun dua unit *free wifi corner* yaitu di pojok Lapangan Alit Saputra dan seputaran Gedung I Ketut Maria. Pemasangan alat *video conference* yaitu; pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ruang Tabanan *Comand Center*, ruang rapat bupati dan ruang rapat wakil bupati. Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Bali, pada tahun 2019 telah terpasang wifi gratis di 393 titik dengan memakai jaringan Fiber Optik sepanjang kurang lebih 1.600 Km dengan titik pemasangan antara lain; 349 titik di seluruh desa adat, 24 titik di wilayah obyek wisata dan 20 titik di seluruh puskesmas di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2020, juga telah dibangun 16 titik cctv yang berada di beberapa fasilitas publik seperti gedung I Ketut Maria, Pura Luhur Batukaru dan obyek wisata Jatiluwih. Adapun pendukung dari TCC berupa aplikasi seperti tabel berikut:

Tabel 2.41
Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan

No	Capaian	Jumlah (Buah)
1	Aplikasi	43
2	Server	23
3	Rak server	7
4	Website	49
5	Router	3
6	Firewall	3

Sumber : Diskominfo Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Kelima kewenangan tersebut adalah:

- a. Kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam.

Kewenangan ini meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi, penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

- b. Kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

- c. Kewenangan dalam penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Kewenangan ini juga mencakup pendidikan dan latihan perkoperasian.

- d. Kewenangan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Kewenangan ini mencakup: pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

- e. Kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.

Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut di atas, lembaga usaha yang giat dibina adalah koperasi. Sampai tahun 2020, terdapat 594 lembaga koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 427 koperasi (71,89 persen). Koperasi aktif dicirikan oleh koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha melayani anggotanya. Jumlah koperasi aktif di Tabanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan sehingga peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat dikatakan semakin melemah. Meskipun mulai tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Dilihat dari bidang usaha yang digeluti, koperasi yang

ada di kabupaten Tabanan terdiri dari: 23 persen koperasi simpan-pinjam, 60 persen koperasi serba-usaha, 8 persen koperasi usaha lainnya dan 8,8 % yang bergerak di sektor riil.

Tabel 2.42

Perkembangan Lembaga Usaha Koperasi di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	559	555	569	586	594
2	Jumlah Koperasi Aktif	524	448	439	418	427
3	Persentase Koperasi Aktif	93,74	80,72	77,15	71,33	71,89

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Tabanan, Tahun 2020

Selain koperasi, pelaku ekonomi yang diharapkan mampu sebagai memutar aktivitas ekonomi daerah adalah Usaha Kecil Mikro (UKM). Jumlah UKM dalam periode 2016-2020 telah berkembang dari 38.592 unit menjadi 42.702 unit. Dilihat dari sisi jumlah, peran UKM dalam menyerap tenaga kerja telah cukup besar meskipun dari sisi daya saing dan produktivitasnya UKM tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Ditengah kemampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang masih sangat terbatas, UKM diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal.

2.4.2.12. Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan dan ekonomi suatu wilayah. Ketika pelaku ekonomi melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Hal yang paling utama dengan masuknya investasi adalah meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan bergeraknya aktivitas ikutan akibat adanya usaha ekonomi tersebut.

Kabupaten Tabanan memiliki potensi penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Kondisi penanaman

modal asing di Kabupaten Tabanan selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat fluktuatif. Penanaman modal asing paling besar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 3.215.425.650.000,-. Nominal tersebut naik Rp. 2.707.106.990.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2019, penanaman modal asing mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp. 196.274.688.469,-.

Sama halnya dengan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri juga berfluktuatif. Penanaman modal dalam negeri paling besar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 12.069.378.530,-. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi Rp. 3.388.657.145.784,- hingga tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi di Tabanan masih belum menggembirakan. Oleh karenanya, upaya-upaya meningkatkan daya tarik investasi harus dilakukan secara lebih serius. Pembenahan-pembenahan dalam hal sarana-prasarana, kepastian hukum, perijinan serta promosi harus mendapat prioritas penanganan.

Tabel 2.43

Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA-PMDN)
di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun (Rp)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanaman Modal Asing	Jutaan	508.318,66	3.215.425,65	2.744.525,64	196.274,69	64.311,87
2	Penanaman Modal Dalam Negeri	Jutaan	n/a	443.833,20	12.069.378,53	3.388.657,14	2.351.033,97
Jumlah		Jutaan	508.318,66	3.659.258,85	14.813.904,17	3.584.931,83	2.415.345,84

Sumber: DPMPTSP Kab. Tabanan, 2020

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Warga negara yang berada pada kelompok usia 16 – 30 tahun termasuk dalam kelompok pemuda (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Perhatian terhadap kelompok usia muda ini mesti diberikan secara optimal mengingat mereka berada pada fase

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan kemajuan suatu daerah/bangsa. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Tabanan diarahkan pada pengembangan fisik dan mental. Pengembangan fisik dilakukan melalui pembinaan olah raga, sedangkan pengembangan mental mencakup pewadahan kegiatan-kegiatan kepramukaan, seni, dan sosial kemasyarakatan. Di samping organisasi yang bersifat formal, di Tabanan khususnya dan Bali umumnya juga terdapat organisasi kepemudaan yang di sebut Sekaa Teruna. Keberadaan organisasi ini bernaung di bawah Desa Adat yang berkiprah lebih dominan pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan seni dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan adat dan agama.

Berkenaan dengan aktivitas kepemudaan di bidang olah raga, di Kabupaten Tabanan terdapat beberapa cabang olah raga yang mendapat pembinaan, yaitu: *woodball*, judo, silat, bulutangkis dan vovinam. Berbagai *event-event* olah raga juga sering diadakan di Kabupaten Tabanan. Tahun 2018 Tabanan dipercaya sebagai penyelenggaraan *Asian Vovinam Championship* yang diikuti 16 negara. Tahun 2019 Kabupaten Tabanan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan PORPROV Bali. Dalam *event* Porprov tahun 2019 Tabanan mampu memperbaiki rangking dari rangking 9 menjadi rangking 5 dari 9 kabupaten/kota dengan perolehan 126 medali (29 medali emas, 32 medali perak dan 65 medali perunggu).

Tabel 2.44

Ranking dan Perolehan Medali Kabupaten Tabanan
dalam PORPROV Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ranking dalam Porprov	Ranking	-	IX	-	V	-

2	Perolehan Medali	Bh	-	61	-	126	-
---	------------------	----	---	----	---	-----	---

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.2.14. Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan daerah dan usaha, penelitian dan keperluan lainnya.

Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri. Statistik dasar dan sektoral merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Statistik sektoral yang telah dilaksanakan tertuang dalam buku Data dan Informasi Statistik Kabupaten Tabanan dan buku Pengolahan dan Analisis Data Informasi Statistik Daerah, dimana ruang lingkup buku ini adalah mendata, mengolah, menganalisa dan

menyajikan data-data statistik sektoral yang sampai tahun 2020 data statistik sektoral baru mencakup 23 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:

- 1) Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- 2) Pendidikan.
- 3) Pariwisata.
- 4) Budaya.
- 5) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- 6) Pertanian.
- 7) Perhubungan.
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 9) Kesehatan.
- 10) Perikanan.
- 11) Pengendalian Penduduk dan KB.
- 12) Koperasi.
- 13) Kependudukan.
- 14) Penanggulangan Bencana.
- 15) Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- 16) Perijinan dan Penanaman Modal.
- 17) Perindustrian dan Perdagangan.
- 18) Perpustakaan dan Arsip.
- 19) Tenaga Kerja.
- 20) Sosial.
- 21) Sekretaris Dewan.
- 22) Lingkungan Hidup.
- 23) Komunikasi dan Informatika.

2.4.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih.

Setiap pemerintah daerah kota/kabupaten yang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib melaksanakan unsur keamanan SPBE dalam tata kelola SPBE, dimana dalam penerapan keamanan SPBE pemerintah daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi domain keamanan dalam arsitektur SPBE nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang keamanan siber yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai domain keamanan SPBE BSSN bertugas untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE Nasional.

Untuk keamanan sumber daya pendukung SPBE di pemerintah daerah, telah dibentuk bidang Persandian yang menangani penanganan pengamanan informasi SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing pemerintah daerah. Persandian adalah kegiatan pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Sedangkan pengamanan informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan

yang diperlukan untuk mewujudkan Keamanan Informasi. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan informasi SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tabanan, saat ini sedang berproses untuk mendapatkan sertifikat elektronik dari BSSN BSrE, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status hukum para pihak dalam transaksi elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan setiap data dan informasi yang dihasilkan dari transaksi elektronik.

Selanjutnya di tahun anggaran 2021, Persandian merencanakan untuk menyelenggarakan *Information Technology Security Assesment* (ITSA) terhadap beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Pemkab Tabanan dengan assessor dari BSSN sebagai salah satu langkah dari persandian untuk pengamanan informasi SPBE.

2.4.2.16. Kebudayaan

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta melalui proses belajar. Oleh karena kebudayaan meliputi sistem ide atau gagasan dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan tersebut bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan manusia. Di samping berwujud benda, kebudayaan dapat berupa pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain.

Fokus seni budaya dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung dan data situs yang ditangani. Adapaun capaian fokus tersebut dapat dilihat pada tabel 2.45 dibawah ini:

Tabel 2.45
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah grup kesenian	1.360	1.357	1.361	1.361	1.365
Jumlah gedung kesenian	1	1	2	2	2
Data situs yang ditangani	44	44	44	56	56

Sumber: Dinas Kebudayaan, tahun 2020

Jumlah grup kesenian di tahun 2016 sebanyak 1.360 kelompok, sempat mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 1.357 kelompok, namun mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.365 kelompok. Hambatan peningkatan pembentukan kelembagaan grup disebabkan karena rendahnya kemauan masyarakat dalam upaya pelestarian seni, khususnya di bidang seni terlebih pada kalangan remaja. Disamping itu sarana prasarana pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan masih terbatas, hingga tahun 2017 Kabupaten Tabanan baru memiliki 1 gedung kebudayaan dan mulai tahun 2018 hingga sekarang sudah memiliki 2 gedung kebudayaan yaitu Gedung Kesenian I Ketut Maria dan *Stage* Garuda Wisnu Kencana (GWS). Selain itu, angka situs yang tertangani sampai tahun 2018 sebanyak 44 situs meningkat di tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi 56 situs.

2.4.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan yang wajib dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan mencakup sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Dari ke empat sub urusan

tersebut, hanya dapat dilakukan sub urusan pembinaan perpustakaan. Sasaran pembinaan perpustakaan ditujukan pada aparatur di internal perangkat daerah, pengelola perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa.

Dalam upaya menunjang program pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan minat baca masyarakat merupakan salah satu aspek yang harus terus digalakkan. Minat baca masyarakat Tabanan secara umum dapat dinyatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca, dan sejenisnya yang selalu ramai dikunjungi. Dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan daerah, indeks kepuasan pemustaka pengguna layanan mengalami peningkatan dari 60 persen pada tahun 2017 menjadi 70 persen pada tahun 2020. Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46

Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indek kepuasan pemustaka	-	60 %	60 %	64%	70%
Jumlah perpustakaan	446	446	446	446	446
Penyelenggaraan e-Perpustakaan	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, tahun 2020

2.4.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip. Arsip merupakan suatu bukti dari keseluruhan kegiatan yang ada pada sebuah organisasi. Di dalam arsip terkandung banyak sekali informasi, seperti: sejarah berdirinya suatu organisasi, kegiatan-

kegiatan yang telah dijalankan dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, arsip dijadikan sebagai pusat ingatan atau rekaman, informasi dan juga sebagai pusat sejarah.

Salah satu cara untuk menciptakan *good corporate governance* adalah dengan melakukan pengelolaan arsip secara baik atau tertib. Pengelolaan arsip secara profesional sangatlah penting di era globalisasi yang teknologi kian pesat perkembangannya. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, pemerintah dituntut untuk mengelolanya secara baik. Penanganan yang paling mendasar dari pengelolaan arsip adalah ketepatan dalam menggunakan kode klarifikasi surat. Tanpa menggunakan kode klarifikasi yang tepat, tentu arsipnya akan kacau. Jika dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan informasi, dokumen tersebut akan sulit ditemukan. Oleh karena itu sangat penting bagi organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tertib arsip. Persentase arsip yang bisa diselamatkan masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena belum adanya tenaga arsiparis di setiap perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2020 arsip yang terselamatkan baru mencapai 37 persen. Perangkat Daerah yang telah dapat dikatakan tertib arsip baru mencapai 27,5 persen sampai dengan tahun 2020. Data kinerja urusan kearsipan secara rinci bisa dilihat pada tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47

Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase arsip yang terselamatkan	-	-	20%	37%	37%
Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	-	-	4,5 %	27,5%	27,5%
Hasil Audit Kearsipan	n/a	18,4	29,8	44,2	44,2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, tahun 2020

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten terbagi menjadi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabupaten Tabanan memiliki kedua potensi tersebut yang sangat mungkin diberdayakan untuk meningkatkan sumber ekonomi daerah. Garis pantai sepanjang ± 38 km dengan potensi perikanan tangkapnya merupakan sumberdaya yang harus dilestarikan. Potensi perikanan air tawar juga cukup besar karena Tabanan memiliki sumber-sumber air permukaan yang relatif cukup banyak. Walaupun potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Tabanan cukup banyak, sampai saat ini masih sangat terbatas jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. Sebagian besar nelayan atau pembudidaya ikan menjadi mata pencaharian tambahan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa capaian tabel di bawah ini.

Tabel 2.48

Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan budidaya	kg	3.268,1	3.314,4	3.390,9	3.071,3	3.096,3
2	Produksi perikanan tangkap (SDGs 14.2.1)	kg	672,0	677,2	698,8	725,7	754,6
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	%	1,8	1,3	2,5	1,2	1,4
4	Produksi benih	ekor	13.316.700	15.500.000	16.015000	15.600.000	16.407.000
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	klp /tahu n	54	60	71	96	70

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Cakupan bina kelompok nelayan	klp /tahun	43	45	52	52	56
7	Angka Konsumsi Ikan (SDGs 2.2.2(c))	kg/kep/tahun	29,6	29,9	30,6	31,2	31,4

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Tabanan, Tahun 2020

Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tabanan masih terbilang rendah, bahkan perikanan tangkap belum mencapai 1 ton per tahun. Demikian pula, peningkatan produksi dari tahun ke tahun masih sangat rendah (rata-rata kurang dari 2% per tahun). Walaupun tingkat produksi rendah, kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan kecenderungannya terus meningkat. Peluang usaha yang cukup menjanjikan di sektor perikanan dan mulai diminati oleh masyarakat adalah dalam usaha perbenihan. Hal ini terlihat dari produksi benih ikan yang terus meningkat.

Dari beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan potensi ekonomi di sektor perikanan belum berkembang secara baik dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Tabanan secara nyata. Ke depan, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama mengatasi persaingan usaha dari daerah lain.

2.4.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan penggerak utama perekonomian Bali dan Tabanan. Pariwisata mampu mendorong berkembangnya usaha-usaha lain karena dampak ikutan yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata sangat luas. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Tabanan sejak tahun 2017 mulai menggeser peran sektor pertanian. Kabupaten Tabanan memiliki berbagai daya tarik wisata dan desa wisata yang dapat sangat potensial sebagai pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Tabanan memiliki 25 obyek daya tarik wisata (DTW) dan 24 Desa Wisata. Perkembangan obyek DTW dan Desa Wisata dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata
di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	DTW	Obyek	25	25	25	25	25
2	Desa Wisata	Obyek	14	16	23	23	24
Jumlah		Obyek	39	41	48	48	49

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tabanan, Tahun 2020

Di samping sebagai generator ekonomi, pariwisata Bali juga mengemban misi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tabanan secara terus-menerus melakukan intervensi, dalam bentuk penataan daya tarik, pembangunan infrastruktur penunjang, pelaksanaan *event-event* seni budaya dan pelaksanaan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tabanan. Upaya-upaya tersebut terlihat dari kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 – 2020

No	Wisatawan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nusantara	Orang	2.784.583	2.577.397	2.667.460	2.563.908	956.018
2	Mancanegara	Orang	2.232.526	2.756.426	2.684.467	2.403.516	353.318
Jumlah		Orang	5.017.109	5.333.823	5.351.927	4.967.424	1.309.336

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tabanan, Tahun 2020

Pada tahun 2020 tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Tabanan sebesar 1,3 juta orang, menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagai dampak adanya pandemi *Covid19* dan kondisi ekonomi global mengalami penurunan. Sangat disadari, pariwisata sangat rentan terhadap perubahan kondisi yang terjadi, baik di daerah tujuan wisata maupun tempat asal wisatawan. Isu-isu yang sering menjadi momok menakutkan dalam industri pariwisata

antara lain teroris dan gangguan keamanan, bencana alam, penyakit menular, gejala politik, dan lain-lain. Dengan demikian pengembangan ekonomi Tabanan tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, melainkan potensi ekonomi lainnya seperti pertanian harus digarap dan tidak dikorbankan oleh pengembangan pariwisata. Integrasi pertanian-pariwisata harus diwujudkan melalui regulasi dan program-program pembangunan yang inovatif.

2.4.3.3. Pertanian

Kabupaten Tabanan memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertanian, baik dilihat dari penggunaan lahan maupun jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani. Jadi, faktor kunci pengembangan ekonomi Tabanan terletak pada kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor ini. Sebagai gambaran umum dari perkembangan pertanian di Kabupaten Tabanan, dapat disimak tabel di bawah ini.

Tabel 2.51

Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi padi	ton	216.547	211.178	211.935	211.243	212.312
2.	Produktivitas padi	ku/ha	56,10	57,37	57,43	55,81	64,24
3.	Luas Binaan Padi Ramah Lingkungan/ Organik	ha	7,7	18,02	10,72	9,95	10
4.	Produktivitas Padi Ramah Lingkungan /Organik	ku/ha	50,05	70,13	69,68	64,67	60
5.	Indeks Pertanaman	%	214.824	177.277	178.943	171.717	190.999
6.	Produksi Jagung	ton	7.369	8.691	4.889	1.419	9.133
7.	Produksi Kedelai	ton	1.280	1.107	332	9.482	153
8.	Produksi Bawang merah	ku	1.963	813	10.974	151	5.230

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Produksi Cabe	ku	13.531	21.439	9.816	7.253	73.679
10.	Produksi Manggis	ton	29.345	1.104	44.550	13.391	374.458
11.	Produksi Kopi	ton	6.101,50	5.331,31	5.332,08	5.500,37	5.800,90
12.	Produktivitas Kopi	kg/ha	744	725	749	732	711
13.	Produksi Cengkeh	ton	668,37	0	0	0	206.33
14.	Produksi Kelapa	ton	274,07	45,4	43,13	239,04	113
15.	Produksi Kakao	ton	2.067,18	4.807,03	851,50	895,03	1084.59
16.	Populasi Sapi Bali	ekor	50.906	45.268	43.842	43.012	42.772
17.	Populasi Kambing	ekor	2.307	2.215	1.819	1.079	1.528
18.	Populasi Ayam ras pedaging	ekor	2.683.994	2.917.265	2.969.975	2.222.085	2.080.540
19.	Populasi Ayam ras petelur	ekor	1.964.228	1.947.398	1.275.388	1.004.946	855.662
20.	Produksi telur	ton	3.455.120	4.516.220	3.835.120	1.913.000	16.796.36

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tabanan, Tahun 2020

Jika disimak Tabel 2.51 di atas, hampir seluruh komoditas utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) mengalami penurunan produksi. Demikian pula terjadi penurunan populasi ternak (sapi, kambing, dan ayam pedaging). Produksi telur juga mengalami kondisi yang sama. Kuantitas penurunan rata-rata mencapai lebih dari 50 persen dalam periode 2016-2020. Perkembangan di atas menjadi peringatan yang sangat keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam memajukan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Tabanan.

2.4.3.4. Perdagangan

Aktivitas ekonomi yang mengatur arus barang dan jasa di Kabupaten Tabanan periode 2016-2020 baik dari ketersediaan maupun pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik. Hal ini

terlihat dari realisasi capaian kinerja perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Perdagangan Dalam Negeri utamanya untuk komoditas bahan makanan pokok, sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Tabanan harga barang tidak mengalami fluktuasi harga yang tinggi. Demikian juga harga komoditi hasil pertanian relatif stabil. Harga beberapa komoditi bahan bangunan sepanjang tahun 2020 secara umum relatif stabil, namun ada beberapa komoditi harganya mengalami peningkatan signifikan, seperti kayu. Transaksi perdagangan dalam kurun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan.

Perdagangan Luar Negeri di Kabupaten Tabanan meliputi ekspor dan impor. Perkembangan nilai ekspor non migas selama periode tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut adalah sebesar Rp. 66.387.456.445, meningkat menjadi Rp. 70.848.138.227,00 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 63.637.589.408,00. Dalam periode tahun yang sama, impor yang dilakukan pelaku usaha di Tabanan berturut-turut sebesar 868.917,05 US \$ (tahun 2018), menurun menjadi 330.246,25 US \$ (2019), dan tahun 2020 impor kembali meningkat menjadi 773.614,34 US \$ dan 23.290 Euro. Perluasan jaringan pemasaran komoditi-komoditi unggulan dan barang jadi dan setengah jadi merupakan tantangan yang harus mampu difasilitasi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas perdagangan yang terjadi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana-prasarana pendukungnya, terutama keberadaan pasar. Di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2020, terdapat 13 pasar rakyat/tradisional. Kondisi ketiga belas pasar tersebut belum seluruhnya dalam kondisi bersih dan nyaman. Sampai saat ini baru 6 (enam) pasar tradisional/pasar rakyat yang mendapat penanganan melalui kegiatan Revitalisasi Pasar yang

bersumber dari dana TP dan DAK. Adapun pasar yang telah mendapat bantuan perbaikan adalah: Pasar Kediri, Pasar Bajera, Pasar Pupuan, Pasar Baturiti, Pasar Marga, dan Pasar Penebel. Berkembangnya pasar-pasar berjejaring seperti Alfa Mart, Indo Mart, dan sejenisnya merupakan pesaing yang berat bagi pasar-pasar tradisional. Ke depan dibutuhkan regulasi pemerintah untuk membatasi izin pasar modern dengan ketentuan jarak minimal dengan pasar tradisional, serta diperlukan upaya-upaya untuk secara terus-menerus melakukan peningkatan kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional.

2.4.3.5. Perindustrian

Kondisi industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam periode tahun 2016-2020 IKM mengalami peningkatan, baik dilihat dari jumlah sentra maupun jumlah unit usahanya. Jumlah unit usaha IKM pada tahun 2020 sebanyak 959 unit usaha dengan jumlah serapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 8.219 orang. Demikian juga dengan perkembangan nilai investasi pada IKM mengalami peningkatan dari Rp.493.202.819.000 menjadi Rp. 178.845.910.365 dalam periode tahun 2016-2020. Dilihat dari perkembangan nilai produksinya, IKM di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan dari Rp. 536.348.830.000 menjadi Rp. 830.970.364.000 dalam periode tahun yang sama.

Tabel 2.52
Perkembangan Industri Kecil (IKM) di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah IKM	unit	805	878	938	943	959
2	Tenaga Kerja	orang	6.838	7.606	8.074	8.104	8.219
3	Nilai investasi	Ribuan Rp	493.202 .819	542.345 .198	589.885 .523	591.294 .123	178.845. 910.365
4	Nilai Produksi	Ribuan Rp	536.348 .830	567.236 .330	586.989 .764	589.819 .764	830.970. 364

Sumber: Disperindag Kabupaten Tabanan, Tahun 2020

Dari sisi pertumbuhan, dapat dikatakan IKM di Tabanan sudah relatif berkembang, namun perlu dipacu IKM-IKM yang memanfaatkan bahan baku lokal Tabanan. IKM yang berbasis pengolahan hasil pertanian perlu menjadi pilihan pemerintah dalam pembinaan agar terjalin rantai produksi yang kuat antar pelaku usaha di Kabupaten Tabanan. Nilai tambah komoditas yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Tabanan (pertanian) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.4.3.6. Transmigrasi

Program Transmigrasi merupakan program pilihan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Program Transmigrasi didasari atas UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Transmigrasi bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib. Secara umum Transmigrasi ada 3 jenis yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Spontan/Swakarsa dan Transmigrasi Bedol Desa. Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan kabupaten/kota terdiri dari tiga sub urusan yaitu untuk Perencanaan Kawasan Transmigrasi melakukan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota, Pembangunan Kawasan Transmigrasi melakukan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Pemerintah Kabupaten Tabanan setiap tahun selalu memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengikuti program transmigrasi atas dasar keinginan pribadi melalui jalur Transmigrasi

Umum yaitu program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui kemenakertrans (kementerian tenaga kerja dan transmigrasi). Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memenuhi minat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan kepada warganya untuk bertransmigrasi. Sepanjang tahun 2016-2017 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memberangkatkan 19 KK dengan jumlah 65 jiwa ke lokasi transmigrasi yang tersebar di Kabupaten-Kabupaten di Sulawesi. Untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ada penempatan transmigrasi karena oleh Pemerintah Provinsi Bali kuota penempatan transmigrasi dialokasikan untuk kabupaten lain di Bali.

Tabel 2.53

Jumlah transmigran dan Lokasi Transmigrasi di Tabanan
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Transmigran (KK/Jiwa)	15/47	4/18	-	-	-
2.	Lokasi Penempatan Transmigran	Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-

Sumber: Disnaker Kab. Tabanan, 2020

2.4.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

2.4.4.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah sebagai langkah awal dimulainya proses pembangunan itu sendiri. Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberi tonggak penguatan pentingnya perencanaan dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah upaya mengurai tahapan pencapaian tujuan pembangunan

dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dengan melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tabanan telah dapat dilaksanakan memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana jangka panjang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga ditetapkan dengan peraturan daerah yang kemudian setiap tahun diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Perencanaan pembangunan tingkat perangkat daerah dan desa telah memenuhi peraturan perundangan. Meskipun ada hal yang perlu dilakukan perbaikan yakni bagaimana membangun sinergisitas dan sinkronisasi setiap jenjang pemerintahan mulai rencana pembangunan nasional hingga rencana pembangunan desa. Kendala terbesar yang dihadapi dalam proses perencanaan adalah ketersediaan data yang presisi di setiap element pembangunan. Hal ini telah menjadi kendala lama yang belum terselesaikan dan sangat mempengaruhi kualitas perencanaan. Data yang tidak akurat dan presisi menyebabkan analisa capaian dan kebutuhan pembangunan akan mengalami deviasi.

2.4.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, cepat dan bersih menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan selama 6 tahun terakhir telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip sistem akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Namun upaya perbaikan terus dilakukan mengingat

peraturan pengelolaan keuangan terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi nasional.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Upaya ini mendapat respon positif sehingga Opini BPK atas LKPD sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 telah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun capaian Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tabanan selama tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.54

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Bakeuda Kab. Tabanan, Tahun 2020

Jika dilihat ke dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Tabanan selalu menetapkan APBD tepat waktu dan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Penggunaan dan pelaporan keuangan pun juga telah memenuhi tata kelola yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya kemampuan finansial daerah dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Ke depan fokus yang penting dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan fiskal pembangunan daerah terlebih setelah pandemi *Covid-19* yang meluluhlantahkan perekonomian Bali.

2.4.4.3. Kepegawaian

Sebagai tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan penyesuaian susunan organisasi Perangkat Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyesuaian struktur organisasi mengakibatkan penyesuaian jumlah jabatan per eselon. Tabel 2.55 menunjukkan jumlah PNS yang menduduki jabatan baik struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum dari tahun 2016-2020.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah menurun dari 37 pada tahun 2016 menjadi 35 pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 33 orang dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 naik menjadi 34 orang. Jumlah pejabat administrator cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.55

Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum,
dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu
pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Jabatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Fungsional Tertentu	5527	4658	4300	4312	4031
Fungsional Umum	2674	2146	2145	2295	2199
Struktural	899	902	835	731	685
Eselon V	34	34	31	0	0
Eselon IV	655	665	616	530	498
Eselon III	173	168	155	167	153
Eselon II	37	35	33	34	34
Eselon I	0	0	0	0	0
Jumlah/Total	9.100	7.706	7.280	7.338	6.915

Sumber: BKPSDM Kab. Tabanan, Tahun 2020

Dari sisi penegakan disiplin pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan telah melaksanakan pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 8 (delapan) penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan: 1 (satu) Surat Keputusan yang merupakan hukuman disiplin teguran tertulis.
2. Hukuman disiplin berat: 7 (tujuh) Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebanyak 3 (tiga) orang Surat Keputusan.
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 1 (satu) orang Surat Keputusan.
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 3 (tiga) orang Surat Keputusan.

Dari 8 penjatuhan hukuman disiplin tersebut 25% (2 kasus) merupakan pelanggaran kasus tindak pidana korupsi dan 25% (2 kasus) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan

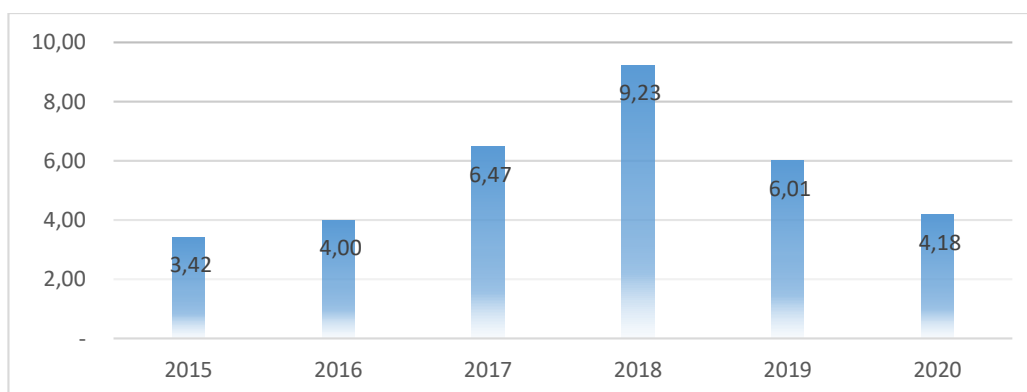
mentaati jam kerja. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 persentase penjatuhan hukuman disiplin mengalami fluktuasi yang tidak jauh berbeda, dari tahun 2019 ke tahun 2020 persentase mengalami penurunan sebesar 12,5% (dari 2 kasus di tahun 2019 menjadi 1 kasus di tahun 2020).

Dibandingkan dengan jumlah PNS per tahunnya bahwa persentase penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2016 sebesar 0.021% (2 kasus dari 9.100 PNS), tahun 2017 sebesar 0.025% (2 kasus dari 7.706 PNS), tahun 2018 sebesar 0% (0 kasus dari 7.280 jumlah PNS), tahun 2019 sebesar 0.027% (2 kasus dari 7.338 PNS), tahun 2020 sebesar 0.014% (1 kasus dari 6.915 PNS).

2.4.4.4. Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan kepegawaian merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Bupati Tabanan nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Pembinaan difokuskan pada peningkatan disiplin dan kapabilitas pegawai. Peningkatan kapabilitas pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun pemerintah provinsi.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dari 3,42 pada tahun 2015 menjadi 4,0 pada tahun 2016 dan 6,47 pada tahun 2017 meningkat menjadi 9,23 pada tahun 2018 namun terus mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 6,01 dan tahun 2020 menjadi 4,18.



Sumber : BKPSDM Kab. Tabanan, tahun 2020

Gambar 2.21.

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020

Selain pelatihan formal pelatihan juga diberikan kepada pejabat berupa Diklatpim II, III dan IV. Persentase pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan dalam Tabel 2.56.

Tabel 2.56

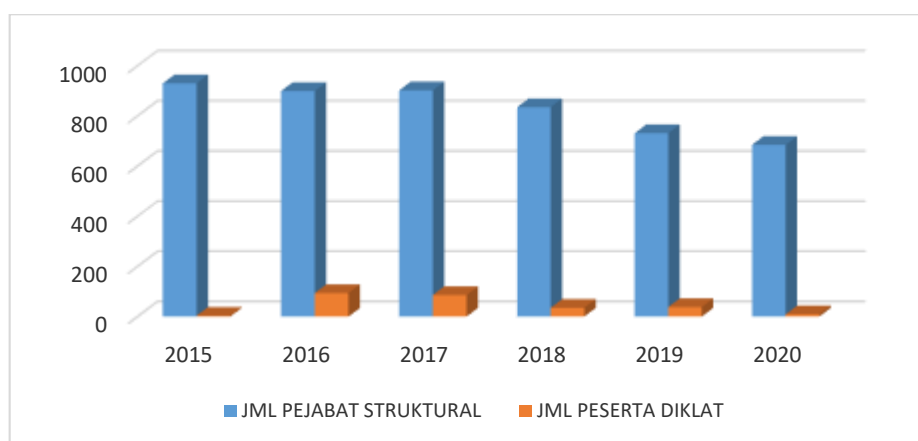
Persentase Pejabat yang Telah Melaksanakan Diklatpim Eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
10,45	9,53	4,19	5,19	1,31

Sumber : BKPSDM Kab. Tabanan, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.56 di atas berdasarkan jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten Tabanan, pada tahun 2016 persentase Pejabat yang Telah Melaksanakan Diklatpim baru mencapai 10,45% yaitu dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 94 orang dari 899 orang pejabat struktural. Tahun 2017 sebesar 9,53 % dengan jumlah peserta Diklat 86 orang dari 902 orang pejabat struktural. Tahun 2018 mencapai 5,19%

dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 35 orang dari 835 orang pejabat struktural. Tahun 2019 sebesar 5,19% dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 38 orang dari 731 orang pejabat struktural. Tahun 2020 menjadi persentase terkecil dalam lima tahun terakhir yaitu 1,31% dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 9 orang dari 685 orang pejabat struktural. Adapun perbandingan jumlah tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Sumber : BKPSDM Kab. Tabanan, Tahun 2020

Gambar 2.22

Perbandingan pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

2.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan pada pemerintah kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi penelitian dan pengembangan yaitu: menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten; menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten; melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten; fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten; melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten.

Untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Tabanan memfasilitasi perangkat daerah dan masyarakat dalam penerapan inovasi daerah dan menyusun kebijakan dalam penerapan inovasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat *event* Festival KITA (Kreativitas dan Inovasi Tabanan) yang dimulai dilaksanakan tahun 2020.

2.4.4.6 Pengawasan

Pengawasan adalah upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil dalam pembangunan daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pengawasan berperan aktif dalam menjaga pengelolaan keuangan yang berujung pada Opini WTP.

Dalam hal pengawasan terhadap aparatur dilakukan melalui pengawasan pelaporan harta kekayaan ASN dan harta kekayaan pejabat negara. Disamping itu juga dilakukan pengawasan terhadap pengaduan laporan dari masyarakat. Wajib lapor LHKPN yang dimulai tahun 2019 tercatat 31 pejabat sudah melaporkan harta kekayaannya, meningkat menjadi 38 di tahun 2020. Untuk pengaduan SP4N-LAPOR yang juga dimulai tahun 2019 tercatat 19 pengaduan meningkat menjadi 27 pengaduan di tahun 2020.

Sementara untuk LHKASN yang baru dimulai tahun 2020 tercatat 654 ASN sudah melaporkan harta kekayaannya. Secara detail disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57

Wajib Lapor LHKPN, LHKASN dan SP4N-LAPOR di
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Lapor LHKASN	-	-	-	-	654
Pengaduan SP4N-LAPOR	-	-	-	19	27
Wajib Lapor LHKPN	-	-	-	31	38

Sumber : Inspektorat Kab. Tabanan, Tahun 2020

Pencapaian Opini WTP selama 6 kali berturut-turut bukan merupakan hasil akhir dari sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi catatan BPK untuk diperbaiki dan terus disempurnakan. Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen agar catatan BPK atas LKPD setiap tahun semakin berkurang serta melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi. Berikut disajikan tabel capaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK-RI sejak tahun 2016-2020.

Tabel 2.58

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD
Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Uraian	Temuan LKPD	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Persentase (%)
2016	7	22	22	100
2017	9	31	31	100
2018	12	17	17	100
2019	7	10	10	100

Uraian	Temuan LKPD	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Persentase (%)
2020		Masih dalam proses pemeriksaan BPK		

Sumber : Inspektorat Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.4.7 Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kecamatan. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan sebagai landasan untuk bekerja dalam mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif tentang kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam melakukan pengukuran IKM masyarakat dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan.

Tabel 2.59

Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Per Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tabanan	NA	NA	Baik (82,52)	Sangat Baik (94,76)	Baik (86,31)
2	Kerambitan	NA	NA	Baik (80,18)	Baik (80,18)	Baik (80,3)
3	Selemadeg	NA	Baik (82,20)	Baik (82,33)	Baik (82,97)	Baik (83,11)
4	Selemadeg Timur	Baik (78,17.)	Baik (82,52)	Baik (82,75)	Baik (84,45)	Sangat Baik (89,36)
5	Selemadeg Barat	Baik (77,30)	Baik (79,22)	Sangat Baik (90,95)	Sangat Baik (90,97)	Sangat Baik (90,99)
6	Pupuan	Baik (76)	Baik (77)	Baik (84,46)	Baik (84,47)	Baik (85,08)
7	Marga	NA	NA	Baik (81,25)	Baik (81,25)	Baik (81,25)
8	Kediri	NA	NA	Baik (78,31)	Baik (79,75)	Sangat Baik (90,75)
9	Penebel	NA	Baik (77,13)	Baik (83,98)	Baik (82,9)	Baik (83,09)
10	Baturiti	NA	NA	Baik (80)	Baik (82,1)	Baik (84,6)

2.4.4.8 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Tabanan tahun 2020 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 32 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal semakin menunjukkan peningkatan hingga mencapai angka 100 persen sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen

seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tabanan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.60
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK KRIMINAL		
		Kasus	Tertangani	RATIO (%)
1	2016	161	131	81,37
2	2017	187	148	79,14
3	2018	189	158	83,60
4	2019	182	135	74,18
5	2020	32	32	100

Sumber : Polres Tabanan 2020

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Tabanan relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Berikut pada tabel 2.61 disajikan data parpol dan ormas maupun hasil pengawasan terhadap orang asing di Kabupaten Tabanan, dan juga rekomendasi penelitian.

Tabel 2.61
Jumlah Parpol, LSM, Hasil Pengawasan Orang Asing dan
Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Parpol	15	15	15	15	16
LSM (Ormas)	155	180	175	173	152
HPOA (Hasil Pengawasan Orang Asing)	-	68	17	67	67



Rekomendasi Penelitian	-	619	369	385	434
------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.4.4.9 Sekretariat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah menetapkan kembali Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang urusan. Capaian kinerja yang telah berhasil diraih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan seperti di bawah ini.

1. Hukum dan perundang-undangan

Dalam kurun waktu 2016-2020 telah berhasil menyelesaikan sebanyak 98 buah Peraturan Daerah (Perda), dan 410 buah Peraturan Bupati serta 2.640 buah Keputusan Bupati. Penanganan sengketa hukum yang ada sebanyak 3 perkara, yang dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara, dan sisanya dalam proses banding. Sedangkan dalam rangka penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak ada, Jaringan Informasi Hukum (JDIH) telah melaksanakan proses input baik pusat maupun daerah sebanyak 142 buah.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan. Standar Pelayanan (SP) tersebar pada 26 OPD tahun 2017, SOP tahun 2018 sebanyak 1.500 buah, SINOVIK tahun 2019 sebanyak 7 Inovasi dan SPM 12 kali pelaporan.

2.4.4.10 Sekretariat DPRD

Peran lembaga Sekretariat Dewan dalam menunjang tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah secara teknis operasional dalam bidang fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan pembangunan sangatlah strategis. Keberhasilan Sekretariat Dewan dalam menunjang tupoksi DPRD Kabupaten Tabanan sejak tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.62.

Tabel 2.62

Jumlah Perda Yang Berhasil Disahkan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda yang disahkan terkait fungsi legislasi	34	10	12	17	15
2	Jumlah kunjungan pimpinan dan anggota	23	23	23	22	21

Sumber: Setwan Kabupaten Tabanan, tahun 2020

2.5 Aspek Daya Saing

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Daya beli masyarakat dapat digambarkan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Daya beli masyarakat Tabanan masih berada dibawah rata-rata provinsi Bali tahun 2019, daya beli masyarakat Tabanan tahun 2019 sebesar Rp. 1,198 juta lebih, menurun jika dibandingkan kondisi tahun 2018, namun meningkat pada Tahun 2020 menjadi Rp. 1,303 juta lebih. Perkembangan daya beli masyarakat Tabanan ditunjukkan pada gambar berikut



Sumber : BPS Kab. Tabanan, 2021

Gambar 2.23

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)
Per Bulan Di Kabupaten Tabanan 2015–2020

2.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP Tabanan mengacu pada NTP Provinsi Bali, berdasarkan tabel 2.63 NTP Tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan capaian terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 93,56 artinya petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Pada kondisi ini pendapatan petani mengalami penurunan dan cenderung lebih kecil sementara tingkat pengeluaran petani semakin tinggi.

Tabel 2.63

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,74	103,93	103,87	104,93	93,56

Sumber: BPS Provinsi Bali, Tahun 2021

2.5.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut. Data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen rata-rata pengeluaran masyarakat Tabanan dialokasikan untuk kebutuhan non makanan (Tabel 2.64)

Tabel 2.64

Persentase Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Komoditas, Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2020

Kelompok Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	44,90	46,63	46,34	46,47	44,85
Bukan Makanan	55,10	53,37	53,66	53,53	55,15
Total	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

2.5.1.4. Rasio Net Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Keterbukaan ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi regional, bukan sebaliknya keterbukaan ekonomi justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat karena kalah bersaing. Dari Tabel 2.58 terlihat bahwa rasio ekspor impor pada tiga tahun terakhir masih stagnan pada kisaran 0,11 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,08 . Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap produk

barang/jasa yang memiliki daya saing khususnya pada sektor pertanian.

Tabel 2.65

Rasio Net Ekspor Impor Barang Jasa terhadap
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (Milyar Rupiah)

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa	PDRB	Rasio
2016	1.316,03	13.420,55	0,10
2017	1.523,80	14.141,72	0,11
2018	1.589,33	14.951,72	0,11
2019	1.670,98	15.784,54	0,11
2020	1.240,12	14.815,80	0,08

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021

2.5.1.5. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Angka kejahatan tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan (tabel 2.66), semakin tingginya tingkat kriminalitas akan berdampak pada turunnya iklim investasi. Oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tabanan.

Tabel 2.66

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana di Kabupaten Tabanan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	292	197	183	207	157
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100,000 Penduduk	66,59	44,67	41,26	46,44	35,04
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	85,62%	79,70%	83,06%	75,36%	95,54%
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana	30°00'00"	44°28'01"	47°52'08"	42°52'07"	55°47'46"

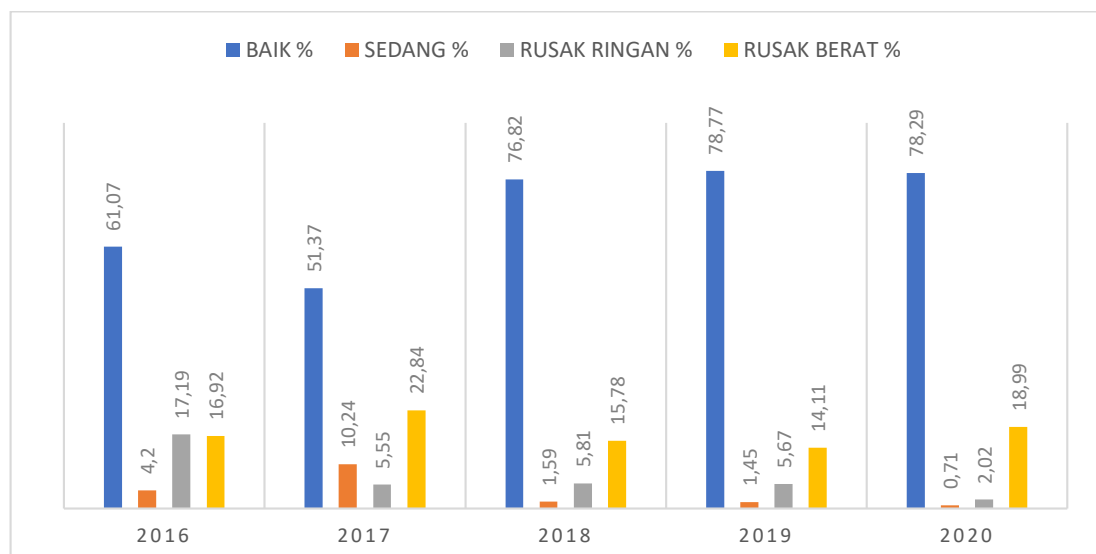
Sumber: BPS Provinsi Bali, Tahun 2021

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan di sektor industri dan usaha kecil menengah dan pertanian yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.5.2.1 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Tabanan meliputi jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Tabanan sepanjang 863,218 km yang tersebar di 10 kecamatan. Jalan dengan kondisi baik hingga tahun 2020 telah mencapai 78,29% yang tersebar di sepuluh kecamatan (gambar 2.24)



Sumber : DPUPRKP Kab. Tabanan, tahun 2020

Gambar 2.24
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

2.5.2.2 Irigasi

Untuk mendukung ketahanan pangan, infrastruktur sumber daya air menjadi sangat penting. Panjang saluran irigasi di Kabupaten Tabanan sepanjang 1.206.630,70 meter. Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Tabanan tahun 2020 sebagian besar dalam kondisi rusak

yakni sebesar 50,67%, sementara dalam kondisi baik sebesar 49,33%. Irigasi dalam kondisi rusak terdapat di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Kediri, dan Baturiti (tabel 2.67.)

Tabel 2.67

Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2020

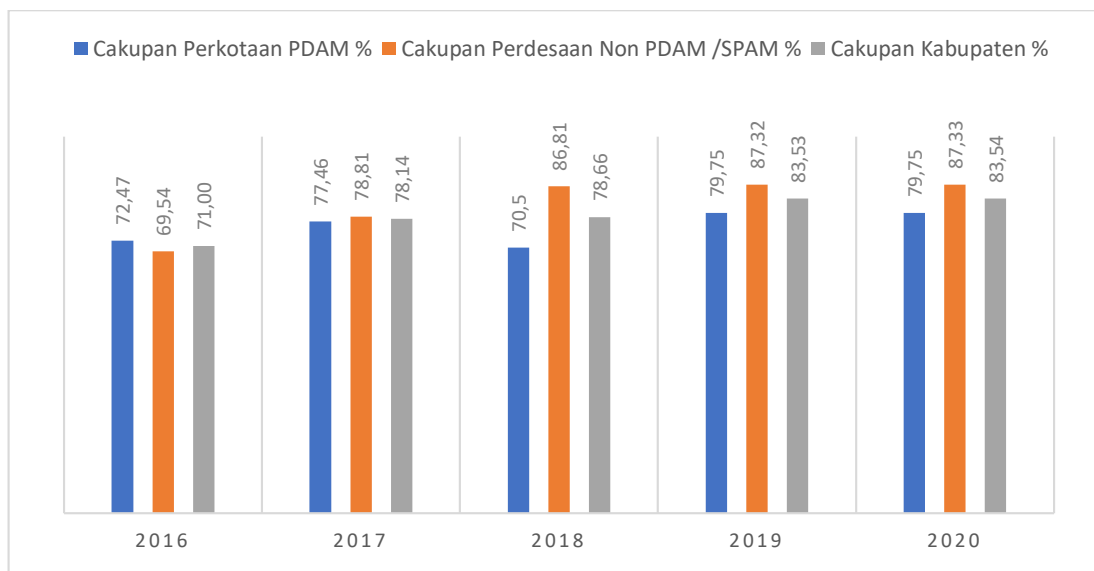
NO	KECAMATAN	TOTAL LUAS	KONDISI JARINGAN IRIGASI							
			BAIK		RUSAK SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			M2	%	M	%	M	%	M	%
1	SELEMADEG TIMUR	100.893	45.056	44,7	6.299	6	27.117	27	22.421	22
2	SELEMADEG BARAT	76.502	9.103	11,9	12.246	16	39.641	52	15.512	20
3	TABANAN	59.816	26.517	44,3	17.797	30	13.293	22	2.209	4
4	KEDIRI	44.923	33.114	73,7	6.526	15	-	-	5.283	12
5	MARGA	57.996	29.252	50,4	1.856	3	1.175	2	25.713	44
6	PNEBEL	36.983	16.187	43,8	11.056	30	4.379	12	5.361	14
7	BATURITI	77.371	14.019	18,1	4.211	5	54.865	71	4.276	6
8	PUPUAN	101.690	58.375	57,4	12.822	13	26.073	26	4.420	4
9	KERAMBITAN	25.513	12.130	47,5	9.939	39	1.275	5	2.169	9
	TOTAL		243,753	41,90	82,752	14,85	167,818	28,85	87,364	15,01

Sumber : DPUPRKP Kab. Tabanan, Tahun 2020

2.5.2.3 Air Bersih

Penyediaan air bersih kepada masyarakat menjadi mutlak karena menyangkut pelayanan dasar yang merupakan sumber kehidupan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih juga berhubungan erat dengan upaya pencegahan penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang buruk. Pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan telah mencapai sepuluh kecamatan, namun belum menjangkau semua desa. Desa-desa yang dominan mendapat pelayanan PDAM terletak di 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur, dan Selemadeg. Desa-desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, Baturiti, Penebel dan Marga pelayanan air bersihnya dikelola secara swadaya melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan.

Melalui sistem pelayanan PDAM dan SPAM Perdesaan, cakupan layanan air bersih pada tahun 2020 telah mencapai 83,54%, meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 83,53% (Gambar 2.25). Berdasarkan capaian tahun 2020 tersebut, masih dibutuhkan peningkatan cakupan layanan sejumlah 16,46% untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.



Sumber : DPUPRKP Kab. Tabanan, tahun 2020

Gambar 2.25

Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 - 2020

2.6. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Tabanan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan, serta tata kelola yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah terhadap komitmen global tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya maksimal dalam menggalang partisipasi seluruh *stakeholder* pembangunan untuk ikut berkolaborasi dalam pencapaian tujuan dan target pembangunan berkelanjutan tersebut. Berikut gambaran singkat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dipandang relevan dengan karakteristik wilayah dan sosial Kabupaten Tabanan.

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan tahun 2020, sebesar 4,27 persen dan tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 3,78 persen. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Tabanan terus mengalami penurunan dimana tingkat kemiskinan tahun 2016 sebesar 5 persen menjadi 4,21 persen di tahun 2019. Namun di tahun 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 4,27 persen sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19*. Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 4,25 persen menjadi sebesar 3,78 persen di tahun 2020 di mana angka-angka tersebut menunjukkan kemiskinan di Provinsi Bali secara perlahan terus mengalami penurunan. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bali, angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Bali lebih rendah dari tingkat kemiskinan Kabupaten Tabanan.

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ditargetkan pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman,

bergizi, dan cukup sepanjang tahun, khususnya bagi orang miskin, kelompok rentan, termasuk bayi; menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk meniadakan anak pendek dan kurus usia di bawah 5 tahun, serta memenuhi kebutuhan gizi bagi remaja perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, dan manula.

Secara umum mengalami peningkatan kondisi menjadi lebih baik. Target tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.

Berdasarkan data yang tercapai menunjukkan kondisi yang lebih baik pada tahun sebelumnya dengan melihat beberapa indikator seperti Angka Kematian Ibu tahun 2020 sebesar 77/100.000 KH. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita tahun 2020 menurun menjadi sebesar 8 persen dari tahun 2019 sebesar 14,4 persen. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe pada tahun 2020 sebesar 3,3 persen.

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 sebesar 77/100.000 KH. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV tahun 2020 sebanyak 83 kasus dari 13.330 populasi kunci, menurun dari tahun 2019 yang mencapai 87 kasus. Kejadian Tuberkulosis per 1.000 orang pada tahun 2020 sebanyak 184 orang per 448.000 penduduk (41 orang per 100.000 penduduk) turun dari kejadian tahun 2019 yaitu 275 orang. Kejadian kasus malaria pada tahun 2020 terdapat 1 kasus, meningkat dibanding tahun 2019 yang nihil kasus. Prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan data

pengguna narkoba yang direhabilitasi pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus meningkat 1 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 9 kasus.

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Berdasarkan data Susenas BPS bulan Maret 2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat tahun 2020 meningkat sebesar 106,12 persen dari tahun 2019 sebesar 106,00. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat tahun 2020 meningkat sebesar 106,88 persen dari tahun 2019 sebesar 106,77 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 sebesar 78,56 persen meningkat dari tahun 2019 sebesar 77,80 persen. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat pada tahun 2020 meningkat sebesar 96,12 persen dari tahun 2019 sebesar 94,93 persen. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat Tahun 2020 sebesar 81,22 persen belum meningkat dari tahun 2019 sebesar 81,22 persen. Persentase angka melek huruf Kabupaten Tabanan tahun 2020 sebesar 93,19 persen, sedangkan di tahun 2019 sebesar 94,93 persen, terjadi penurunan angka melek huruf dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,74 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya proses migrasi pendatang yang bekerja di sektor non formal serta penduduk usia lanjut yang datanya dikeluarkan dari *data base*.

Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat laki-laki pada tahun 2019 sebesar 102,48 persen dan perempuan 111,95 persen. Total APK SMP/MTs/sederajat sebesar 106,77 persen di tahun 2019 meningkat sebesar 0,11 persen di tahun 2020 menjadi 106,88 persen.

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada tahun 2019, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Tabanan sebesar 83,53 persen meningkat sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 78,66 persen. Proporsi akses layanan sumber air minum layak bersumber dari cakupan perkotaan PDAM dan cakupan perkotaan non PDAM. Jumlah cakupan sanitasi layak berupa Ipal Komunal yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 64 unit tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Tabanan. Dalam rangka pemenuhan target cakupan akses air bersih 100 persen, dan memenuhi kriteria 4 K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan berkelanjutan), diperlukan program pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan untuk pencapaian akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga dan IPAL Komunal bagi wilayah dengan penduduk padat dan kumuh. Akses terhadap fasilitas sanitasi layak (Jamban Sehat) menurut kecamatan dan Puskesmas, tahun 2020 sudah mencapai 97,5 %. Namun demikian, masih terdapat $\pm$ 3.320 KK yang belum memiliki akses jamban sehat atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi layak.

Tujuan 7: Energi Bersih dan terjangkau

Menurut laporan PT. PLN Wilayah Tabanan, jumlah pelanggan listrik dari tahun 2013 sebanyak 110.098 pelanggan meningkat menjadi 136.995 pelanggan di tahun 2018. Banyaknya daya listrik terpasang di Kabupaten Tabanan di tahun 2017 sebesar

183.943.253 VA mengalami peningkatan sebanyak 1,17 persen menjadi 216.145.503 VA di tahun 2018. Produksi listrik juga terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2017 tercatat 280.299.603 KWh meningkat menjadi 284.667.480KWh di tahun 2018. Sedangkan jumlah KWh (Kilo Watt Hour) listrik PLN yang terjual pada tahun 2018 mencapai 284.337.926 KWh dan jumlah listrik yang susut/hilang mencapai 280.080KWh.

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabanan atas dasar harga konstan (%) di Tahun 2019 sebesar 53,59 persen meningkat sebesar 3.67 persen dibanding tahun 2018 sebesar 49,92 persen. PRDB per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah) tahun 2018 sebesar 22.261.083 juta meningkat sebesar 1,7 juta Rupiah dari sebelumnya sebesar 20.463.438 juta Rupiah di tahun 2017. Berdasarkan data BPS, Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Tabanan dari tahun 2017 sebesar 1,79 persen hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan mencapai 1,28 persen. Namun di tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,21 persen dari tahun sebelumnya akibat dampak *pandemic covid-19*. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berfluktuasi dari tahun 2016 sebesar 76,51 persen meningkat menjadi 77,46 persen di tahun 2018. Namun menurun menjadi 75,47 persen di tahun 2020.

Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Berdasarkan indikator-indikator yang ada dan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kondisi mantap jalan kabupaten Tahun 2020 sepanjang 681,93 km, menurun dari tahun 2019 sepanjang 692,486 km. Terjadi penurunan 1,05 persen. Untuk jaringan irigasi dengan luas 16.749 ha, kondisi baik tahun 2019 sebesar 41,90 persen, meningkat 23,1

persen di tahun 2020 menjadi 65 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Tabanan tahun 2019 sebesar 83,53 persen, meningkat sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 78,66 persen. Untuk pembangunan IPAL Komunal telah terbangun 64 unit IPAL Komunal. Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019 sudah mencapai 97,5 persen. Drainase yang ada saat ini sepanjang 2,344 Km yang sebagian besar masih dalam Kota dan Ibu Kota Kecamatan. Kondisi drainase di Kabupaten Tabanan dalam kondisi mantap tahun 2019 dan 2020 mencapai 75,72 persen. Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku untuk mempromosikan industri khususnya industri penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2019 mencapai 22 persen menurun dari tahun 2018 yang mencapai 22,05 persen.

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Berdasarkan data BPS ketimpangan di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan sebesar 0,010 persen, dimana Koefisien Gini pada tahun 2017 sebesar 0,310 persen, meningkat di tahun 2018 menjadi 0,320 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabanan tahun 2018 sebesar 4,46 persen menurun sebesar 0,25 persen pada tahun 2019 yang sebesar 4,21 persen. Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Tabanan tahun 2018 berjumlah 28 desa.

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Sampai tahun 2018 sebanyak 1.207 unit rumah tidak layak huni yang sudah dapat dituntaskan. Jumlah desa tangguh bencana di daerah pesisir telah terbentuk sebanyak 3 desa yang terletak di Desa Beraban Kecamatan Kediri, Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan. Telah tersusun Peta Rawan

Bencana, Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Tujuan 12: Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 70 persen. Sampai dengan tahun 2020 jumlah bank sampah yang aktif sebanyak 5 unit dan TPST sebanyak 2 unit. Kapasitas tinja yang mampu ditangani pada tahun 2019 sebanyak 1.395m³/tahun meningkat sebanyak 678m³/tahun pada tahun 2020 menjadi 2.073m³/tahun.

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Dalam persiapan perubahan iklim Kabupaten Tabanan telah menyusun Peta Rawan Bencana, Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Tujuan 14: Ekosistem Laut

Dalam menuju pencapaian Tujuan 14: Ekosistem Laut dilaksanakan dengan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Mengingat penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kelautan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, Kabupaten Tabanan tetap mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan.

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Tujuan ekosistem darataan meliputi melindungi, merestori dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Penyelenggaraan bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi akan tetap didukung oleh Kabupaten Tabanan guna pencapaian Tujuan 15: Ekosistem Daratan melalui perangkat daerah terkait dan keterlibatan masyarakat.

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Dalam mendukung Kelembagaan yang tangguh di Kabupaten Tabanan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tahun 2019 dengan nilai B. Pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) pada tahun 2018 juga mendapatkan kategori hijau.

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan data BPS persentase individu yang mengakses internet pada tahun 2019 sebesar 48,06 persen, yang menggunakan komputer sebesar 14,43 persen, dan yang menggunakan telepon seluler sebesar 72,32 persen

Dalam rangka mencapai target SDGs pada tahun 2030, masing-masing perlu ditetapkan tujuan yang diukur melalui indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.



2.7. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Analisa gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.68

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB	6,14	5,38	na	5,72	-6,14
2	Laju Inflasi	na	na	na	na	na
3	PDRB Perkapita Harga Berlaku (Jt/Th)	42,55	46,6	na	na	na
4	Indek Gini	0,34	0,31	0,32	0,32	na
5	IPM	74,19	74,86	na	na	76,17
	Fokus Kesejahteraan Sosial					
	Sosial					
1	Persentase Penduduk Miskin	5	4,92	4,46	4,41	4,27
2	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus/10.000 Penduduk)	5	4	na	na	na
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Aspek Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
I	Pendidikan					
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,1	8,43	8,43	8,64	101,65
2	Angka Melek Huruf	93,88	94	93,32	94,93	93,19
	Angka Partispasi Kasar (APK)					
1	SD/MI/Paket A	103,54	106,25	105,8	106	100
2	SMP/MTs/Paket B	99,51	98,88	106,66	106,77	101,30
	Angka Kelulusan					
1	SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<i>Angka Partisipasi Murni (APM)</i>					
1	SD/MI/Paket A	97,61	96,26	94,54	94,93	97,43
2	SMP/MTs/Paket B	91,99	92,38	81,05	81,22	91,69
	Pendidikan Dasar					
1	Angka Partisipasi Sekolah	105,44	103,96	107,32	108,08	109,98
2	Rasio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk)	3,7	3,7	3,7	3,7	92
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1:11	1:12	1:12	1:13	12,79
4	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata (Guru/Kls/10.000 pddk)	1:36	1:36	1:36	1:36	1,99
	Pendidikan Menengah					
1	Angka Partisipasi Sekolah	105,44	103,96	107,32	108,08	98,65
2	Rasio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk)	1:26	1:26	1:26	1:26	25
3	Rasio Guru Terhadap Murid (Guru/Murid)	1:11	1:12	1:11	1:11	na
4	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata (Guru/Kls/10.000 pddk)	1:12	1:12	1:12	1:12	5,92
5	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun Melek Huruf	93,88	94,00	93,32	94,93	93,19
	Fasilitas Pendidikan					
1	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal	80	80	80	80	na
2	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	77,55	78,4	79,6	79,6	35,97
3	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik	36	36	36	36	52,63
	Pendidikan Usia Dini					
1	Pendidikan Usia Dini	77,31	77,34	77,8	77,8	78,56
	Angka Putus Sekolah					
1	Angka Putus Sekolah (APS SD/MI) (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
2	Angka Putus Sekolah (APS SMP/MTs) (%)	0,04	0,03	0,14	0,14	0,28
	Angka Kelulusan					
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100
3	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	99,06	100,03	100,04	100,04	100,64
4	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	82,99	82,99	82,99	82,99	Non kewenangan



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	91,6	92,54	93,29	93,29	81,36
II	Kesehatan					
1	Pencapaian BOR BRSUD Tabanan sesuai Standar	68,9	58,4	54,36	76,08	61,3
2	Tingkat Akreditasi Pelayanan BRSUD Tabanan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi	20	60	20	100%	100
4	Rasio Posyandu per Satuan Balita (Bh/10.000)	18,8	18,8	18,7	29	16.5
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,088	0,093	0,085	2,715	2.5
6	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0016	0,0018	0,002	0,002	0,002
7	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Bh/10.000)	2,9	3	3,1	3,65	4.8
8	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	3	3,6	3,9	65,3	7.7
9	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	94	93,1	92,4	93%	92.2
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebinaisan (%)	94,4	92,1	93,6	95,40%	95.7
11	Cakupan Desa Kelurahan UCI (%)	100	100	100	79,7	80.5
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit BDB (%)	100	100	100	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100%	100
16	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	94	90,7	103,2	101,43	100,7
17	Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan Puskesmas (%)	75	75	70	147,50%	87.30
18	Meningkatnya Cakupan Rawat Inap Puskesmas (%)	25	25	30	23,63%	28.25
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio Tempat Ibadah (Bh/1.000 Penduduk)	4	4	4	4	4
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (Ton/1.000 Orang)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Penyusunan Norma, Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Buah	2	2	2	2	2
4	Rasio Pemukiman Layak Huni (M2 / KM2)	10	10	10	10	10



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	30	30	30	35	35
6	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan (%)	6	7	9	15	15
7	Jumlah Kawasan Strategis yang mampu berkembang	0	0	0	62	62
8	Ketahanan terhadap RTRW (%)	70	73	75	76	76
9	Luas Wilayah Produktif (%)	80	80	80	80	80
10	Luas Wilayah Industri (%)	5	5	5	5	5
11	Luas Wilayah Kebanjiran (%)	5	5	5	5	5
12	Luas Wilayah Kekeringan (%)	5	5	5	5	5
13	Luas Wilayah Perkotaan (%)	10	10	10	10	10
14	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kondisi sarana prasarana Infrastruktur jalan yang menghubungkan Pusat Pusat Pertumbuhan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
15	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	61,07	61,37	76,82	78,75	78,75
16	Panjang Jalan dilalui Roda Empat (KM per orang)	200	210	220	230	230
17	Jalan Penghubung Kabupaten dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman (KM) Penduduk (Minimal dilalui roda Empat	100,36	100,3	100,36	100,36	100,36
18	Jumlah Aset Irigasi (DI)	24	40	23	20	20
19	Jumlah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	65,48	66,82	68,16	66	66
	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Tingkat Pencapaian Komponen komponen SPM Bidang Keciptakarya	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM belum tercapai sesuai target	9 SPM belum tercapai sesuai target
2	Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	71,00	78,14	78,66	83,53	83,54
3	Rumah Tangga pengguna Listrik (%)	40	40	40	40	40
4	Rumah Tangga bersanitasi (Bh/1000 Pddk)	5	5	5	5	5
5	Lingkungan Permukiman Kumuh	33,27	12,52	8,05	8,05	8,05
6	Rumah Layak Huni (Orang/ 1000 Penduduk	200	365	642	445	445
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat					
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten (%)	80	80	80	80	80



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (%)	60	60	60	60	60
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) (%)	30	35	40	45	88
	Sosial					
1	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan	70	70	70	70	70
2	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Buah)	3	3	3	3	3
3	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	70	70	70	70	70
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	70	70	70	70	70
	Ketenagakerjaan					
1	Persentase Pengangguran	1,73	1,79	1,43	1,28	4,21
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	10	4,42	5,4	4,69	4,69
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	90	95,58	90	95,31	90
3	Rasio KDRT (%)	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03
4	Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur (%)	0	0	0	0	0
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	90,5	99,5	98,94	99,16	99,03
6	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindakan Kekerasan (%)	52	64	25	35	45
	Pangan					
1	Regulasi Ketahanan Pangan (Buah)	0	2	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	100	100	100	100
3	Indeks Pertanaman Padi (IP Padi) (%)	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16
	Lingkungan Hidup					
1	Persentase penanganan sampah (%)	17,00	18,61	46,54	59,68	44,92
2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	71,00	78,14	78,66	83,53	83,54
3	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	0	0	0	0	0
4	Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	0	0	0	0	0
5	Pencemaran status mutu air (%)	0	70	48	48	25
6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	0	0	0	0	0



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	43	57	75	75	28,6
8	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Penegakan hukum lingkungan (%)	0	0	0	0	0
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	0	0	0	0	0
11	Kerusakan kawasan hutan (kawasan)	0	0	0	0	0
	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	12,46	14,41	18,24	21,54	28,48
2	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian(%)	36,22	45,29	52,59	52,59	67,27
3	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan,Pengangkatn dan Pengesahan Anak (%)	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1	Persentase Bumdes yang produknya mampu diserap BUMD (%)	n.a	50	80	95	95
2	Persentase desa dengan pelayanan baik	90	90	90	95	95
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (kelompok)	14	14	14	14	14
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga (org)	3	3	3	3	3
2	Rasio akseptor KB(%)	70	70	80	65	81,31
3	Cakupan peserta KB aktif(%)	70	70	80	81,8	82,57
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I (%)	50	50	50	92	92
	Perhubungan					
1	Perolehan penghargaan WTN	1	1	1	1	0
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (buah)	66,42	66,42	66,42	3.532.197	596.155
3	rasio Ijin trayek (buah/org)	427	436	507	544	544
4	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	11.234	10.027	9.912	9.905	8.007
5	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	3	3	3	3	3
6	Angkutan Darat (buah)	359.205	359.201	359.201	425.899	435.428
7	Kepemilikan Kir Angkutan umum	1036	1032	1032	5158	5.827
8	Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum (ribu Rp.)	77	77	86	85	85
	Komunikasi dan Informatika					



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wartel/warnet (buah/10.000 penduduk)	5	5	5	5	5
2	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	26	26	26	26	26
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	6	6	6	6	6
4	Pameran/Expo (kali)	1	1	1	1	0
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
1	Jumlah koperasi Sehat yang jenis usaha utamanya bukan simpan pinjam	403	345	338	322	329
	Penanaman Modal					
1	Jumlah Investor PMDN	1.075	625	604	1.050	1.881
2	Jumlah Investor PMA	6	6	8	42	58
	Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Jumlah organisasi pemuda (buah)	114	114	114	114	114
2	Jumlah organisasi olah raga (buah)	30	30	30	30	30
3	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	28	28	28	28	28
4	Jumlah kegiatan olah raga (kali)	50	50	50	50	50
5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah/penduduk)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
6	Lapangan olahraga (buah/penduduk)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	Statistik					
1	Buku “Kabupaten dalam angka” (buah)	1	1	1	1	1
2	Buku “PDRB Kabupaten” (buah)	0	0	0	0	0
	Kebudayaan					
1	Jumlah Grup Kesenian yang representatif	1.360	1.357	1.361	1.361	1.365
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	2	2	2
3	Jumlah Klub Olahraga	10	10	10	10	10
4	Jumlah Gedung Olahraga yang representatif	1	1	1	1	1
	Perpustakaan					
1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan	17	25	27	27	27
2	Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan (orang)	10	11	8	8	8
3	Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas (orang)	26.600	32.160	0	0	0
	Kearsipan					
1	Pengelolaan arsip secara buku (buah)	0	0	1	1	1



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Buah)	0	0	203	203	203
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan (%) ton	3.618,70	3.991,7	4.194,30	4.194,30	3.999,75
2	Konsumsi Ikan (%) kg/kapita/tahun	29,6	29,9	30,6	30,6	30,2
3	Cakupan Bina Kelompok budidaya Ikan (%)	152	169	175	175	167
	Pariwisata					
1	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun	3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danu, Kebun Raya Eka	3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danu, Kebun Raya Eka	3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danu, Kebun Raya Eka	4 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danu, Kebun Raya, Jatiluwih	2 Obyek Wisata (Tanah Lot, Kebun Raya)
2	Kunjungan wisata (%)	10	12	12	4	-73
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	21	22	22	22	17
4	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	96	95	95	95	95
5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	256	267	255	374	374
	Pertanian					
1	Nilai Tukar Petani	<100	<100	<100	<100	<100
2	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem	1450 ha	1450 ha	1450 ha	1450 ha	1450 ha
3	Produktifitas Padi (Ton)/hektar)	55	55	55	55	55
4	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	22,67	22,67	22,55	22,55	22,55
5	Cakupan bina kelompok petani (%)	10	10	10	10	10
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase jumlah Desa Berlistrik (%)	100	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	50	50	50	50	50
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	90	90	90	90	90
	Perdagangan					
1	Jumlah IKM	805	878	938	943	959
2	Tenaga Kerja	6.838	7.606	8.074	8.107	8.219
3	Nilai Investasi (Rp 000.000)	493.202	542.345	589.885	591.294	178.845.910
4	Nilai Produksi (Rp.000.000)	536.348	567.236	586.989	589.819	830.970
	Perindustrian					
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,63	23,94	24,63	25,08	26,02



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Pertumbuhan Industri (UKM)	77,808	77,900	78,000	78,100	78,300
3	Pertumbuhan Industri IKM	11,905	12,084	12,084	12,326	12,609
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	37,7	25,0	50,0	75,0	85,0
	Perencanaan					
1	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA (Buah)	1	1	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Buah)	1	1	1	1	1
	Sekretariat Daerah					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
3	Produktivitas total daerah	40,86	40,86	40,86	40,86	40,86
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4	4	4	4	4
5	Jumlah Nasabah Jamkrida	5759	5759	5759	5759	5759
6	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	43	43	43	43	43



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah telah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan yang belum seluruhnya dapat ditangani, baik karena alasan administratif, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun karena alasan masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tabanan tahun 2015-2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah kurun waktu lima tahun kedepan (2021-2026). Gambaran umum dan analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2015-2020 mencakup: (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; dan (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2020

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tabanan pada kurun waktu 2015-2020 telah menunjukkan hasil cukup baik terutama sebelum terjadinya pandemi covid-19, meskipun



masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Tabanan antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dicapainya berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi makro maupun sektoral. Meskipun demikian, dalam hal pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya dapat dioptimalkan terutama pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan semakin berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, kemampuan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu daerah.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2015-2020, antara lain dapat dicermati dari target dan realisasi APBD setiap tahunnya, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2015-2020 Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.	PENDAPATAN	1.615.933.308.429,18	1.794.601.450.264,89	1.871.864.102.726,24	1.862.277.203.959,96	1.926.615.982.906,61	1.789.840.176.484,88	1,72%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	300.799.020.964,83	318.083.799.105,63	426.635.750.740,34	363.370.469.708,67	354.558.239.084,47	313.212.776.619,63	0,68%
1.1.1	Pajak daerah	105.792.993.979,18	105.186.643.351,66	128.176.142.228,62	97.930.045.247,57	116.003.787.793,50	97.073.960.221,42	-1,42%
1.1.2	Retribusi daerah	47.030.645.631,63	22.397.629.555,14	20.466.248.417,31	29.213.425.356,55	23.362.356.137,00	22.752.793.990,00	-11,40%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.322.114.267,68	8.741.999.292,44	10.385.423.266,17	9.673.603.885,57	9.937.546.372,59	10.285.519.016,75	5,83%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	140.653.267.086,34	181.757.526.906,39	267.607.936.828,24	226.553.395.218,98	205.254.548.781,38	183.100.503.391,46	4,49%
1.2.	Dana Perimbangan	815.846.444.833,00	1.102.265.093.170,00	1.096.289.816.435,00	1.063.464.921.676,00	1.075.691.158.141,00	1.040.716.326.716,00	4,14%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	17.441.962.833,00	23.775.524.756,00	23.944.694.953,00	23.104.621.003,00	16.638.025.262,00	27.101.550.501,00	7,62%
1.2.2	Dana alokasi umum	722.004.642.000,00	826.283.780.000,00	811.768.631.000,00	811.768.631.000,00	847.281.658.000,00	757.249.339.000,00	0,80%
1.2.3	Dana alokasi khusus	76.399.840.000,00	252.205.788.414,00	260.576.490.482,00	228.591.669.673,00	211.771.474.879,00	256.365.437.215,00	22,36%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	499.287.842.631,35	374.252.557.989,26	348.938.535.550,90	435.441.812.575,29	496.366.585.681,14	435.911.073.149,25	-2,24%
1.3.1	Hibah	93.214.568.674,00	101.080.964.556,96	5.645.302.885,03	44.063.418.987,72	44.213.011.060,10	56.152.143.013,72	-8,10%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-



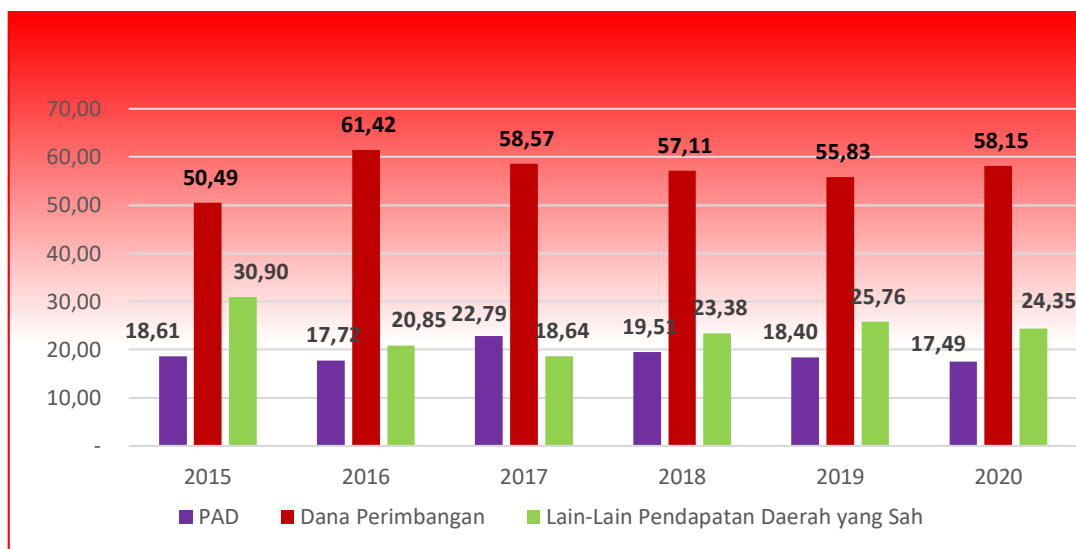
No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	157.674.594.957,35	162.018.334.432,30	131.145.049.332,07	133.166.486.271,89	143.315.225.636,98	116.888.351.037,95	-4,87%
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	247.995.679.000,00	88.183.813.000,00	113.917.874.000,00	152.721.992.000,00	167.327.267.000,00	208.975.901.000,00	-2,81%
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	403.000.000,00	22.969.446.000,00	98.230.309.333,80	105.489.915.315,68	141.511.081.984,06	53.894.678.097,58	126,14%
2.	BELANJA	1.586.227.841.183,50	1.872.683.054.623,51	1.861.870.179.735,27	1.909.975.375.775,88	1.926.615.982.906,91	1.772.916.984.710,79	1,87%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.050.345.517.786,18	1.171.646.506.575,75	1.116.115.895.946,36	1.166.534.746.080,97	1.214.054.583.543,00	1.194.660.578.651,61	2,17%
2.1.1	Belanja Pegawai	824.144.116.801,19	910.740.327.400,75	804.449.867.018,81	826.488.842.987,59	856.129.843.053,15	842.115.361.546,55	0,36%
2.1.2	Belanja Bunga	44.197.461,94	31.394.350,00	13.535.990,82	2.020.959.818,38	7.340.194,85	471.279.272,59	48,36%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	45.344.113.150,00	37.395.400.000,00	67.797.085.600,00	91.043.713.450,00	69.659.159.150,00	102.666.370.636,00	14,59%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.204.500.000,00	2.926.000.000,00	2.999.500.000,00	4.278.000.000,00	19.290.535.920,00	3.497.000.000,00	1,47%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	12.978.453.723,75	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	10.386.569.504,00	-3,64%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	164.630.136.649,30	206.136.048.600,00	226.438.571.111,73	228.285.893.600,00	254.550.369.000,00	220.328.945.000,00	4,98%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	15.195.052.692,47	0,00%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	535.882.323.397,32	701.036.548.047,76	745.754.283.788,91	743.440.629.694,91	712.561.399.363,91	578.256.406.059,18	1,28%
2.2.1	Belanja Pegawai	33.905.164.639,62	27.146.895.493,00	22.159.485.500,00	109.090.593.550,00	88.761.497.141,10	0,00	-100,00%



No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	389.007.715.998,50	416.829.978.349,89	433.029.611.564,01	416.110.095.578,99	436.617.527.706,08	393.585.132.630,32	0,20%
2.2.3	Belanja Modal	112.969.442.759,20	257.059.674.204,87	290.565.186.724,90	218.239.940.565,92	187.182.374.516,73	184.671.273.428,86	8,54%
3	PEMBIAYAAN	126.246.363.080,04	149.525.435.554,48	76.278.976.254,13	66.051.886.950,98	120.943.852.840,94	123.184.099.497,40	-0,41%
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.968.327.787,74	148.047.400.260,36	65.850.940.960,01	65.723.851.656,86	69.265.817.546,82	68.934.099.497,40	-9,07%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	121.329.373.787,74	147.395.729.760,36	65.213.158.460,01	65.324.628.656,86	17.697.644.546,82	18.148.759.497,40	-27,14%
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri					51.400.000.000,00	50.250.000.000,00	-1,13%
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	638.954.000,00	651.670.500,00	637.782.500,00	399.223.000,00	168.173.000,00	535.340.000,00	-2,91%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.278.035.292,30	1.478.035.294,12	10.428.035.294,12	328.035.294,12	51.678.035.294,12	54.250.000.000,00	52,71%
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	1.200.000.000,00	10.350.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	78.035.292,30	78.035.294,12	78.035.294,12	78.035.294,12	51.478.035.294,12	50.250.000.000,00	193,86%
3.2.5	Pengeluaran Investasi Permanen Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00					-100,00%

Sumber : Bakeuda, LRA 2015-2020

Kondisi diatas, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 1,72 persen. Laju pertumbuhan terbesar bersumber dari Dana Perimbangan sebesar 4,14 persen diikuti Pendapatan Asli Daerah yang tumbuh sebesar 0,68 persen sementara Lain-lain Pendapatan Daerah tumbuh negatif 2,24 persen, kondisi ini disebabkan tidak terealisasinya bantuan keuangan dari Kabupaten Badung akibat dampak Pandemi Covid-19. Sementara Pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020 masih tergantung pada dana perimbangan sebesar 56,93 persen, kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 24,35 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar 19,09 persen, sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan
Terhadap Pendapatan Daerah

Dengan demikian, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tabanan sebesar 19,21 persen atau katagori rendah artinya keuangan Kabupaten Tabanan dalam rangka pembangunan sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat baik dalam bentuk



Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya. Karena itu, kinerja pengelolaan PAD masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, maka perlu dioptimalkan pengelolaan PAD dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target PAD selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain: (1) Data obyek dan potensi sumber PAD yang masih minim, (2) Rendahnya kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah, (3) Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah, (4) Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak, dan (5) belum maksimalnya penagihan pajak. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lambat laun dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terobosan melalui berbagai alternatif peningkatan PAD.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3.2.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Tabanan

Uraian	2019	2020	Pertumbuhan (%)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	10.371.269.735,74	20.025.221.144,47	93,08
Kas di Bendahara Penerimaan	12.505.002,43	214.541.246,88	1.615,64



Uraian	2019	2020	Pertumbuhan (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	178.900.000,00	100,00
Kas BLUD	837.248.864,93	6.961.410.317,74	731,46
Kas JKN/FKTP	3.800.371.013,12	0,00	-100,00
Kas BOS	3.127.364.881,18	4.406.118.562,40	40,89
Kas Lainnya (Kas Dana Pendidikan)	-	-	-
Piutang Pendapatan	-	-	-
Piutang Pajak	59.957.434.709,24	69.342.967.091,49	15,65
Piutang Retribusi	2.121.462.653,00	2.255.272.253,00	6,31
Piutang Lain-lain PAD	39.144.322,76	21.953.352.490,01	55.983,11
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.607.251.004,99	8.158.729.930,21	-40,04
Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Piutang Lainnya	35.900.757.183,52	273.576.526,53	-99,24
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih)	-49.860.386.385,60	-52.579.322.635,55	5,45
Persediaan	23.373.009.081,65	28.834.388.732,80	23,37
Jumlah Aset Lancar	103.287.432.066,96	110.025.155.659,98	6,52
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	
Investasi Nonpermanen	871.240.075,00	345.085.500,00	-60,39
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-	-
(Penyisihan Investasi Nonpermanen)	0,00	-19.057.925,00	100,00
Jumlah Investasi Nonpermanen	871.240.075,00	326.027.575,00	-62,58
Investasi Permanen	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	85.056.554.012,86	89.801.818.034,59	5,58
Jumlah Investasi Permanen	85.056.554.012,86	89.801.818.034,59	5,58
Jumlah Investasi Jangka Panjang	85.927.794.087,86	90.127.845.609,59	4,89
ASET TETAP			
Tanah	526.736.932.157,42	528.001.453.630,42	0,24
Peralatan dan Mesin	396.822.734.629,53	479.212.641.390,28	20,76
Gedung dan Bangunan	805.974.919.262,26	866.505.034.102,51	7,51
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.479.000.679.828,43	1.506.213.423.172,79	1,84



Uraian	2019	2020	Pertumbuhan (%)
Aset Tetap Lainnya	12.794.473.294,59	12.193.082.042,50	-4,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.721.944.500,00	19.173.982.734,70	415,16
(Akumulasi Penyusutan)	-1.157.980.458.463,07	-1.268.467.732.232,59	9,54
Jumlah Aset Tetap	2.067.071.225.209,16	2.142.831.884.840,61	3,67
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.884.000.000,00	1.884.000.000,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.904.556.720,00	1.177.011.984,00	-76,00
(Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud)	-2.777.600.526,00	0,00	-100,00
Aset Lain-Lain	31.593.590.423,75	5.667.045.444,78	-82,06
(Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain)	-27.196.266.683,75	0,00	-100,00
Jumlah Aset Lainnya	8.408.279.934,00	8.728.057.428,78	3,80
JUMLAH ASET	2.264.694.731.297,98	2.351.712.943.538,96	3,84
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Bunga	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	178.900.000,00	100,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	949.807.561,84	1.121.106.006,10	18,04
Utang Belanja	44.491.335.622,84	52.209.285.204,52	17,35
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	669.138.946,44	100,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	45.441.143.184,68	54.178.430.157,06	19,23
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	45.441.143.184,68	54.178.430.157,06	19,23
EKUITAS			
EKUITAS	2.219.253.588.113,30	2.297.534.513.381,90	3,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.264.694.731.297,98	2.351.712.943.538,96	3,84

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

Berdasarkan Analisis neraca Kabupaten Tabanan tahun 2019-2020, Aset pemerintah Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,84 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata meningkat sebesar 4,89 persen, aset tetap meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,67 persen Sedangkan aset lancar mengalami peningkatan sebesar 6,52 persen.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio solvabilitas. Rasio aktivitas adalah untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Analisis Rasio Keuangan kabupaten Tabanan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,27	2,05
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1,76	1,52
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,02	0,02
4	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,02
5	Rata-rata umur Persediaan	0,92	0,90

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten Tabanan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas yang positif. Analisis ketiganya disajikan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.3, rasio lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 2,27 dan tahun 2020 sebesar 2,05

2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. *Quick ratio* pada tahun 2019 sebesar 1,76 serta periode tahun 2020 *quick ratio* sebesar 1,52. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0,02. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2019 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar 0,02 serta periode tahun 2020 sebesar 0,02. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Tabanan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan ratio yang mengukur seberapa efektif dan efisien Pemerintah Daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber – sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain rata – rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Besar rasio rata – rata persediaan pada tahun 2019 sebesar 0,92 dan tahun 2020 sebesar 0,90. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah mampu menggunakan aktiva yang dimiliki secara efisien dan efektif.

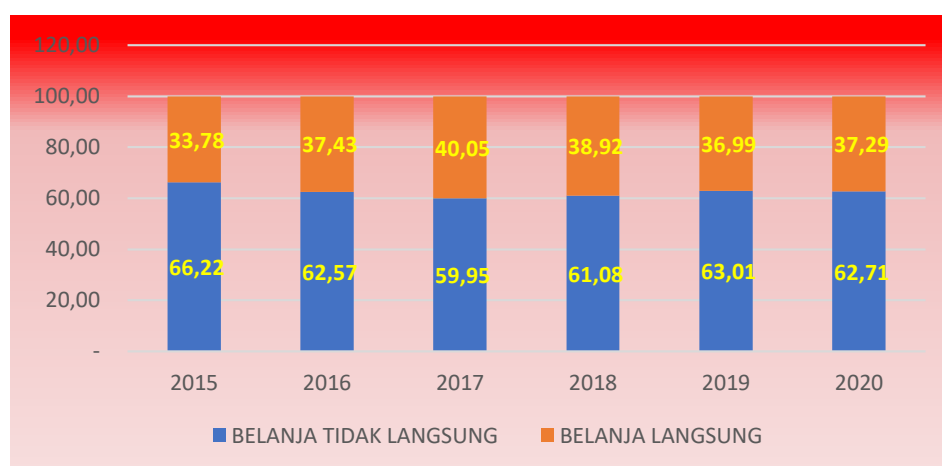
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015-2020



Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk pendekatan eksternal dan internal yang dalam pelaksanaannya tercermin dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat.

Berdasarkan komposisi penggunaannya, komponen belanja aparatur merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah. Hasil perhitungan rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 62,59 persen sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah rata-rata sebesar 37,41 persen. Berikut rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020.



Gambar 3.2.

Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2020

Kondisi ini berimplikasi pada penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan terhadap pemenuhan pelayanan publik tidak berjalan secara optimal. Apabila dicermati, komponen belanja modal rata-rata pencapaiannya masih sangat rendah yakni sebesar 71,32 persen. Kondisi ini disebabkan oleh tidak terealisasinya pinjaman daerah sehingga berimplikasi pada penundaan beberapa program khususnya yang berkaitan dengan program infrastruktur.

Tabel 3.4.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	91,79%	88,73%	95,44%	97,50%	96,57%	92,97%
1	Belanja Pegawai	89,87%	86,13%	94,47%	96,86%	96,27%	93,71%
2	Belanja Bunga	44,20%	31,39%	0,62%	76,65%	14,68%	80,56%
3	Belanja Subsidi						
4	Belanja Hibah	99,24%	98,88%	95,80%	98,71%	98,61%	98,39%
5	Belanja Bantuan Sosial	97,11%	88,67%	90,89%	93,00%	98,07%	92,10%
6	Belanja Bagi Hasil	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,68%
7	Belanja Bantuan Keuangan	99,92%	100,00%	100,00%	100,00%	99,56%	99,68%



8	Belanja Tidak Terduga	0,00%	36,12%	10,88%	0,00%	0,00%	37,39%
B	Belanja Langsung	93,96%	94,79%	73,48%	73,00%	73,71%	97,46%
1	Belanja Pegawai	100,66%	79,89%	75,57%	97,60%	88,00%	0,00%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,59%	97,49%	93,59%	95,88%	95,75%	94,29%
3	Belanja Modal	90,09%	92,44%	55,57%	46,18%	44,53%	95,18%

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tabanan selama kurun waktu tiga tahun disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2020

No.	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	2017	885.153.656.734,61	1.872.390.415.029,39	47,27
2	2018	903.533.828.460,29	1.910.303.411.070,00	47,30
3	2019	922.397.136.704,79	1.977.733.040.956,03	46,64
4	2020	898.068.001.335,56	1.772.940.833.272,32	50,65

Sumber: Bakeuda Kab. Tabanan

Berdasarkan Tabel 3.5. terlihat bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur rata-rata kurun waktu empat tahun hampir sebesar 50 persen.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan terlebih dahulu diuraikan data-data pendukung yaitu (1) Defisit riil anggaran, dan (2) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini.



3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran.

Tahun 2018 hingga tahun 2020, anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tabanan, selalu mengalami defisit. Selisih antara defisit/surplus ditambah dengan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah, disebut sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan. Defisit riil Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.862.277.203.959,96	1.926.615.982.906,61	1.789.840.176.484,88
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.909.975.375.775,88	1.926.055.005.661,91	1.542.201.470.206,79
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	328.035.294,12	51.678.035.294,12	54.250.000.000,00
A	Defisit riil	(48.026.207.110,04)	(51.117.058.049,42)	193.388.706.278,09

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020

Tahun 2018-2020				
No.	Uraian	TAHUN		
		2018	2019	2020
	Defisit Riil			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	65.324.628.656,86	17.697.644.546,82	18.148.759.497,40
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	399.223.000,00	168.173.000,00	35.794.500,00



4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	51.400.000.000,00	50.250.000.000,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	17.697.644.546,82	18.148.759.497,40	31.607.291.271,49

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

3.2.2.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Persentase realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya penghematan belanja atau akibat lainnya. Demikian pula pada tahun 2019, persentase terbesar disebabkan karena adanya penghematan belanja atau akibat lainnya, namun mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 72,91 persen. Pada tahun 2020 realisasi sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 18.148.759.497,40 meningkat sebesar 2,54% dari tahun 2019, disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabanan
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	65.324.628.656,86	100%	17.697.644.546,82	100%	18.148.759.497,40	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	32.040.695.647,86	100%	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan dana perimbangan	-42.715.991.583,00	100%	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-31.000.985.453,87	100%	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	309.213.824.098,60	100%	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah



3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima (5) tahun kedepan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Untuk menganalisis belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	895.327.268.796,38	920.123.976.776,85	747.328.285.692,59	-6%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	631.310.276.528,00	630.975.336.132,00	511.069.173.016,00	-7%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH	5.640.000.000,00	6.480.000.000,00	6.551.450.000,00	5%
3	Belanja Bunga	2.020.959.818,38	7.340.194,85	471.279.272,59	-38%
4	Belanja Bagi Hasil	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	10.386.569.504,00	-10%
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	57.261.000,00	-84%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	227.521.360.000,00	253.826.628.000,00	218.792.552.900,00	-1%
B	Belanja Langsung	361.362.967.075,04	444.582.748.205,96	231.027.040.051,39	-3%
1	Tenaga Harian Daerah	796.951.000,00	778.110.000,00	754.277.000,00	-2%
2	Belanja Jasa Pelayanan Medik	74.108.731.080,36	66.835.367.932,90	0,00	-100%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	30.286.334.987,31	29.091.897.502,50	15.730.576.319,70	-20%
4	Belanja Bahan Obat-Obatan	36.826.780.183,92	31.044.183.549,61	0,00	-100%
5	Belanja Bahan Material Keperluan Rumah Tangga	6.952.690.944,00	2.207.106.907,00	6.152.852.689,00	-4%
6	Belanja Jasa Kantor	53.036.138.035,70	138.062.991.260,95	103.399.588.053,67	25%
7	Belanja Premi Asuransi	18.371.303.518,00	46.644.521.548,00	35.885.229.859,44	25%
8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.164.244.782,00	9.373.325.805,00	5.830.088.032,00	-17%



9	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	559.439.040,00	517.850.000,00	340.000.000,00	-15%
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.604.550.000,00	9.361.562.000,00	9.039.750.000,00	-2%
11	Belanja makanan dan minuman Pasien	3.061.234.903,75	3.332.770.260,00	0,00	-100%
12	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)	117.594.568.600,00	107.333.061.440,00	0,00	-100%
13	Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota	141.511.081.984,06	53.394.678.097,58	53.894.678.097,58	-28%
C	Pengeluaran pembiayaan	78.035.294,12	51.478.035.294,12	50.250.000.000,00	764%
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran Pokok Hutang	78.035.294,12	51.478.035.294,12	50.250.000.000,00	764%
TOTAL A+B+C		1.256.768.271.165,54	1.416.184.760.276,93	1.028.605.325.743,98	-6%

Sumber: LRA, Bakeuda Kab. Tabanan, diolah

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2.1. Pendapatan Daerah

Untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan maka harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, yang akan ditempuh dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Mengefektifkan hubungan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat agar tetap mendapatkan dana transfer seperti DAU, DAK, Dana Hibah, Dana Penyesuaian, dan dana bagi hasil dalam porsi yang maksimal, khususnya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah



yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan kelancaran perekonomian.

2. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD termasuk PBB dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah. Berdasarkan analisa atas PAD Kabupaten Tabanan 5 (lima) tahun terakhir diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD adalah sebesar 2,18 persen. Dengan demikian kontribusi PAD atas pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sangat minim sekali, sementara potensi sumber-sumber pendapatan daerah tumbuh begitu cepat seiring dengan cepatnya laju pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Perangkat daerah yang mengelola PAD baik pajak maupun retribusi belum optimal. Karena itu harus ada kebijakan khusus Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kinerja pengelola PAD, melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
3. Mengupayakan kerjasama dengan dunia usaha dan para investor dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam pendanaan pembangunan yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi serta memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian/kesejahteraan masyarakat.
4. Menjajaki kemungkinan pinjaman daerah untuk membiayai program prioritas yang berorientasi investasi.

Disamping kebijakan pendapatan di atas, berdasarkan kinerja masa lalu, seperti yang disajikan pada tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2015-2020 pendapatan untuk periode lima tahun mendatang dapat diproyeksikan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tiga Tahun masih mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kisaran 11,71 persen, dan diasumsikan tumbuh rata-rata 1,26 persen dalam kurun waktu 2022-2026



2. Pendapatan Transfer kurun waktu 2022-2026 diasumsikan tumbuh sebesar 2,59 terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 3,06 persen, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar 1,25 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 0,93 persen
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari dana BOS non fisik bidang pendidikan diasumsikan tetap.

Berdasarkan kebijakan dan asumsi di atas, maka pendapatan daerah tahun 2022-2026, dapat diproyeksikan seperti pada Tabel 3.10.



Tabel 3.10.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.925.567.376.894,60	1.929.772.469.754,61	1.983.492.377.038,48	2.045.253.275.551,84	2.109.265.062.040,43
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.244.442.701,09	330.957.442.129,54	334.419.794.314,63	340.719.365.855,30	347.183.021.450,11
4.1.01	Pajak Daerah	96.982.778.711,03	97.467.692.604,58	99.417.046.456,68	102.896.643.082,66	106.498.025.590,55
4.1.02	Retribusi Daerah	22.808.553.490,00	23.036.639.024,90	23.497.371.805,40	24.202.292.959,56	24.928.361.748,35
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.058.310.500,06	11.058.310.500,06	11.113.602.052,56	11.224.738.073,08	11.336.985.453,81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.394.800.000,00	199.394.800.000,00	200.391.774.000,00	202.395.691.740,00	204.419.648.657,40
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.552.322.934.193,52	1.555.815.027.625,08	1.606.072.582.723,85	1.661.533.909.696,54	1.719.082.040.590,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.000.958.277,01	1.383.948.715.459,78	1.433.037.387.048,18	1.486.137.569.329,90	1.541.277.332.638,89
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.321.975.916,51	171.866.312.165,29	173.035.195.675,67	175.396.340.366,64	177.804.707.951,42
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00

Berdasarkan uraian Tabel 3.10. diatas data proyeksi pendapatan Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026, dapat disampaikan asumsi dan beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026 memperhatikan realisasi tahun 2016-2020 dan mempertimbangkan pemulihan perekonomian global, nasional dan daerah akibat pandemi covid-19 dimana perekonomian Kabupaten Tabanan masih bergantung pada sektor pariwisata.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini, belum mempertimbangkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2022-2026 yang akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, antara lain kebijakan dana perimbangan, retribusi, perpajakan, bantuan keuangan dan pengelolaan cashflow anggaran dari sisi pendapatan, termasuk dari sisi belanja (kebijakan pengembangan infrastruktur, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta bantuan sosial).

3.3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta menjadi prioritas utama dalam pengeluaran daerah lima tahun kedepan, disajikan dalam Tabel 3.11.



Tabel 3.11.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	2.188.830.376.895,00	1.914.203.998.410,58	1.967.917.050.420,20	2.030.041.284.418,19	2.094.415.479.165,30
5.1	BELANJA OPERASI	1.447.178.217.200,76	1.450.338.594.168,78	1.491.035.464.724,28	1.538.105.251.578,39	1.586.879.770.484,31
5.1.01	Belanja Pegawai	866.574.927.826,52	868.467.371.625,36	892.836.787.392,70	921.022.325.746,65	950.228.663.085,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.812.035.541,68	493.888.248.400,72	507.746.878.512,93	523.775.697.352,51	540.385.033.824,61
5.1.05	Belanja Hibah	87.791.253.832,57	87.982.974.142,69	90.451.798.818,65	93.307.228.479,24	96.266.073.574,43
5.2	BELANJA MODAL	483.188.807.745,97	220.406.086.158,97	226.590.737.104,70	233.743.871.923,40	241.156.072.674,01
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.776.090,28	14.808.358,60	15.223.884,92	15.704.480,48	16.202.481,82
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.237.850.831,39	71.393.421.486,30	73.396.739.087,05	75.713.765.708,04	78.114.708.356,91
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.461.440.529,09	61.595.661.262,07	63.324.051.214,07	65.323.097.959,71	67.394.544.418,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	349.642.872.718,82	86.568.510.826,42	88.997.645.301,26	91.807.169.483,58	94.718.446.536,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	831.867.576,39	833.684.225,58	857.077.617,40	884.134.291,59	912.170.880,55
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.626.746.965,00	6.242.058.245,57	6.417.211.990,66	6.619.793.892,80	6.829.712.727,71
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.626.746.965,00	6.242.058.245,57	6.417.211.990,66	6.619.793.892,80	6.829.712.727,71
5.4	BELANJA TRANSFER	251.836.604.983,26	237.217.259.837,26	243.873.636.600,55	251.572.367.023,61	259.549.923.279,27



KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.215.432.697,55	14.332.162.919,65	14.734.327.063,57	15.199.468.001,35	15.681.455.003,62
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	236.621.172.285,71	222.885.096.917,62	229.139.309.536,98	236.372.899.022,26	243.868.468.275,65
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.802.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.539.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.263.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289.802.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.03	Pembayaran Pokok Hutang	20.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00



Uraian Belanja dan Pembiayaan pada Tabel 3.11. berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah digunakan mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Data Pembiayaan Daerah sesuai Tabel 3.11. diatas merupakan prediksi yang dihitung berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimal silpa.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya disajikan pada Tabel 3.12. dan 3.13. di bawah ini:



Tabel 3.12.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.925.567.376.895	1.929.772.469.755	1.983.492.377.038	2.045.253.275.552	2.109.265.062.040
2	Pencairan Dana Cadangan (Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	26.539.558.250	67.170.351.281	63.272.785.192	59.745.409.861	56.217.107.304
	Dikurangi					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.451.285.336.677	1.445.285.336.677	1.505.285.336.677	1.505.285.336.677	1.505.285.336.677
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	500.821.598.468	551.657.484.358	541.479.825.553	599.713.348.736	660.196.832.667



Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut total pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 3.13.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026

No.	Jenis Dana	Proyeksi Anggaran (Rp. X Juta)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Prioritas I	1.375.754,04	1.100.970,27	1.135.751,42	1.175.979,12	1.217.663,75
2	Prioritas II	564.896,53	566.130,16	582.015,92	600.389,30	619.428,12
3	Prioritas III	248.179,80	247.103,57	250.149,71	253.672,86	257.323,61
	Total	2.188.830,38	1.914.204,00	1.967.917,05	2.030.041,28	2.094.415,48

Berdasarkan Tabel 3.13 yang menyajikan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1. Prioritas I untuk program Pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat serta tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun seperti gaji dan tunjangan PNS dan anggota DPRD, belanja jasa listrik, air, telepon, dan belanja sewa yang telah ada ikatan kontraknya, tambahan penghasilan khusus guru yang belum sertifikasi, tunjangan profesi guru, dan pembiayaan pengeluaran untuk dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, penyertaan modal non permanen untuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat, belanja transfer dan belanja pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai



manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah dan terkait langsung dengan janji-janji politik/kampanye Bupati/Wakil Bupati Tabanan periode 2021-2026. Disamping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
3. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tambahan penghasilan ASN, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tabanan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas bidang: 1) Pangan, Sandang, dan Papan; 2) Pendidikan dan Kesehatan; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan 5) Pariwisata. Kelima bidang tersebut didukung dengan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi-misi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka permasalahan pembangunan daerah yang



dihadapi dikelompokkan pada lima aspek yaitu: geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.

4.1.1 Geografi

Aspek geografi wilayah Kabupaten Tabanan memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tabanan tentang kondisi alam seperti luas dan batas wilayah, topografi dan geologi, hidrologi, iklim dan suhu, kerangka pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tabanan, dengan melihat hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Tabanan. Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan kedepan dalam aspek geografi adalah:

- Terjadinya kesenjangan antar wilayah yaitu masih terdapat ketimpangan pembangunan pada wilayah Tabanan bagian utara (Kecamatan Baturiti, Marga, Penebel) dan barat (Kecamatan Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan) dengan wilayah Tabanan bagian selatan (Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan) yang mempengaruhi aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.
- Aksesibilitas antara wilayah Tabanan bagian utara dan barat perlu dikembangkan untuk menciptakan poros baru guna meningkatkan daya saing kedua wilayah tersebut. Aksesibilitas ini berupa kondisi jalan yang masih belum baik dan merata serta topografi wilayah yang terjal. Aksesibilitas ini juga terkait dengan akses informasi berupa keterjangkauan internet akibat kondisi geografi yang tidak mendukung.
- Pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang memiliki potensi namun belum dikembangkan untuk memberikan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.
- Wilayah Tabanan merupakan wilayah rawan bencana, berpotensi terhadap bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan puting beliung.



- Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu segera menindak lanjuti baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasca bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi.

4.1.2 Demografi

Salah satu aset penting dalam pembangunan suatu wilayah yaitu penduduk dimana aset penduduk ini dapat menjadi modal penting jika diberdayakan dengan baik, namun dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik dalam pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839,33 km² memiliki proyeksi penduduk mencapai 445,70 ribu jiwa di tahun 2019. Berdasarkan aspek demografi, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Tabanan memiliki kepadatan penduduk mencapai 531 jiwa per km², dimana terdapat 4 (empat) kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari rata-rata meliputi Kecamatan Kediri (1.777 jiwa per km²), Tabanan (1.464 jiwa per km²), Marga (941 jiwa per km²), dan Kerambitan (926 jiwa per km²). Jika melihat kondisi tersebut, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor geostrategis, selain sebagai pusat perekonomian yang dekat dengan ibu kota kabupaten, kedua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri bersinggungan langsung dengan pusat Kabupaten Badung yang diketahui merupakan salah satu pusat ekonomi Bali dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan juga menjadi bagian Kawasan Metropolitan Sarbagita. Kondisi ini perlu menjadi perhatian sehingga pembangunan-pembangunan yang menunjang kehidupan masyarakat tidak saja bertumpu pada kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi tetapi juga memperhatikan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah namun memiliki potensi sumber daya alam yang penting untuk dikembangkan.



2. Berdasarkan komposisi penduduk, Kabupaten Tabanan mengalami bonus demografi yaitu suatu kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif (rentang usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini erat kaitannya dengan rasio ketergantungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif sehingga jika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari usia non produktif akan memberikan dampak bagi pembangunan secara keseluruhan. Dampak positif bonus demografi bagi pembangunan suatu wilayah dapat menjadi peluang bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat jika penduduk usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang pembangunan dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Demikian pula sebaliknya, dimana bonus demografi dapat berdampak negatif jika kualitas sumber daya yang ada kurang memadai dan tidak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. Bonus demografi juga dapat bersifat negative jika usia produktif tidak dibekali dengan skill yang baik dan mumpuni akan menjadi factor penting pada tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan. Usia produktif juga menjadi tantangan untuk mampu disalurkan menjadi generasi yang sukses serta memiliki akhlak dan perilaku yang baik.
3. Penduduk miskin di Kabupaten Tabanan sampai dengan tahun 2019 mencapai 18,74 ribu jiwa, dimana angka tersebut berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 19,77 ribu jiwa atau sejumlah 4,21 persen. Masih tingginya angka prosentase penduduk miskin di Kabupaten Tabanan memerlukan upaya penanganan yang optimal melalui berbagai upaya yang tepat. Di samping itu, adanya pandemi COVID 19 secara global sejak tahun 2020, tentunya akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan di tahun

mendatang.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu adanya sebaran penduduk miskin yang tidak merata dimana kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi yaitu di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, dan Selemadeg Timur. Pendataan dan verifikasi juga perlu diperbaharui setiap tahunnya dimana akan dapat memberikan gambaran secara nyata tentang penduduk miskin dan dapat diberikan solusi yang tepat bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tabanan.

4.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

4.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup: 1) umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan; 3) kehidupan yang layak. Ketiga komponen tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pengukuran komponen kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran komponen pengetahuan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pengukuran komponen hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data BPS Kabupaten Tabanan 2020 seperti pada gambar 4.1

menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Tabanan tahun 2019 sebesar 76,16, yang mengalami peningkatan dari 71,06 pada tahun 2013, dengan sebutan lain terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 5,1 poin selama 5 tahun. IPM Kabupaten Tabanan tahun 2019 untuk wilayah Provinsi Bali berada pada urutan ke 4 setelah Denpasar, Badung, dan Gianyar. Nilai tersebut diatas nilai IPM Provinsi Bali sebesar 0,78 poin. Sebagai catatan sampai saat ini, IPM Kabupaten Tabanan tahun 2020 belum diterbitkan sehingga belum bisa menggambarkan kondisi terkini, mengingat situasi Pandemi Covid-19.

Gambar 4.1
IPM Tabanan 2013–2019



Sumber: BPS-Tabanan 2020

Capaian IPM tahun 2019 disebabkan oleh angka harapan hidup (73,53 tahun), harapan lama sekolah (12,99 tahun), rata-rata lama sekolah (8,87 tahun) dan pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 14,608 juta). Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan capaian IPM terlebih masa pandemi yang sangat menguncang hampir semua sektor di Bali. Akar permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Angka harapan hidup masih belum maksimal meski sudah diatas

Provinsi Bali, ditambah lagi dalam kondisi pandemi yang belum diukur atas pengaruhnya pada angka harapan hidup masyarakat Tabanan.

- Rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 9 tahun sebagai angka wajib belajar pendidikan dasar.
- Rendahnya pengeluaran per Kapita per tahun masyarakat Tabanan terlebih dengan adanya pandemi dimana berdampak pada seluruh sektor ekonomi Bali sehingga mempengaruhi pengeluaran masyarakat.

4.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkembangnya perekonomian masyarakat suatu wilayah dan sebagai ukuran kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambaran kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan wilayah tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan Pendapatan perkapita penduduk dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan maupun produktivitasnya. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkembangnya perekonomian suatu wilayah maka dari itu pertumbuhan ini sangat penting karena merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu wilayah lebih maju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikasi dalam mengurangi angka pengangguran.

Sejak 2013 Kabupaten Tabanan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,69% hingga 5,63% pada tahun 2019 seperti pada gambar 4.2. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun Tabanan selalu lebih tinggi dari Bali maupun Nasional. Sektor Ekonomi Tabanan banyak dipengaruhi oleh bidang usaha pertanian (21,63%) dan penyedia akomodasi makmin (21,96%). Pandemi Covid-19 ini memberi dampak negatif pada sektor usaha pelayanan jasa

akomodasi makan dan minum, listrik dan gas, mengakibatkan penurunan pertumbuhan PDRB Bali dari 5,67% pada triwulan ke III tahun 2019 menjadi -8,27% di triwulan III tahun 2020. Secara menyeluruh hal ini berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi Tabanan.



Sumber: BPS-Tabanan 2020

Gambar 4.2.

Pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2013-2019 (Kiri) dan pertumbuhan (%) PDRB menurut lapangan usaha triwulan III 2020 (kanan)

Tabel 4.1

Penduduk Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Tabanan, 2019

LAPANGAN KERJA UTAMA	JUMLAH	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	71.583	26,70
Industri Pengolahan	327	0,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	48.606	18,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	798	0,30
Konstruksi	246	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.873	7,41
Jasa Lainnya	45.772	17,07
Jasa Pendidikan	3.622	1,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.405	10,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	618	0,23
Jasa Perusa haan	6.175	2,30
Transportasi dan Pergudangan	-	0,00
Pengadaan Listrik dan Gas	5.359	2,00
Informasi dan Komunikasi	13.507	5,04
Pertambangan dan Penggalian	7.884	2,94
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.065	2,64



LAPANGAN KERJA UTAMA	JUMLAH	%
Real Estate	8.254	3,08
TOTAL	268.094	100,00

Sumber: BPS Tabanan 2020

Masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan disebabkan masih belum optimalnya pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada selain memang sumber daya yang dimiliki masih terbatas. Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah:

- i) Masih rendahnya laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, khususnya pertanian yang merupakan kontributor tertinggi dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi pembentuk PDRB (Tabel 4.1). Padahal pada tahun 2019, pertanian adalah sektor yang dominan menyerap tenaga kerja, sebanyak 26,7%. Hal ini bersumber dari beberapa akar permasalahan:
 - Belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian terutama pada industri hilir, yaitu jasa pengolahan hasil pertanian, sehingga belum mampu memberikan pertumbuhan ekonomi signifikan.
 - Belum optimalnya pengolahan produk pertanian menjadi produk unggulan, yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sebagian besar produk pertanian masih berupa komoditas produk langsung hasil pertanian.
 - Belum optimalnya pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi. Sebagai contoh, Kopi Robusta Pupuan adalah produk unggulan kopi Tabanan dengan sertifikat Indikasi Geografis, namun sampai saat ini hanya diolah secara natural dan *full wash*. Petani hanya mengolah secara natural, hasilnya dijual dalam *Green Bean*, sehingga perlu dikembangkan teknologi pengolahan kopi dengan fermentasi *anaerobic* bertujuan untuk



meningkatkan cita rasa kopi. Industri hilir belum menerapkan *Zero Waste Technology* sehingga belum memberikan nilai tambah optimal.

- Belum dioptimalkan sistem *marketing* atau membuat *branding* Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan.
 - Belum dikelolanya sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, sebagai Lumbung Desa
- ii) Belum optimalnya sektor pengadaan dan pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Tabanan. Sektor ini menyediakan lapangan kerja sebanyak 0,09% di tahun 2019.
- Belum dikelolanya dan dimanfaatkan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah, secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tabanan memiliki banyak sungai besar dan danau, hal ini membawa kejayaan Tabanan dimasa lalu dijuluki sebagai lumbung Padi Bali. Julukan ini tinggal nama, karena belum optimalnya pengolahan air ini, dimana air terbuang begitu saja hingga jutaan liter per detik. Masalah belum optimalnya pengolahan air permukaan di Tabanan mengakibatkan, banyak sawah menjadi kekurangan air dan bergeser menjadi subak abian. Sebagian besar sawah di Tabanan hanya teraliri air di musim hujan. Rendahnya debit air untuk persawahan berakibat menurunnya produksi padi Tabanan.
 - Belum optimalnya pengolahan air, melalui pembuatan waduk di hulu, maupun bantaran sungai akan menjaga sediaan air pertanian yang memadai. Pembangunan waduk dapat meningkatkan persediaan air bersih untuk masyarakat Tabanan secara menyeluruh dan Industri lainnya. Disamping air bersih waduk berpotensi sebagai penyedia listrik tenaga air dan perikanan. Pengolahan air melalui pembangunan waduk dan "*long storage*" diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tabanan.



- Belum terkelolanya dan dimanfaatkan mata air yang tersebar sangat banyak di daerah Tabanan, sebagai industri air bersih pedesaan. Serta proteksi terhadap air sungai dari sampah dan beban pencemar lainnya seperti BOD, colli, total fosfat dan lainnya yang bersumber dari sector rumah tangga, industry kecil maupun pertanian anorganik.
 - Sampah masih menjadi masalah dalam pengolahannya. Sesuai dengan kebijakan Provinsi diupayakan pengolahan sampah berbasis sumber. Perlu dibuat sebuah strategi yang komprehensif untuk penanganan sampah sampai tuntas di tingkat desa. Perlu dilakukan proteksi terhadap sungai dan mata air sehingga tidak tercemar oleh sampah maupun beban pencemar lainnya. Perlu dikembangkan pengolahan sampah di desa melalui upaya *reduce, reuse, recycle* dan pupuk organik. Pengelolaan TPA yang masih *open dumping* serta belum berjalan efektifnya pemilahan sampah rumah tangga akan berdampak besar dimasa depan. Sehingga diperlukan sebuah system terpadu pengolahan sampah yang bisa diterapkan di tingkat kawasan/kecamatan sehingga mampu menyelesaikan sampah di tingkat desa.
- iii) Pedagang besar dan eceran menduduki urutan ketiga dalam menyerap tenaga kerja, namun bidang ini masih belum dioptimalkan dalam meningkatkan nilai jual produk pertanian lokal Tabanan. Belum dioptimalkan distribusi pedagang berjejaring berbasis desa (BUMDesa) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan.
- iv) Belum optimalnya jasa kesehatan dalam dunia pariwisata. Jasa pelayanan Kesehatan Tradisional Bali belum dikembangkan dengan optimal terkait dengan industri pariwisata (*Balinese wellness*). Pengembangan Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dalam industri *Balinese Wellness* akan mampu meningkatkan pengembangan industri farmasi dan kesehatan lainnya, seperti industri kosmetik tematik Bali, Industri Obat

Tradisional, dan Industri Makanan Sehat.

- v) Belum optimalnya memanfaatkan Jasa Pendidikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Tabanan. Tabanan sudah sangat dikenal memiliki SD, SMP, dan SMA berkualitas ditingkat nasional, namun Tabanan belum memiliki Sekolah Unggulan dari tingkat Paud sampai Perguruan Tinggi, yang mampu menarik minat siswa dan mahasiswa untuk datang ke Tabanan menempuh pendidikannya.

4.1.3.3 PDRB Per Kapita

BPS Kabupaten Tabanan 2019 menyatakan PDRB per kapita Kabupaten Tabanan adalah 53,59 juta rupiah/tahun, hal ini berada dibawah PDRB per kapita Provinsi Bali yaitu 58,24 juta rupiah/tahun. Tabanan mengalami peningkatan PDRB per kapita dari tahun 2013 dari 30,11 hingga 53,59 juta rupiah/tahun (Gambar 4.3).



Sumber: BPS-Tabanan

Gambar. 4.3

PDRB Per Kapita Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2013-2019

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam upaya peningkatan pendapatan per kapita adalah:

- i) PDRB per kapita Kabupaten Tabanan masih dibawah rerataan baik Provinsi maupun Nasional, sehingga perlu diupayakan peningkatan PDRB dari 17 sektor ekonomi, secara prioritas dan berbasis pada potensi dan peluang yang dimiliki dari setiap sektor tersebut.

- ii) PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebagai faktor pembagi. Sektor pedagang besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman menyerap tenaga kerja sebanyak 35,4% (Tabel 4.1). Masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 pada triwulan ketiga sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar -5,79%. Prosentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 4,21%, meningkat dari 1,28% di tahun 2019. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran akan meningkatkan jumlah angka pencari kerja dan meningkatkan pengangguran di kabupaten lain yang berasal dari Tabanan. Angka pengangguran ini akan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk Tabanan dan menurunkan PDRB per-kapita Tabanan.

4.1.3.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensional, yang ditandai oleh ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Kemiskinan memang merupakan masalah individu, tetapi selalu ada dalam konteks sosial, sehingga menjadi tanggung jawab komunitas untuk menanggulangnya. Kemiskinan memang tidak bisa dihapus, tetapi bisa dikurangi.



Sumber: BPS-Tabanan, 2020

Gambar 4.4

Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali
Tahun 2013 – 2019

Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Tabanan dari tahun 2013-2019 selalu berada di atas presentase Provinsi Bali, demikian juga dengan angka garis kemiskinannya sebagaimana gambar 4.4. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2019 di Kabupaten Tabanan, namun masih memberikan angka yang lebih tinggi dari provinsi. Angka garis kemiskinan di Kabupaten Tabanan meningkat dari tahun 2013 sebesar 329,29 ribu rupiah mncapai 425,90 ribu rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran rata-rata penduduk miskin perbulan. Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam pengurangan kemiskinan adalah:

- i) Penanganan kemiskinan masih bersifat parsial.
- ii) Masih tingginya angka prosentase penduduk miskin di Kabupaten Tabanan, sehingga perlu diupayakan penanganan yang optimal melalui berbagai upaya yang tepat.
- iii) Perlu dilakukan riset yang lebih mendalam melalui program desa presisi guna memetakan penduduk miskin, potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana agar mendapatkan solusi pengentasan kemiskinan yang tepat. Dimana penduduk miskin bisa hidup berdikari hingga menjadi penduduk mandiri.

4.1.3.5 Pendapatan Penduduk

Pemerataan pendapatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi samarata mungkin diantara warga masyarakat. Pemerintah harus mengupayakan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendapatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional. Pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari indikator nilai Indeks *Gini Ratio* dan

Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia).



Sumber: BPS Tabanan, 2020

Gambar 4.5
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bali dan
Kabupaten Tabanan

Data BPS Tabanan menunjukkan bahwa *Gini Ratio* sejak tahun 2015 hingga 2018 berada pada kategori rendah dimana pada tahun 2018 sudah berada pada 0,320 (Gambar 4.5). Secara menyeluruh *Gini Ratio* Kabupaten Tabanan berada di bawah Provinsi Bali, namun masih ada permasalahan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang untuk upaya pemerataan pendapatan. Permasalahan tersebut adalah:

- Menjaga angka gini rasio pada rentang sedang, sehingga dapat mencegah semakin lebarnya jarak antara penduduk miskin dengan penduduk kaya.
- Masih tingginya perbedaan proporsi penerimaan pendapatan antara kelompok 40% berpenghasilan rendah dengan kelompok 20% berpenghasilan tinggi.

4.1.3.6 Tingkat Pengangguran

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) atau yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, besarnya partisipasi



penduduk dibidang ketenagakerjaan dapat dilihat melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Menurut data BPS Kabupaten Tabanan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 mencapai 359.416 orang, dari jumlah ini, 75,56% termasuk dalam kategori angkatan kerja. Prosentase ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 (77,46%). Pada tahun 2018 penduduk yang bekerja tercatat 98,57 persen dan meningkat menjadi 98,72 persen pada 2019. Sejalan dengan hal tersebut, persentase pengangguran mengalami penurunan dari 1,43 persen menjadi 1,28 persen. TPT pada tahun 2019 laki-laki tercatat sebesar 1,55 persen, sementara TPT perempuan hanya sebesar 0,97 persen.

Tenaga kerja di Tabanan tahun 2019 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 38,83 persen. Sementara itu, sebanyak 36,37 persen dari total tenaga kerja merupakan pengusaha, dimana yang berusaha sendiri sebesar 12,16 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 22,19 persen, dan 4,02 persen berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang berusaha sendiri sebesar 14,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang hanya 10,08 persen. Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Tabanan adalah persentase pekerja keluarga/tidak dibayar yang masih cukup besar, yaitu mencapai 15,09 persen. Pada umumnya, pekerja keluarga didominasi oleh kaum perempuan karena kebanyakan dari mereka membantu suami atau keluarganya untuk menjalankan usaha. Hal ini tercermin dari tingginya persentase perempuan menjadi pekerja keluarga tidak dibayar mencapai 27,20 persen. Sebaliknya penduduk laki-laki yang menjadi pekerja keluarga sangat rendah, hanya 4,78 persen dari total pekerja laki-laki.

Penduduk yang berkecimpung sebagai pekerja bebas baik di



sektor pertanian maupun non pertanian masih ditemukan di Tabanan, walaupun persentasenya kecil. Komposisi pekerja bebas di sektor pertanian lebih dominan perempuan mencapai 4,36 persen sedangkan laki-laki mencapai 2,40 persen. Namun berbeda halnya di non pertanian, pekerja bebas laki-laki mencapai 5,58 persen, lebih tinggi dari pekerja bebas perempuan yang hanya 3,03 persen. Hal ini karena pekerja bebas di non pertanian lebih banyak merupakan pekerjaan konstruksi dimana kontribusi penduduk laki-laki yang dibutuhkan lebih dominan.

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam upaya pemerataan pendapatan adalah:

- i) Masih tingginya prosentase pekerja keluarga / tidak dibayar mencapai 15,09% dimana sebagian besar dari mereka adalah perempuan.
- ii) Rendahnya penduduk yang bekerja bebas pada sektor pertanian, sedangkan pertanian akan dikembangkan menjadi sektor unggulan.

4.1.3.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan pada usia kerja dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan. Tingkat pendidikan juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Tabel 4.2 menyajikan besarnya persentase penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Jumlah Angkatan kerja yang tidak memiliki ijazah pada tahun 2020 adalah 15,46%, meningkat 2,42% dari tahun 2019. Angkatan Kerja Tabanan berpendidikan SMP atau tidak bekerja sebesar 65,18%. Hal ini memerlukan perhatian khusus pemerintah guna meningkatkan daya saing angkatan kerja Tabanan.

Tabel 4.2

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Tabanan tahun 2019 dan 2020

Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
tidak memiliki ijazah	8,43	11,34	17,49	19,45	12,96	15,40
SD sederajat	23,75	21,38	27,61	24,29	25,68	22,84
SMP sederajat	18,18	18,54	19,28	17,21	18,73	17,88
SMA keatas	49,64	48,74	35,62	39,05	42,63	43,90
Kab. Tabanan	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Tabanan, 2020

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tabanan pada tahun ajaran 2019, sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tabanan, untuk SD/MI ada 322 sekolah, SMP/MTs ada 46 sekolah, dan SMA/SMK/MA ada 32 sekolah. Dengan melihat keadaan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA, siswa belum dapat leluasa dalam menentukan pilihan sekolah yang diinginkan terutama pilihan untuk sekolah di wilayah sendiri. Begitu pula untuk melanjutkan pada pendidikan tinggi seperti universitas, masih sedikit pilihan yang dapat dilakukan siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih, sehingga banyak siswa memilih melanjutkan sekolah/kuliah di luar Kabupaten Tabanan.

Rasio murid terhadap guru merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat mutu pengajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan beban tugas guru dalam mengajar pada suatu jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai rasio murid terhadap guru berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung menurun. Pada tabel 4.3 dapat dilihat dimana pada tahun ajaran 2016-2020 rasio murid-guru pada jenjang SD, dan SMP di Kabupaten Tabanan



berada di angka 1:11 hingga 1:13, artinya satu guru bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 anak didik. Rasio paling tinggi terjadi pada jenjang Pendidikan SD, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasionya sebesar 1:11 pada tahun 2016, 1:12 pada 2017, 1:12 pada tahun 2018, 1:13 pada tahun 2019 dan 1:12,79 pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa peningkatan jumlah guru SD tidak sebanding dengan peningkatan siswa SD. Peningkatan rasio yang cukup tinggi juga terjadi pada jenjang SMP, dimana pada tahun 2016 sebesar 1:11, pada tahun 2017 sebesar 1:12, pada tahun 2018 sebesar 1:11, pada tahun 2019 sebesar 1:11 kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 1:12,38. Peningkatan rasio pada jenjang ini paling besar dibandingkan jenjang lainnya. Indikasi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat terkait ketersediaan jumlah guru SD dan SMP agar mutu pengajaran di kelas dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 4.3
Rasio Guru Terhadap Murid

NO	Tingkat Pendidikan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Dasar					
	Rasio Guru Terhadap Murid	1:11	1:12	1:12	1:13	1:12,79
2	Pendidikan SMP					
	Rasio Guru Terhadap Murid	1:11	1:12	1:11	1:11	1:12,38

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah:

- i) Tingginya prosentase angkatan kerja Tabanan berpendidikan SMA sederajat ke bawah memerlukan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas kerja, seperti dengan meningkatkan peluang Pendidikan Vokasional melalui Lembaga Pelatihan Kerja.
- ii) Belum terdatanya kompetensi tenaga kerja Tabanan

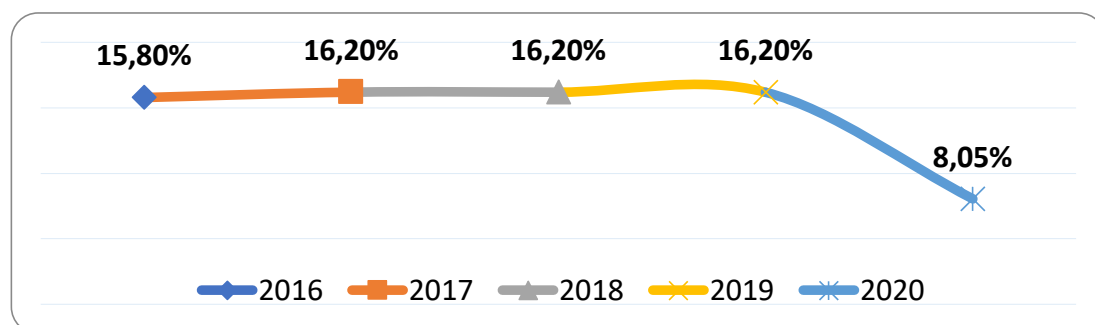
berdasarkan kualitas pendidikannya.

- iii) Belum dipetakan kompetensi unggulan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan pengembangan pembangunan Tabanan.
- iv) Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai baik dari segi pendidikan formal maupun non formal.
- v) Mutu proses pembelajaran belum optimal.
- vi) Perlu ditingkatkan kualitas guru di Tabanan
- vii) Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru PNS.
- viii) Kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah dimana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di sekolah lainnya terjadi kekurangan.
- ix) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik belum berjalan dengan baik terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal.

4.1.3.8 Derajat Kesehatan Masyarakat

Sistem kesehatan nasional menggariskan pembangunan bidang kesehatan pada hakekatnya merujuk pada tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk adalah Angka Kesakitan (Morbiditas). Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Morbiditas Tabanan mengalami penurunan dari tahun 2018 pada 14,48% menjadi 12,84% pada tahun 2020.

Indikator lain yang juga digunakan sebagai tolok ukur dalam



melihat kondisi kesehatan masyarakat diantaranya adalah kondisi persalinan dan stunting. Indikator ini menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selama dua tahun terakhir, proses kelahiran terakhir yang dialami penduduk perempuan di Tabanan ditolong oleh tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Tabanan sangat tinggi dalam memandang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak paska melahirkan. Sedangkan indikator stunting menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Tabanan masih mengalami *stunting* meski sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar 4.6.

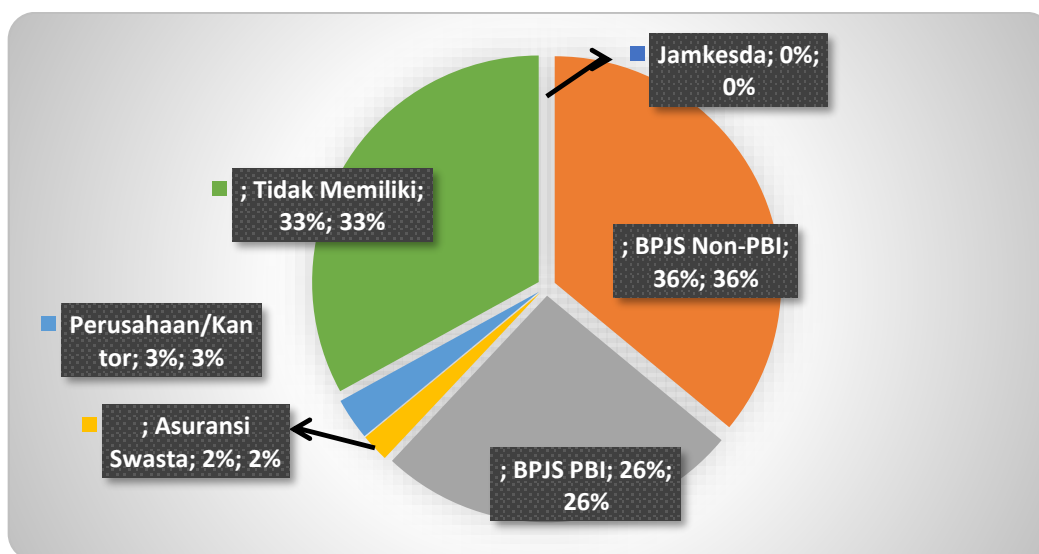
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2020

Gambar 4.6

Stunting di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Tabanan memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Tabanan datang ke dokter praktek mandiri, sebesar 63,15 pada tahun 2019, puskesmas adalah pilihan kedua yaitu sebesar 18,41%. Rumah sakit pemerintah dikunjungi sebesar 10,32%. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan.

Sebaran pembiayaan kesehatan masyarakat Tabanan pada tahun 2019 digambarkan pada Gambar 4.7. Hampir sebagian besar masyarakat Tabanan menggunakan pembiayaan jaminan kesehatan, namun masih 33% belum memiliki jaminan kesehatan.



Sumber: BPS Tabanan, 2020

Gambar 4.7

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2019

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah:

- i) Belum dimanfaatkan sarana kesehatan pemerintah oleh masyarakatnya, sehingga perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan sistem pelayanan terintegrasi antara pelayanan pemerintah dan swasta.
- ii) Belum semua masyarakat Tabanan memiliki jaminan kesehatan
- iii) Belum diperoleh data sistem kesehatan terintegrasi dan berjejaring guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada publik

4.1.4 Pelayanan Umum

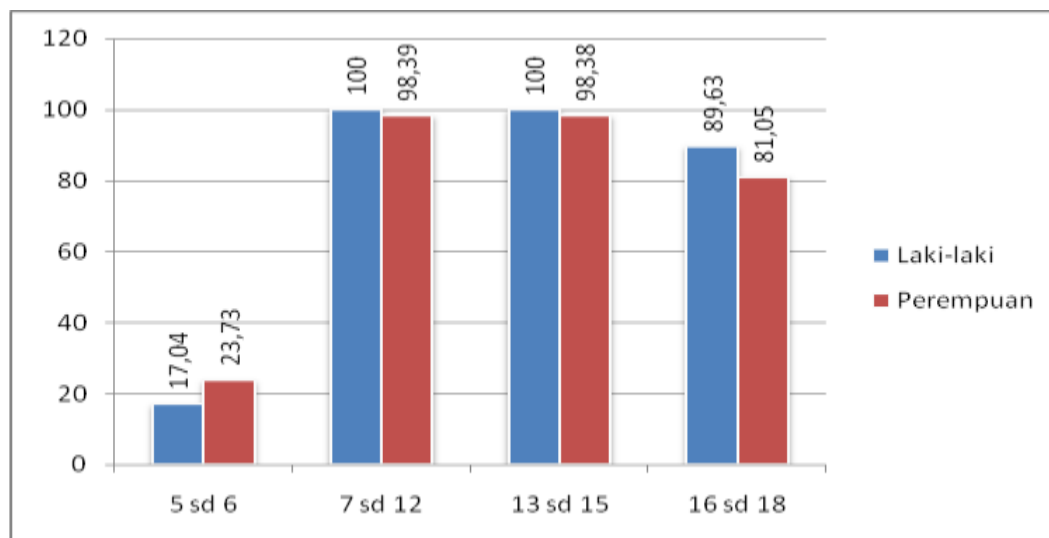
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Lampiran, Permendagri, No. 86 Tahun 2017). Aspek

pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Menurut UU. No. 23 Tahun 2014, bidang urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, serta penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

4.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pemerintah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan. Adapun kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.



Sumber BPS Tabanan, 2020

Gambar. 4.8

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabanan 2019

Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,20%, dan menurun menjadi 99,19% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan



ketuntasan belajar 9 tahun menurun pada tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya, dimana terdapat 0,81% belum menyelesaikan pendidikan 9 tahunnya di tahun 2020. APS kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2019, yaitu 99,19% dan menurun ke level 98,65% di tahun 2020. APS kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2019 adalah 85,34%, meningkat menjadi 87,49% di tahun 2020. Dilihat menurut jenis kelamin, APS perempuan jauh di bawah laki-laki. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pada usia ini banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Berdasarkan hasil Susenas 2019, banyaknya penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan yang dapat membaca dan menulis tercatat sebanyak 94,93 persen meningkat 2,81 persen dibanding tahun sebelumnya. Sisanya sebanyak 5,07 persen adalah mereka yang buta huruf. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tabanan tahun ajaran 2019, sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tabanan, untuk SD/MI ada 322 sekolah, SMP/MTs ada 46 sekolah, dan SMA/SMK/MA ada 32 sekolah.

Pada tahun ajaran 2017-2019 rasio murid-guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tabanan berada di angka 10 hingga 14. Rasio paling tinggi terjadi pada jenjang Pendidikan SMP, dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rasionya sebesar 11,50 pada tahun 2019; 11,51 pada tahun 2018; dan 10,68 pada 2017. Peningkatan rasio yang cukup tinggi juga terjadi pada jenjang SMA, dimana pada tahun 2017 sebesar 10,64 menjadi 11,04 pada 2018 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 13,76. Hal ini menandakan bahwa peningkatan jumlah guru tidak sebanding dengan peningkatan siswa.

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam pelayanan pendidikan adalah:

- i) Perlu ditingkatkan keberhasilan wajib belajar 9 tahun



dan 12 tahun.

- ii) Masih rendahnya persentase kualitas mutu akreditasi dan setifikasi pendidik TK dan SD.
- iii) Masih perlu ditingkatkan partisipasi pendidikan sekolah di semua jenjang pendidikan.
- iv) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan bermutu guna meningkatkan kualitas SDM Tabanan Unggul.
- v) Masih belum memadai fasilitas jumlah dan kualitas Gedung sekolah pada tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.
- vi) Masih belum memadai sarana dan prasarana Sekolah dalam melaksanakan pendidikan daring dan luring, untuk mewujudkan Tabanan Era Baru.
- vii) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal di semua jenjang pendidikan;

b. Kesehatan

Pelayanan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup manusia dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan demikian akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek yang menyangkut kesehatan seperti angka kematian bayi, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, penolong kelahiran, balita yang diimunisasi, persentase balita yang pernah disusui, serta lamanya pemberian ASI masih merupakan masalah dalam pembangunan di Tabanan.

Pada tahun 2019, kondisi kesehatan penduduk di Tabanan lebih baik dibandingkan tahun 2018. Hal ini dilihat dari angka kesakitan yang menurun, dari 14,48% pada tahun 2018 menjadi 13,86% di tahun 2019. Pada tahun 2019, sebanyak 71,15 persen proses persalinan ditolong oleh dokter kandungan dan sisanya dibantu oleh bidan. Selama dua tahun terakhir,

proses kelahiran terakhir yang dialami penduduk perempuan di Tabanan ditolong oleh tenaga medis. Tenaga non medis seperti dukun bayi dan non medis lainnya sudah bukan menjadi pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Tabanan sangat tinggi dalam memandang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak paska melahirkan.

Tabel 4.4

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2017 – 2019

FASILITAS KESEHATAN	2017	2018	2019
Rumah Sakit	8	9	9
Klinik	10	10	12
Puskesmas	20	20	20
Puskesmas Pembantu	82	82	78
Posyandu	828	830	860

Sumber : BPS Tabanan, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2017 – 2019 yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan untuk fasilitas kesehatan posyandu dimana di tahun 2018 sejumlah 830 unit menjadi 860 unit di tahun 2019. Dari gambar 4.7, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 sebesar 36 persen penduduk yang berobat jalan menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang dalam pelayanan bidang kesehatan adalah:

- i) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat belum optimal.
- ii) Belum optimalnya tingkat kualitas pelayanan kesehatan pemerintah.



- iii) Masih tingginya jumlah penduduk yang belum menerima bantuan iuran JKN
- iv) Belum optimalnya pelayanan posyandu guna menekan *stunting*
- v) Masih ditemukannya gizi buruk dan *stunting* serta meningkatnya obesitas.
- vi) Capaian SPM bidang kesehatan belum 100 %.
- vii) Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- viii) Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetis Melitus, Kanker, Jantung).

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Urusan wajib pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi pembangunan di bidang infrastruktur, terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi, konservasi sumber daya air, pengaturan jasa kontruksi dan penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan.

Infrastruktur jalan dari panjang total 863,218 km, dalam kondisi baik sudah 78,29 % (675,830 Km), kondisi rusak ringan sampai berat sekitar 21,71% (187,388 Km). Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak ringan sebanyak 22 buah dari total 59 jembatan. Perlu di bangun jalan lintas tengah (Sanda – Wangaya Gede), yang berfungsi sebagai jalur konektivitas destinasi wisata wilayah utara dan barat (Jatiluwih – TTP Sanda) dan pembangunan 7 buah jembatan baru. Kebutuhan untuk irigasi sawah di Tabanan mencapai 342,83 juta m³/tahun, namun belum didukung dengan jaringan irigasi cukup baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lima puluh delapan koma tujuh satu prosen (58,71 %) jaringan irigasi dalam



kondisi rusak merata di seluruh wilayah. Cakupan layanan air bersih Kabupaten Tabanan telah mencapai 83,53%, masih dibutuhkan peningkatan cakupan layanan sejumlah 16,47%. Belum optimalnya pelayanan akan kebutuhan air bersih yang diberikan PDAM ke pelanggan, dan belum memenuhi 4 K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan berkelanjutan), diperlukan pengembangan dan optimalisasi.

Sesuai data BPS, 86% penduduk telah menggunakan jamban milik sendiri, sedangkan 13,4% menggunakan lainnya yang bisa berupa jamban bersama, MCK Umum dan atau melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Dari 133 desa baru 18,79% yang menyandang status ODF (*open defecation free*) atau baru 25 desa ODF. Drainase sepanjang 88.082 km: kondisi baik 48,77% (42,956.73 km) 26,95% (23,741.70 km), kondisi sedang, 16,10% (14,177.70 km) kondisi rusak dan 8,18% (7,205.70 km) masih dalam kondisi tanah. Dimensi saluran drainase perkotaan yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemanfaatan lahan. Bangunan prasarana aparatur pemerintah 26 unit dalam kondisi rusak berat, 3 unit kondisi kurang baik dan 163 unit kondisi baik. Bangunan prasarana publik 244 unit dalam kondisi rusak berat, 138 unit dalam kondisi kurang baik.

Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang antara lain:

- i) Masih terdapat jalan dalam kondisi belum mantap sepanjang 181,288 km (21,01%);
- ii) Belum optimalnya kinerja Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air dimana masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi belum mantap sejumlah 255,182 m (43,86%);
- iii) Belum seluruh desa mendapatkan akses air minum layak dimana cakupan air minum kabupaten baru



mencapai 83,53%;

- iv) Layanan sanitasi khususnya air limbah baru mencapai 97,5 %, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak;
- v) Masih terdapat genangan di beberapa titik dan kondisi drainase/gorong-gorong dan trotoar sebagian besar dalam kondisi rusak;
- vi) Kondisi prasarana aparatur publik masih belum optimal dimana terdapat kurang lebih 15-20% masih dalam kondisi kurang mantap;
- vii) Kondisi penataan ruang yang belum didukung dengan peraturan yang memadai sehingga menghambat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Semangat pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah menjamin atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat serta menjaga kualitas kawasan permukiman. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- i) Masih terdapat adanya kawasan kumuh yang belum tertangani dimana lebih banyak pada kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yaitu sejumlah kurang lebih 8,24 Ha atau 7,08%.
- ii) Kebutuhan penyediaan rumah layak huni masih cukup tinggi, dimana masih terdapat rumah tidak layak huni di masyarakat.
- iii) Belum teridentifikasi kebutuhan rumah yang terkena dampak bencana, atau terkena dampak program pemerintah.
- iv) Pada beberapa kawasan perumahan, belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas yang memadai.
- v) Banyak pengembang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya dan sudah banyak dalam



kondisi rusak.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kehidupan yang tentram dan rasa aman merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Rasa aman tersebut akan memberikan keyakinan bagi masyarakat untuk beraktivitas guna meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan melaksanakan fungsinya dan menjamin rasa aman bagi masyarakatnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- i) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan.
- ii) Pelayanan dasar sesuai SPM masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang.
- iii) Belum semua desa rawan bencana mendapatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat melalui kelompok Jaga Baya.
- iv) Perlunya penguatan karakter kebangsaan untuk menjawab ancaman radikalisme.

f. Sosial

Pasal 34 UUD 1945 memberikan semangat bahwa pemerintah daerah harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya. Keadilan sosial yang dimaksud adalah agar pemerintah memberikan dukungan bagi mereka yang mengalami kendala dalam menjalankan kehidupannya dengan tanpa memandang atas suku, adat, ras, dan agama. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya memberikan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan kemampuan daerah agar mereka dapat meneruskan kehidupan selayaknya. Namun permasalahan



bidang sosial masih dihadapi antara lain:

- i) Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani.
- ii) Belum terintegrasikannya amanat tentang standar pelayanan minimal urusan sosial kedalam dokumen perencanaan daerah.
- iii) Terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada.
- iv) Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
- v) Belum optimalnya peran rumah singgah dan sistem SLRT dalam penanggulangan kemiskinan.

4.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Dalam memberikan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan pemerintah kabupaten selalu berupaya untuk memfasilitasi pertumbuhan lowongan kerja dengan meningkatkan investasi yang masuk serta menumbuhkembangkan UMKM yang potensial. Selain itu pemerintah selalu berupaya agar tenaga kerja yang ada melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Melalui Cipta



kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan adanya tuntutan globalisasi ekonomi.

Cakupan dari Cipta Kerja terkait dengan:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
- d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Ruang lingkup dari Cipta Kerja cukup luas, sehingga perlu dipedomani oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kewenangannya dan potensi yang ada di masing-masing daerah. Adapun ruang lingkup dari Cipta Kerja meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan ekonomi
- h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. penguatan sanksi.

Selama ini tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan tergolong rendah mencapai 1,28 persen dari angkatan kerja. Namun jika ditelisik lebih jauh masih banyak permasalahan yang harus menjadi fokus lima tahun mendatang, antara lain:

- i) Penanganan angkatan kerja yang menganggur belum dilakukan secara sistemik.
- ii) Masih tingginya kesenjangan antara jumlah pencari



kerja dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga daya tawar pencari kerja dalam pemenuhan hak-haknya cenderung sangat lemah.

- iii) Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- iv) Lembaga Latihan Kerja (LLK) Meliling sebagai tempat meningkatkan kompetensi tenaga kerja belum didukung oleh sarana prasarana gedung dan SDM yang memadai.
- v) LLK belum memiliki fokus pelatihan unggulan untuk mencetak tenaga kerja yang memiliki daya saing terbaik dibandingkan dengan lulusan LLK di tempat lain.
- vi) Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.
- vii) Bonus Demografi belum mampu dimanfaatkan secara optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan selalu menjadi fokus pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender yang mencapai 78,14%. Namun masih ada permasalahan yang akan dihadapi selama lima tahun mendatang, antara lain:

- i) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah
- ii) Perlu dibukakan peluang bagi kesetaraan dan keadilan gender.
- iii) Perlu upaya lebih serius untuk meningkatkan status sebagai kabupaten layak anak
- iv) Peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga belum dilakukan secara terpadu dan sistematis
- v) Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan



belum dilakukan secara maksimal.

c. Pangan

Meski ada beberapa desa berstatus rawan pangan, namun hal tersebut lebih disebabkan pada pemanfaatan lahan yang diarahkan perkebunan sesuai dengan potensi dan keunggulan geografis. Kabupaten Tabanan telah mencapai angka 91,5 dalam skor pola pangan harapan pada tahun 2019 yang dapat diartikan bahwa masyarakat telah memiliki ketahanan pangan yang baik. Namun pandemi Covid-19 memberikan pengalaman bahwa ketahanan pangan keluarga yang memanfaatkan pekarangan menjadi solusi menjaga asupan gizi keluarga. Kedepan permasalahan urusan pangan yang menjadi fokus pembangunan adalah:

- i) Ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai sumber karbohidrat masih sangat tinggi.
- ii) Pemanfaatan lahan tidak produktif dan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga belum menjadi gerakan yang luas.
- iii) Sumber protein dari sumber daya perikanan belum digarap secara maksimal.
- iv) Fluktuasi harga pangan, seperti: sayur-mayur, telur, daging, dan lain-lain sering kali terjadi pada musim-musim tertentu.
- v) Masyarakat belum terlindungi secara maksimal dari bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti: bahan pangan yang tercemar logam berat serta mengandung pengawet, pewarna, dan penyedap yang tidak sesuai standar kesehatan.
- vi) Penanganan pasca panen terhadap komoditas pangan yang dihasilkan oleh petani Tabanan belum dilakukan secara optimal.

d. Pertanian

Kasus konflik pemanfaatan tanah di Kabupaten Tabanan



jarang terjadi karena hampir sebagian besar wilayah/tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah bukti kepemilikan tanah belum semua bersertifikat. Permasalahan yang dihadapi bidang pertanahan antara lain:

- i) Masih adanya bidang tanah masyarakat yang belum bersertifikat.
- ii) Asset tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan belum seluruhnya memiliki sertifikat dan belum dikelola dengan manajemen yang baik.
- iii) Tanah milik pemerintah daerah belum terbebas dari konflik dengan masyarakat.
- iv) Konflik batas wilayah antar desa masih terjadi

e. Lingkungan Hidup

Kendala terbesar yang dihadapi Tabanan adalah pengelolaan sampah dan limbah baru hanya limapuluhan persen dari daerah perkotaan yang mampu dilayani, itupun dengan metode kumpul dan buang. Perlu upaya mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dan limbahnya sendiri dan peningkatan keterlibatan pihak desa serta pihak lainnya. Pengelolaan TPA yang masih open dumping serta belum optimalnya pemilahan sampah di tingkat sumber akan berdampak buruk terhadap lingkungan di masa depan. Sehingga diperlukan upaya yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan tuntas di tingkat desa. Dengan roadmap yang jelas dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, dari pemilahan, pengangkutan sampai dengan pengelolaannya sehingga mampu di duplikasikan di desa yang lainnya. Issue perubahan iklim juga harus mendapat perhatian serius seperti mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, mengurangi perilaku yang berdampak kepada pemanasan global dan gas rumah kaca, serta giat melakukan penghijauan/ reboisasi di daerah kritis. Upaya-upaya adaptasi dan mitigasi harus terus digalakkan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Selain itu kendala yang



dihadapi adalah upaya mempertahankan daya dukung lingkungan untuk menopang kebutuhan masyarakat.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara umum, kajian terhadap daya dukung dan daya tampung dilakukan melalui pendekatan jasa ekosistem, yang memuat 20 kondisi fungsi jasa ekosistem di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil analisis indeks komposit fungsi ke 20 jasa ekosistem, Kabupaten Tabanan bagian barat sampai utara memiliki fungsi jasa ekosistem yang sangat tinggi pada sektor pariwisata, sehingga lebih banyak di prioritaskan untuk pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan hidup pada sektor wisata. Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tabanan pada dasarnya hanya pada bagian tengah saja yang dapat dikembangkan menjadi prioritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan fungsi jasa ekosistemnya. Hal yang paling mempengaruhi adalah fungsi jasa ekosistem dalam hal penyediaan air bersih yang akan bersaing dengan konsumsi domestik dan pariwisata serta diprediksi akan memperburuk kualitas jasa ekosistem dalam pengendalian hama, pemeliharaan tanah, hingga pendukung siklus hara. Selain melihat pada fungsi jasa ekosistem, kajian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Tabanan juga ditinjau berdasarkan proyeksi daya dukung pangan dan daya dukung air seperti ditunjukkan pada tabel 4.5 dan 4.6.

Berdasarkan tabel 4.5, ada 6 kecamatan di Kabupaten Tabanan yang memiliki isu penyediaan air, baik diakibatkan oleh kapasitas produksi maupun ketersediaan layanan penyediaan air (SPAB). Enam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Baturiti, Marga, Penebel, Pupuan, Selemadeg Barat, dan Selemadeg Timur. Dari 6 (enam) kecamatan ini, hanya Kecamatan Penebel yang kapasitas produksinya dapat ditingkatkan dari sumber daya air yang telah dimiliki oleh PDAM / PAMDES.



Tabel 4.5
Daya Dukung Air Berdasarkan Fungsi Jasa Ekosistem Per Tahun

Kecamatan	Potensi Air (m ³ /th) berbasis jasa ekosistem	Kebutuhan Air (m ³ /th) - domestik, pertanian, perkebunan			Daya Dukung Air (m ³ /th) berdasarkan fungsi jasa ekosistem penyedia air		
		2017	2020	2030	2017	2020	2030
Baturiti	28,987,872.11	3,398,620.16	3,423,805.16	3,507,755.16	25,589,251.95	25,564,066.95	25,480,116.95
Kediri	9,030,879.01	5,657,116.92	5,778,114.42	6,181,439.42	3,373,762.09	3,252,764.59	2,849,439.59
Kerambitan	14,116,913.84	2,558,219.30	2,573,549.30	2,624,649.30	11,558,694.54	11,543,364.54	11,492,264.54
Marga	8,150,406.15	2,610,448.70	2,628,516.20	2,688,741.20	5,539,957.44	5,521,889.94	5,461,664.94
Penebel	42,905,040.01	3,290,540.38	3,295,467.88	3,311,892.88	39,614,499.63	39,609,572.13	39,593,147.13
Pupuan	44,161,401.59	2,428,297.87	2,435,962.87	2,461,512.87	41,733,103.72	41,725,438.72	41,699,888.72
Salamadeg Barat	19,632,620.70	1,314,381.97	1,319,856.97	1,338,106.97	18,318,238.73	18,312,763.73	18,294,513.73
Salamadeg Timur	18,676,573.06	1,614,245.87	1,619,720.87	1,637,970.87	17,062,327.19	17,056,852.19	17,038,602.19
Selemadeg	10,818,924.50	1,411,769.55	1,416,149.55	1,430,749.55	9,407,154.95	9,402,774.95	9,388,174.95
Tabanan	7,444,277.06	4,458,446.52	4,508,269.02	4,674,344.02	2,985,830.54	2,936,008.04	2,769,933.04
Total Kab Tabanan	203,924,908.03	28,742,087.24	28,999,412.24	29,857,162.24	175,182,820.80	174,925,495.80	174,067,745.80

Sumber : KLHS Kab Tabanan

Tabel 4.6
Daya Dukung Air Berdasarkan Potensi dan Kapasitas Produksi SPAB

Kecamatan	Potensi Air Baku (m ³ /th) dari PDAM dan PAMDES	Produksi terpasang Air Baku (m ³ /th) dari PDAM dan PAMDES	Daya Dukung Potensi Air Baku dari PDAM dan PAMDES (m ³ /th)			Daya Dukung Potensi Air Baku yang mampu diproduksi dari PDAM dan PAMDES (m ³ /th)		
			2017	2020	2030	2017	2020	2030
Baturiti	3,090,528.00	2,633,256.00	-308,092.16	-333,277.16	-417,227.16	-765,364.16	-790,549.16	-874,499.16
Kediri	9,870,768.00	9,870,768.00	4,213,651.08	4,092,653.58	3,689,328.58	4,213,651.08	4,092,653.58	3,689,328.58
Kerambitan	9,145,440.00	3,481,574.40	6,587,220.70	6,571,890.70	6,520,790.70	923,355.10	908,025.10	856,925.10
Marga	772,632.00	772,632.00	1,837,816.70	1,855,884.20	1,916,109.20	1,837,816.70	1,855,884.20	1,916,109.20
Penebel	5,834,160.00	1,624,104.00	2,543,619.62	2,538,692.12	2,522,267.12	1,666,436.38	1,671,363.88	1,687,788.88
Pupuan	473,040.00	473,040.00	1,955,257.87	1,962,922.87	1,988,472.87	1,955,257.87	1,962,922.87	1,988,472.87
Salamadeg Barat	630,720.00	630,720.00	-683,661.97	-689,136.97	-707,386.97	-683,661.97	-689,136.97	-707,386.97
Salamadeg Timur	1,419,120.00	1,419,120.00	-195,125.87	-200,600.87	-218,850.87	-195,125.87	-200,600.87	-218,850.87
Selemadeg	9,729,171.36	1,945,771.20	8,317,401.81	8,313,021.81	8,298,421.81	534,001.65	529,621.65	515,021.65
Tabanan	61,526,736.00	14,232,196.80	57,068,289.48	57,018,466.98	56,852,391.98	9,773,750.28	9,723,927.78	9,557,852.78
Total Kab Tabanan	102,492,315.36	37,083,182.40	73,750,228.12	73,492,903.12	72,635,153.12	8,341,095.16	8,083,770.16	7,226,020.16

Sumber : KLHS Kab Tabanan



Tabel 4.7
Daya Dukung Lahan untuk Pemenuhan Pangan

Kecamatan	Ketersediaan lahan untuk pangan berdasarkan Keberlanjutan Fungsi Jasa Ekosistem (Ha)	Kebutuhan Lahan untuk pangan (Ha)			Daya Dukung Lahan untuk pemenuhan Pangan DENGAN mempertimbangkan keberlanjutan fungsi jasa ekosistem (Ha)			Daya Dukung Lahan untuk pemenuhan Pangan TANPA mempertimbangkan keberlanjutan fungsi jasa ekosistem (Ha)		
		2017	2020	2030	2017	2020	2030	2017	2020	2030
Baturiti	5,932.84	6,280.30	6,340.10	6,539.43	-347.46	-407.26	-606.60	472.89	413.09	213.75
Kediri	4,515.10	12,093.90	12,381.20	13,338.87	-7,578.80	-7,866.10	-8,823.77	-7,725.40	-8,012.70	-8,970.37
Kerambitan	3,980.96	5,066.10	5,102.50	5,223.83	-1,085.14	-1,121.54	-1,242.87	-980.07	-1,016.47	-1,137.80
Marga	3,289.31	5,436.60	5,479.50	5,622.50	-2,147.29	-2,190.19	-2,333.19	-2,030.46	-2,073.36	-2,216.36
Penebel	7,814.70	5,821.40	5,833.10	5,872.10	1,993.30	1,981.60	1,942.60	4,554.36	4,542.66	4,503.66
Pupuan	7,267.53	5,088.20	5,106.40	5,167.07	2,179.33	2,161.13	2,100.47	9,194.79	9,176.59	9,115.93
Salamadeg Barat	5,194.90	2,524.60	2,537.60	2,580.93	2,670.30	2,657.30	2,613.97	6,813.21	6,800.21	6,756.87
Salamadeg Timur	3,837.47	2,797.60	2,810.60	2,853.93	1,039.87	1,026.87	983.54	2,852.31	2,839.31	2,795.98
Selemadeg	3,175.23	2,555.80	2,566.20	2,600.87	619.43	609.03	574.36	2,760.26	2,749.86	2,715.19
Tabanan	3,537.56	9,665.50	9,783.80	10,178.13	-6,127.94	-6,246.24	-6,640.57	-6,124.36	-6,242.66	-6,636.99
Total Tabana	48,545.59	57,330.00	57,941.00	59,977.67	-8,784.41	-9,395.41	-11,432.07	9,787.52	9,176.52	7,139.86

Sumber : KLHS Kab Tabanan

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, jika ketersediaan lahan untuk pemenuhan pangan dilihat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan fungsi jasa ekosistem, maka secara umum Kabupaten Tabanan memiliki surplus lahan untuk penyediaan pangan. Namun jika memandang dari aspek keberlanjutan fungsi jasa ekosistem, wilayah ini mengalami defisit lahan yang berkelanjutan dalam penyediaan pangan.

Sebagai daerah dengan keunggulan geografis sebagai wilayah pertanian pengelolaan sumberdaya alam menjadi krusial. Hal ini ditunjukkan rendahnya indeks kualitas lingkungan Kabupaten Tabanan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Capaian indeks kualitas lingkungan hidup belum maksimal.
- Pengelolaan sampah berbasis sumber belum optimal.
- Penanganan sampah masih terpola “kumpul – angkut – buang” sehingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada kondisinya semakin kritis.
- Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik.
- Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil telah dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana bersinergi dengan pemerintahan desa untuk update data penduduk serta pelayanan berbasis desa sehingga tidak harus Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikan catatan kependudukan. Permasalahan yang masih dihadapi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

- i) Kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah.
- ii) Belum semua penduduk memiliki Akta Kelahiran.
- iii) Proses pengurusan akte kelahiran bagi pasangan yang menikah lebih dari satu kali masih dianggap rumit oleh masyarakat.
- iv) Masih ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.
- v) Proses perbaikan NIK sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- vi) Birokrasi pelayanan Santunan Kematian belum berjalan secara optimal sehingga sebagian besar masyarakat tidak tertarik mengikuti proses yang ditetapkan.
- vii) Program Santunan Kematian belum dapat dimanfaatkan untuk pemutakhiran (*updating*) data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan besar dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah bagaimana mensinergiskan pembangunan yang dilakukan di desa dengan pembangunan yang dilakukan di kabupaten. Salah satu sumber permasalahan adalah belum tersedianya mekanisme pemantauan perkembangan desa secara akurat dan cepat sebagai penyamaan data dalam membangun

kebijakan. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tabanan telah terbentuk 128 BUMDes (96,24%) dimana sebanyak 65 BUMDes yang menjalankan usaha toko. Dengan adanya BUMDes tersebut akan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Tabanan dan juga dapat meningkatkan target Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Di samping itu pula dapat meningkatkan target RPJMD Semesta Berencana Prov. Bali tahun 2018-2023 khususnya pada Misi 16 dan Misi 17. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa antara lain:

- i) Belum semua desa memiliki BUMDes yang menjadi faktor utama dalam ekonomi desa.
- ii) Belum terbangunnya sistem pendataan desa yang presisi dalam mensinergiskan kebijakan pemerintah kabupaten dan kebijakan pemerintah desa.
- iii) Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan desa belum maksimal disemua desa.
- iv) Diperlukan dorongan dalam inovasi di tiap desa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Melihat *total fertility rate* Tabanan yang sudah mencapai 2,0 dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran untuk membangun keluarga berencana. Sehingga diperlukan upaya lanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu ada beberapa permasalahan perlu diatasi dalam pembangunan kedepan antara lain:

- i) Penguatan keluarga melalui pembinaan 8 fungsi keluarga belum berjalan sesuai harapan
- ii) Penyuluh KB yang telah tersebar di seluruh kecamatan belum diberdayakan secara maksimal dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga yang sehat dan

sejahtera.

- iii) Proses edukasi tentang kesehatan reproduksi, tumbuh-kembang anak, stunting, gizi keluarga, dan lain-lain terhadap remaja pra nikah sangat terbatas.

i. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam bertransportasi. Fokus dalam pelayanan perhubungan adalah menyediakan fasilitas keselamatan transportasi darat serta pengelolaan transportasi darat termasuk parkir. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- i) Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik belum optimal.
- ii) Kondisi terminal kurang representatif dan adanya aktivitas lain yang mengganggu fungsi terminal.
- iii) Lokasi parkir masih banyak menggunakan badan jalan sehingga mempengaruhi fungsi dari jalan itu sendiri.
- iv) Belum terkoneksinya antar wilayah dengan transportasi masal.
- v) Persaingan antara transportasi konvensional dengan transportasi *online*.
- vi) Belum terintegrasinya ATCS (*Area Traffic Control System*) dengan seluruh APILL di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan;
- vii) Layanan Penerangan Jalan Umum berbasis *Smart City* belum terlaksana.

j. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika mengemban tugas berat dalam era digital saat ini. Tuntutan penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi terus meningkat yang sangat diharapkan setiap pelayanan dan pelaksanaan tugas di pemerintahan menggunakan TI. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung baik bagi penyedia



layanan maupun pengguna layanan yakni masyarakat. Hal yang krusial saat ini dibangun adalah kesiapan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk membangun infrastruktur berkaitan dengan *big data* yang akan menjadi sentral dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, permasalahan yang akan dihadapi lima tahun yang akan datang antara lain:

- i) Lemahnya penerapan *e-government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- ii) Belum terbangunnya *big data* pembangunan daerah sebagai basis kinerja ASN serta penyiapan infrastruktur pendukung.
- iii) Belum optimalnya pengelolaan informasi pelayanan publik berbasis media sosial dan lainnya sebagai corong penyebarluasan pelaksanaan pembangunan.
- iv) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola TI
- v) Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem informasi/*website*, data, serta infrastruktur.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Tabanan merupakan wilayah agraris yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan tidak ada kegiatan industri besar. Sehingga kegiatan perekonomian ditopang oleh usaha kecil dan menengah termasuk pedagang kecil. Ada 42.702 unit usaha kecil dan menengah serta 586 koperasi yang telah berkontribusi pada bergulirnya ekonomi di Kabupaten Tabanan namun jumlah tersebut masih kurang khususnya dalam sinergi pembangunan pertanian yang mensejahterakan masyarakat. Selain itu jika dilihat dari data tenaga kerja yang bekerja tanpa dibayar, menandakan bahwa masih banyak UMKM berbasis keluarga yang tidak menentukan besar bayaran upah tenaga kerja. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyangkut Koperasi, Usaha Kecil, dan



Menengah yang perlu dipedomani oleh Pemerintah Daerah yaitu Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Namun demikian, untuk mengembangkan koperasi dan UMKM, ada beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan, antara lain:

- i) Belum terjalinnya hubungan interaksi yang kuat antara kelompok UMKM, dengan BUMD, BUMDes dan pertanian.
- ii) Menurunnya jumlah koperasi aktif dan melemahnya peran koperasi dalam mendukung sektor riil dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- iii) Peran UKM dalam menyerap tenaga kerja relatif besar, namun daya saing dan produktivitasnya masih lemah.
- iv) Minat masyarakat sebagai wirausaha masih sangat kurang dibandingkan dengan sektor formal walaupun upah yang mereka terima pada sektor formal relatif kecil.
- v) UKM yang terjangkau/mendapatkan pendampingan dan pembinaan masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada.

1. Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi tiap tahun. Sedangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi besar dan tumbuh positif pertahun. Terlebih lagi dengan terjadinya pandemi ini, penanaman modal akan sulit tumbuh positif berkaitan terjadinya koreksi pada perekonomian di seluruh dunia. Kondisi ini bisa jadi tantangan sekaligus potensi dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Tabanan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dipedomani oleh Pemerintah Daerah yang meliputi investasi khususnya Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan peluang bagi investasi Pemerintah



Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Untuk pengembangan kedepan, beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi adalah:

- i) Belum optimalnya pelayanan perijinan mengingat tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- ii) Jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Tabanan cenderung menurun sejak lima tahun terakhir.
- iii) Belum terhubungnya antara investasi yang masuk dengan kompetensi angkatan kerja yang tersedia.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu dorongan lebih dalam keterlibatan pemuda. Sedangkan pada bidang olah raga, Tabanan terkendala dalam pembinaan olahragawan muda. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun kepemudaan dan olah raga antara lain:

- i) Antusias pemuda dalam berorganisasi untuk terlibat dalam proses pembangunan semakin menurun.
- ii) Belum maksimalnya dikembangkan *sport tourism* di Tabanan, padahal memiliki potensi besar.
- iii) Masih diperlukannya wadah yang mengapresiasi karya dan aktivitas kreatif pemuda.
- iv) Kualitas sarana dan prasarana keolahragaan terus menurun

n. Statistik

Pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien jika saja didukung oleh data yang presisi. Sehingga diperlukan upaya dalam membangun bidang statistik agar dapat berkontribusi maksimal pada pembangunan kebijakan. Permasalahan yang masih menjadi kendala bidang statistik adalah:

- i) Belum terbangunnya sistem pengumpulan data statistik sektoral secara terintegrasi untuk menyediakan data



akurat dan pembaharuan secara periodik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2020.

- ii) Integrasi data antar instansi pemerintahan, termasuk dengan pemerintahan desa belum terbangun

o. Persandian

Saat ini kendala terbesar dalam persandian adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dibidang persandian. Hal ini berakibat pada lemahnya pengelolaan persandian dalam informasi didalam lingkungan pemerintah kabupaten, antar pemerintah kabupaten dan provinsi, dan pemerintah dengan pihak lainnya. Padahal persandian memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan informasi.

p. Kebudayaan

Penyelenggaraan pelayanan kebudayaan merupakan upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan serta memberikan tumbuhnya kebudayaan baru yang sesuai dengan jatidiri bangsa. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan antara lain:

- i) Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah.
- ii) Minat generasi muda dalam memperdalam sastra (huruf dan bahasa) daerah semakin menurun sehingga karya-karya sastra peninggalan nenek moyang dikhawatirkan akan menjadi artefak.
- iii) Pelestarian benda cagar budaya belum mampu dilakukan secara maksimal.
- iv) Pariwisata yang berbasis budaya belum menemukan pola yang spesifik

q. Perpustakaan

Perpustakaan saat ini terjepit oleh perkembangan jaman, padahal seharusnya perpustakaan hadir sebagai pusat



perkembangan pengetahuan dan dimana wawasan dan karakter generasi muda dibentuk. Namun perkembangan teknologi informasi memberikan tekanan pada perpustakaan untuk berkembang jauh dari yang sudah ada. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- i) Menurunnya kesadaran membaca pada generasi muda
- ii) Transformasi perpustakaan menjadi lebih modern dan sesuai perkembangan jaman mengalami banyak kendala khususnya ketersediaan SDM pustakawan yang sesuai kompetensi serta sarana dan prasana
- iii) Koleksi buku baik fisik maupun digital belum berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

r. Kearsipan

Pelaksanaan pelayanan bidang kersipan mengalami hambatan dan permasalahan antara lain:

- i) Gedung Arsip yang memenuhi standar yang layak sebagai Gedung Arsip Daerah belum ada
- ii) Kesadaran pengelolaan arsip di perangkat daerah masih rendah dan seringkali diabaikan
- iii) Jumlah arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan masih terbatas

4.1.4.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan khususnya perikanan budidaya. Namun kinerja bidang perikanan masih belum memuaskan dari segi produksi perikanan. Kendala juga dihadapi berkaitan tradisi di masyarakat terkait konsumsi ikan Tabanan baru mencapai 31,49 kg perkapita per tahun masih dibawah provinsi yang sudah mencapai 38,8 kg perkapita pertahun, dan masih jauh dari nasional yang telah mencapai 50,69 perkapita pertahun. Topografi Tabanan yang mendukung pertanian membuat

masyarakat lebih memilih konsumsi daging dan sayuran yang tersedia disekitarnya. Adapun tradisi makan ikan di masyarakat ada tiga jenis yakni ikan nyalian (jenis rasbora), kakul (keong sawah) dan lindung (belut) yang sering disebut sebagai *be carik* yang selama ini belum dibudidayakan atau dengan kata lain merupakan tangkapan dialam bebas. Sehingga untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Tabanan diperlukan kombinasi pelestarian komoditi lokal serta intensifitas perikanan budidaya serta tangkap. Untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Tabanan termasuk peningkatan produksi perikanan dihadapi beberapa permasalahan:

- i) Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat yang berujung pada rendahnya daya serap produksi perikanan.
- ii) Rantai distribusi ikan hasil produksi masih panjang yang berakibat dirugikannya pembudidaya.
- iii) Masih terjadinya konflik dalam pemanfaatan air dengan subak yang menjadi kendala pengembangan kegiatan budidaya.
- iv) Pakan masih mengandalkan pellet produksi pabrik yang harganya kian hari terus meningkat berakibat pada tingginya biaya produksi.
- v) Masih kurangnya produksi benih baik dari UPT PPB maupun unit pembenihan rakyat sehingga masih mendatangkan dari daerah tetangga dan bahkan dari jawa.

b. Pariwisata

Masa pandemi ini merupakan pukulan telak bagi pariwisata dan menunjukkan betapa bergantungnya Bali pada pariwisata. Kondisi ini sangat terasa bagi dua objek wisata andalan Kabupaten Tabanan yakni DTW Danu Beratan dan DTW Tanah Lot. Terjadi penurunan drastis pada kedua objek tersebut bahkan data menunjukkan sudah terjadi penurunan kunjungan



ke Tabanan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini menunjukkan perlu upaya serius dalam mengembangkan pariwisata di Tabanan dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung alam serta perubahan arah perkembangan pariwisata yang setelah pandemi akan lebih mengarah bukan pada kerumunan namun ketenangan, bentang alam dan tradisi. Untuk mencapai itu ada beberapa permasalahan yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan wisata kedepan, antara lain:

- i) Pemasaran pariwisata belum dikemas secara professional sebagai satu kesatuan kunjungan dengan menghubungkan antar objek wisata
- ii) Potensi pariwisata kawasan Tabanan Barat seperti Pantai Balian, Pupuan, Suraberata belum digarap secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan ini lebih lambat dibandingkan dengan kawasan Tabanan Timur.
- iii) Keberadaan 24 (dua puluh empat) Desa Wisata belum berkembang secara merata dan keberadaanya belum dikelola dengan manajerial yang baik oleh Pemerintahan Desa.
- iv) Belum ada interaksi yang jelas antara potensi pertanian, tradisi dan bentang alam dalam pengembangan pariwisata
- v) Industri kreatif belum berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- vi) Belum adanya regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).
- vii) Terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke Tabanan baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

c. Pertanian

Pertanian merupakan aktivitas utama masyarakat Tabanan meskipun proporsi lapangan pekerjaan utama hanya



26,7%. Sebagian besar masyarakat yang bekerja diluar pertanian masih menjaga warisan leluhurnya berupa bidang lahan pertanian, namun tidak dikelola secara efektif dan sering kali diserahkan pada penggarap dan bahkan dibiarkan begitu saja. Ini lah tantangan terbesar pertanian Tabanan dimana potensi alam yang ada tidak sejalan dengan jumlah SDM yang trampil dan fokus. Selain permasalahan pertanian yang disampaikan sebelumnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi kedepan, antara lain:

- i) Produktivitas pertanian lahan basah dan kering di Kabupaten Tabanan cenderung menurun.
- ii) Populasi ternak kambing dan sapi terus mengalami penurunan.
- iii) Kelembagaan usaha pada sektor pertanian belum berperan maksimal sehingga daya tawar petani terhadap komoditas yang dihasilkan sangat lemah.
- iv) Sebagian besar petani berusia di atas 50 tahun sehingga adopsi teknologi pertanian berlangsung sangat lambat.
- v) Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan.
- vi) Kasus penyakit menular pada hewan dan ternak masih tinggi.
- vii) Rantai produksi dan rantai pemasaran pada komoditas pertanian pada umumnya belum terkoneksi dengan baik sehingga sering ditemukan kasus: permintaan tersedia – produksi tidak tersedia dalam jumlah/kualitas yang cukup, sebaliknya produksi melimpah – permintaan pasar tidak ditemukan.

d. Perdagangan

Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa perdagangan belum sepenuhnya mendukung

perkembangan pertanian lokal. Ketersediaan pasar desa hingga pasar di Kabupaten belum terkoneksi sebuah jaringan pemasaran yang betul-betul membentengi pemasaran produk lokal. Dan bahkan pedagang di pasar-pasar besar sudah mulai didominasi orang luar kabupaten. Tentu ini kenyataan miris yang harus dihadapi kedepan. Bagaimana membangun perdagangan yang berpihak pada produk lokal. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan di Tabanan adalah:

- i) Prasarana pasar bagi distribusi produk UMKM masih terbatas, baik jumlah maupun kualitas pasar yang telah ada.
- ii) Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- iii) Pasar yang ada masih terkesan kumuh dan tak terawat
- iv) Jumlah dan nilai produk ekspor dari Kabupaten Tabanan masih sangat rendah.
- v) Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tabanan cenderung mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.
- vi) Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen, yang ditunjukkan dengan UTTP yang ditera masih belum semuanya.
- vii) Sinergi program antara Perangkat Daerah yang menangani produksi dan Perangkat Daerah yang menangani perdagangan belum terjalin secara baik.

e. Perindustrian

Sama halnya dengan perdagangan, disektor industri juga belum memberikan kontribusi positif pada perkembangan pertanian sebagai sektor unggulan. Perlu upaya yang serius dalam mengembangkan industri yang berbasis pertanian. Pengembangan perindustrian di Tabanan menghadapi beberapa tantangan dari permasalahan yang dihadapi antara lain:

- i) Lemahnya fasilitasi dan atau pemberian insentif bagi

pertumbuhan industri berbasis produk lokal khususnya pertanian.

- ii) IKM yang berijin jumlahnya relatif kecil.
- iii) Masih terbatasnya kemampuan inovasi pelaku industri kecil sehingga daya saing mereka masih lemah.
- iv) Industri yang telah memiliki sertifikasi standar kelayakan produk masih terbatas.
- v) Belum adanya regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

4.1.4.4 Fungsi Penunjang

a. Perencanaan

Perencanaan memiliki posisi sentral dalam pembangunan sebagai peletak dasar langkah dan kebijakan yang diambil. Pencapaian pembangunan akan sangat dipengaruhi penetapan rencana yang dapat mengalokasikan sumberdaya dengan baik. Meskipun seluruh dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh perundangan dan peraturan yang berlaku telah dapat disusun namun ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- i) Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja daerah yang masif dan efisien serta update khususnya data statistik sektoral sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
- ii) Belum terjaminnya keselarasan perencanaan kabupaten dengan perencanaan desa.
- iii) Belum dimilikinya fungsional perencanaan sebagai penggerak perencanaan yang konsisten.

b. Keuangan

Sumber daya penting dalam pembangunan adalah kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan kemampuan keuangan daerah serta pendukungnya akan menjadi krusial untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan dengan

pencapaian visi dan misi. Dari segi pengelolaan keuangan Tabanan sudah memiliki pencapaian yang baik dengan 6 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut turut. Namun kendala terbesar adalah dari segi pendapatan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan mencapai tujuan pembangunan maka permasalahan yang harus ditanggulangi antara lain:

- i) Proporsi pendapatan asli daerah menopang kemampuan fiskal daerah masih rendah.
- ii) Tata kelola keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.
- iii) Perkembangan data potensi dan realisasi objek pendapatan belum dikelola secara *real time* termasuk pengelolaan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi.
- iv) Pengelolaan asset daerah belum optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan bahkan meningkatkan pendapatan daerah.
- v) Belum dimilikinya fungsional berkaitan pengelolaan pendapatan daerah.

c. Kepegawaian

Peningkatan pelayanan publik bertumpu pada kualitas ASN. Kendala yang dihadapi diberbagai daerah adalah meningkatkan profesionalisme ASN untuk membangun birokrasi yang efektif dan efisien. Meskipun upaya reformasi birokrasi telah terus digalakkan namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- i) Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian seperti sistem perekrutan, promosi dan mobilisasi, eselonisasi, remunerasi, kesejahteraan pegawai, disiplin, dan pensiun.
- ii) Pengembangan karir pegawai dengan sistem merit belum



dilaksanakan secara konsisten, serta *talent scouting* belum dijadikan dasar dalam pengisian formatur jabatan.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan kepegawaian bertujuan untuk peningkatan kapabilitas pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan. Dimana seluruh ASN harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pendidikan dan pelatihan tersebut yaitu:

- i) Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi.
- ii) Profesionalisme ASN belum sesuai harapan yang berujung pada belum optimal dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang bertanggung jawab yang dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik

e. Pengawasan

Pengawasan yang merupakan sebagai fungsi dari Inspektorat memiliki tugas yang penting untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan. Hal yang paling krusial adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya memberikan nasihat dan mengawal pelaksanaan program prioritas agar tidak menyalahi aturan sehingga para pelaksana tidak mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa permasalahan yang dialami dalam pengawasan antara lain:

- i) Belum optimalnya kapasitas dan kuantitas APIP mengingat semakin banyak hal yang harus diawasi.
- ii) Pengawasan yang berbasis/berorientasi kinerja belum berjalan optimal.
- iii) Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai

tuntas.

f. Penelitian dan Pengembangan

Riset dan inovasi merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memaksimalkan sumberdaya dalam mencapai tujuan pembangunan. Selama riset dan inovasi belum tumbuh seimbang disemua urusan dan perangkat daerah sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban seringkali hanya bersifat formal dan normatif. Selain itu pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh pihak akademisi maupun masyarakat belum maksimal dilakukan. Pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan mengalami beberapa permasalahan yaitu:

- i) Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis riset dan teknologi.
- ii) Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan penelitian.
- iii) Rendahnya minat ASN di Pemerintahan Kabupaten Tabanan terhadap jabatan fungsional peneliti.

g. Kecamatan

Untuk mewujudkan tujuan kecamatan yaitu Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam bidang pelayanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Teknologi Informasi (TI) dan sarana prasarana pendukung pelayanan yang layak. Permasalahan yang dihadapi



dalam pelayanan di kecamatan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Kurangnya diklat-diklat teknis kepegawaian
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

h. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tabanan memiliki fungsi untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Bidang Pemuda

- a. Semakin menurunnya semangat nasionalisme sehingga mengaburkan karakter dan jati diri serta menurunkan moral pemuda dan cenderung memicu sikap individualisme yang berujung pada munculnya konflik sosial;
- b. Belum optimalnya pendidikan kepemudaan dalam membentuk kepribadian pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup;
- c. Pemuda sebagai benteng pertahanan idiologi, adat dan budaya belum memiliki peran yang cukup;

2. Bidang Agama dan Budaya

- a. Terjadi kasus pencurian pratima dan upaya-upaya provokasi melalui pelecehan simbol-simbol agama yang menyebabkan keresahan umat beragama;
- b. Menurunnya minat generasi muda untuk memelihara dan mengembangkan seni dan budaya lokal;
- c. Belum terpola dan terprogram upaya-upaya pelestarian peninggalan budaya, baik berwujud benda/bangunan



maupun berupa nilai-nilai/kearifan lokal, bahasa, dan seni

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdapat ancaman terhadap budaya lokal akibat perkembangan teknologi
4. Bidang Politik
 - a. Banyaknya ormas/LSM baru yang belum terdaftar secara legal sehingga menyebabkan sulitnya dilakukan pembinaan dan berdampak pada timbulnya potensi pelanggaran oleh anggotanya;
 - b. Masih terjadinya konflik bernuansakan adat terkait sengketa lahan maupun tapal batas desa adat, yang apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka dikhawatirkan dapat mengganggu kedamaian di masyarakat;
 - c. Meningkatnya ketidakpedulian antar masyarakat ditingkat terkecil yang menyebabkan tidak terdeteksinya potensi gerakan-gerakan separatis dan potensi kejahatan lokal;
 - d. Konflik sosial.

i. Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Kabupaten Tabanan bertugas membantu Bupati Tabanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam pelaksanaannya Sekretariat daerah menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

- Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsman.



- Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah.
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
- Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;

j. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan memiliki peran sangat strategis yaitu dalam menunjang tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah secara teknis operasional dalam bidang fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan pembangunan. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah;

- Belum optimalnya perencanaan kinerja, karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dimasa datang.
- Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat;
- Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Sekretariat Dewan

4.1.5 Daya Saing Daerah

4.1.5.1 Perbaikan iklim investasi

Pembangunan sebuah wilayah memerlukan investasi untuk memperbesar ekonomi. Untuk itu Kabupaten Tabanan memerlukan iklim investasi yang tepat agar dapat memiliki daya tarik bagi pemilik modal. Dan yang khusus lagi adalah bagaimana investasi yang masuk sesuai dengan potensi Tabanan yakni pertanian. Permasalahan yang dihadapi dalam memperbaiki iklim investasi adalah:

- i) Belum terbangunnya daya tarik investasi bidang pertanian sebagai potensi utama Tabanan



- ii) Belum optimalnya iklim investasi daerah.
- iii) Belum terwujudnya gedung pelayanan publik yang memudahkan perijinan sebagai daya tarik investasi.
- iv) Diperlukan sinergi antara investasi dan kompetensi tenaga kerja.

4.1.5.2 Ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

Kendala terbesar dalam pembangunan adalah terciptanya ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu kabupaten. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak samanya potensi dan kesempatan berkembangnya satu wilayah. Ketimpangan juga akan menurunkan kesempatan kerja yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan adanya tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan penyesuaian atas aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, termasuk Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja cipta kerja. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya dan mampu mengimbangi ketimpangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Untuk itu pemerintah wajib meminimalisir Ketimpangan ekonomi dan menciptakan perluasan kesempatan kerja, dimana terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- i) Ketimpangan perkembangan antara wilayah selatan, utara dan wilayah barat Tabanan baik dari segi ekonomi dan wisata
- ii) Belum meratanya kualitas infrastruktur antar wilayah
- iii) Timpangnya antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja



4.1.5.3 Inovasi dan kreativitas daerah

Masyarakat Tabanan merupakan masyarakat yang dinamis dan penuh dengan semangat berkarya dengan daya cipta tinggi. Ini merupakan potensi besar bagi pembangunan Tabanan namun permasalahan yang dihadapi adalah

- i) Belum optimalnya apresiasi atas inovasi yang dilakukan masyarakat
- ii) Belum terbentuknya wadah dalam menginkubasi dan memperluas inovasi dan kreativitas masyarakat untuk menjadi inovasi daerah.
- iii) Belum terbangunnya kerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian lain dalam pemanfaatan hasil penelitian.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam menyusun isu strategis selain melihat permasalahan yang dihadapi, juga dapat melihat pada dokumen perencanaan terkait dari perencanaan pusat hingga perencanaan kabupaten, untuk melihat potensi kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta konsistensi pembangunan jangka panjang.

4.2.1 Tinjauan Dokumen Perencanaan Terkait

4.2.1.1. Tinjauan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024



Tinjauan RPJMN 2019-2024 dilakukan agar arah kebijakan RPJMDSB Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat nasional sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan setelah dikelompokkan menurut Bidang Pola Pembangunan Semesta Berencana, diantaranya :

1. Pangan, Sandang, dan Papan

- **Pangan**

Kabupaten Tabanan bersama dengan Karangasem, Bangli, dan Buleleng mendapat prioritas pengembangan kawasan Kopi dari Kementerian Pertanian melalui Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. Rencana pendanaan yang diberikan sebesar 43,96 milyar.

Kabupaten Tabanan bersama dengan 8 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali mendapat prioritas pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa dari Kementerian Desa PDTT melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rencana pendanaan yang diberikan sebesar 4,08 milyar.

- **Sandang**

Kabupaten Tabanan bukan merupakan lokasi pembangunan dan pengembangan yang terkait dengan bidang sandang.

- **Papan**

Kementerian PUPR melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman menempatkan Kabupaten Tabanan bersama Kota Denpasar, Kabupaten



Badung dan Gianyar sebagai prioritas dalam kegiatan Sambungan rumah yang terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Skala Permukiman (SR). Rencana pendanaan yang diberikan sebesar 379,69 milyar.

Kementerian PUPR melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman juga menempatkan Kabupaten Tabanan bersama Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar sebagai prioritas dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan. Rencana pendanaan yang diberikan sebesar 40 milyar.

2. Pendidikan Dan Kesehatan

- **Pendidikan**

Pembangunan Pendidikan secara nasional dilakukan disemua wilayah tanpa terkecuali sehingga Kabupaten Tabanan juga wajib berperan pada pencapaian target pembangunan nasional dibidang pendidikan.

- **Kesehatan**

Program prioritas pemerintah pusat yang terkait dengan bidang kesehatan di Kabupaten Tabanan adalah program-program pengelolaan kesehatan lingkungan untuk menunjang pola hidup sehat masyarakat, yaitu:

- Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman oleh Kementerian PUPR untuk Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan bersama dengan Kabupaten Gianyar dan Badung. Rencana Pendanaannya sebesar 44,49 milyar.
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman oleh Kementerian PUPR dengan kegiatan pembangunan TPA baru juga

dilaksanakan di Kabupaten Tabanan bersama dengan Kabupaten Gianyar dan Badung dengan rencana pendanaan sebesar 629,57 milyar.

- Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman oleh Kementerian PUPR dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi IPLT juga dilaksanakan di Kabupaten Tabanan bersama dengan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Badung. Rencana Pendanaannya sebesar 56,90 milyar.
- Program Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM (PDAM yang menerapkan *Smart Grid Water Management*). Rencana pendanaannya sebesar 2,10 milyar.
- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa PDTT juga merencanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendanaannya sebesar 0,27 milyar.

3. Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan

Program prioritas pemerintah pusat yang terkait berasal dari Kementerian Desa PDTT dengan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali dengan rencana pendaannya sebesar 0,95 milyar.

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya

Pembangunan adat, agama, tradisi , seni dan budaya berkaitan erat dengan pengembangan dan pembangunan masyarakat desa sebagai benteng terdepan. Oleh karena itu



program prioritas pemerintah pusat dibidang tersebut dikaitkan dengan program-program pembangunan desa, yaitu:

- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa PDTT untuk Desa Digital (P3PD) di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendaannya sebesar 11,62 milyar.
- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa PDTT untuk pendamping desa di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendaannya sebesar 58,27 milyar.
- Program Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri untuk Penetapan Batas Desa di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendanaannya sebesar 0,51 milyar.
- Program Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri untuk Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendaannya sebesar 1,25 milyar.
- Program Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD) di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendaannya sebesar 23,99 milyar.
- Program Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tabanan dan 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Bali. Rencana pendaannya sebesar 0,52 milyar.



5. Pariwisata

Pembangunan pariwisata secara nasional diarahkan pada pembangunan 10 Bali Baru, serta menjaga perkembangan pusat kunjungan wisata yang telah dikenal luas seperti Bali, Yogyakarta, dan lainnya. Sebagai bagian dari Pulau Bali maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan juga tetap menjadi perhatian pusat.

Berdasarkan tinjauan di atas, adapun kebijakan di tingkat pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 meliputi Pangan, Sandang, dan Papan, Pendidikan dan Kesehatan, Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya, Pariwisata, dimana kebijakan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan patut dijadikan pedoman dan arahan sehingga pembangunan di Kabupaten Tabanan sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat nasional sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

4.2.1.2. Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

1. Pangan, Sandang, Papan

• Pangan

- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya yang diarahkan tersebar diseluruh kecamatan.
- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan industri unggulan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu:
 - Industri pengolahan biji kakao, lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten



- Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan.
- Industri pengolahan biji kopi, lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng
 - Industri pengolahan kelapa, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan Kabupaten Tabanan sebagai kabupaten penyangganya
 - Industri pengolahan daging lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya
- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu :
- Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan.
 - Cabai sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan dan Bangli.
 - Kopi sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Badung, Bangli dan Buleleng.
 - Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan
- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pengembangan kawasan Peternakan Kambing di Kabupaten Tabanan.

- **Sandang**

Kabupaten Tabanan bukan sebagai salah satu lokasi pembangunan dan pengembangan yang terkait dengan bidang sandang.

- **Papan**

Pembangunan bidang papan di Provinsi Bali dilaksanakan disuluruh wilayah termasuk juga Kabupaten



Tabanan.

2. Pendidikan Dan Kesehatan

• Pendidikan

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali.

• Kesehatan

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberculosis Resistensi Obat di Kabupaten Tabanan
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Tabanan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali

3. Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan

- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Bali termasuk Kabupaten Tabanan dengan meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak.
- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memberikan pelatihan melalui LLK Meliling

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya

- Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerjasama dengan Desa Adat yang ada di seluruh Kabupaten termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Pemajuan Adat,



Agama, Tradisi, Seni dan Kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.

- Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Penguatan Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi untuk menguatkan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

5. Pariwisata

- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Soka
- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Tanah Lot
- KLHS KDTWK PROVINSI Bedugul-Pancasari-Kintamani
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Berdasarkan tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, adapun kebijakan di tingkat provinsi meliputi Pangan, Sandang, dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya, Pariwisata. Untuk itu kebijakan Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Tabanan patut dijadikan pedoman dan arahan sehingga pembangunan di Kabupaten Tabanan sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat provinsi sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.



4.2.1.3 Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025

Peninjauan RPJPD sangat penting dalam menjaga konsistensi perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Peninjauan difokuskan pada arah pembangunan yang telah ditetapkan dimana periode tahun 2021 -2026 ini merupakan tahap akhir penyampaian visi dan misinya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025, visi yang ingin dicapai adalah **“TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN”**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut dicapai melalui 6 Misi Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius.
2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
3. Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.
4. Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good government*).
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi rencana jangka panjang tersebut dibagi kedalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Periode Pemerintahan Jaya-Wira saat ini merupakan periode kepemimpinan Kepala Daerah ke-4 (terakhir) selama periode RPJPD 2005-2025. Terdapat arah dan sasaran pokok pembangunan lima tahun keempat yang harus dipedomani, diselaraskan, dan dijabarkan dalam Visi dan Misi Pembangunan daerah lima tahun kedepan.



A. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Pemerintah Kabupaten Tabanan pada periode pemerintahan kepala daerah 2021-2025 akan menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

1. Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri.
2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk persaingan global.
3. Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah.
4. Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional penunjang daerah Agrowisata.
5. Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah.

B. Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM III, RPJM IV ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan tingkat pertumbuhan yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dengan tetap terjaganya daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat Tabanan yang terus meningkat juga ditandai oleh makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh-kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya



kesetaraan gender.

1. Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.
3. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.
4. Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
5. Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.

6. Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 – 2025 khususnya pada Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025 dimana berdasarkan sasaran pokok tersebut di atas terdapat beberapa relevansi guna mewujudkannya pada pembangunan 5 tahun ke depan. Adapun dari sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sasaran pokok 1 :

Untuk target penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat terbaik di Bali telah terwujud melalui program Trans Serasi. Sedangkan Untuk target pelayanan publik di bidang kesehatan masih dapat ditingkatkan untuk mencapai yang terbaik di Bali melihat potensi yang ada. Untuk layanan pendidikan dengan target angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun belum tercapai karena saat ini angka rata-rata lama sekolah masih diangka 8,87 tahun atau di bawah target nasional wajib belajar 9 tahun. Mengingat kewenangan kabupaten hanya sampai pada sekolah menengah pertama, maka yang menjadi fokus utama adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah ke angka 9 tahun.

Sasaran pokok 2 :

Perkembangan teknologi saat ini membuka ruang informasi kepada masyarakat, namun bersamaan dengan hal itu acaman pada integritas kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa juga hadir. Untuk itu sasaran ini masih relevan menjadi fokus pembangunan lima tahun kedepan

Sasaran pokok 3 :

Kesejahteraan masyarakat yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah tujuan utama pembangunan saat ini sehingga sasaran ini harus menjadi fokus pembangunan kedepan.

Sasaran pokok 4 :

Perkembangan pariwisata setelah masa Pandemi Covid 19 memberikan peluang bagi Tabanan dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki yakni wisata budaya dan agro. Selama ini belum berhasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan sehingga sangat relevan untuk dikembangkan kedepan.

Sasaran pokok 5 :

Meskipun pertumbuhan ekonomi Tabanan saat ini cenderung negatif mengikuti tren pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Namun justru ditengah pandemi ini tumbuh kesadaran generasi muda untuk memanfaatkan lahan yang mereka punya dibidang pertanian. Hal ini tentu harus didukung penuh dengan mengembangkan petani milenial.

Sasaran pokok 6 :

Target sasaran ini masih relevan untuk menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan.

4.2.1.4 Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Salah satu kebijakan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana untuk Kabupaten Tabanan merujuk pada Rencana Tata Ruang Provinsi Bali dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Bali, Bali merupakan satu kesatuan Ruang, mencakup Ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas Ruang daratan kurang lebih 559.472,91 Ha, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan Ruang besar yaitu Ruang Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau



kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada Wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari Wilayah Bali maupun luar Wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta mudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri Masyarakat dan daerah Bali. Isu-isu Penataan Ruang di atas, merupakan tantangan berat bagi Provinsi Bali terkait dengan upaya pencapaian Visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang tertuang pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten mencakup:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang mencakup:
 - a. Pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata



dan hierarkhis dimana provinsi telah menetapkan Tabanan sebagai bagian dari PKN yang mencakup Kawasan Perkotaan Sarbagita.

- b. Peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional;
- c. Sistem jaringan jalan terdiri dari:
 - Jaringan jalan nasional yang ada dalam Wilayah Provinsi, meliputi:
 - Jalan bebas hambatan/jalan tol;
 - Jalan arteri primer (jap) (Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Antosari Tabanan-Mengwitani)
 - Jalan kolektor primer dua (JKP-2), merupakan ruas jalan yang menghubungkan antara ibu kota Provinsi dan ibu kota Kabupaten/Kota meliputi 64 (enam puluh empat) ruas jalan.
 - Terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi: 1. terminal dan/atau simpul transit Gilimanuk di Kabupaten Jembrana; 2. terminal dan/atau simpul transit Pupuan di Kabupaten Tabanan;
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah Provinsi Bali
 - Pengembangan jaringan listrik transmisi 150 kv (seratus lima puluh kilovolt) mencakup: 1. Kapal II/Tanah Lot-Inc (Antosari-Kapal).
 - Sistem jaringan telekomunikasi, diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi dan



informatika ke seluruh Wilayah menuju *Bali Smart Island*.

- Sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - Perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada seluruh Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah sungai strategis nasional terdiri dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS);
 - Perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian ekosistem danau meliputi Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng;
 - Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan bendungan/waduk/embung yang telah ada meliputi: embung Telaga Tunjung;
Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang telah ada di seluruh Wilayah;
 - Pengendalian daya rusak air melalui:
 - i. Sistem drainase perkotaan;
 - ii. Sistem pengendalian banjir; dan
 - iii. Sistem pengamanan pantai

e. Sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya mencakup:

- SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- Sistem jaringan persampahan Wilayah lintas Kabupaten/Kota;
- Sistem pengelolaan air limbah lintas Kabupaten/Kota;
- Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas Kabupaten/Kota; dan
- Sistem jaringan Mitigasi dan evakuasi bencana

2. Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang mencakup:



a. Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung mencakup:

- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
- Mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana

Kawasan peruntukan lindung mencakup:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan konservasi;
- Kawasan lindung geologi;
- Kawasan rawan bencana;
- Kawasan cagar budaya; dan
- Kawasan lindung lainnya

b. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budidaya mencakup:

- Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:
 - Kawasan hutan produksi;
 - Kawasan hutan rakyat;
 - Kawasan pertanian;
 - Kawasan perikanan;
 - Kawasan pariwisata;
 - Kawasan peruntukan industri;
 - Kawasan permukiman;



- Kawasan pertambangan dan energi; dan
- Kawasan peruntukan lainnya.

3. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis mencakup:

- a. Pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional;
- b. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- c. Perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa

Kawasan strategis nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi

- a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita
- b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Subak-Bali Lansekap

Kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional yang terdapat di Wilayah Provinsi merupakan kawasan strategis yang ditetapkan Unesco, terdiri atas:

- a. Kawasan warisan dunia subak lansekap budaya Bali;
- b. Kawasan strategis sektor skala nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas KSPN Bedugul dan sekitarnya.

Berdsarakan uraian di atas, sudah menjadi kewajiban bahwa RTRW Provinsi Bali harus dipedomani dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan, untuk menyelaraskan rencana pembangunan secara keseluruhan, sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



4.2.1.5 Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2009-2019

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan yang perlu ditinjau untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan dalam lima tahun ke depan yaitu:

a. Isu Pembangunan

1. Isu Administrasi Pembangunan

- Jumlah pemekaran desa terus bertambah dari tahun ketahun yaitu: 113 desa tahun 2001, 117(2003), 123 (2004), 128 (2007) dan 131 (2008) dan 132 (2009);
- Dua wilayah kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri) menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional dalam Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang dikembangkan dalam sistem metropolitan, sehingga butuh keterpaduan penataan ruang kawasan perkotaan antar wilayah;
- Belum memiliki payung penataan ruang baik di darat maupun perairan dan laut baik RTRW maupun RDTR yg berketetapan (hukum-Perda) sesuai ketentuan.

2. Isu Lingkungan

- Memiliki variasi ekosistem kawasan hutan, danau, kawasan pertanian, permukiman, kawasan pesisir dan laut;
- Proporsi luas hutan tahun 2007 hanya 11,88%, kurang dari target 30% luas wilayah;
- Kondisi Hutan Lindung 14,98% agak kritis dan kritis dan 13,8% potensial kritis, sedangkan kondisi Kawasan Budidaya 4,37% agak kritis dan kritis dan 36,41% potensial kritis;
- Wilayah bagian utara merupakan bagian dari kawasan resapan air Bali;



- Kesulitan penerapan ketentuan sempadan pantai dan sempadan jurang;
- Kecenderungan alihfungsi lahan pertanian tinggi, sehingga mengancam posisi Tabanan sebagai gudang berasnya Bali dan andalan pertanian Bali;
- Tingginya perambahan kawasan lindung setempat terutama di kawasan pantai, jurang, pinggir-pinggir sungai dan pada lahan pertanian sawah;
- Seluruh kawasan pantai rawan abrasi, gelombang pasang dan tsunami;
- Tantangan untuk mendukung *Bali Green, Clean dan Organic*.

3. Isu Ekonomi

- Struktur perekonomian: Primer dan Tersier dominan;
- Potensi Unggulan Pertanian dalam arti luas dengan unggulan : tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, didukung pengembangan Kawasan Agropolitan dan Simantri;
- Upaya perwujudan Tabanan sejahtera berbasis pertanian;
- Perlunya peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata;
- Telah ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata mencakup Kawasan Pariwisata Soka, Kawasan Daya Tarik Wisata Tanah Lot dan Kawasan Daya Tarik Wisata Bedugul Pancasari dan memiliki sebaran Daya Tarik Wisata.

4. Isu Sosial Budaya

- Kebutuhan dan penguatan penerapan konsep-konsep kearifan lokal dalam penataan ruang mencakup nilai-nilai Tri Hita Karana, Sad Kerthi, Bhisama, Tri Mandala dan lainnya;



- Terancamnya kawasan-kawasan suci dan kawasan tempat suci;
- Terancamnya kepemilikan lahan orang Bali;
- Wajah lansekap dan bangunan berarsitektur Bali cukup mendominasi wilayah kuat, namun di beberapa tempat telah mulai terancam oleh arsitektur modern;
- Memiliki 345 Desa Pekraman, 222 Subak Basah dan 145 Subak Abian sebagai pendukung budaya dan pertanian Bali disertai sebaran 1 Pura Sad Kahyangan, 6 Pura Dang Kahyangan, 107 Pura Kahyangan jagat dan sebaran Kawasan Cagar Budaya;
- Perlunya integrasi penataan ruang wilayah dan kawasan dengan tata pelemahan desa pekraman.

5. Isu Infrastruktur Wilayah

- Hampir sebagian besar jalan-jalan kawasan perdesaan dalam kondisi rusak, terutama jalan kabupaten, apalagi jalan desa;
- Menurunnya sediaan air baku, belum meratanya pelayanan air minum, sediaan listrik, dan sarana wilayah lainnya;
- Rendahnya aksesibilitas beberapa desa di Kecamatan Seledag Barat dan antara Tabanan Barat dan Tabanan Tengah di bagian utara wilayah;
- Akan dilalui rencana jalan bebas hambatan Kuta - Soka – Pekutatan dan Canggu – Beringkit- Batuan yang melintasi wilayah serta rencana pengembangan jalan baru Soka– Seririt;
- Dimensi jalan pada jalur-jalur penting relatif sempit.

b. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Tabanan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).



Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Tabanan, karakteristik wilayah Kabupaten Tabanan, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan.

Dengan demikian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan adalah:

- Mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah kabupaten yang hijau, lestari, aman dan berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan kepariwisataan dan sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Strategis Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang meliputi:

1. Pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan;
2. Pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan kawasan Perkotaan Sarbagita dan kawasan perdesaan;
3. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan;
4. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;
5. Pengembangan tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam bali;



6. Pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian;
7. Pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis ekowisata; dan
8. Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

d. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tabanan

1. Strategi pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan fungsi utama bagian-bagian wilayah kabupaten meliputi:
 - Mengembangkan bagian barat wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Timur dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, perkebunan, peternakan, hortikultura buah-buahan, tanaman pangan, pariwisata dan perikanan yang mendukung fungsi kawasan lindung wilayah dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Bajera didukung Kawasan Perkotaan Pupuan, Kawasan Perkotaan Lalanglinggah dan Kawasan Perkotaan Megati;
 - Mengembangkan bagian selatan wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri, dengan fungsi utama pusat pelayanan wilayah dan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan industri kecil, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Tabanan didukung Kawasan Perkotaan Sembunggede, Kawasan Perkotaan Kerambitan, dan Kawasan Tanah Lot;



- Mengembangkan bagian utara wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Marga, Penebel dan Baturiti, dengan fungsi utama kawasan konservasi, perkebunan, hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan dan pariwisata, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Baturiti didukung Kawasan Perkotaan Penebel, Kawasan Perkotaan Marga dan Kawasan Perkotaan Candikuning; dan
 - Mengembangkan potensi wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Strategi pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah yang merata, berhirarki dan terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan kawasan perdesaan meliputi:
- Mengintegrasikan Kawasan Perkotaan Tabanan menjadi bagian dari PKN dan KSN Perkotaan Sarbagita, melalui kerja sama terpadu pengelolaan kawasan perkotaan lintas wilayah;
 - Mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan fungsi PKN dengan sebaran PPK dalam wilayah;
 - Mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan khusus meliputi pusat-pusat Kegiatan Pariwisata, Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Kawasan Agropolitan ke dalam sistem perkotaan wilayah secara terpadu;
 - Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; dan
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan.
3. Strategi peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan meliputi:



- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten;
 - Mengembangkan jaringan jalan baru termasuk pengembangan jalan bebas hambatan dan/atau jalan alternatif lainnya untuk memperlancar arus lalu lintas antar wilayah dan membuka akses ke seluruh wilayah serta ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sosio-kultur masyarakat dan daya dukung lahan;
 - Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - Mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang, angkutan barang dan sistem angkutan umum massal (saum) terpadu yang terintegrasi antar wilayah dan dalam sistem perkotaan sarbagita.
4. Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
- Mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;
 - Meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;
 - Mengembangkan sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kerja sama pengelolaan persampahan terpadu antar wilayah; dan



- Mengembangkan sistem pengolahan air limbah melalui jaringan air limbah terpusat maupun setempat dengan teknologi ramah lingkungan.
5. Strategi pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali meliputi:
- Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;
 - Menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS;
 - Melestarikan kawasan pegunungan sebagai kawasan resapan air Provinsi Bali;
 - Melindungi kawasan danau beratan sebagai reservoir Provinsi Bali;
 - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
 - Pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci;
 - Mengembangkan kawasan budi daya dengan sistem agroforestri pada kawasan budi daya dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;
 - Mengembangkan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan untuk membatasi perkembangan kawasan terbangun;
 - Membatasi dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perkembangan kawasan terbangun skala besar di kawasan perdesaan; dan



- Mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi.
6. Strategi pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian Bali meliputi:
- Mempertahankan kawasan pertanian lahan basah yang beririgasi (subak) untuk pelestarian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
 - Mengembangkan kawasan dengan kluster-kluster komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang berdaya saing terdiri atas:
 - Komoditas unggulan kopi dan kakao di bagian barat wilayah;
 - Komoditas unggulan tanaman pangan di seluruh bagian wilayah;
 - Komoditas unggulan tanaman hortikultura di bagian utara wilayah;
 - Komoditas unggulan hortikultura buah-buahan di bagian barat wilayah;
 - Komoditas peternakan yang tersebar di seluruh wilayah; dan
 - Komoditas unggulan perikanan dan kelautan di kawasan pesisir.
 - Memantapkan beberapa kluster-kluster kawasan pengembangan komoditas unggulan sebagai kawasan agropolitan;
 - Mengembangkan secara terpadu sistem agribisnis, agroindustri dan agrowisata yang berdaya saing;
 - Mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan sektor lainnya, untuk meningkatkan pendapatan,



pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;

- Mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun pemeliharaan tanaman pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim global; dan
- Mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau (*Bali clean and green*).

7. Strategi pengembangan pariwisata terintegrasi yang berbasis ekowisata meliputi:

- Mengendalikan pengembangan kawasan strategis pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata Soka, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Bedugul - Pancasari dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot yang berwawasan lingkungan;
- Memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa wisata dan daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata;
- Memantapkan partisipasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
- Memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;
- Memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata;
- Memperkuat eksistensi desa pekrakan, subak dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata; dan



- Mengembangkan pola kerja sama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal.
8. Strategi pengembangan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - Turut menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan tinjauan RTRW Kabupaten Tabanan 2012-2032, adapun isu pembangunan, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan, seluruhnya merupakan arahan yang dilaksanakan yang tentunya ditahapkan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Tabanan.

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabanan

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diurai pada sub bab sebelumnya yang dibagi atas lima aspek yaitu: geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah serta sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi maka dapat dirumuskan isu yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan antara lain:

1. Pangan, Sandang, dan Papan

Dari berbagai permasalahan yang telah diurai sebelumnya dapat dirumuskan isu strategis yang menjadi fokus dalam



perumusan kebijakan pembangunan ke depan bidang pangan, sandang, dan papan, antara lain:

- Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, baik karena lemahnya manajemen produksi maupun pengolahan hasil pertanian.
- Keberadaan lahan tidur cukup luas yang sangat potensial mendukung ketersediaan pangan.
- Industri hilir pertanian belum berkembang optimal sehingga daya saing produk produk pertanian Tabanan untuk menembus pasar ekspor masih lemah.
- Lemahnya sistem marketing dan penciptaan *branding* produk unggulan Tabanan.
- Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan.
- Ketersediaan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah belum terkelola secara profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Keberadaan BUMDes hampir di seluruh desa belum berperan sebagai jejaring dan tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan.
- Peningkatan produksi perikanan melalui pemanfaatan teknologi budidaya.
- Potensi industri sandang belum tergali.
- Peningkatan penyediaan rumah layak huni dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
- Penanganan pencegahan dan pasca bencana.

2. Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas pendidikan untuk membentuk SDM yang unggul dan berkarakter budaya Bali.



- Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun.
- Lemahnya usaha-usaha preventif dan promotif serta pengembangan kesehatan tradisional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Belum terbangunnya sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *real time* derajat sehat masyarakat.

3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi. Isu strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan kedepan bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan antara lain:

- Lemahnya sistem pendataan menjadi kendala dalam pemberian jaminan sosial yang berkeadilan.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terintegrasi.
- Kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian belum berkontribusi maksimal dalam penanggulangan kemiskinan.
- Dukungan program pembangunan yang responsif gender masih lemah.
- Produktifitas tenaga kerja masih rendah.
- Lemahnya mutu pendidikan non formal atau vokasional dalam mendukung daya saing angkatan kerja.

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Isu strategis dalam pembangunan bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya antara lain:

- Karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali semakin tergerus oleh budaya luar.
- Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah.



- Minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik perlu digali untuk melestarikan tradisi, seni dan budaya.
- Peran generasi muda dalam memajukan pertanian sebagai akar budaya Bali masih terbatas.

5. Pariwisata

Pembangunan pariwisata ke depan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:

- Pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya belum digarap secara maksimal.
- Pengembangan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital membutuhkan perhatian yang lebih serius.
- Terjadinya ketimpangan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara, dan barat.
- Belum berkembangnya destinasi wisata yang mampu berperan sebagai generator ekonomi baru yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

6. Penunjang

Bidang penunjang merupakan bagian mencakup kesiapan daerah dalam menjalankan pola semesta berencana, sehingga kelima bidang tersebut dapat terjamin pelaksanaannya. Isu strategis yang dihadapi dalam memastikan penyelenggaraan pola semesta berencana antara lain:

- Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanasan global dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- Penanganan sampah, limbah dan daur ulang belum optimal.
- Pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik masih berjalan lambat.
- Pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik belum berjalan secara



sistemik.

- Dukungan data terpadu (*big data*) dari tingkat desa hingga kabupaten (Data Desa Presisi) sebagai dasar perumusan kebijakan publik belum mendapat perhatian yang memadai.
- Pengembangan basis data yang berbasis riset dan inovasi masih sangat terbatas.
- Pemanfaatan IT untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan tepat waktu dalam pelayanan investasi belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
- Pengelolaan PAD dan tata kelola keuangan daerah belum optimal.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) periode tahun 2021-2026 merupakan periode keempat atau periode akhir pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tabanan 2005-2025. Periode ini memiliki tantangan yang sangat berat ditengah kondisi global dan nasional yang mengalami kontraksi pada seluruh aspek kehidupan akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, optimisme dan kerja keras menjadi modal untuk menjawab tantangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Upaya mewujudkannya tertuang melalui perencanaan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu jalur, tegak lurus serta tata kelola pemerintahan satu pulau Bali dalam satu manajemen (*one island one management*).

RPJMD-SB periode tahun 2021-2026 mengandung prinsip perencanaan pembangunan Tabanan yang dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Pembangunan berdimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat holistic yaitu membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah;

3. Pembangunan bersifat integratif, artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan
5. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural artinya sebagai kepala pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural;

Kelima pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagatkerthi*) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

5.1. Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut :

VISI :

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
DI KABUPATEN TABANAN
MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai

dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan *sradha*, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama, terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan

lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.

- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.

- d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.

4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan.

5.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran dan beberapa indikator yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Infrastruktur yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain:

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan

Dengan sasaran:

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 4 (empat) sasaran antara lain :

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- c. Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya.

Untuk jelasnya tujuan, sasaran dan indikatornya dapat di lihat pada tabel 5.1.

5.3. **Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pelayanan Umum yang diterjemahkan sebagai tujuan Aman, Aspek Daya Saing Daerah sebagai tujuan Unggul, dan Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebagai tujuan Madani. Tujuan dan sasaran, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tabanan

TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
				(n-1)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)			
VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)												
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)												
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan		Persentase Capaian SDG's Terhadap Target Rencana Aksi Daerah (RAD)	Realisasi pencapaian target RAD SDG's	N.A	70%	80%	85%	90%	90%	90%		
Sasaran 1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata Persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial)	Jumlah persentase masing-masing Capaian SPM dibagi 6 pelayanan dasar	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK; DISKES; DPUPRPKP; SATPOLPP; BPBD; DISSOSP3A;	
Sasaran 2	Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur	Rata-rata kumulatif IKM Pelayanan Publik urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perpustakaan, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika	N.A	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	DISDUKCAPIL; DISHUB; DISPERSIP; DISKOMINFO;	



TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
				(n-1)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)		
Sasaran 3	Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indek Kualitas Air x 30%) + (Indek kualitas Udara x 30%) + (Indeks Tutupan Hutan x 40%)	Kurang Baik (54,83)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (68)	Cukup Baik (69)	Baik (71)	Baik (71)	DLH
Sasaran 4	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi Angkatan Kerja x 100%	4,23	4	3,9	3,8	3,6	3,2	3,2	DISNAKER
Sasaran 5	Meningkatnya implementasi pembangunan keluarga unggul berbasis desa	prosentase Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa dibagi jumlah desa	7,52%	11,28%	15,04%	18,80%	22,56%	26,32%	26,32%	DISPENDUKKB,
Sasaran 6	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Data BPS Tabanan	95,36	95,38	95,39	95,4	95,5	95,6	95,6	DISSOSP3A
MISI 2 : Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)											
Tujuan 2: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan		Indeks Daya Saing Daerah	Hasil penilaian Kemendikbud Dikti	N.A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
				(n-1)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)		
Sasaran 1	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil penilaian Kemendikbud Dikti	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	Kabupaten Terino vatif	BAPELITBANG
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian Kemen PAN RB	61,26 (BAIK)	66,50 (BAIK)	70,00 (BAIK)	73,20 (BAIK)	74,30 (BAIK)	75,00 (BAIK)	75,00 (BAIK)	SETDA; BAPELITBANG; BKPSDM; SETWAN;KECAMATAN.
Sasaran 3	Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN	Peningkatan Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)	Jumlah realisasi PMA dan PMDN pada tahun berkenaan	N.A	3.500	3.850	4.235	4.659	4659	5.125	DPMPPTSP
Sasaran 4	Optimalisasi PAD	Persentase Peningkatan PAD Non BLUD per Tahun	PAD tahun ini dikurangi PAD tahun sebelumnya dibagi total PAD tahun sebelumnya dikali seratus persen	13%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	BAKEUDA
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian LKPD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTORAT
Sasaran 6	Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	Presentase Desa Yang Telah Melaksanakan Desa Presisi	Jumlah desa yang telah melaksanakan Desa Presisi dibagi Jumlah desa, dikali seratus persen	0	10%	30%	50%	70%	100%	100%	DPMD



TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
				(n-1)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)		
Sasaran 7	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah keikutsertaan pemuda dalam proses pembangunan tahun berkenaan dibagi total jumlah pemuda dikali seratus persen	N.A	40%	50%	60%	65%	65%	65%	DISDIK; BAKESBANGPOL
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (Madani)											
Tujuan 3: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan		Indeks Gini	BPS Kabupaten Tabanan	0,32%	0,31%	0,30%	0,30%	0,29%	0,29%	0,29%	
Sasaran 1	Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	BPS Kabupaten Tabanan	21,90%	22.50%	23.00%	23.50%	24.50%	25.00%	25.00%	DISTAN; DISKAN
Sasaran 2	Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Total skor actual masing-masing kelompok pangan	91,5	93,6	94,3	95,1	95,7	95,7	95,7	DISKEPA,
Sasaran 3	Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Jumlah PDRB dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibagi jumlah PDRB tahun berkenaan dikali seratus persen	8,65%	8,75%	8,80%	8,85%	8,90%	8,95%	8,95%	DISKOPUKM, DISPERINDAG



TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
				(n-1)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)		
Sasaran 4	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%	20%	22%	25%	27%	30%	32%	32%	DISBUD; DISPAR

5.4. Asta Program

Asta Program merupakan prinsip yang mendasari pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang nantinya sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah

Menyusun, menetapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan Tabanan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, *Tri Hita Karana*, *Sat Kertih*, dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang berlandaskan pada riset dan inovasi daerah, dengan tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan, pertahanan dan keamanan Tabanan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tabanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Data Desa Presisi

Untuk mengefektifkan pemerintahan dan pelayanan publik di desa, Bupati dan Wakil Bupati bersinergi dengan desa adat dan desa dinas menyelenggarakan pendataan desa presisi, meliputi pendataan demografi, batas wilayah, potensi desa, aset dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan

bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan.

3. Reformasi Birokrasi

Menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

4. Pembangunan Rohani dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat

Menjalankan pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat dengan mengutamakan kesadaran hidup yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

5. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial

Menjalankan pembangunan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan membuka ruang partisipasi rakyat Tabanan, serta mendorong keterlibatan swasta dan desa adat agar mampu berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi rakyat Tabanan secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

6. Pembangunan Hukum yang Berkeadilan

Menjalankan pembangunan politik hukum untuk menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan publik dengan melakukan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap seluruh produk peraturan perundang-undangan (undang-undang, Perda Provinsi Bali, Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati) agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Menjalankan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang mandiri dan berkeadilan dengan menjamin hak setiap rakyat Tabanan atas: sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak azasi manusia; infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman.

8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Menjalankan pembangunan bidang industri yang melibatkan seluruh rakyat Tabanan, sesuai dengan potensi Kabupaten Tabanan, dengan mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya hayati dan non hayati, serta budaya sebagai bagian dari jati diri Tabanan untuk memperkuat ekonomi Tabanan agar mampu berdikari dalam membiayai pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, dengan prioritas pembangunan bidang industri meliputi:

- a. industri pangan, sandang, dan papan;
- b. industri energi, khususnya energi terbarukan;
- c. industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional;
- d. industri pariwisata

Asta Program secara prinsip diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara disiplin, taat, patuh, dan bertanggung jawab menuju efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Urusan Pemerintahan (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan), serta 5 (lima)

Unsur Pemerintahan (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum). Urusan dan bidang pemerintahan yang menjadi bidang kewenangan kabupaten tersebut terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Bidang Pendidikan
 2. Bidang Kesehatan
 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 6. Bidang Sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Bidang Tenaga Kerja
 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Bidang Pangan
 4. Bidang Pertanahan
 5. Bidang Lingkungan Hidup
 6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Bidang Perhubungan
 10. Bidang Komunikasi dan Informatika
 11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 12. Bidang Penanaman Modal
 13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 14. Bidang Statistik

15. Bidang Persandian
16. Bidang Kebudayaan
17. Bidang Perpustakaan
18. Bidang Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. Bidang Kelautan dan Perikanan
 2. Bidang Pariwisata
 3. Bidang Pertanian
 4. Bidang Perdagangan
 5. Bidang Perindustrian
6. Bidang Transmigrasi
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Perencanaan
 2. Keuangan
 3. Kepegawaian
 4. Pendidikan dan Pelatihan
 5. Penelitian dan Pengembangan
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Inspektorat Daerah
- g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 1. Kecamatan
- h. Unsur Pemerintahan Umum, meliputi :
 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Keseluruhan urusan pemerintahan tersebut harus terwadahi dalam perangkat daerah. Sedangkan bentuk dan susunan perangkat daerah perlu dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam mengemban misi serta mewujudkan visi.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Starategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tatacara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah disepakati. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut diperjelas dengan arah kebijakan agar rumusan strategi memiliki fokus dan target pelaksanaan dalam lima tahun ke depan.

Selanjutnya penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran akan ditempuh melalui strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disajikan dalam matrik.

6.1. Strategi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1. Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	1.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi SPM pelayanan dasar secara terpadu	a. Membangun sistem data base dan mekanisme evaluasi SPM pelayanan dasar b. Pemenuhan SPM Pelayanan dasar
	1.2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Infrastruktur yang Berkeadilan	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pencatatan sipil, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya	a. Pemenuhan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelayanan b. Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu
	1.3. Terwujudnya Pembangunan yang Berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1.3.1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta penanganan sampah berbasis masyarakat	a. Penyediaan regulasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup
	1.4. Meningkatnya Kesem-pa-tan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.4.1. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a. Membangun sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul dan berdikari
			b. Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
	1.5. Meningkatnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	1.5.1. Meningkatkan peran penyuluh KB dan pendamping desa dalam membangun basis data mikro keluarga	a. Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	1.6. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	1.6.1. Meningkatkan ketahanan keluarga, peran, dan perlindungan perempuan	a. Penyediaan regulasi dan data terpadu yang responsif gender b. Meningkatkan pengarusutamaan gender
	2.1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	2.1.1. Meningkatkan penerapan riset dan inovasi dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah	a. Menjalin kerjasama riset dengan lembaga riset b. Penerapan inovasi program berbasis riset
	2.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2.2.1. Menyiapkan birokrasi pemerintahan untuk mencapai visi misi Kepala Daerah serta standar pelayanan minimum	a. Evaluasi struktur dan tupoksi kelembagaan organisasi perangkat daerah b. Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN
			a. Penerapan kontrak kinerja berjenjang dan membangun sistem Monev kinerja b. Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja
	2.3. Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN	2.3.1. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	a. Meningkatkan transparansi perijinan usaha b. Meningkatkan kualitas kelembagaan untuk memfasilitasi perijinan dan memberi dukungan tenaga kerja c. Meningkatkan jaminan keamanan investasi
			a. Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi
	2.4. Optimalisasi PAD	2.4.1. Membangun sistem pengelolaan PAD berbasis elektronik	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.5.1. Meningkatkan intensitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan antar perangkat daerah	a. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, instrument anggaran kinerja serta sistem evaluasi
			b. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	2.6. Terbangunnya 'Guna Desa' di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	2.6.1. Integrasi sistem dan manajemen pendataan desa	a. Menyiapkan sarana, prasarana, SDM dan kelembagaan 'Guna Desa'
			b. Pengumpulan dan pengolahan data Desa yang Presisi
			c. Update data Desa Presisi secara kontinyu
	2.7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	2.7.1. Meningkatkan kualitas generasi muda sebagai pionir pembangunan yang sehat, cerdas, adaptif dan kreatif	a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga
			b. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda
			c. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
3 Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	3.1. Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	3.1.1. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	a. Penguatan manajemen kawasan komoditas unggulan
			b. Peningkatan SDM, kelembagaan, adopsi teknologi dan sarana prasarana
			c. Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian
			d. Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga
			e. Optimalisasi pemanfaatan lahan
			f. Meningkatkan populasi perikanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3.2 Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama	3.2.1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
			b. Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan
	3.3. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	3.3.1. Mengintegrasikan Koperasi dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola produk lokal	a. Pengembangan BUMDes, koperasi sektor riil dan kelompok usaha lainnya
			b. Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan
	3.4. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya	3.4.1. Melestarikan seni dan budaya lokal serta mengembangkan manfaat ekonomi bagi para pelakunya	a. Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai daya tarik destinasi pariwisata
			b. Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya
			c. Penyelenggaraan event-event seni dan budaya secara periodik
		3.4.1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan desa wisata	a. Membangun sistem infrastruktur yang terkoneksi antar obyek wisata
			b. Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi
			c. Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual



6.2. Langkah Strategis Tahunan

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 ditempuh melalui berbagai strategi dan arah kebijakan. Dari berbagai strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dirangkum menjadi langkah strategis tahunan yang akan diterjemahkan sebagai tema-tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Langkah Strategis/tema RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.2
Langkah Strategis Tahunan

Langkah Strategis				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemeliharaan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Karakteristik Masyarakat Mandiri	Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani (AUM)	Pengembangan Lanjut Infrastruktur Menuju Awal Kemajuan Teknis dan Profesional Penunjang Daerah Agrowisata	Pengembangan Daya Saing Regional dan Internasional Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Kesejahteraan melalui Pertanian yang Berkelanjutan

Berdasarkan langkah strategis tahunan tersebut, dijabarkan dalam *milestone* yang disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 6.3.
Milestone Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
I	Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan								
1.	Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga	Rata-rata Persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial)	100%	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi SPM pelayanan dasar secara terpadu	Membangun sistem data base dan mekanisme evaluasi SPM pelayanan dasar	Pemenuhan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan SPM pelayanan dasar
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur	Sangat Baik (90)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, di bidang pencatatan sipil, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya	Pemenuhan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelayanan	Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu	Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu	Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu	Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu
3.	Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Baik (71)	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta penanganan sampah berbasis masyarakat	Penyediaan regulasi pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup



NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
4.	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,2	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	Membangun sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari	Membangun sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari	Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
5.	Meningkatnya implementasi pembangunan keluarga unggul berbasis desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	26,32% (35 desa)	Meningkatkan peran penyuluh KB dan pendamping desa dalam membangun basis data mikro keluarga	Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga	Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga	Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga	Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga	Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga
6.	Terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,2	Meningkatkan ketahanan keluarga, peran, dan perlindungan perempuan	Penyediaan regulasi dan data terpilah yang responsip gender	Meningkatkan pengarus-utamaan gender	Meningkatkan pengarus-utamaan gender	Meningkatkan pengarus-utamaan gender	Meningkatkan pengarus-utamaan gender
II. Tujuan 2: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan									
1.	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif	Meningkatkan penerapan riset dan inovasi dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah	Menjalin kerjasama riset dengan lembaga riset	Penerapan inovasi program berbasis riset	Penerapan inovasi program berbasis riset	Penerapan inovasi program berbasis riset	Penerapan inovasi program berbasis riset



NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	BAIK (75)	Menyiapkan birokrasi pemerintahan untuk mencapai visi misi Kepala Daerah serta standar pelayanan minimum	Evaluasi struktur dan tupoksi kelembagaan organisasi perangkat daerah	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN
				Meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah	Penerapan kontrak kinerja berjenjang dan membangun sistem Monev kinerja	Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja	Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja	Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja	Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja
3.	Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN	Peningkatan Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)	5.125	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan transparansi perijinan usaha	Meningkatkan transparansi perijinan usaha	Meningkatkan transparansi perijinan usaha	Meningkatkan transparansi perijinan usaha	Meningkatkan transparansi perijinan usaha
					Meningkatkan kualitas kelembagaan untuk memfasilitasi perijinan dan memberi dukungan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas kelembagaan untuk memfasilitasi perijinan dan memberi dukungan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan keamanan investasi	Meningkatkan jaminan keamanan investasi	Meningkatkan jaminan keamanan investasi
4.	Optimalisasi PAD	Persentase peningkatan PAD non BLUD per tahun	15%	Membangun sistem pengelolaan PAD berbasis elektronik	Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi



NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian LKPD	WTP	Meningkatkan intensitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan antar perangkat daerah	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, instrumen anggaran kinerja, serta sistem evaluasi	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, instrumen anggaran kinerja, serta sistem evaluasi	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, instrumen anggaran kinerja, serta sistem evaluasi	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
6.	Terbangunnya 'Guna Desa' di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	Presentase Desa Yang Telah Melaksanakan 'Guna Desa'	100%	Integrasi sistem dan manajemen pendataan desa	Menyiapkan sarana, prasarana, SDM, dan kelembagaan 'Guna Desa'	Pengumpulan dan pengolahan data Desa yang Presisi	Update data Desa yang Presisi secara kontinyu	Update data Desa yang Presisi secara kontinyu	Update data Desa yang Presisi secara kontinyu
7.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	65%	Meningkatkan kualitas generasi muda sebagai pioner pembangunan yang sehat, cerdas, adaptif dan kreatif	Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga	Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga	Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga	Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga	Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga
					Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda
					Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual



NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
III	Tujuan 3: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan								
1.	Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	25%	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	Penguatan manajemen kawasan komoditas unggulan	Optimalisasi pemanfaatan lahan	Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian	Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian	Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian
					Peningkatan SDM, kelembagaan, adopsi teknologi dan sarana prasarana	Meningkatkan populasi perikanan	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga
2.	Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,7	Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
					Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan	Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan	Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan	Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan	Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan
3.	Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	Persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor)	8,95%	Mengintegrasikan Koperasi dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola produk lokal	Pengembangan BUMDes, koperasi sektor riil dan kelompok usaha lainnya	Pengembangan BUMDes, koperasi sektor riil dan kelompok usaha lainnya	Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan	Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan	Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan
4.	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang	32%	Melestarikan seni dan budaya lokal serta	Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai	Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai	Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai	Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai	Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai



NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KONDISI AKHIR 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya	menjadikan potensi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan		mengembangkan manfaat ekonomi bagi para pelakunya	daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik destinasi pariwisata
					Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya	Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya	Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya	Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya	Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya
						Penyelenggaraan event-event seni dan budaya secara periodik	Penyelenggaraan event-event seni dan budaya secara periodik	Penyelenggaraan event-event seni dan budaya secara periodik	Penyelenggaraan event-event seni dan budaya secara periodik
				Meningkatkan daya tarik destinasi dan desa wisata	Membangun sistem infrastruktur yang terkoneksi antar obyek wisata	Membangun sistem infrastruktur yang terkoneksi antar obyek wisata	Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi	Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi	Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi
						Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi	Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual	Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual	Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual



6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah adalah implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan daerah tersebut ditampilkan pada Tabel 6.4. Prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sehingga program yang dilaksanakan secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah ditampilkan pada Tabel 6.5.



Tabel 6.4.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

TUJUAN SASARAN PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT TABANAN YANG AMAN DAN NYAMAN DALAM PERIKEHIDUPAN (AMAN)										
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan										
Sasaran 1.1 Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga	Penerapan Teknologi 4.0 pada Dunia Pendidikan menuju Tabanan Era Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	39,82 %	57,23 %	64,90 %	70,80 %	76,70 %	85,55 %	DISDIK
	Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal disemua Jenjang Pendidikan Sesuai dengan Kewenangan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Penerapan kurikulum Bali unggul pada PAUD, Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (Prosentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan)	80%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK
	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang Terintegrasi pada Semua Jenjang Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,27%	78,50%	78,75%	79%	80%	81%	DISKES
			Angka Kematian Pasien (NDR) (0/00)	39,15%	<25%	<25%	<25%	<25%	<25%	BRSU
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi yang Berstandar, Bermutu, dan Terjangkau	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	40%	50%	55%	60%	60%	60%	DISKES



TUJUAN SASARAN PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Madya	19,55%	27%	30%	33%	36%	39%	DISKES
	Meningkatkan Kualitas Keterhubungan (Konektivitas) Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan berkategori mantap	81,76%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPRPKP
	Peningkatan Nilai Perumahan dan Pemukiman Menuju Keamanan dan Kenyamanan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang telah diserahkan	N.A.	20%	40%	60%	80%	100%	DPUPRPKP
	Menjalankan Politik Hukum Untuk Menjamin Penegakan Hukum yang Dilakukan dengan Evaluasi, Harmonisasi, dan Sinkronisasi terhadap Seluruh Produk Peraturan Di Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Dan Keindahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISPOLPP
	Peningkatan Program Jaminan Sosial di Semua Lini sebagai Jaminan terhadap Hak Setiap Rakyat.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISOSP3A
Sasaran 1.3 Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Memanfaatkan Energi Terbarukan (Mikrohidro dan Tenaga Surya) sebagai Energi Alternatif Pedesaan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	N.A.	9,70%	12%	14,20%	16,50%	18,70%	DLH
	Pengolahan Sampah berbasis sumber di desa.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	N.A.	50%	60%	70%	85%	100%	DLH
	Membudayakan sosiopreneur dalam menjaga lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ketersediaan RTH	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	DLH



TUJUAN SASARAN PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Sasaran 1.4 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Membangun Sentra Pendidikan Vokasi (Keterampilan) yang Berdaya Saing Tinggi, Unggul dan Berkidari	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah Pencari Kerja terdaftar	37,21%	100%	100%	100%	100%	100%	DISNAKER
	Meningkatkan Akses Lapangan Pekerjaan yang Layak Melalui Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah serta Koperasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah Pencari Kerja	69,88%	75%	80%	85%	90%	95%	DISNAKER
MISI 2: MEMBANGUN MASYARAKAT TABANAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN BERDAYA SAING TINGGI DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN (UNGGUL)										
Tujuan 2.1: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan										
Sasaran 2.6 Terbangunnya ‘Guna Desa’ Di Seluruh Wilayah Kabupaten	Membangun ‘Guna Desa’	Program Penataan Desa	Persentase desa tertib hukum	N.A.	20%	40%	60%	80%	100%	DPMD
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	N.A.	70%	80%	90%	95%	100%	DISKOMINF O
MISI 3: MEWUJUDKAN MASYARAKAT TABANAN YANG MEMILIKI KEMANDIRIAN SECARA SOSIAL-EKONOMI DI BERBAGAI BIDANG YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN (MADANI)										
Tujuan 3: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan										
Sasaran 3.1 Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan	Pengolahan Pasca Panen Produk Pertanian dalam Arti Luas yang Bernilai Ekonomi Tinggi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	N.A	10%	10%	10%	10%	10%	DISTAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan	N.A	10%	10%	10%	10%	10%	DISTAN



TUJUAN SASARAN PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Kabupaten Tabanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	N.A	1%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%	DISKAN
Sasaran 3.3 Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	Membangun Industri Kesehatan Tradisional dan Kosmetik Tradisional Bali	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang	3,86%	5%	7%	9%	10%	12%	DISPERINDA G
	Branding Produk Tabanan menuju Pasar Global	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran	41,66%	83,33%	100%	100%	100%	100%	DISPERINDA G
Sasaran 3.4 Meningkatnya Aktifitas ekonomi masyarakat yang bersumber dari potensi seni dan budaya	Melindungi, Mengembangkan, dan Membina Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Situs dan Ritus, Serta Memanfaatkannya untuk Meningkatkan Daya Saing maupun Keunggulan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya	3,16%	10%	10%	10%	10%	10%	DISBUD
	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai Penggerak Ekonomi Desa	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	N.A.	35%	42%	50%	60%	75%	DISPAR
	Pariwisata Spiritual Healing/ Balinese wellness	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010	20%	28%	36%	44%	52%	60%	DISPAR



Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah

TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam perikehidupan (Aman)								
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Persentase capaian SDG's terhadap target Rencana Aksi Daerah (RAD)	N.A	70%	80%	85%	90%	90%	
Sasaran 1: Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga	Rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	39,82%	57,23	64,90	70,80	76,70	85,55	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik	85%	95%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan kurikulum Bali unggul pada PAUD, Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (Prosentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan)	80%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,27%	78,50%	78,75%	79%	80%	81%	
	Angka Kematian Pasien (NDR) (0/00)	39,15%	<25%	<25%	<25%	<25%	<25%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	40%	50%	55%	60%	60%	60%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	19,55%	27,00%	30,00%	33,00%	36,00%	39,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan berkategori mantap	81,76%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Jaringan Irigasi	65%	65%	67%	68%	70%	70%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten	84%	88%	91%	94%	97%	100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	55%	68%	76%	84%	92%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan limbah sesuai standar	83%	88%	91%	94%	97%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan yang dapat ditangani.	76%	84%	88%	92%	96%	100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Baru yang dikembangkan	87%	92%	94%	96%	98%	100%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	92,10%	94,21%	96,32%	98,42%	100%	100%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	63%	65%	75%	83%	85%	85%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat	20%	25%	30%	35%	40%	40%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang	27%	36%	50%	65%	75%	85%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Persentase PSU yang telah	N.A.	20%	40%	60%	80%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	diserahterimakan							
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	57%	70%	80%	90%	95%	100%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	92%	80%	80%	90%	95%	100%	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentra-man, Ketertiban Dan Keindahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Pra, Pasca dan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	35%	50%	60%	70%	80%	90%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	N.A	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	57,70%	62%	64%	66%	68%	70%	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	N.A	85%	88%	91%	94%	98%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	N.A	57%	59%	60%	61%	63%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas di wilayah kabupaten Tabanan	N.A	5%	5%	5%	5%	5%	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang prima	64%	40%	60%	80%	100%	100%	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	N.A	84%	90%	95%	100%	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN	N.A	40%	60%	80%	100%	100%	
Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kurang Baik (54,83)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (68)	Cukup Baik (69)	Baik (71)	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Desa Proklim	N.A	9,70%	12,00%	4,20%	16,50%	18,70%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	N.A.	50%	60%	70%	85%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan RTH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 4: Meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23%	4%	3,9%	3,8%	3,6%	3,2%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah Pencari Kerja terdaftar	37,21%	100%	100%	100%	100%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah Pencari Kerja	69,88%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
Sasaran 5: Meningkatkan implementasi pembangunan keluarga unggul berbasis desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	7,52% (10 desa)	11,28% (15 desa)	515,04% (20 desa)	18,80% (25 desa)	22,56% (30 desa)	26,32% (35 desa)	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	N.A	77%	79%	81%	83%	85%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	74%	76%	77%	78%	79%	80%	
Sasaran 6: Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,36	95,5	95,7	95,9	96	96,2	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,95	78	78,14	78,28	78,32	78,5	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Kecamatan dan Desa Layak Anak	30%	40%	50%	60%	70%	80%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
MISI 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)								
Tujuan 2: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	Indeks Daya Saing Daerah	N.A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
Sasaran 1: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	85%	85%	90%	90%	95%	95%	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61,26 (BAIK)	66,50 (BAIK)	70,00 (BAIK)	73,20 (BAIK)	74,30 (BAIK)	75,00 (BAIK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit System	0,4	0,61	0,65	0,7	0,75	0,8	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional	60%	50,23%	54,02%	58,67%	64,24%	65%	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang Telah Mengelola Arsip	22%	25%	50%	75%	100%	100%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan	0%	25%	50%	75%	100%	100%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	85%	90%	90%	100%	100%	100%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	90%	90%	90%	90%	90%	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Pupuan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Barat	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kerambitan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Tabanan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Marga	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kediri	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pupuan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kerambitan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tabanan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Penebel	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturiti	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kediri	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah pemda yang bersertifikat	10%	14%	16%	18%	20%	22%	
Sasaran 3: Meningkatkan iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN	Peningkatan Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)	N.A	3.500	3.850	4.235	4.659	5.125	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA)	81,02%	99,70%	99,80%	99,80%	99,90%	99,90%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	90%	92%	93%	94%	95%	96%	
Sasaran 4: Optimalisasi PAD	Persentase peningkatan PAD non BLUD per tahun	13%	15%	15%	15%	15%	15%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	13%	10%	10%	13%	15%	15%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	90%	95%	95%	95%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	90%	95%	95%	95%	100%	100%	
Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Realisasi PKPT/Rencana PKPT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 6: Terbangunnya ‘Guna Desa’ Di Seluruh Wilayah Kabupaten	Persentase Desa Yang Telah Melaksanakan ‘Guna Desa’	0	10%	30%	50%	70%	100%	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa tertib hukum	N.A	20%	40%	60%	80%	100%	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	N.A.	70,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	
Sasaran 7: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	N.A	40%	50%	60%	65%	65%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan daya saing Kepemudaan dalam pembangunan daerah	8%	10%	15%	25%	35%	50%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi	4	4	4	4	3	3	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan	100%	80%	85%	90%	95%	100%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.	N.A	80%	80%	80%	80%	80%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWAS-PADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Terkendalnya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	NA	85%	90%	93%	95%	100%	
MISI 3: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)								
Tujuan 3: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	Indeks Gini	NA	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285	
Sasaran 1: Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	21.90%	22.50%	23.00%	23.50%	24.50%	25.00%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	N.A	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan	50	52%	54%	56%	58%	60%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok yang dibina oleh penyuluh	40%	45%	50%	55%	60%	65%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	95%	96%	97%	98%	99%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	N.A	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,10%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	N.A	1,20%	1,30%	1,40%	1,50%	1,60%	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	N.A	1,00%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%	
Sasaran 2: Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	93,6	94,3	95,1	95,7	95,7	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional terhadap Kebutuhan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 3: Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	8,65%	8,75%	8,80%	8,85%	8,90%	8,95%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	4%	7%	9%	12%	14%	16%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	N.A	2%	3%	4%	5%	6%	



TUJUAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2020	2022	2023	2024	2025		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang	3,86%	1,52%	1,99%	2,42%	2,83%	3,19%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran	41,66%	83,33%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi	10%	20%	20%	20%	20%	20%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang legal dan representatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 4: Meningkatnya Aktifitas ekonomi masyarakat yang bersumber dari potensi seni dan budaya	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan potensi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan	20%	22%	25%	27%	30%	32%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya	3,16%	10%	10%	10%	10%	10%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	17%	22%	27%	32%	37%	42%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang Edukatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	N.A	35%	42%	50%	60%	75%	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010	20%	28%	36%	44%	52%	60%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW	1.300.000 orang	15%	30%	45%	60%	75%	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan langkah berikutnya dalam menterjemahkan visi misi Kepala Daerah terpilih ke dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Bab VI akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam melaksanakan program tersebut. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kerangka pendanaan dan indikasi rencana program prioritas ditampilkan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	1.925.567.376.894,60	1.929.772.469.754,61	1.983.492.377.038,48	2.045.253.275.551,84	2.109.265.062.040,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.244.442.701,09	330.957.442.129,54	334.419.794.314,63	340.719.365.855,30	347.183.021.450,11
4.1.01	Pajak Daerah	96.982.778.711,03	97.467.692.604,58	99.417.046.456,68	102.896.643.082,66	106.498.025.590,55
4.1.02	Retribusi Daerah	22.808.553.490,00	23.036.639.024,90	23.497.371.805,40	24.202.292.959,56	24.928.361.748,35
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.058.310.500,06	11.058.310.500,06	11.113.602.052,56	11.224.738.073,08	11.336.985.453,81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.394.800.000,00	199.394.800.000,00	200.391.774.000,00	202.395.691.740,00	204.419.648.657,40
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.552.322.934.193,52	1.555.815.027.625,08	1.606.072.582.723,85	1.661.533.909.696,54	1.719.082.040.590,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.000.958.277,01	1.383.948.715.459,78	1.433.037.387.048,18	1.486.137.569.329,90	1.541.277.332.638,89
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.321.975.916,51	171.866.312.165,29	173.035.195.675,67	175.396.340.366,64	177.804.707.951,42
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.925.567.376.894,60	1.929.772.469.754,61	1.983.492.377.038,48	2.045.253.275.551,84	2.109.265.062.040,43
5	BELANJA	2.188.830.376.895,00	1.914.203.998.410,58	1.967.917.050.420,20	2.030.041.284.418,19	2.094.415.479.165,30
5.1	BELANJA OPERASI	1.447.178.217.200,76	1.450.338.594.168,78	1.491.035.464.724,28	1.538.105.251.578,39	1.586.879.770.484,31
5.1.01	Belanja Pegawai	866.574.927.826,52	868.467.371.625,36	892.836.787.392,70	921.022.325.746,65	950.228.663.085,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.812.035.541,68	493.888.248.400,72	507.746.878.512,93	523.775.697.352,51	540.385.033.824,61
5.1.05	Belanja Hibah	87.791.253.832,57	87.982.974.142,69	90.451.798.818,65	93.307.228.479,24	96.266.073.574,43
5.2	BELANJA MODAL	483.188.807.745,97	220.406.086.158,97	226.590.737.104,70	233.743.871.923,40	241.156.072.674,01



KODE	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.776.090,28	14.808.358,60	15.223.884,92	15.704.480,48	16.202.481,82
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.237.850.831,39	71.393.421.486,30	73.396.739.087,05	75.713.765.708,04	78.114.708.356,91
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.461.440.529,09	61.595.661.262,07	63.324.051.214,07	65.323.097.959,71	67.394.544.418,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	349.642.872.718,82	86.568.510.826,42	88.997.645.301,26	91.807.169.483,58	94.718.446.536,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	831.867.576,39	833.684.225,58	857.077.617,40	884.134.291,59	912.170.880,55
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.626.746.965,00	6.242.058.245,57	6.417.211.990,66	6.619.793.892,80	6.829.712.727,71
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.626.746.965,00	6.242.058.245,57	6.417.211.990,66	6.619.793.892,80	6.829.712.727,71
5.4	BELANJA TRANSFER	251.836.604.983,26	237.217.259.837,26	243.873.636.600,55	251.572.367.023,61	259.549.923.279,27
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.215.432.697,55	14.332.162.919,65	14.734.327.063,57	15.199.468.001,35	15.681.455.003,62
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	236.621.172.285,71	222.885.096.917,62	229.139.309.536,98	236.372.899.022,26	243.868.468.275,65
	JUMLAH BELANJA	2.188.830.376.895,00	1.914.203.998.410,58	1.967.917.050.420,20	2.030.041.284.418,19	2.094.415.479.165,30
	TOTAL SURPLUS/(Defisit)	(263.263.000.000,40)	15.568.471.344,04	15.575.326.618,28	15.211.991.133,65	14.849.582.875,13
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.802.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.539.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.263.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289.802.558.250,40	67.170.351.280,97	63.272.785.191,73	59.745.409.861,36	56.217.107.303,87
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.03	Pembayaran Pokok Hutang	20.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.539.558.250,00	82.738.822.625,00	78.848.111.810,00	74.957.400.995,00	71.066.690.179,00



KODE	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
	Pembiayaan Netto	263.263.000.000,40	(15.568.471.344,03)	(15.575.326.618,27)	(15.211.991.133,64)	(14.849.582.875,13)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	39,82 %	57,23 %	102.796.572.000	64,90 %	105.469.282.872	70,80 %	108.633.361.358	76,70 %	111.892.362.199	85,55 %	115.249.133.065	85,55 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Kurikulum Bali Unggul pada Satuan Pendidikan	80 %	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	257.500.000	100 %	265.225.000	100 %	273.181.750	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik	85 %	95 %	217.677.200	100 %	223.336.807	100 %	230.036.911	100 %	236.938.019	100 %	244.046.159	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,27 %	78,50 %	132.281.981.249	78,75 %	135.721.312.761	79 %	139.792.952.144	80 %	143.986.740.709	81 %	148.306.342.930	81 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Pasien (NDR) (0/00)	39,15 %	<25 %	8.747.238.000	<25 %	8.974.666.188	<25 %	9.243.906.174	<25 %	9.521.223.359	<25 %	9.806.860.060	<25 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	40 %	50 %	6.392.391.842	55 %	6.558.594.030	60 %	6.755.351.851	60 %	6.958.012.406	60 %	7.166.752.779	60 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan mi- numan yang meme-nuhi standar perijinan	40 %	55 %	167.520.000	60 %	171.875.520	65 %	177.031.786	70 %	182.342.739	75 %	187.813.021	75 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	19,55 %	27 %	140.600.000	30 %	144.255.600	33 %	148.583.268	36 %	153.040.766	39 %	157.631.989	39 %	0	DINAS KESEHATAN
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Jaringan Irigasi	65 %	65 %	10.046.357.300	67 %	10.307.562.590	68 %	10.616.789.467	70 %	10.935.293.152	70 %	11.263.351.946	70 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten	84 %	88 %	6.667.514.000	91 %	6.840.869.364	94 %	7.046.095.445	97 %	7.257.478.308	100 %	7.475.202.658	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	55 %	68 %	620.000.000	76 %	636.120.000	84 %	655.203.600	92 %	674.859.708	100 %	695.105.499	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan limbah sesuai standar	83 %	88 %	1.470.000.000	91 %	1.508.220.000	94 %	1.553.466.600	97 %	1.600.070.598	100 %	1.648.072.716	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan yang dapat ditangani	76 %	84 %	2.000.000.000	88 %	2.052.000.000	92 %	2.113.560.000	96 %	2.176.966.800	100 %	2.242.275.804	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Baru yang dikembangkan	87 %	92 %	762.836.900	94 %	782.670.659	96 %	806.150.779	98 %	830.335.303	100 %	855.245.362	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	92,10 %	94,21 %	2.159.347.936	96,32 %	2.215.490.982	98,42 %	2.281.955.712	100 %	2.350.414.383	100 %	21.477.489.180	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	63 %	65 %	47.383.325.088	75 %	17.533.953.268	83 %	29.100.642.421	85 %	48.805.926.446	85 %	50.270.104.240	85 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan berkategori mantap	81,76 %	100 %	369.963.000.000	100 %	65.560.825.093	100 %	67.527.649.846	100 %	69.553.479.341	100 %	71.640.083.721	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat	20 %	25 %	30.000.000	30 %	30.780.000	35 %	31.703.400	40 %	32.654.502	40 %	33.634.137	40 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang	27 %	36 %	415.000.000	50 %	425.790.000	65 %	438.563.700	75 %	451.720.611	85 %	465.272.229	85 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	57 %	70 %	1.125.000.000	80 %	1.154.250.000	90 %	1.188.877.500	95 %	1.224.543.825	100 %	1.261.280.140	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	92 %	80 %	1.400.000.000	80 %	1.436.400.000	90 %	1.479.492.000	95 %	1.523.876.760	100 %	1.569.593.063	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang telah diserahkan	N.A %	20 %	250.000.000	40 %	256.500.000	60 %	264.195.000	80 %	272.120.850	100 %	280.284.476	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keindahan	100 %	100 %	174.000.000	100 %	178.524.000	100 %	183.879.720	100 %	189.396.112	100 %	195.077.995	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100 %	100 %	1.463.300.106	100 %	1.501.345.909	100 %	1.546.386.286	100 %	1.592.777.875	100 %	1.640.561.211	100 %	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaa	100 %	100 %	260.000.000	100 %	266.760.000	100 %	274.762.800	100 %	283.005.684	100 %	291.495.855	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	35 %	50 %	294.000.000	60 %	305.180.000	70 %	318.415.400	80 %	332.047.862	90 %	346.089.298	90 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	360.000.000	100 %	369.360.000	100 %	380.440.800	100 %	391.854.024	100 %	403.609.645	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	180.000.000	100 %	184.680.000	100 %	190.220.400	100 %	195.927.012	100 %	201.804.822	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Sosial	100 %	100 %	136.000.000	100 %	136.000.000	100 %	136.000.000	100 %	136.000.000	100 %	136.000.000	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah Pencari Kerja terdaftar	37,21 %	100 %	150.000.000	100 %	153.900.000	100 %	158.517.000	100 %	163.272.510	100 %	168.170.685	100 %	0	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah Pencari Kerja	69,88 %	75 %	2.032.698.870	75 %	2.085.549.041	75 %	2.148.115.512	75 %	2.212.558.977	75 %	2.278.935.747	75 %	0	DINAS TENAGA KERJA	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,95 %	78 %	90.000.000	78,14 %	92.340.000	78,28 %	95.110.200	78,32 %	97.963.506	78,5 %	100.902.411	78,5 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Tertangani	100 %	100 %	125.000.000	100 %	128.250.000	100 %	132.097.500	100 %	136.060.425	100 %	140.142.238	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Kecamatan dan Desa Layak Anak	30 %	40 %	120.000.000	50 %	125.720.000	60 %	132.491.600	70 %	139.466.348	80 %	146.650.338	80 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Tertangani	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	100 %	100 %	555.800.000	100 %	443.973.200	100 %	448.412.900	100 %	457.381.100	100 %	466.528.700	100 %	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional terhadap Kebutuhan Masyarakat	75 %	75 %	1.076.641.900	80 %	1.104.634.589	85 %	1.137.773.627	90 %	1.171.906.836	95 %	1.207.064.041	95 %	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah pemda yang bersertifikat	10 %	14 %	15.000.000	16 %	15.390.000	18 %	15.851.700	20 %	16.327.251	22 %	16.817.069	22 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Desa Proklim	N.A %	9,70 %	973.547.450	12 %	330.000.000	14,20 %	363.000.000	16,50 %	401.775.000	18,70 %	409.742.300	18,70 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan RTH	100 %	100 %	1.111.084.300	100 %	1.026.060.800	100 %	1.056.842.500	100 %	1.088.547.700	100 %	1.121.204.300	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola	N.A %	50 %	9.756.821.650	60 %	9.943.809.320	70 %	10.242.123.596	85 %	10.549.387.307	100 %	10.865.868.925	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	N.A %	85 %	80.000.000	88 %	82.080.000	91 %	84.542.400	94 %	87.078.672	98 %	89.691.032	98 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	N.A %	57 %	1.520.000.000	59 %	1.559.520.000	60 %	1.606.305.600	61 %	1.654.494.768	63 %	1.704.129.611	63 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	57,70 %	62 %	1.605.261.000	64 %	1.646.997.786	66 %	1.696.407.720	68 %	1.747.299.951	70 %	1.799.718.950	70 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa tertib hukum	N.A %	20 %	200.000.000	40 %	1.000.000.000	60 %	1.030.000.000	80 %	1.060.900.000	100 %	1.092.727.000	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100 %	100 %	75.000.000	100 %	76.950.000	100 %	79.258.500	100 %	81.636.255	100 %	84.085.343	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa	100 %	100 %	155.000.000	100 %	159.030.000	100 %	163.800.900	100 %	168.714.927	100 %	173.776.375	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	N.A %	77 %	3.609.035.000	79 %	3.702.869.910	81 %	3.813.956.007	83 %	3.928.374.688	85 %	4.046.225.928	85 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan	74 %	76 %	190.000.000	77 %	194.940.000	78 %	200.788.200	79 %	206.811.846	80 %	213.016.201	80 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	kesadaran tentang fungsi keluarga													KELUARGA BERENCANA	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten Tabanan	N.A %	5 %	4.500.000.000	5 %	4.617.000.000	5 %	4.755.510.000	5 %	4.898.175.300	5 %	5.045.120.559	5 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	N.A %	84 %	1.093.000.000	90 %	1.121.418.000	95 %	1.155.060.540	100 %	1.189.712.356	100 %	1.225.403.727	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi	N.A %	100 %	4.173.424.200	100 %	4.281.933.229	100 %	4.410.391.226	100 %	4.542.702.963	100 %	4.678.984.052	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	N.A %	2 %	390.304.000	3 %	400.451.904	4 %	412.465.461	5 %	424.839.425	6 %	437.584.608	6 %	0	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	4 %	7 %	85.039.100	9 %	87.250.117	12 %	89.867.620	14 %	92.563.649	16 %	95.340.558	16 %	0	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA)	81,02 %	99,70 %	224.960.530	99,80 %	230.809.504	99,80 %	237.733.789	99,90 %	244.865.803	99,90 %	252.211.777	99,90 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	343.813.000	100 %	352.752.138	100 %	363.334.702	100 %	374.234.743	100 %	385.461.786	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan daya saing Kepemudaan dalam pembangunan daerah	8 %	10 %	139.200.000	15 %	142.819.200	25 %	147.103.776	35 %	151.516.889	50 %	156.062.396	50 %	0	DINAS PENDIDIKAN
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi	4 Ranking	4 Ranking	1.270.000.000	4 Ranking	1.303.020.000	4 Ranking	1.342.110.600	3 Ranking	1.382.373.918	3 Ranking	1.423.845.136	3 Ranking	0	DINAS PENDIDIKAN
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	N.A %	70 %	15.000.000	80 %	15.390.000	90 %	15.851.700	95 %	16.327.251	100 %	16.817.069	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian	N.A %	10 %	23.326.600	13 %	23.933.092	15 %	24.651.084	20 %	25.390.617	25 %	26.152.335	25 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
				dan sesuai dengan standar BSSN														
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Terjaga Kelestariannya	3,16 %	10 %	4.052.507.500	10 %	4.157.872.695	10 %	4.282.608.876	10 %	4.411.087.142	10 %	4.543.419.756	10 %	0	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	17 %	22 %	750.000.000	27 %	769.500.000	32 %	792.585.000	37 %	816.362.550	42 %	840.853.427	42 %	0	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang Edukatif	100 %	100 %	700.000.000	100 %	718.200.000	100 %	739.746.000	100 %	761.938.380	100 %	784.796.531	100 %	0	DINAS KEBUDAYAAN
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang prima	64 %	40 %	100.000.000	60 %	102.600.000	80 %	105.678.000	100 %	108.848.340	100 %	112.113.790	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang Telah Mengelola Arsip	22 %	25 %	100.000.000	50 %	102.600.000	75 %	105.678.000	100 %	108.848.340	100 %	112.113.790	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan	0 %	25 %	215.000.000	50 %	220.590.000	75 %	227.207.700	100 %	234.023.931	100 %	241.044.649	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,0 %	1,2 %	313.981.200	1,3 %	322.144.711	1,4 %	331.809.053	1,5 %	341.763.324	1,6 %	352.016.224	1,6 %	0	DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,10 %	0,40 %	658.169.520	0,60 %	675.281.928	0,80 %	695.540.385	1,00 %	716.406.597	1,10 %	737.898.795	1,10 %	0	DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	0,8 %	1 %	32.500.000	1,1 %	33.345.000	1,2 %	34.345.350	1,3 %	35.375.711	1,4 %	36.436.982	1,4 %	0	DINAS PERIKANAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020	20 %	28 %	1.722.000.000	36 %	1.560.000.000	44 %	1.682.000.000	52 %	1.809.000.000	60 %	1.936.000.000	60 %	0	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW	13 %	15 %	205.000.000	30 %	239.000.000	45 %	274.000.000	60 %	299.000.000	75 %	353.000.000	75 %	0	DINAS PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	N.A %	35 %	371.000.000	42 %	437.000.000	50 %	337.000.000	60 %	335.000.000	70 %	281.000.000	70 %	0	DINAS PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	10 %	10 %	831.000.000	10 %	804.340.902	10 %	1.291.268.759	10 %	1.406.887.381	10 %	1.573.668.180	10 %	0	DINAS PERTANIAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan	50 %	52 %	4.155.500.000	54 %	4.225.024.730	56 %	4.398.775.472	58 %	4.726.238.737	60 %	4.857.525.899	60 %	0	DINAS PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	95 %	96 %	225.000.000	97 %	236.250.000	98 %	238.612.525	99 %	250.543.125	100 %	263.070.282	100 %	0	DINAS PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Subak, Subak Abian yang dibina oleh Penyuluh	40 %	45 %	163.750.000	50 %	171.937.500	55 %	172.134.375	60 %	174.378.094	65 %	176.606.698	65 %	0	DINAS PERTANIAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Bangunan Pasar Rakyat yang Layak Terfasilitasi dan Terawasi	100 %	100 %	1.400.000.000	100 %	1.436.400.000	100 %	1.479.492.000	100 %	1.523.876.760	100 %	1.569.593.063	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi	10 %	20 %	75.000.000	20 %	76.950.000	20 %	79.258.500	20 %	81.636.255	20 %	84.085.343	20 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komoditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran	41,66 %	83,33 %	120.000.000	100 %	123.120.000	100 %	126.813.600	100 %	130.618.008	100 %	134.536.548	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang	3,86 %	1,52 %	754.100.000	1,99 %	773.706.600	2,42 %	796.917.798	2,83 %	820.825.332	3,19 %	845.450.092	3,19 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100 %	100 %	2.550.821.000	100 %	2.617.142.346	100 %	2.695.656.616	100 %	2.776.526.315	100 %	2.859.822.104	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa yang diselenggarakan	100 %	100 %	360.000.000	100 %	369.360.000	100 %	380.440.800	100 %	391.854.024	100 %	403.609.645	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90 %	90 %	19.844.449.400	90 %	20.360.405.084	90 %	20.971.217.237	90 %	21.600.353.754	90 %	22.248.364.367	90 %	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	85 %	90 %	2.260.000.000	90 %	2.318.760.000	100 %	2.388.322.800	100 %	2.459.972.484	100 %	2.533.771.659	100 %	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan	85 %	90 %	1.000.000.000	90 %	1.000.000.000	90 %	1.000.000.000	90 %	1.000.000.000	90 %	1.000.000.000	90 %	0	BADAN PERENCANAAN,



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah													PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	02		KEUANGAN															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	90 %	95 %	302.293.537.302	95 %	300.908.287.302	95 %	300.908.287.302	100 %	300.908.287.302	100 %	300.908.287.302	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	90 %	95 %	1.900.000.000	95 %	753.900.000	100 %	776.517.000	100 %	799.812.510	100 %	823.806.885	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	13 %	10 %	2.816.674.912	13 %	2.466.046.732	15 %	2.540.028.134	15 %	2.616.228.978	15 %	2.694.715.848	15 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit System	0,4 %	0,61 %	150.000.000	0,65 %	153.900.000	0,7 %	158.517.000	0,75 %	163.272.510	0,8 %	168.170.685	0,8 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional	60 %	50,23 %	150.000.000	54,02 %	153.900.000	58,67 %	158.517.000	64,24 %	163.272.510	65 %	168.170.685	65 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	85 %	85 %	150.000.000	90 %	75.000.000	90 %	77.250.000	95 %	79.567.500	95 %	81.954.525	95 %	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Realisasi PKPT/Rencana PKPT)	100 %	100 %	321.352.000	100 %	329.707.152	100 %	339.598.367	100 %	349.786.318	100 %	360.279.907	100 %	0	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100 %	100 %	223.690.200	100 %	229.506.145	100 %	236.391.330	100 %	243.483.069	100 %	250.787.562	100 %	0	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pupuan	N.A %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.540.000	100 %	19.096.200	100 %	19.669.086	100 %	0	KECAMATAN PUPUAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.000.000	100 %	19.570.000	100 %	20.157.100	100 %	20.761.813	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG BARAT



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.600.000	100 %	21.218.000	100 %	21.854.540	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.494.000	100 %	20.078.820	100 %	20.681.185	100 %	21.301.620	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kerambitan	N.A %	100 %	14.000.000	100 %	14.364.000	100 %	14.794.920	100 %	15.238.768	100 %	15.695.931	100 %	0	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tabanan	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.494.000	100 %	20.078.820	100 %	20.681.185	100 %	21.301.620	100 %	0	KECAMATAN TABANAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Penebel	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.494.000	100 %	20.078.820	100 %	20.681.185	100 %	21.301.620	100 %	0	KECAMATAN PENEHEL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturiti	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.494.000	100 %	20.078.820	100 %	20.681.185	100 %	21.301.620	100 %	0	KECAMATAN BATURITI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga	N.A %	100 %	9.000.000	100 %	9.234.000	100 %	9.511.020	100 %	9.796.351	100 %	10.090.241	100 %	0	KECAMATAN MARGA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kediri	N.A %	100 %	19.000.000	100 %	19.494.000	100 %	20.078.820	100 %	20.681.185	100 %	21.301.620	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kediri	100 %	100 %	69.000.000	100 %	70.794.000	100 %	72.917.820	100 %	75.105.355	100 %	77.358.515	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Tabanan	100 %	100 %	29.000.000	100 %	29.754.000	100 %	30.646.620	100 %	31.566.019	100 %	32.512.999	100 %	0	KECAMATAN TABANAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Marga	100 %	100 %	75.000.000	100 %	76.950.000	100 %	79.258.500	100 %	81.636.255	100 %	84.085.343	100 %	0	KECAMATAN MARGA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Baturiti	100 %	100 %	69.000.000	100 %	70.794.000	100 %	72.917.820	100 %	75.105.355	100 %	77.358.515	100 %	0	KECAMATAN BATURITI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Penebel	100 %	100 %	74.000.000	100 %	75.924.000	100 %	78.201.720	100 %	80.547.772	100 %	82.964.205	100 %	0	KECAMATAN PENEBEL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Kerambitan	100 %	100 %	27.000.000	100 %	27.702.000	100 %	28.533.060	100 %	29.389.052	100 %	30.270.723	100 %	0	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Selemadeg Timur	100 %	100 %	29.000.000	100 %	29.754.000	100 %	30.646.620	100 %	31.566.019	100 %	32.512.999	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Selemadeg	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	78.280.000	100 %	80.628.400	100 %	83.047.252	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	100 %	69.000.000	100 %	69.000.000	100 %	71.070.000	100 %	73.202.100	100 %	75.398.163	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum d Kecamatan Pupuan	100 %	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.810.000	100 %	28.644.300	100 %	29.503.629	100 %	0	KECAMATAN PUPUAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai Nilai Kebangsaan	100 %	80 %	360.000.000	85 %	360.000.000	90 %	370.800.000	95 %	381.924.000	100 %	393.381.720	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	N.A %	80 %	1.741.750.000	80 %	1.741.750.000	80 %	1.794.002.500	80 %	1.847.822.575	80 %	1.903.257.252	80 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	N.A %	85 %	1.239.145.000	90 %	1.239.145.000	93 %	1.276.319.350	95 %	1.314.608.931	100 %	1.354.047.198	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X																		
X	XX																	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Kediri)	100 %	100 %	3.913.174.000	100 %	3.932.739.870	100 %	4.050.722.066	100 %	4.172.243.728	100 %	4.297.411.040	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	100 %	100 %	3.449.069.000	100 %	3.466.314.345	100 %	3.570.303.775	100 %	3.677.412.889	100 %	3.787.735.275	100 %	0	KECAMATAN TABANAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Tabanan)														
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Marga)	100 %	100 %	3.878.500.000	100 %	3.897.892.500	100 %	4.014.829.275	100 %	4.135.274.153	100 %	4.259.332.378	100 %	0	KECAMATAN MARGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti)	100 %	100 %	4.029.607.358	100 %	4.049.755.395	100 %	4.171.248.057	100 %	4.296.385.498	100 %	4.425.277.063	100 %	0	KECAMATAN BATURITI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Penebel)	100 %	100 %	2.823.507.462	100 %	2.837.624.999	100 %	2.922.753.749	100 %	3.010.436.362	100 %	3.100.749.453	100 %	0	KECAMATAN PENEBEL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Kerambitan)	100 %	100 %	3.297.240.000	100 %	3.313.726.200	100 %	3.413.137.986	100 %	3.515.532.126	100 %	3.620.998.089	100 %	0	KECAMATAN KERAMBITAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Selemadeg Timur)	100 %	100 %	3.037.250.000	100 %	3.052.436.250	100 %	3.144.009.338	100 %	3.238.329.618	100 %	3.335.479.506	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg)	100 %	100 %	3.616.119.941	100 %	3.634.200.541	100 %	3.743.226.557	100 %	3.855.523.354	100 %	3.971.189.054	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (selemadeg Barat)	100 %	100 %	3.371.875.500	100 %	3.388.734.878	100 %	3.490.396.924	100 %	3.595.108.832	100 %	3.702.962.096	100 %	0	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Pupuan)	100 %	100 %	3.628.731.899	100 %	3.646.875.558	100 %	3.756.281.825	100 %	3.868.970.280	100 %	3.985.039.388	100 %	0	KECAMATAN PUPUAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disdik Tabanan)	100 %	100 %	393.652.352.630	100 %	395.620.614.393	100 %	407.489.232.825	100 %	419.713.909.810	100 %	432.305.327.104	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %	100 %	141.526.952.949	100 %	142.234.587.714	100 %	146.501.625.345	100 %	150.896.674.106	100 %	155.423.574.329	100 %	0	DINAS KESEHATAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRSUD Tabanan)	100 %	100 %	162.510.045.000	100 %	163.322.595.225	100 %	168.222.273.082	100 %	173.268.941.274	100 %	178.467.009.512	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPUPRKP Tabanan)	100 %	100 %	20.502.759.212	100 %	20.605.273.008	100 %	21.223.431.198	100 %	21.860.134.134	100 %	22.515.938.158	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	100 %	100 %	16.760.200.000	100 %	16.844.001.000	100 %	17.349.321.030	100 %	17.869.800.661	100 %	18.405.894.681	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Satpol PP Tabanan)														
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BPBD Tabanan)	100 %	100 %	3.094.468.250	100 %	3.109.940.591	100 %	3.203.238.809	100 %	3.299.335.973	100 %	3.398.316.052	100 %	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dinsos P3A Tabanan)	100 %	100 %	6.538.500.000	100 %	6.571.192.500	100 %	6.768.328.275	100 %	6.971.378.123	100 %	7.180.519.467	100 %	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disnaker Tabanan)	100 %	100 %	6.002.721.000	100 %	6.032.734.605	100 %	6.213.716.643	100 %	6.400.128.142	100 %	6.592.131.987	100 %	0	DINAS TENAGA KERJA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskepa Tabanan)	100 %	100 %	5.100.200.000	100 %	5.125.701.000	100 %	5.279.472.030	100 %	5.437.856.191	100 %	5.600.991.877	100 %	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	100 %	15.668.509.200	100 %	16.227.723.321	100 %	16.691.455.148	100 %	17.164.313.875	100 %	17.683.329.071	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disduk Capil Tabanan)	100 %	100 %	6.731.271.937	100 %	6.764.928.297	100 %	6.967.876.146	100 %	7.176.912.430	100 %	7.392.219.803	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMD Tabanan)	100 %	100 %	9.077.000.000	100 %	9.122.385.000	100 %	9.396.056.550	100 %	9.677.938.247	100 %	9.968.276.394	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dispenduk KB)	100 %	100 %	5.975.607.600	100 %	6.005.485.638	100 %	6.185.650.207	100 %	6.371.219.713	100 %	6.562.356.305	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dishub Tabanan)	100 %	100 %	27.790.575.229	100 %	27.929.528.105	100 %	28.767.413.948	100 %	29.630.436.367	100 %	30.519.349.458	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskominfo Tabanan)	100 %	100 %	6.958.688.410	100 %	6.993.481.852	100 %	7.203.286.308	100 %	7.419.384.897	100 %	7.641.966.444	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskop UKM Tabanan)	100 %	100 %	5.662.730.707	100 %	5.691.044.361	100 %	5.861.775.691	100 %	6.037.628.962	100 %	6.218.757.831	100 %	0	DINAS KOPERASI DAN UKM
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMPTSP Tabanan)	100 %	100 %	8.270.910.150	100 %	8.312.264.701	100 %	8.561.632.642	100 %	8.818.481.621	100 %	9.083.036.070	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	100 %	100 %	8.013.000.000	100 %	8.053.065.000	100 %	8.294.656.950	100 %	8.543.496.659	100 %	8.799.801.558	100 %	0	DINAS KEBUDAYAAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disbud Tabanan)														
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dispersip Tabanan)	100 %	100 %	6.906.317.000	100 %	6.940.848.585	100 %	7.149.074.043	100 %	7.363.546.264	100 %	7.584.452.652	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskan Tabanan)	100 %	100 %	6.404.380.665	100 %	6.436.402.568	100 %	6.629.494.645	100 %	6.828.379.485	100 %	7.033.230.869	100 %	0	DINAS PERIKANAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Dispar Tabanan)	100 %	100 %	5.306.322.200	100 %	5.454.601.811	100 %	5.628.319.865	100 %	5.715.959.461	100 %	5.833.728.245	100 %	0	DINAS PARIWISATA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Distan Tabanan)	100 %	100 %	30.866.779.423	100 %	31.086.876.688	100 %	31.516.832.834	100 %	32.183.525.659	100 %	33.028.451.866	100 %	0	DINAS PERTANIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disperindag Tabanan)	100 %	100 %	8.944.013.306	100 %	8.988.733.373	100 %	9.258.395.374	100 %	9.536.147.235	100 %	9.822.231.652	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Setda Tabanana)	100 %	100 %	37.342.452.545	100 %	37.529.164.808	100 %	38.655.039.752	100 %	39.814.690.945	100 %	41.009.131.673	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Setwan Tabanan)	100 %	100 %	48.405.300.000	100 %	48.647.326.500	100 %	50.106.746.295	100 %	51.609.948.684	100 %	53.158.247.144	100 %	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bapelitbang Tabanan)	100 %	100 %	9.830.668.370	100 %	9.940.758.575	100 %	10.238.981.332	100 %	10.546.150.772	100 %	10.862.535.295	100 %	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bakeuda Tabanan)	100 %	100 %	38.000.579.120	100 %	38.190.582.016	100 %	39.336.299.476	100 %	40.516.388.460	100 %	41.731.880.114	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BKPSDM Tabanan)	100 %	100 %	6.000.604.623	100 %	6.030.607.646	100 %	6.211.525.875	100 %	6.397.871.652	100 %	6.589.807.801	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Inspektorat Tabanan)	100 %	100 %	13.101.146.807	100 %	12.638.952.541	100 %	13.018.121.117	100 %	13.408.664.751	100 %	13.810.924.693	100 %	0	INSPEKTORAT
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Keshannpol Tabanan)	100 %	100 %	4.053.993.200	100 %	4.074.263.166	100 %	4.196.491.061	100 %	4.322.385.793	100 %	4.452.057.367	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Target Tahun					
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Rata-rata Persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial)	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kurang Baik (54,83)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (68)	Cukup Baik (69)	Baik (71)
4.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23	4	3,9	3,8	3,6	3,2
5.	prosentase Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	7,52%	11,28%	15,04%	18,80%	22,56%	26,32%
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	95,36	95,38	95,39	95,4	95,5	95,6
7.	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif	Kabupaten Terinovatif
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
9.	Peningkatan Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)	3.500	3.500	3.850	4.235	4.659	5.125



No	Indikator	Target Tahun					
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
10.	Persentase Peningkatan PAD Non BLUD per Tahun	13%	15%	15%	15%	15%	15%
11.	Hasil Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Persentase Desa Yang Telah Melaksanakan "Guna Desa"	0	10%	30%	50%	70%	100%
13.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	30%	40%	50%	60%	65%	65%
14.	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	21,63%	22.50%	23.00%	23.50%	24.50%	25.00%
15.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	93,6	94,3	95,1	95,7	95,7
16.	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	8,70%	8,75%	8,80%	8,85%	8,90%	8,95%
17.	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan	20%	22%	25%	27%	30%	32%



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKK)

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	5,60	5,7	5,8	5,9	6,0	6	6
2	Laju Inflasi	Pesentase (%)	2,24	3,00 $\pm$ 1%	3,00 $\pm$ 1%	3,00 $\pm$ 1%	3,00 $\pm$ 1%	3,00 $\pm$ 1%	3,00 $\pm$ 1%
3	PDRB per kapita	Jumlah	53,59	57,09	60,59	64,09	67,59	71,09	71,09
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	4,21	4,2	4,2	4,19	4,15	4,1	4
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	76,17	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	94,93	93,50	93,85	94,00	94,25	94,50	95,00
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,88	8,90	8,94	8,98	9,10	9,15	9,20
9	Angka usia harapan hidup	tahun	73,65	74	74	74	74	74	74



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	3,3	3,3	3,2	3,1	3	3	3
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	75,47	76	76,75	77	77,5	78	78.5
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	4,23	4,1	4	3,9	3,8	3,6	3,2
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	75	80	85	90	100	100
16	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	91,50	92,00	93,60	94,30	95,10	95,70	95,70
18	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH									



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17,14	16,52	16,21	15,90	15,59	15,28	14,97
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	104,10	105,00	105,50	106,00	106,50	107,00	107,50
3	Angka kriminalitas	Kasus	182	180	175	170	165	160	155
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	73,98	73,98	74,98	74,98	74,98	74,98
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	21,63	21,90%	22,50%	23,00%	23,50%	24,50%	25,00%
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2	Angka Partisipasi Kasar	Persentase (%)	72,14	73,50	74,50	75,50	76,75	78,50	80,00
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	106,12	106,20	106,25	106,30	106,35	106,40	106,45
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106,88	106,93	106,98	107,03	107,08	107,13	107,18
1.3	Angka Partisipasi Murni								
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96,12	96,17	96,22	96,27	96,32	96,37	96,42
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	81,22	81,32	81,47	81,62	81,77	81,92	82,07
1.4	Angka Partisipasi Sekolah								
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	109,98	110,00	110,02	110,04	110,06	110,08	110,10
1.5	Angka Putus Sekolah								
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,23	0,18	0,13	0,08	0,03	0,02	0,00
1.6	Angka Kelulusan								
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Angka Transisi (AT)								
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	100,64	100,66	100,68	100,70	100,72	100,74	100,76
1.8	Fasilitas Pendidikan								
1.8.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	35,97	43,75	51,75	60,85	78,15	85,75	90,85
1.8.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	52,63	60,65	78,75	85,75	90,75	95,25	100
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	92	91	90	89	88	87	86



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	25	24	23	21	20	19	18
1.11	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	12,79	12,79	13,25	13,35	13,45	13,55	13,65
1.12	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
1.12.1	SD/MI	Persentase (%)	2,27	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1.12.2	SMP/MTS	Persentase (%)	5,92	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	94,92	95,22	95,42	95,62	95,82	96,02	96,22
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	81,36	85,45	88,75	91,75	93,75	95,75	97,75



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14. 2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	96,45	96,95	97,45	97,95	98,45	99,00	100,00
1.14. 3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	98,20	98,70	99,00	99,25	99,75	100,00	100,00
2 Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	65	64	63	62	61	60	60
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	10,4	10	9,8	9,5	9,20	8,80	8,80
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,8	6,5	6,4	6,2	5,9	5,8	5,8
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	77,3	76	75	74	73	72	72
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk		82	83	84	84	84	85	85
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk		80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	90,00	92,00	93,000	95,00	96,00	98,00	98
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	18,5	44	44	44	44	44	44
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	90,9	90	90	90	90	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	75,9/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk	<49/100.000 penduduk



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	55	100	100	100	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0,002/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	50,08	60	62	64	68	69	69
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	NA	70	72	74	75	76	76
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	18	18	17	17	17	16	16



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	90	90	90	90	90	90	90
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	60	60	60	60	60	60	60
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	60	60	60	60	60	60	60
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	90	90	90	90	90	90	90
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	80	82	84	85	86	88	88
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	60	61	62	64	66	65	65
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	65	76	65	66,5	68	69,5	70,00
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	47,53	48,03	49,03	50,53	52,53	55,03	55,53



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3	Panjang Pantai Terabrasi	Kilometer	12,51	11,50	10,60	10,00	9,51	8,00	8,00
3.4	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80,84	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	60	60	65	70	75	80	85
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan kabupaten yang bersertifikat	Persentase (%)	25	25	30	35	40	45	45
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	83,16	85	88,38	92,5	95,88	100	100
3.9	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	Persentase (%)	83,54	85	88,38	92,5	95,88	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.10	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	87,34	90	92,5	95	97,5	100	100
3.10.1	Persentase penduduk yang berakses air minum di Kabupaten Tabanan	Persentase (%)	83,54	85	88,38	92,5	95,88	100	100
3.10.2	Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Kabupaten Tabanan	Persentase (%)	83,16	85	88,38	92,5	95,88	100	100
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase (%)	80	90	90	90	90	90	90
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1	Jumlah rumah terbangun kewenangan kabupaten	Unit	NA	0	10	20	40	60	130



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase (%)	NA	93	93	95	98	100	100
4.3	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	87,34	90	92,5	95	97,50	100	100
5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	35	35	70	85	90	100	100
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	50	60	70	80	90	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	20	40	60	80	100	100	100
5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Sosial								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	70	75	75	75	75	75	75
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	70	85	86	87	88	89	90
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	95	95	95	95	95	95	95
6.4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	Persentase (%)	5	5	6	7	8	9	10



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial								
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	Tenaga Kerja								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	5,5	5	4	3	2	1	1
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	174 Orang	360 Orang	379 Orang	399 Orang	420 Orang	442 Orang	465 Orang
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah	4.612 Orang	4,700 Orang	4.900 Orang	5.100 Orang	5.300 Orang	5.500 Orang	5.800 Orang
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	160 Orang	224 Orang	512 Orang	672 Orang	752 Orang	848 Orang	1.088 Orang
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	0	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang
1.8	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase (%)	2,81	2,70	2,77	2,81	2,85	2,88	2,90
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	50	50	50	50	50	50	50
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	25	25	25	25	25	25	25
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	50	50	50	50	50	50	50



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	71,3	50	55	60	65	70	75
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3 Pangan									
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Padi (Beras)	Ton	114.583,00	115.155,92	115.731,69	116.310,35	116.891,90	117.476,36	118.063,75
	Padi (Gabah)	Ton	212.312,00	213.373,56	214.440,43	215.512,63	216.590,19	217.673,14	218.761,51
3.1.2	Jagung	Ton	9.133,00	9.178,67	9.224,56	9.270,68	9.317,03	9.363,62	9.410,44
3.1.3	Kedelai	Ton	153,00	153,77	154,53	155,31	156,08	156,86	157,65
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	9.631,00	9.679,16	9.727,55	9.776,19	9.825,07	9.874,19	9.923,57
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	1.785,00	1.793,93	1.802,89	1.811,91	1.820,97	1.830,07	1.839,22
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Ha ri	4.288,00	4.309,44	4.330,99	4.352,64	4.374,41	4.396,28	4.418,26
		Gram/Kap/H ari	84,41	84,83	85,26	85,68	86,11	86,54	86,97
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Pertanian									
4.1	Persentase data informasi pertanian yang handal	Persentase (%)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5 Lingkungan Hidup									
5.1	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten	Dokumen	0	1	3	3	2	2	11



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ya/Tidak	0	1	3	3	2	2	11
5.3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	11,4	14.476	14.664	14.965	15,04	15.228	15.228
5.4	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	24,7	33,38	33,42	33,46	33,5	33,54	33,54
5.5	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	13,33	7,32	7,34	7,36	7,38	7,41	7,41
5.6	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	,-	,-	1	1	1	1	4
5.7	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten	Jumlah	3 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	27



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.8	Jumlah limbah B3 yang dikelola		40	20	20	20	20	20	100
5.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Perusahaan	91	95	105	115	125	135	160
5.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di kabupaten	Orang	0	2	2	2	2	2	10
5.11	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	-	-	10	10	10	10	40



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.12	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70
5.13	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70
5.14	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70
5.15	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	-	26	26	26	26	29	133
5.16	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	-	20	20	20	20	20	100
5.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	-	26	26	26	26	29	133



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	-	3	3	3	3	3	15
5.19	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah , lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	18	10	10	10	10	10	50
5.20	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	101.894 m3	112.083 m3	123.291 m3	135.620 m3	139.182 m3	153.108 m3	153,108 m3



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani di kabupaten Tabanan (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	38,98	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	99,00	99,00	99,10	99,20	99,30	99,50	99,50
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	99,16	99,18	99,20	99,25	99,30	99,50	99,50
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	99,00	99,00	99,10	99,20	99,30	99,50	99,50
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	99,00
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	50	70	75	80	90	100	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	20	40	50	60	70	80	80
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	46	48	50	53	55	57	57



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	6	8	10	12	14	16	16
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	0	10	20	30	40	50	50
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	3	2	2	2	2	2	2
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	67,137	67.130	67,123	67,116	67,109	67,102	67,102



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	227	220	213	206	199	192	192
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	0,32	0,31	0,3	0,29	0,28	0,27	0,27
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase (%)	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	42,38	42,5	42,62	42,74	42,86	4,98	4,98
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	82,56	82,68	82,8	82,92	83,04	83,16	83,16



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	93,9	93,91	93,92	93,93	93,94	93,95	93,95
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	89	89,01	89,03	89,05	89,07	89,09	89,09
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	86,66	86,68	86,7	86,71	86,72	86,73	86,73
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	1	1	1	1	1	1	1
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	15	15	15	15	15	15	15
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk								
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	92,89	92,9	92,91	92,92	92,93	92,94	92,94
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan	Persentase (%)	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga								
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	26-27 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20
9 Perhubungan									
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	596.995	272.080	280.684	289.718	299.204	309.164	309.164
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	570	570	570	570	570	570	570



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	2.226	2.326	2.426	2.526	2.626	2.726	2.726
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis								
9.4.1	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48
9.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
9.8.1	Angkutan Darat								
	- Orang	Jumlah	596.995	272.080	280.684	289.718	299.204	309.164	309.164
9.9	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	bandara/ terminal per tahun								
9.9.1	Terminal								
	- Orang / Barang	Jumlah	1.877	172.080	180.684	189.718	199.204	209.164	209.164
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	NA	NA	25	50	75	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	NA	NA	26,39	48,68	70,97	100,00	100,00
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		NA	77,20	78,75	80,32	81,93	83,57	85,24
10.3. 1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	NA	73,77	75,24	76,75	78,28	79,85	81,44



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.3. 2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	NA	3,44	3,50	3,57	3,65	3,72	3,79
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	NA	49,02	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	NA	14,72	15,01	15,31	15,62	15,93	16,25
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	71,80	72,00	72,50	73,20	74,00	74,50	75,00
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase (%)	2,40	5,02	7,04	9,04	12,06	14,07	16,07
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase (%)	88,25	88,83	89,40	89,97	90,54	91,12	91,69
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	43.715	45.900	46.775	47.649,0	48.960	49.835	50.709
11.5	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persentase (%)	5,2%	5,3	5,9	6,2	6,5	6,9	7



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Penanaman Modal								
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	4300	766	800	820	875	950	1050
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Milyar)	2351,03	8172,57	3500	3850	4235	4659	5125
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	9322:1000 0x 100% = 93 %	94	95	95	95	95	95
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	34,14	35	35	35	35	35	35
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	82,689 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)
13	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	26,67	36,67	46,67	56,67	66,67	83,33	100,00



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	45,28	52,83	60,38	67,92	75,47	83,02	90,57
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	25	25	30	30	35	35	40
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	50	50	55	60	65	70	75
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	20	20	25	30	35	40	45
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	250	260	270	280	290	300	310
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	150	175	200	225	230	235	240
14	Statistik								
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "PDRB"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	2,50	5,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
16 Kebudayaan									
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	1	2	2	2	2	2	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	16	4	4	4	4	4	5
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2	3
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	7	2	2	2	2	2	3
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	1	3	3	3	3	3	4
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu								
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	NA	3	3	3	3	3	4
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	NA	1	1	1	1	1	2
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	1	2	2	2	2	2	3
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah		2	5	5	5	5	6
17	Perpustakaan								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	0,42	0,48	0,55	0,61	0,68	0,72	0,72
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	36.189	37.789	38.189	38.589	38.989	39.289	39.289
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	1500	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100	3.100
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	11.284	11.984	12.184	12.384	12.584	12.784	12.784
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	3	3	5	6	8	10	10
18	Kearsipan								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	10	10	25	50	75	100	100
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	10	10	25	50	75	100	100
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1 Pariwisata									
1.1	Kunjungan Wisatawan		1.308.102	1.400.000	1.750.000	2.500.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	954.795	840.000	1.050.000	1.500.000	2.475.000	3.300.000	4.125.000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	353.307	560.000	700.000	1.000.000	2.025.000	2.700.000	3.375.000
1.2	Lama Tinggal Wisatawan		3	3	3	3	3	4	4
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	3	3	3	3	3	4	4
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	3	3	3	3	3	4	4
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	7,4	6	6	6	7	9	10



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pertanian								
2.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.1.1	Padi	Jumlah	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24
2.1.2	Jagung	Jumlah	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92
2.1.3	Kedelai	Jumlah	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
2.2	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	1.950	2.020	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5	Perdagangan								
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	0,81	0,85	0,91	0,91	1	1	1
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Perindustrian								



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	34,67	35	35,33	36	36,67	37	37,67
8 Kelautan dan Perikanan									
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	3.850,9	3.864,1	3.886,5	3.916,0	3.953,8	3.997,1	4.045,1
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	31,4	32,0	32,3	32,5	32,9	33,4	33,8
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	89	90	92	94	96	98	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	630,6	636,5	643,2	650,3	658,1	667,5	674,8
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PENUNJANG URUSAN									
1 Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Keuangan								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	0,91	4,79	4,00	3,50	3,00	2,75	2,50
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	0,97	1,60	1,22	1,15	1,09	1,09	1,08
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	25,43	26,14	26,64	27,24	27,95	27,95	27,95
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	31,72	31,77	31,82	31,87	31,92	31,92	31,92
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	0,57	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	Jumlah	14.097.222. 700,00	15.446.000. 000,00	5.390.714.6 22,91	3.883.590.64 6,24	2.797.825.03 1,11	2.015.615. 346,15	1.452.094. 101,11
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	54,96	58,3	62,36	67,17	72,76	79,19	80
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	43,73	46,30	51,18	56,33	62,02	68,80	70
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	35	35	35	35	35	35	35
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	2.465	2.592	2.382	1.793	1.610	1.465	1.465



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4.822	5.377	5.524	6.105	6.288	6.433	6.433
4 Penelitian dan Pengembangan									
	Penerapan SIDA:								
4.1	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	70	75	80	85	90	95	100
5 Pengawasan									
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.014	0.044	0.044	0.044	0.029	0.014	0.014
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	7	7	7	6	6	5	5
6 Sekretariat Dewan									



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasi nya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 Kesatuan Bangsa Dan Politik									
7.1	Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan	Persentase (%)	100	75	80	85	90	95	100
7.2	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.	Persentase (%)	85	75	80	80	80	80	95
7.3	Masyarakat yang memahami Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase (%)	100	75	80	85	90	95	100
7.4	Terkendalnya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	Persentase (%)	100	80	85	90	93	95	100



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 dan RPJMN.

Dokumen RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan antara lain: Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD



Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya,

Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana pada wilayah Kabupaten Tabanan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan Kabupaten Tabanan

Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RKP Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Tabanan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan



oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten, dan lain-lain.

 BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA